



SALINAN

GOVERNOR NORTH SUMATRA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR NORTH SUMATRA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan: ayat (1) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan ayat (3) bahwa perubahan

yang mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.08/Men0/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Bidang Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 440);
 27. Permentan Nomor 105 Tahun 2014 Tentang Integrasi Kebun Dan Ternak Di Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

28. Kepmentan Nomor 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I	:Pendahuluan;
BAB II	:Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	:Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
BAB V	:Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
BAB VI	:Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VII	:Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII	:Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
BAB IX	:Penutup.

2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2021
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 TAHUN 2019-2023

1. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Permendagri 86 Tahun 20217 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan : ayat (1) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : c. terjadi perubahan yang mendasar dan ayat (3) bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid - 19) sejak awal bulan Maret 2020 mempengaruhi konsistensi antara perencanaan dan realisasi capaian hasil pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sumatera Utara dan menyebabkan krisis ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan III (tiga) tahun 2020 terkoreksi sebesar - 2.60 % dan pada Triwulan IV (empat) tahun 2020 terkoreksi sebesar -1.07 % serta berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat baik ditataran Daerah, Nasional maupun Internasional.

Terbitnya beberapa kebijakan nasional juga ikut mempengaruhi penyusunan dokumen pembangunan daerah terkait Perencanaan dan Keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi serta dukungan terhadap program prioritas Nasional perlu dilakukan penyesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengingat Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 lebih dahulu ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 dilaksanakan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pada masa pandemic covid-19, penyesuaian capaian indikator pembangunan daerah dan akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat melalui gagasan membangun desa menata kota, yang diarahkan pada 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan, Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris, Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 342 ayat (4) bahwa Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2022 dan 2023 mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
2021 NOMOR 57

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	8
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	10
1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMN	10
1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.....	10
1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara.....	11
1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.....	11
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	8
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	20
2.1.4. Kondisi Umum Demografi.....	24
2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara.....	28
2.1.6. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	88
2.1.7. Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara	91
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	94
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi.....	94
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	107
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	129
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	129
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	155
2.3.3. Urusan Pilihan	182
2.3.4. Urusan Penunjuang	194
2.3.5. Urusan Pendukung	200
2.4. ASPEK DAYA SAING	206
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	207

2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	215
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	215
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	216
2.4.5.	Indikator Lain yang mendukung Aspek Daya Saing.....	219
2.4.6	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	222
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		1
3.1.	KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	2
3.1.2.	Alokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19	13
3.1.3.	Neraca Daerah.....	15
3.1.4.	Kinerja Pendanaan Non APBD	22
3.2.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	25
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	25
3.2.2.	Proporsi Penggunaan Anggaran	29
3.2.3.	Proporsi Pembiayaan Daerah	36
3.3.	KERANGKA PENDANAAN.....	39
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	41
3.3.2.	Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	49
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....		1
4.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	1
4.1.1.	Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	1
4.1.2.	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	13
4.2.	ISU STRATEGIS	43
4.2.1.	Telaahan Isu International.....	43
4.2.2.	Telaahan Isu Strategis Regional.....	100
4.2.3.	Isu Strategis Nasional.....	102
4.2.4.	Isu Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	109
4.2.5.	Penelahaan RPJMD Daerah Lain	120
4.3.	Penetapan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	123
BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN.....		1
5.1.	VISI.....	1
5.2.	MISI	2
5.3.	TUJUAN DAN SASARAN.....	3
5.4.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA	9
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		1
6.1.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	1

6.2.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA.....	10
6.3.	KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA UTARA	15
6.4.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL	21
6.4.1.	Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RTRW....	24
6.5.	DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA.....	26
6.5.1.	Program Pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat.....	26
6.5.2.	Program Pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten/Kota.....	37
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....		
7.1.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN.....	1
7.2.	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	7
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
8.1.	INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI SUMATERA UTARA.....	1
8.2.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI SUMATERA UTARA	4
8.3.	INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	6
8.4.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA.....	7
BAB IX PENUTUP		
9.1.	PEDOMAN TRANSISI	1
9.1.1.	Masa Transisi Tahun 2020	2
9.1.2.	Masa Akhir Periode RPJMD Tahun 2023 dan Penyusunan RKPD Tahun 2024.....	3
9.2.	KAIDAH PELAKSANAAN.....	4

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	1
Tabel. 2.2	Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara	5
Tabel. 2.3	Sebaran Potensi Panas Bumi.....	16
Tabel. 2.4	Sebaran Potensi Tambang Gambut	16
Tabel. 2.5	Sebaran Potensi Tambang Batubara	17
Tabel. 2.6	Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral Logam.....	18
Tabel. 2.7	Gempa Bumi, 2020	21
Tabel. 2.8	Indeks Resiko Banjir	22
Tabel. 2.9	Bencana Puting Beliung, 2020	23
Tabel. 2.10	Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)	25
Tabel. 2.11	Jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020	26
Tabel. 2.12	Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Development Goals (TPB/SDGs) Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2020	30
Tabel. 2.13	Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Yang Sudah Dilakukan Namun Belum Mencapai Target Nasional di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2020	48
Tabel. 2.14	Tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	64
	Yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Diperoleh Data Di Provinsi Sumatera Utara.....	64
Tabel. 2.15	Matriks Evaluasi Capaian Irisan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023	69
Tabel. 2.16	Produksi Beberapa Komoditi Pangan Di Sumatera Utara Tahun 2018	89
Tabel. 2.17	Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara	91
Tabel. 2.18	Kawasan Strategis Sumatera Utara	93
Tabel. 2.19	PDRB Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	97
Tabel. 2.20	Tabel Laju Pertumbuhan dan Distribusi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara.....	99
Tabel. 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran ADHK 2010 (persen) Tahun 2016 – 2020	100
Tabel. 2.22	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku	100

Tabel. 2.23	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020.....	101
Tabel. 2.24	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi se-Sumatera Utara Tahun 2016-2020.....	101
Tabel. 2.25	Inflasi 5 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.....	103
Tabel. 2.26	Perbandingan IHK dan Inflasi/Deflasi Kota-Kota di Pulau Sumatera.....	104
Tabel. 2.27	Perkembangan Gini Ratio seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2016-2020	106
Tabel. 2.28	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2016 – 2020.....	107
Tabel. 2.29	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020	109
Tabel. 2.30	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen, 2016-2020	111
Tabel. 2.31	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2020	112
Tabel. 2.32	Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2016-2020.....	114
Tabel. 2.33	Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara 2016-2020.....	115
Tabel. 2.34	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2016-2020	116
Tabel. 2.35	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota sesumatera Utara, 2020.....	117
Tabel. 2.36	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2016-2020	119
Tabel. 2.37	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan 2016-2020	120
Tabel. 2.38	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan 2016-2020.....	121
Tabel. 2.39	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten/Kota 2020	122
Tabel. 2.40	SDM Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	125
Tabel. 2.41	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2016-2020.....	125
Tabel. 2.42	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020.....	129
Tabel. 2.43	Capaian Indikator Pendidikan Provsu Tahun 2016-2020	129
Tabel. 2.44	Jumlah Siswa Putus Sekolah Dan Angka Putus Sekolah.....	130
Tabel. 2.45	Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Tahun	

	2016 – 2020.....	130
Tabel. 2.46	Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah	131
Tabel. 2.47	Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah	131
Tabel. 2.48	Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	132
Tabel. 2.49	Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	133
Tabel. 2.50	Jumlah Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) 2020	134
Tabel. 2.51	Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK) Tahun 2020	135
Tabel. 2.52	Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota, 2020	141
Tabel. 2.53	Lokasi Fokus Intervensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020	143
Tabel. 2.54	Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota Tahun 2020	144
Tabel. 2.55	10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di FKTP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020	145
Tabel. 2.56	Capaian Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	145
Tabel. 2.57	Capaian Indikator Rumah Sakit Haji Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	147
Tabel. 2.58	Kondisi Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Kontruksi Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	148
Tabel. 2.59	Indikator Irigasi dan Air Baku 2016-2020	149
Tabel. 2.60	Capaian Indikator Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	150
Tabel. 2.61	Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 2016-2020	151
Tabel. 2.62	Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2016-2020	153
Tabel. 2.63	Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2020.....	153
Tabel. 2.64	Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu	154
Tabel. 2.65	Indikator Kinerja Urusan Sosial	154
Tabel. 2.66	Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	155
Tabel. 2.67	Jumlah Tenaga Kerja Penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.....	156
Tabel. 2.68	Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020.....	156
Tabel. 2.69	Kondisi pangan di Sumatera Utara.....	158
Tabel. 2.70	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	159

Tabel. 2.71	Data timbunan sampah di Sumatera Utara tahun 2016 - 2020.....	161
Tabel. 2.72	Data Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020.....	163
Tabel. 2.73	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton Co2Eq) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020.....	168
Tabel. 2.74	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	169
Tabel. 2.75	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	170
Tabel. 2.76	Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	171
Tabel. 2.77	Capaian Akta Perceraian dan Akta Kematian Provinsi Sumatera Utara	171
Tabel. 2.78	Rekapitulasi Jumlah Lintasan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	173
Tabel. 2.79	Rekapitulasi Jumlah Lintasan Antar Pelabuhan Di Kawasan Danau Toba.....	173
Tabel. 2.80	Terminal Tipe B di Provinsi Sumatera Utara, 2020.....	174
Tabel. 2.81	Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.....	174
Tabel. 2.82	Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	175
Tabel. 2.83	Indikator Penanaman Modal.....	176
Tabel. 2.84	Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga	177
Tabel. 2.85	Data Statistik sektoral yang terintegrasi.....	178
Tabel. 2.86	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian.....	179
Tabel. 2.87	Indikator Kebudayaan	180
Tabel. 2.88	Indikator Perpustakaan.....	181
Tabel. 2.89	Indikator Kearsipan.....	181
Tabel. 2.90	Indikator Pariwisata	182
Tabel. 2.91	Indikator Pertanian Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.....	183
Tabel. 2.92	Potensi Baku Lahan Sawah	184
Tabel. 2.93	Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	185
Tabel. 2.94	Indikator Kehutanan	187
Tabel. 2.95	Kondisi Daya Listrik Terpasang dan Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara	187
Tabel. 2.96	Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi Sumatera Utara	190
Tabel. 2.97	Potensi Energi Baru Terbarukan Berbasis Panas Bumi	191
Tabel. 2.98	Potensi Pengembangan Energi Bersumber Biomassa, Biogas dan Matahari.....	192
Tabel. 2.99	Indikator Perdagangan	192
Tabel. 2.100	Indikator Perindustrian	193
Tabel. 2.101	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	194

Tabel. 2.102	Indikator Perencanaan Provsu.....	195
Tabel. 2.103	Indikator Keuangan Provsu	196
Tabel. 2.104	Inikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah	197
Tabel. 2.105	Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia	197
Tabel. 2.106	Indikator Capaian Kegiatan Kepegawaian Daerah Provsu.....	198
Tabel. 2.107	Indikator Penelitian dan Pengembangan.....	199
Tabel. 2.108	Indikator Badan Penghubung.....	199
Tabel. 2.109	Indikator Pengawasan	200
Tabel. 2.110	Capaian Indikator Sekretariat Dewan.....	200
Tabel. 2.111	Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara (rupiah/kapita/bulan) Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara	207
Tabel. 2.112	Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 - 2020	208
Tabel. 2.113	Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara 2016-2020	210
Tabel. 2.114	Nilai FoB (ribu US\$) Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijiit dan perubahannya (Δ) Desember 2020 dan Periode Januari–Desember 2020	211
Tabel. 2.115	Nilai CIF (Ribu US\$) Impor Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijiit Desember 2020 dan Periode Januari–Desember 2020	213
Tabel. 2.116	Kondisi Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara dengan Negara Mitra Utama Desember 2020 dan Periode Januari – Desember 2020 (ribu US\$).....	214
Tabel. 2.117	Indeks Infrastruktur.....	215
Tabel. 2.118	Angka Kriminalitas.....	215
Tabel. 2.119	Lama Proses Perizinan Di Provinsi Sumatera Utara.....	216
Tabel. 2.120	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sumut ...	216
Tabel. 2.121	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara	216
Tabel. 2.122	Rasio Ketergantungan	219
Tabel. 2.123	Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara.....	220
Tabel. 2.124	Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	221
Tabel. 2.125	Indeks Resiko Bencana Indonesia Wilayah Sumatera	222
Tabel. 2.126	Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	224
Tabel. 2.127	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2019-2020	226
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.3	Kemampuan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020..	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.4	Rincian Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5	Prioritas Penanganan Covid-19 Tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6	Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.7	Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.8	Perkembangan Pendanaan melalui Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.9	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.11	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Utara	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.12	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sumatera Utara	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.13	Analisis Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Utara	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.14	Rasio/Kontribusi SiLPa terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.15	Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 s.d tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.17	Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 s.d tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2016-2020	2
Tabel 4.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020	3
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2016-2020	4
Tabel 4.4	Prevelensi Stunting pada Balita per Kabupateb/Kota, 2020	6
Tabel 4.5	Perolehan Medali Provinsi Sumatera Utara pada Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON)	9
Tabel 4.6	Kemantapan Jalan Tahun 2017-2020	10
Tabel 4.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	

	Pembangunan Daerah	12
Tabel 4.8	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara.....	14
Tabel 4.9	Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan RPJMD Perubahan 2019-2023.....	46
Tabel 4.10	Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	103
Tabel 4.11	Target Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMN	103
Tabel 4.12	Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024	104
Tabel 4.13	Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024	106
Tabel 4.14	Identifikasi RPJMD Daerah Lain.....	121
Tabel 4.15	Jalur LRT Dan Monorel Mebidang	131
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara	5
Tabel 5.2	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Sebelum dan Sesudah Perubahan RPJMD 2019-2023.....	10
Tabel 5.3	Persandingan Prioritas Nasional (PN) dengan Prioritas Provinsi (PP) Sumatera Utara	12
Tabel. 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	3
Tabel. 6.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi 9 (Sembilan) Arah Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2021-2023	11
Tabel. 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	14
Tabel. 6.4	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara	24
Tabel. 6.5	Program Pembangunan Yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat	26
Tabel. 6.6	Program Pembangunan Yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota	37
Tabel 7.1.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023	1
Tabel 7.2.	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023.....	4
Tabel 7.3.	Rencana Kapasitas Riil Indikasi Kebutuhan Alokasi Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023	6
Tabel 8.1.	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023...	3
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.....	5

Tabel 8.3.	Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023	8
Tabel 8.4.	Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023	9
Tabel 8.5.	Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023	10
Tabel 8.6.	Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023	11
Tabel 8.7.	Penetapan Indeks Gini Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023	12
Tabel 8.8.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (IKU PD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019–2023	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 1.	Peta Wilayah Administrasi.....	1
Gambar 2. 2.	Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	15
Gambar 2. 3.	Persentase Capaian TPB Sumatera Utara Tahun 2020.....	29
Gambar 2. 4.	Jumlah dan Persentase Capaian Indikator masing-masing TPB.....	29
Gambar 2. 5.	Perbandingan Produksi dan Kebutuhan beberapa Komoditas Pangan di Sumatera Utara Tahun 2018.....	90
Gambar 3.1	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 (persen)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.2	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah).....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.3	Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016-2020.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.4	Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1	Konsep Pembangunan Sport Center.....	132
Gambar 4.2	Konsep Pembangunan TPA MEBIDANGRO.....	132
Gambar 4.3	Rencana Pembangunan Monorel.....	133

DAFTAR GRAFIK

Grafik.2.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara	24
Grafik.2.2	Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur.....	26
Grafik.2.3	Persentase Penduduk Lansia	27
Grafik.2.4	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 2020	27
Grafik.2.5	Sebaran Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota	28
Grafik.2.6	Persentase Nilai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	88
Grafik.2.7	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016 s.d. 2020.....	95
Grafik.2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera 2020 (Persen)	95
Grafik.2.9	Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020.....	102
Grafik.2.10	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	104
Grafik.2.11	Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	105
Grafik.2.12	Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020	107
Grafik.2.13	Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020	108
Grafik.2.14	Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020	108
Grafik.2.15	Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Pendapatan Perkapita (Rp Juta/Jiwa) Sumatera Utara - 2020	110
Grafik.2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020	111
Grafik.2.17	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020	113
Grafik.2.18	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/ Kota, 2020	114
Grafik.2.19	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara dan Nasional	115
Grafik.2.20	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota	116
Grafik.2.21	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020.....	118
Grafik.2.22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020	118
Grafik.2.23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Sumatera 2020	119

Grafik.2.24	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumatera Utara dan Nasional.....	120
Grafik.2.25	Angka Partisipasi Murni (APK) Sumatera Utara dan Nasional	121
Grafik.2.26	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Sumatera 2020.....	123
Grafik.2.27	Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	123
Grafik.2.28	Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020	124
Grafik.2.29	Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020	124
Grafik.2.30	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2016-2020.....	126
Grafik.2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen).....	126
Grafik.2.32	Perbandingan TPT Provinsi Se-Pulau Sumatera 2020	127
Grafik.2.33	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.....	127
Grafik.2.34	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	128
Grafik.2.35	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	128
Grafik.2.36	AKI dan Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020	136
Grafik.2.37	Kasus Kematian Ibu per Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	136
Grafik.2.38	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2020	137
Grafik.2.39	AKB dan Kasus Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara	138
Grafik.2.40	Kasus Kematian Bayi per Kabupaten/Kota Tahun 2020	139
Grafik.2.41	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2020.....	140
Grafik.2.42	Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara	141
Grafik.2.43	Angka Kesakitan (Morbiditas) di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020	144
Grafik.2.44	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2020	169
Grafik.2.45	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi 2016-2020	172
Grafik.2.46	Perkembangan Luas Panen Padi di Sumatera Utara, 2019-2020.....	209
Grafik.2.47	Struktur Nilai Ekspor Sumatera Utara Januari–Desember 2019 dan 2020	211
Grafik.2.48	Pangsa Ekspor Sumatera Utara Januari–Desember 2019 dan 2020	212
Grafik.2.49	Impor Sumatera Utara Menurut Kelompok Barang Ekonomi Januari–Desember 2019 dan 2020	213
Grafik.2.50	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	218

Grafik.2.51	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020	218
Grafik.2.52	Perkembangan IDI Sumatera Utara.....	220
Grafik.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020	3
Grafik.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Sumatera 2020	4
Grafik.4.3	Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	5
Grafik.4.4	Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020	5
Grafik.4.5	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2016-2020.....	7
Grafik.4.6	Produksi Daging (Ton) Tahun 2016-2020.....	8
Grafik.4.7	Perkembangan IDI Sumatera Utara & Nasional Tahun 2016-2020.....	9
Grafik.4.8	Perolehan Medali Sumut di Event PON	9
Grafik.4.9	Kemantapan Jalan Provinsi dan Nasional di Sumatera Utara Tahun 2017-2020	11
Grafik.4.10	Permasalahan Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	11
Grafik.4.11	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2013 - 2019 (%).....	98



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 tahun serta (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Sesuai dengan pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Berdasarkan Pasal 1 Point 26 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Pasangan Gubernur Sumatera Utara Letjend. TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Drs. H. Musa Rajekshah, M.Hum yang dilantik pada tanggal 5 September 2018, telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Kemudian Dokumen RPJMD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 31 Mei 2019.

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Disamping hasil evaluasi, kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Terbitnya beberapa kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk

mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, beberapa peraturan baru terbit dan menjadi landasan juridis perlunya dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 adalah terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang telah

ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan pemulihan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Pandemi Covid-19 ini berdampak buruk bagi Provinsi Sumatera Utara khususnya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya. Konsekuensinya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya.

Adapun Ruang Lingkup Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Ini, Mencakup Hal-Hal Sebagai berikut:

1. Pembaharuan Dasar-Dasar Hukum Penyusunan RPJMD sesuai dengan perubahan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembaharuan data dan informasi pembangunan dari periode Tahun 2013-2018 Menjadi 2016-2020;
3. Penyesuaian kerangka pendanaan dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perhitungan kembali kemampuan fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2022-2023;

4. Penyelarasan RPJMD Sumatera Utara 2019-2023 terhadap RPJMN 2020-2024, yang mencakup isu strategis, sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program prioritas dan pelaksanaan kegiatan strategis nasional di daerah;
5. Penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Kemenpan RB dan hasil review RPJMD;
6. Penyesuaian program pembangunan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Pemetaan kembali program dan prioritas pembangunan yang mendukung langsung terhadap Pencapaian Indikator Makro, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
8. Penyesuaian target kinerja dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah;
9. Penyesuaian nomenklatur indikator kinerja pembangunan daerah.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diterapkan beberapa pendekatan meliputi:

1. **Pendekatan teknokratik**, dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.
3. **Pendekatan politik** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019-2023 dirumuskan dengan memperhatikan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan sebagai berikut:

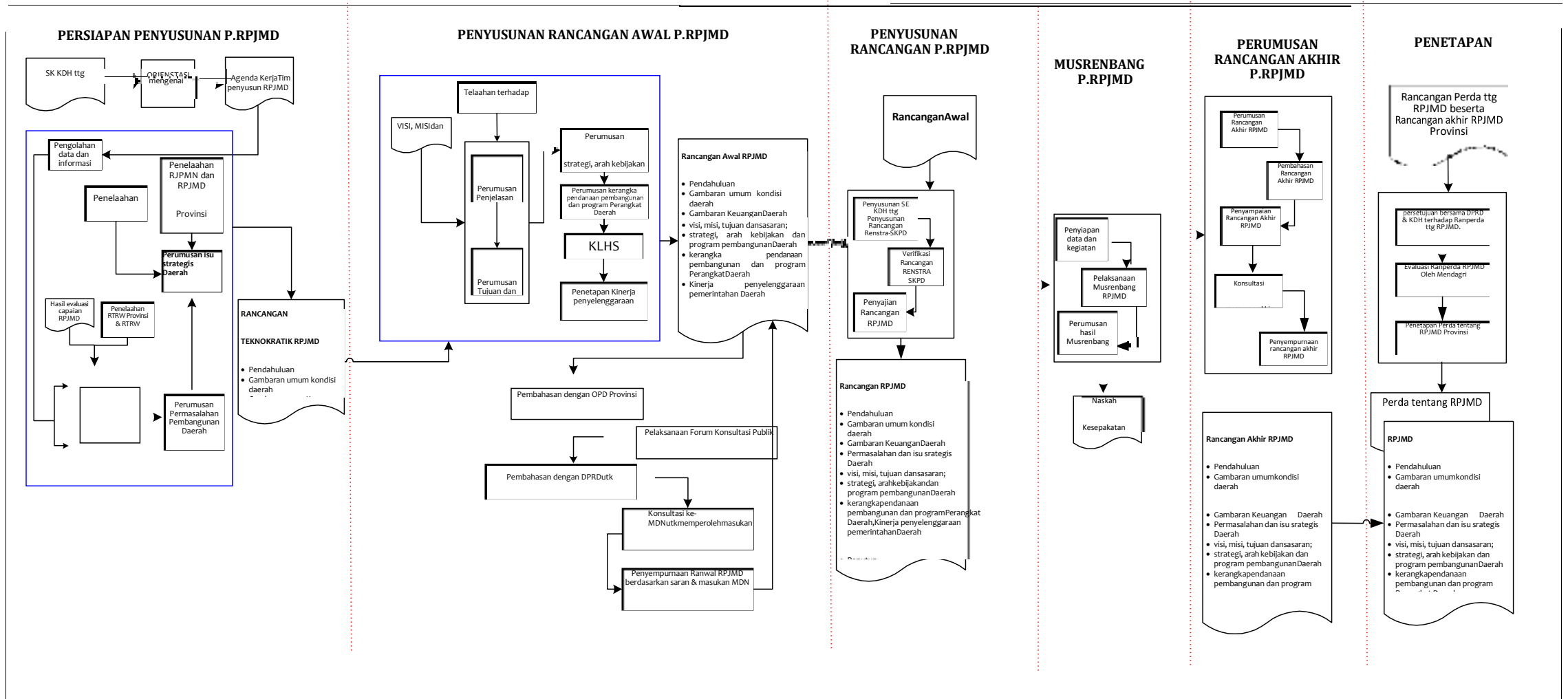
a. Pendekatan Perencanaan **Holistik-Tematik, Integratif** dan **Spasial**.

- 1) **Pendekatan Tematik-Holistik** dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) **Pendekatan Integratif**: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- 3) **Pendekatan Spasial**: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

b. Kebijakan Anggaran Belanja *Money Follow Program Priority*.

Proses penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 dilakukan **mutatis mutandis** sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tatacara Penyusunan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Oleh sebab itu penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 telah memperhatikan RPJMN melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Selain itu pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara.

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 5 (lima) tahunan yang menjabarkan rencana kegiatan dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan.

Kemudian, perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, perubahan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan perubahan APBD 2021 dan Rancangan APBD 2022 dan 2023.

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD.

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2016 Ayat (1) yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah Merevisi kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut dari munculnya beberapa peraturan dan kebijakan nasional serta perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
4. Sebagai perwujudan dari Visi-Misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.
- 1.4. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.
- 1.5. Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi RPJMD paruh waktu, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bab ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram.

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat

merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum, bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan Potensi Pengembangan Wilayah Letak, Luas dan Batas Wilayah Kondisi Topografi Kondisi Klimatologi Kondisi Geologi Kondisi Hidrologi Penggunaan Lahan Kondisi Geografi Lainnya - 368 - aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah, bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan.

Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD, bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.2. Neraca Daerah bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan.

3.3 Kerangka Pendanaan Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan - 377 - menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan). Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara

deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

- 4.2. Isu Strategis Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

- 5.1. Visi Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD;
2. Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan
3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

- 5.2. Misi Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi; - 378 -
2. Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan
3. Penjelasan masing-masing misi.

- 5.3. Tujuan dan Sasaran Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;

3. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
4. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 ha dan luas lautan 11.000.000 ha. Luas lautan mencapai 60,5 persen, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km. Luas daratan Sumatera Utara sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 232 (BPS, 2020).



Sumber : Perda No.2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

Gambar 2. 1.

Peta Wilayah Administrasi

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 450 kecamatan, 5.417 desa dan 693 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba	Balige	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km2)
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.369,00
10. Dairi	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. Karo	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.596,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.570,98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.202,78
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	473,73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	41,31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	107,83
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	55,66
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	31,00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	59,19
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	114,66
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	280,78
SUMATERA UTARA	Medan	450	5417	693	72.981,23

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2020

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Sumatera Utara adalah 0° 50' Lintang selatan - 4° 40' lintang utara dan 96° 40' - 100° 50' bujur timur. Sumatera Utara berada di sebelah barat Indonesia dan memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

b. Posisi Geostrategis

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan

Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

c. Kondisi/Kawasan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa kondisi kawasan yaitu pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Kondisi pesisir wilayah Sumatera Utara meliputi 68 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu 23 kecamatan di wilayah Pantai Barat dan 31 kecamatan di wilayah Pantai Timur, 14 kecamatan di wilayah Kepulauan Nias.

Kondisi wilayah Sumatera Utara yang merupakan wilayah pegunungan atau berada di atas ketinggian 600 mdpl seluas 2.478.735 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

Kondisi kepulauan meliputi 232 pulau. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Berhala di Pantai Timur, dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga di wilayah Pantai Barat.

3. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian timur dan pesisir barat. Kemiringan tanah antara 0–12 persen seluas 47.810 Km², antara 12–40 persen seluas 6.305 Km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km².

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0–2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0-300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300-600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70 persen dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;
- Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan malihant atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

b. Potensi

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

5. Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 239 DAS meliputi dari 56 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 183 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumon. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 49,36 persen dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 50,64 persen.

Alih fungsi lahan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan dokumen Rekalkulasi Penutupan Lahan publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2017, dimana terjadi penurunan luasan tutupan lahan hutan sebesar 9,92 persen.

Data lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 1.379.351,65 hektar atau 18,9 persen dari luas daratan Sumatera Utara, meliputi 13,48 persen dengan kategori kritis dan 5,42 persen dengan kategori sangat kritis, yang tersebar di 30 kabupaten/kota kecuali Kota Binjai, Tanjungbalai, dan Tebing Tinggi. Luasan lahan kritis terbesar umumnya berada di kawasan dataran tinggi sebesar 47,48 persen dari luas lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kemudian 22,95 persen berada di wilayah Pantai Barat, 16,96 persen berada di wilayah Pantai Timur, dan 12,61 persen berada di wilayah Kepulauan Nias. Jika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten/kota masing-masing, maka Kabupaten Karo dan Dairi memiliki persentase masing-masing 56,17 persen dan 53,22 persen

b. Sungai, Danau dan Rawa

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni:

Tabel. 2.2
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

NO	WILAYAH SUNGAI	KETERANGAN
1.	Alas – Singkil	Lintas Provinsi
2.	Batang Natal-Batang Batahan	Lintas Provinsi
3.	Rokan	Lintas Provinsi
4.	Belawan – Ular – Padang	Strategis Nasional
5.	Toba – Asahan	Strategis Nasional
6.	Batang Angkola -Batang Gadis	Lintas Kab/Kota
7.	Wampu – Besitang	Lintas Kab/Kota
8.	Bah Bolon	Lintas Kab/Kota
9.	Barumun – Kualuh	Lintas Kab/Kota
10.	Pulau Nias	Lintas Kab/Kota
11.	Sibundong - Batang Toru	Lintas Kab/Kota

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Badan air berupa danau meliputi Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Kabupaten Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) Kabupaten seluas 112.986,15 ha. Di Pulau Samosir Kabupaten Samosir terdapat dua danau yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau dengan debit air cukup besar potensial bagi pengembangan sistem pengairan dan peyediaan air baku dan danau yang memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Juga terdapat potensi air tanah

dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan rawa dengan luas baku 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 ha (32,18 persen) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dijadikan areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian seluas 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45 persen).

c. Debit

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri, selain sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA). Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi.

Oleh karena itu kebutuhan air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian perlu dijaga sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat yang potensial dikembangkan dari melimpahnya air di sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga untuk menjaga investasi di bidang energi perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan yang menjadi daerah tangkapan air DAS yang dimanfaatkan.

6. Klimatologi

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan pengamatan Balai Besar

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Suhu/*Temperature* minimum sebesar 22,2-23,2,8 derajat celsius sementara suhu maksimum: 34,8-33,2 derajat celsius atau rata-rata sebesar 27,4-26,7, kelembaban/*humidity* minimum sebesar 43-53 persen dan kelembaban maksimum 98 persen atau rata-rata sebesar 86.9 persen. Kecepatan angin maksimum berkisar 13-23 meter per detik, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb, jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70-4,51 persen

7. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budi Daya

Berdasarkan data dari Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 yang bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, penggunaan lahan Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

b. Kawasan Lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MenLHK-PKTL/KUH/Pla.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.009.212,24 Ha atau $\pm 41,51\%$ dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas $\pm 421.150,85$ Ha; Hutan Lindung seluas $\pm 1.199.236,17$ Ha; Hutan

Produksi Terbatas seluas $\pm 634.938,43$ Ha, Hutan Produksi Tetap seluas $\pm 674.856,34$ Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas $\pm 79.030,45$ Ha;

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, serta potensi bahan tambang dan mineral.

1. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, sektor pertanian mencatat pertumbuhan dengan laju positif. Sektor pertanian sendiri pada kenyataannya didukung oleh pertanian rakyat. Berdasarkan Kepmentan Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, untuk Tanaman Pangan seperti Komoditas Padi akan diprioritaskan di Kabupaten Asahan, Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Komoditas Jagung akan diprioritaskan di Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Labuhan Batu Selatan dan Tapanuli Selatan. Untuk komoditas Kedelai, lokasi prioritas pengembangan Kawasan di Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Sedangkan untuk ubi kayu prioritas pengembangan Kawasan berada di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Untuk komoditas tanaman hortikultura, Cabai akan diprioritaskan pengembangan kawasannya di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Simalungun, Batu Bara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Untuk komoditas Bawang merah akan dikembangkan pada Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Labuhanbatu Utara, Samosir, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat. Komoditas bawang putih, Provinsi Sumatera Utara akan memprioritaskan pengembangan kawasannya di Kabupaten Simalungun, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Karo, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Toba dan Tapanuli Selatan. Kabupaten Karo dan Simalungun merupakan kawasan pertanian untuk prioritas komoditas jeruk, sedangkan pisang akan diprioritaskan di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.

2. Perkebunan

Berdasarkan data yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 luas areal perkebunan adalah 2.167.671,49 ha atau 11,88 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 29,7 persen dari total daratan Provinsi Sumatera Utara dengan produksi sebesar ± 20.318.622,73 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,31 persen dan pertumbuhan produksi sebesar 5,21 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Sektor ekonomi rakyat memperlihatkan kondisi bahwa komoditi perkebunan rakyat telah mengambil peran yang sangat penting, dimana untuk luas dan produksi beberapa komoditi penting bahkan melampaui perkebunan milik PTP/PNP maupun swasta.

Komoditas kopi akan diprioritaskan pengembangan kawasan sebagai amanat Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 di Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi dan Karo.

3. Peternakan

Berdasarkan data hasil analisis di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diperoleh bahwa wilayah potensial bagi pengembangan sapi, untuk sapi potong di Sumatera Utara berturut-turut adalah di Kab. Langkat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Asahan, dan Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang dan Kab. Serdang Bedagai, sedangkan untuk sapi perah berada di daerah Kabupaten Karo. Pengembangan kerbau potensial dilakukan di Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan ternak kuda direkomendasikan dilakukan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ternak kecil seperti kambing potensial diarahkan pemeliharaannya di Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Asahan. Domba potensi dikembangkan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengembangan ternak unggas seperti ayam buras potensi dikembangkan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun ayam pedaging potensi dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, Asahan, Langkat, Deli Serdang dan Kota Binjai. Kemudian, ayam petelur potensi dikembangkan di Kota Binjai,

Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai. Adapun ternak itik potensi dikembangkan di Kabupaten Toba, Mandailing Natal, Dairi, Nias, dan Serdang Bedagai.

4. Perikanan

Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 276.030 ton pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 persen, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 8,79 persen. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah pulau sebanyak 213 sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak. Di kawasan Pantai Barat, antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, hasilnya mencapai 1.076.960 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias (tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79 persen). Budidaya kelautan antara lain adalah teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang. Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Kawasan Pantai Timur yang meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Medan, mencapai 276.030 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari (tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75 persen). Sementara potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di bagian tengah yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Kota Pematangsiantar, Tebing Tinggi dan Binjai

memiliki potensi jenis ikan unggulan seperti ikan mas, nila, mujair, gurame, lele dumbo dan udang galah.

5. Pariwisata

Sumatera Utara juga memiliki berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain; wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus.

1. Wisata Alam

Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata alam yang menjadi andalan dalam menarik wisatawan, diantaranya, yaitu:

- 1) Kawasan Danau Toba. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir dan sekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk pantai Haranggaol Kabupaten Karo, serta arahan kedepan Kawasan Danau Toba sebagai Taman Bumi (*Geopark*) yang direncanakan titik pusatnya di Kecamatan Sianjur mula-mula Kabupaten Samosir;
- 2) Pemandian air panas Pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipituidai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
- 3) Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
- 4) Paroppo di Kabupaten Dairi;
- 5) Pegunungan di Kabupaten Pakpak Bharat;
- 6) Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun;
- 7) Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 8) Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba;
- 9) Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara;

- 10) Danau Siombak Kota Medan;
- 11) Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai;
- 12) Pantai Perupuk, Pantai Sejarah di Kabupaten Batubara;
- 13) Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang;
- 14) Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
- 15) Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan;
- 16) Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu di Kabupaten Nias;
- 17) Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat;
- 18) Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
- 19) Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 20) Pantai Natal, Mandailing Natal;
- 21) Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar disektor ekowisata. Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain :

a. Kawasan Ekowisata Tangkahan

Tangkahan terletak diantara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat rehabilitasi satwa langka orangutan sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu juga terdapat kawasan Bahorok, sekitar 75.7 km dari Medan atau 3 (tiga) jam dengan mobil.

b. Kawasan Ekowisata Karo.

Kabupaten Karo terletak sekitar 77 Km dari Kota Medan. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kawar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

2. Wisata Kebudayaan

Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya:

- 1) Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan;
- 2) Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Binjai;
- 3) Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 4) Kawasan situs bersejarah kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- 5) Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 6) Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 7) Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal;
- 8) Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal;
- 9) Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga;
- 10) Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- 11) Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara;
- 12) Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba;
- 13) Istana Sisimangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 14) Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir;
- 15) Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi;
- 16) Rumah Tradisionil di Kabupaten Pakpak Barat;
- 17) Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
- 18) Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batubara;
- 19) Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai;
- 20) Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang;
- 21) Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat;
- 22) Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunung Sitoli;
- 23) Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan;

- 24) Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias;
- 25) Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.

3. Wisata Minat Khusus

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dikategorikan wisata minat khusus antara lain:

- 1) Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- 2) Arung Jeram di Sei Asahan - Toba dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
- 3) Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau-pulau Batu di Nias Selatan
- 4) Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat
- 5) Olahraga Paralayang di Sitopsi;
- 6) Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara;
- 7) Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi;
- 8) Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai;
- 9) Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
- 10) Museum pusaka Nias di Kota Gunung Sitoli;
- 11) Museum sejarah Batak di Balige di Kabupaten Toba

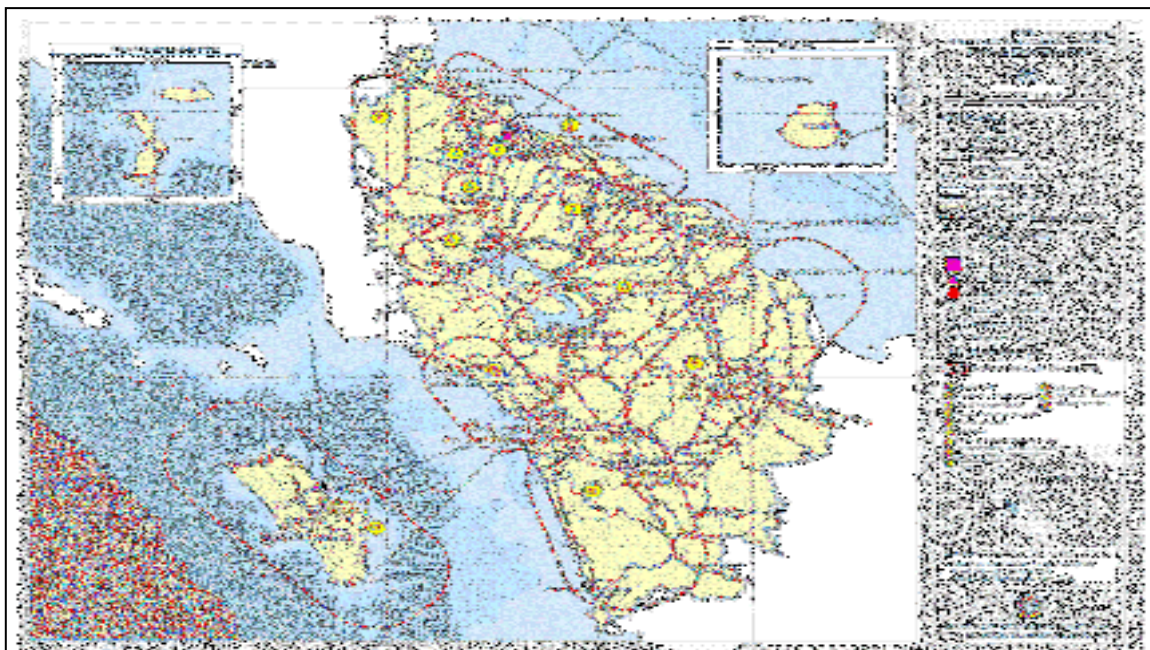
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata yang mengamanahkan bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi (Ripparda) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018.

Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan perwilayaan. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibagi dalam 12 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), yaitu :

- 1) Medan dan sekitarnya;
- 2) Pantai Timur Sumatera Utara dan sekitarnya;
- 3) Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Wilayah Sumatera Utara;
- 4) Binjai, Namu Sira Sira dan sekitarnya;
- 5) Tanah Karo dan sekitarnya;
- 6) Dairi dan sekitarnya;
- 7) Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya;
- 8) Tapanuli Utara, Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya;
- 9) Rantau Prapat, Kota Pinang, Gunung TUA dan sekitarnya;
- 10) Sibolga dan sekitarnya;
- 11) Kepulauan Nias dan sekitarnya;
- 12) Batang Toru dan sekitarnya.



Gambar 2. 2.
Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara

6. Bahan Tambang dan Mineral

Potensi bahan tambang terdiri dari bahan tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang gambut, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah sebagai berikut :

1. *Bahan Tambang Panas Bumi*

Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada beberapa tempat antara lain di Desa Lau Debuk-Debuk Sibayak Kabupaten Karo terbukti sebesar 30 MW; Desa

Sarulla Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 135 MW; dan Desa Namorailangit Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 210 MW. Potensi panas bumi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.3
Sebaran Potensi Panas Bumi

No	Lapangan	Kabupaten	RES (Mwe)		RE (Mwe)	Pb	Pv	Ins (MW)
			Sp	Hp	Ps			
1	Beras Tepu	Karo	-	-	-	-	-	-
2	LauDebuk-Debuk Sibayak	Karo	-	70	131	-	30	2
3	Marike	Karo	25	-	-	-	-	-
4	Dolok Merawan	Simalungun	225	-	-	-	-	-
5	Pusuk Buhit D. Toba	Samosir	225	-	-	-	-	-
6	Simbolon Samosir	Samosir	225	-	-	-	-	-
7	Sarulla	Tap. Utara	-	100	200	-	135	-
8	Namorailangit	Tap. Utara	-	-	-	-	210	-
9	Sibuhuan	Padang Lawas	100	-	-	-	-	-
10	S. Merapi – Sampuraga	Madina	-	-	420	-	-	-
11	Sampuraga	Madina	225	-	-	-	-	-
12	Roburan	Madina	-	-	320	-	-	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara
Keterangan:Sp:Speculative, Hp:Hipothetical,Ps:Possible/ terduga,Pb:Probable/ mungkin, Pv:Proven/ terbukti,Re:Reserve/ cadangan,Res:Resources/ sumberdaya, Ins:Installed/ terinstal

2. Bahan Tambang Minyak Bumi

Provinsi Sumatera Utara memiliki indikasi kandungan minyak yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

3. Bahan Tambang Gambut

Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Sebaran lahan gambut terdapat di beberapa lokasi antara lain Desa Panai tengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Adapun rincian sebaran potensi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.4
Sebaran Potensi Tambang Gambut

No	Lokasi	Koordinat (LU, BT)	Status	Cadangan (m³)
1	Desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang hasundutan	2°14'0,4" 98°52'04"	Eksplorasi Lanjutan	13.191.086
2	Desa Simangarunsang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	2°16'12" 98°44'00"	Eksplorasi Lanjutan	20.666.444

No	Lokasi	Koordinat (LU, BT)	Status	Cadangan (m³)
3	Desa Panaitengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu		Eksplorasi Pendahuluan	370.000.000
4	Desa Buluhtelang, Kecamatan Padangtualang Kabupaten Langkat	03°52'57,4" 98°20'0,9"	Penyelidikan Pendahuluan	6.000.000

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara

4. Bahan Tambang Batu Bara

Potensi keberadaan batubara terdapat di 15 titik di Sumatera Utara, terdapat 7 (tujuh) lokasi yang telah memiliki potensi cadangan antara lain Desa Pargarutan, Kec. Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 1.000.000 ton seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.5
Sebaran Potensi Tambang Batubara

No	Lokasi	Status	Cadangan (ton)
1	Desa Rantau Panjang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailingnatal	Penyelidikan Pendahuluan	
2	Desa Pulaupadang Kec. Lingga Bayu Kab.Mandailingnatal	Penyelidikan Pendahuluan	
3	Desa Pargarutan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan	Eksplorasi Pendahuluan	1.000.000
4	Desa Ampolu Kec. Angkola Timur, Kab.Tapanuli Selatan	Penyelidikan Pendahuluan	
5	Desa Jonggoljae Kec. Arse Kab.Tapanuli Selatan	Penyelidikan Pendahuluan	
6	Kec. Sibolga Kab. Tapanuli Tengah	Penyelidikan Pendahuluan	-
7	Desa Hudopa Nauli Kec. Kolang Kab.Tapanuli Tengah	Penyelidikan Pendahuluan	
8	Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat	Penyelidikan Pendahuluan	100.000
9	Desa Tangkahan Kec. Batangserangan Kab.Langkat	Penyelidikan Pendahuluan	150.000
10	Kec. Besitang Kab. Langkat	Penyelidikan Pendahuluan	
11	Kec. Seilepan Kab. Langkat	Penyelidikan Pendahuluan	
12	Desa Tanjungberingin Kec. Kualuhhulu Kab. Labuhan Batu	Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000
13	Desa Hilimbowo Kare Kec. Alasa Kab Nias	Eksplorasi Pendahuluan	19.200.000
14	Desa Nazalou Alo'oa, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli	Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000
15	Desa Onozitoli Sifaoro'ase Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli	Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

5. Bahan Tambang Radioaktif

Potensi bahan tambang radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

6. Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Bahan tambang mineral logam terdiri dari 21 jenis dengan sebaran lokasi tercantum pada Tabel berikut :

Tabel. 2.6
Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral Logam

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
1	Antimoni	a. Gunungsitoli, Kabupaten Nias b. Batangasih Batanglubuk c. Kabupaten Mandailingnatal. d. Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas e. Desa Bangko, Kecamatan Batang natal, Kabupaten Mandailing Natal
2	Arsen	a. Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk, Kab. Mandailing Natal b. Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu c. Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan
3	Barit	a. Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba b. Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga
4	Bauksit	a. Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5	Belerang	a. Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal b. Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal c. Desa Namorailangit, Kecamatan Pahae julu, Kabupaten Tapanuli Utara d. Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara e. Gunung Pusukbuhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir f. Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara g. Gunung Sibayak, Kecamatan Simpang empat Kabupaten Karo h. Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo
6	Besi	a. Sebelah barat Pulau Nias, Kabupaten Nias b. Aeksorik, Aekhorsik, Siayu, Kecamatan Kota nopan Kab Mandailing Natal
7	Bismutih	a. Batanggadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal b. Pulau Samosir, Kabupaten Samosir
8	Kromium	a. Batangnatal, Kecamatan Batang natal Kabupaten Mandailing Natal b. Mandailing Natal c. Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailingnatal
9	Emas	a. Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal b. Desa Sinunukan, Desa Muarasoma, Kec Batang natal Kab. Mandailing Natal c. Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailingnatal d. Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas e. Desa Sikuikkuik, Kec Padangsidimpunan Barat, Kab Tapanuli Selatan f. Gunungmeriah, Kecamatan Gunungmeriah Kabupaten Deliserdang

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		g. Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi h. Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Toralaulu Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan i. Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan j. Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat
10	Perak	a. Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal b. Desa Batahan, Kecamatan Batang natal Kabupaten Mandailing Natal c. Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas
11	Tembaga	a. Batanggadis, Aekkorsik, Aeksorik, Aekkulbungnagodang, Batanglobung Kecamatan Batangnatal Kabupaten Mandailing Natal b. Pagargunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal c. Desa Aekhabil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab Tapanuli Tengah d. Dolokpinapan, Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang hasundutan e. Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi
12	Florit	a. Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
13	Mangan	a. Desa Simpanggambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal b. Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
14	Merkuri	a. Seisampali, Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang
15	Molibdenum	a. Aekkolbungnagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
16	Niobium	a. Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah
17	Platina	a. Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
18	Tellurium	a. Bukit Piongg, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
19	Seng	a. Aektambang, Batanggadis, Batanglobung Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal b. Hutabargotjulu, Aeksorik, Pagargunung, Patahajang, Malilir, Bukit Piongg, Gunungmarisi Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal c. Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah d. Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab Tapanuli Selatan e. Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kabupaten Dairi f. Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan
20	Timbal	a. Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias b. Batanggadis, Batanglobung, Aekhorsik Kec Batangnatal Kab Mandailing Natal c. Desa Pagargunung, Patahajang, Gunungmarisi Bukit Piongg, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailingnatal d. Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah e. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara f. Desa Sopokomil, Kecamatan SilimapunggapunggaKabupaten Dairi g. Kecamatan SosaKabupaten Tapanuli Selatan
21	Wolfram	a. Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah b. Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten.

7. Bahan Galian Air Tanah

Lokasi kegiatan pertambangan bahan galian air tanah tersebar di 19 (sembilan belas) cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara yaitu CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane, CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat, CAT Tarutung, CAT Onolimbu/Gunung Sitoli, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala Batangtoru, CAT Teluk Durian/Pekanbaru, CAT Banjarampa, CAT Panyabungan, CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidempuan, CAT Natal-Ujunggading, CAT Lubuk Sikaping.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, kawasan rawan bencana di Provinsi Sumatera Utara dibagi kedalam beberapa kawasan, yaitu kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan zona patahan aktif, kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami, kawasan rawan banjir/banjir bandang, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan rawan kebakaran hutan, dan kawasan rawan letusan gunung berapi. Wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap terjadinya longsor (gerakan tanah), gelombang pasang (tsunami), banjir dan peristiwa gempa.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempabumi dan letusan gunungapi. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunungapi aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Sumatera Utara Tahun 2016-2020 yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kebencanaan dengan persentase frekuensi kejadian bencana terbanyak adalah bencana banjir sebesar 61,52 persen, cuaca ekstrim sebesar 11,93 persen, tanah longsor sebesar 8,23 persen, gempa bumi sebesar 6,79 persen, dan kekeringan sebesar 4,73 persen.

Berdasarkan publikasi dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam Kelas Risiko Tinggi dengan skor 145,25 pada peringkat 19 dari 34 provinsi di Indonesia. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerabilities*), dan kapasitas (*capacities*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

a. Massa Gerakan Tanah/ Tanah Longsor

Kawasan yang terletak pada daerah rawan massa gerakan tanah/tanah longsor antara lain kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Sibolga

b. Gempa Bumi

Berdasarkan data dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Medan/ *Meteorological Climatologica and Geophysical Agency Medan* jumlah gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebanyak 350 kali. Pada tahun 2020 Kabupaten Dairi merupakan kabupaten dengan gempa bumi terbanyak yaitu 114 kali, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.7
Gempa Bumi, 2020

No.	Kabupaten/Kota	Gempa Bumi
1.	Nias	14
2.	Mandailing Natal	13
3.	Tapanuli Selatan	11
4.	Tapanuli Tengah	3
5.	Tapanuli Utara	44
6.	Dairi	114
7.	Nias Selatan	50
8.	Padang Lawas Utara	26
9.	Padang Lawas	14
10.	Nias Utara	12
11.	Nias Barat	2
12.	Sibolga	17
13.	Medan	2
14.	Gunung Sitoli	9

Sumber : BPS Sumut 2021

c. Rawan Gelombang Pasang Air Laut/Abrasi/Tsunami

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 (lima) meter. Di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

d. Banjir

Indeks resiko bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara dengan kelas resiko tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.8
Indeks Resiko Banjir

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
1.	Nias	36,0	Tinggi
2.	Mandailing Natal	36,0	Tinggi
3.	Tapanuli Selatan	36,0	Tinggi
4.	Tapanuli Tengah	36,0	Tinggi
5.	Labuhanbatu	36,0	Tinggi
6.	Asahan	36,0	Tinggi
7.	Nias Selatan	36,0	Tinggi
8.	Serdang Bedagai	36,0	Tinggi
9.	Batubara	36,0	Tinggi
10.	Padanglawas	36,0	Tinggi
11.	Labuhanbatu Selatan	36,0	Tinggi
12.	Labuhanbatu Utara	36,0	Tinggi
13.	Nias Utara	36,0	Tinggi
14.	Nias Barat	36,0	Tinggi
15.	Deli Serdang	35,5	Tinggi
16.	Tanjungbalai	33,6	Tinggi
17.	Gunung Sitoli	33,6	Tinggi
18.	Langkat	31,1	Tinggi
19.	Karo	26,0	Tinggi
20.	Padanglawas Utara	24,0	Tinggi
21.	Tebing Tinggi	21,6	Tinggi
22.	Medan	18,1	Tinggi

Sumber : BPS Sumut 2021

e. Angin Puting Beliung

Terdapat 5 daerah yang terkena bencana angin Puting Beliung di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Langkat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.9
Bencana Puting Beliung, 2020

No.	Kabupaten/Kota	Angin Putting Beliung*
1.	Mandailing Natal	1
2.	Tapanuli Utara	1
3.	Toba	1
4.	Dairi	2
5.	Deli Serdang	3
6.	Langkat	2
7.	Karo	1
8.	Serdang Bedagei	2
9.	Batubara	2
10.	Padang Lawas Utara	1
11.	Pematang Siantar	1
14.	Medan	2

Sumber : BPS Sumut 2021

f. Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain peristiwa bencana alam, di Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kawasan rawan bencana kebakaran hutan, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional pada tahun 2020 kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 9 kali pada 5 (lima) daerah diantaranya Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Dairi sebanyak 3 Tiga) kali, Kabupaten Mandailing Natal 1(satu) kali, Kabupaten Tapanuli Utara 1 (satu) kali dan Kabupaten Toba 1 (satu) kali.

g. Letusan Gunung Berapi

Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di wilayah Sumatera Utara yakni Gunung Sorik Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Dolok Martimbang, Gunung Sibayak, Gunung Pusuk Buhit dan Gunung Sibual-buali. Keenam gunung api tersebut dapat di bagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi gunung api sebagai berikut:

- **Tipe A**, yaitu gunung yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600. Gunung api tipe ini paling rentan meletus. Gunung api di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk kedalam tipe ini ialah Gunung Sorik Merapi di Kabupaten Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
- **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo;Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah

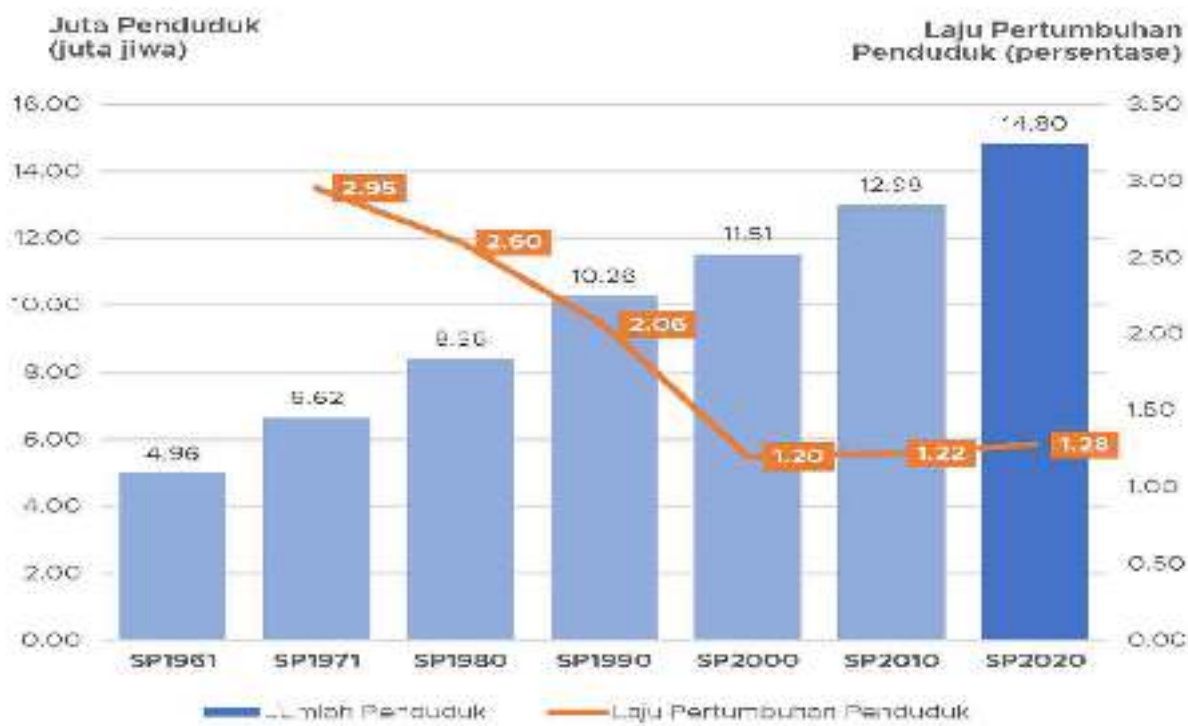
gunung api. Gunung di Sumatera Utara yang termasuk kedalam tipe ini ialah Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.4. Kondisi Umum Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Sumatera Utara pada Bulan September 2020 sebanyak 10.80 juta jiwa. Jumlah penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1.82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181.72 ribu jiwa setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun. Terdapat percepatan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.06 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2000-2020 yang sebesar 1,22 persen. Perkembangan Jumlah dan Laju Penduduk bedasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara

Sementara jumlah penduduk jumlah penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.10
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	71 686	74 986	146 672
Mandailing Natal	235 478	237 408	472 886
Tapanuli Selatan	151 148	149 763	300 911
Tapanuli Tengah	183 814	181 363	365 177
Tapanuli Utara	156 176	156 582	312 758
Toba Samosir	102 850	103 349	206 199
Labuhan Batu	250 481	243 418	493 899
Asahan	389 391	380 569	769 960
Simalungun	497 314	492 932	990 246
Dairi	154 628	154 136	308 764
Karo	200 247	204 751	404 998
Deli Serdang	971 735	959 706	1 931 441
Langkat	520 784	509 418	1 030 202
Nias Selatan	180 917	179 614	360 531
Humbang Hasundutan	98 958	98 793	197 751
Pakpak Bharat	26 446	25 905	52 351
Samosir	67 957	68 484	136 441
Serdang Bedagai	331 101	326 389	657 490
Batu Bara	206 551	204 127	410 678
Padang Lawas Utara	132 893	127 827	260 720
Padang Lawas	131 476	129 535	261 011
Labuhan Batu Selatan	160 356	153 738	314 094
Labuhan Batu Utara	193 854	188 140	381 994
Nias Utara	73 216	74 058	147 274
Nias Barat	43 800	46 194	89 994
Sibolga	44 915	44 669	89 584
Tanjung Balai	89 159	86 868	176 027
Pematangsiantar	132 615	135 639	268 254
Tebing Tinggi	86 032	86 806	172 838
Medan	1 212 069	1 223 183	2 435 252
Binjai	145 859	145 983	291 842
Padang Sidempuan	112 004	113 101	225 105
Gunungsitoli	66 136	69 881	136 017
SUMATERA UTARA	7 422 046	7 377 315	14 799 361

Sumber : Sensus Penduduk 2020

Selain itu jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.11
Jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020

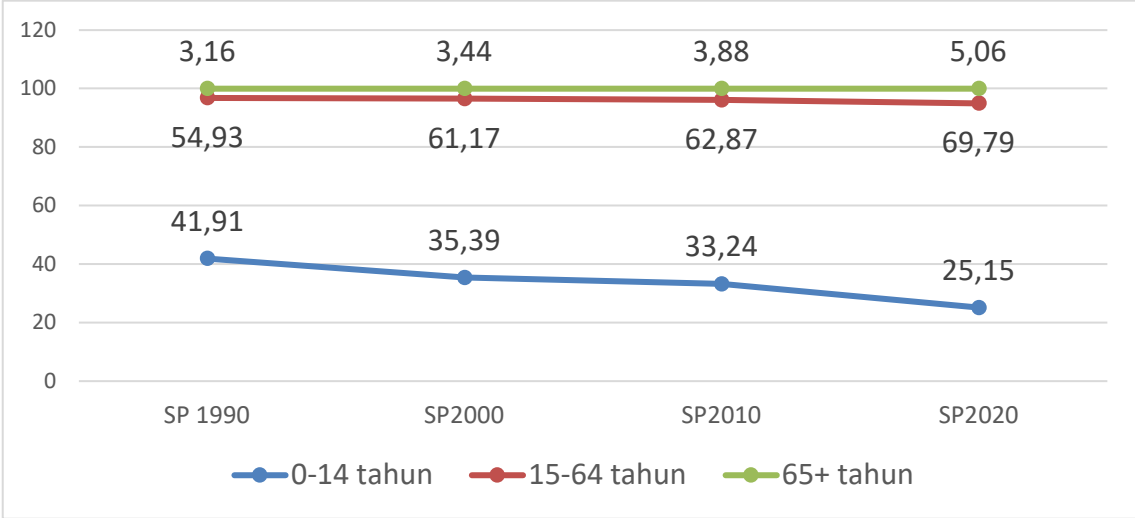
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	1 909 837	1 783 977	3 693 814
15-64	5 132 810	5 117 856	10 250 666
65+	322 613	420 663	743 276
Tidak Tahu/TT	56 786	54 819	111 605
TOTAL	7 422 046	7 377 315	14 799 361

Sumber : Sensus Penduduk 2020

2. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

- Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat menjadi 69.79 persen di tahun 2020. Dan terjadi perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun) dan 65 tahun ke atas di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Sumatera Utara masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 69,79 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

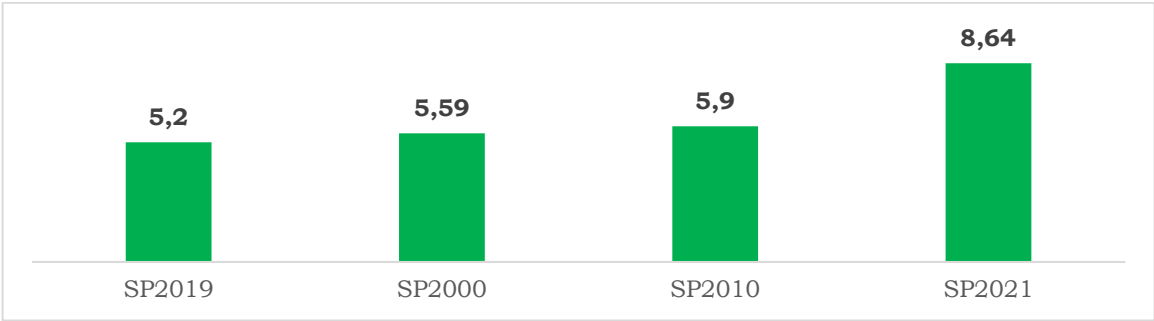


Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.2
Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur

Pembangunan yang dicapai oleh Sumatera Utara selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Konsekwensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Sumatera Utara meningkat menjadi 8,64 persen di tahun 2020.

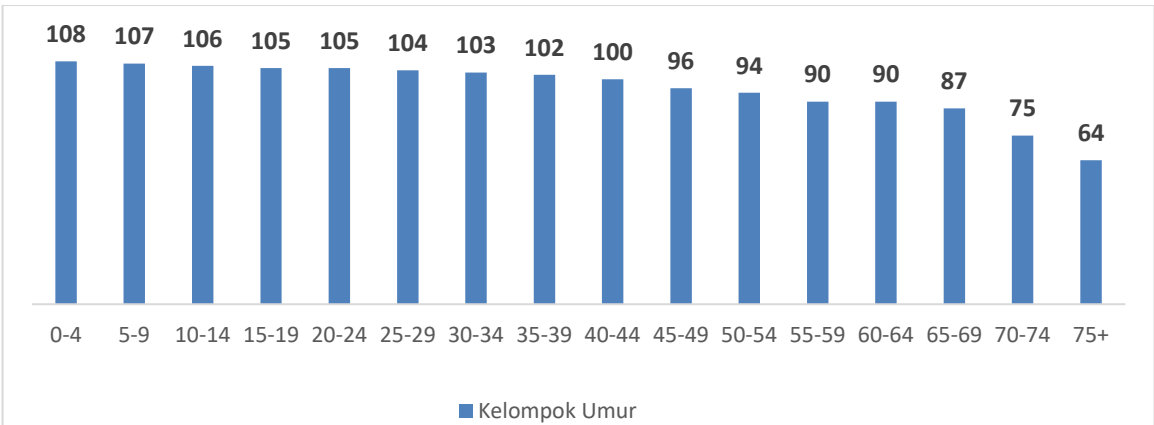


Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.3
Persentase Penduduk Lansia

- Rasio Jenis Kelamin

SP 2020 mencatat jumlah laki-laki di Sumatera Utara sebanyak 7,42 juta orang atau 50,15 persen dari penduduk Sumatera Utara, jumlah penduduk Perempuan di Sumatera Utara sebanyak 7,38 juta orang, atau 49,85 persen dari penduduk Sumatera Utara. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara sebesar 101, yang artinya terdapatnya 101 laki-laki per 100 perempuan di Sumatera Utara pada tahun 2020.



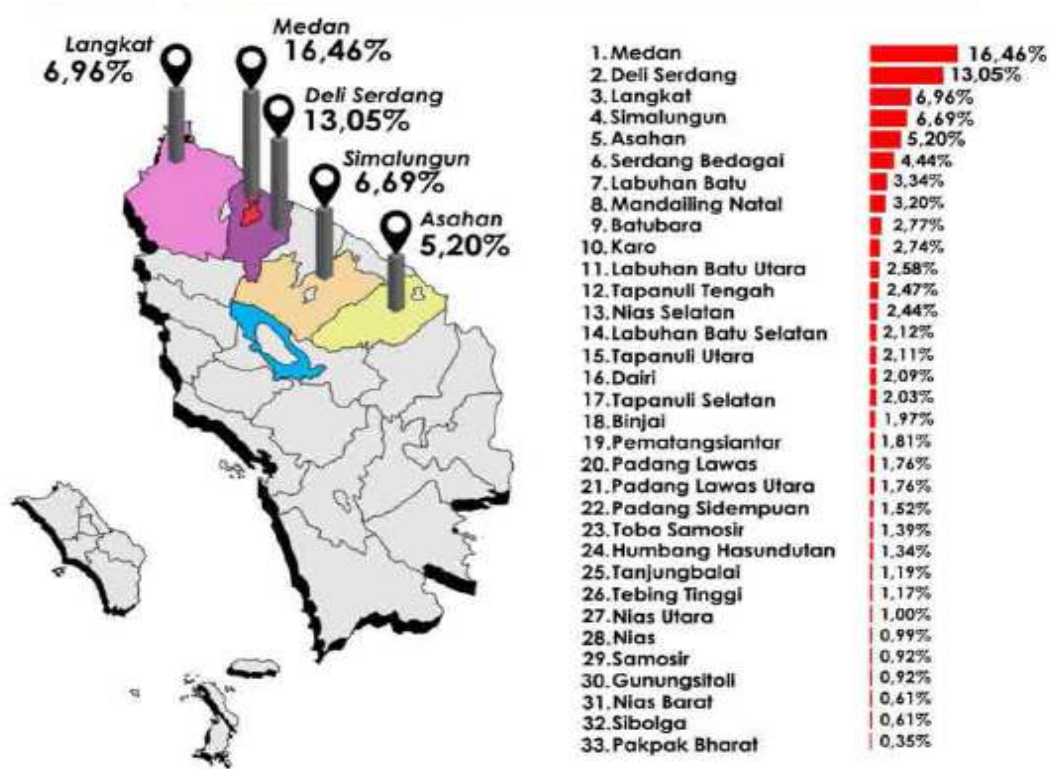
Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.4
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 2020

3. Distribusi/Pesebaran Penduduk

Sebaran Penduduk Sumatera Utara masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya hanya sebesar 0.36 persen wilayah Sumatera Utara. Namun Kota Medan di huni oleh 2,44 juta penduduk atau 16,46 persen penduduk Sumatera Utara. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk sebanyak

1,93 juta orang atau sebesar 13,05 persen. Sementara Kabupaten Langkat, Simalungun dan Asahan mempunyai sebaran masing-masing sebesar 6,96 persen, 6,69 persen dan 5,20 persen. Adapun Kabupaten/Kota lainnya masing-masing dibawah 5 persen.

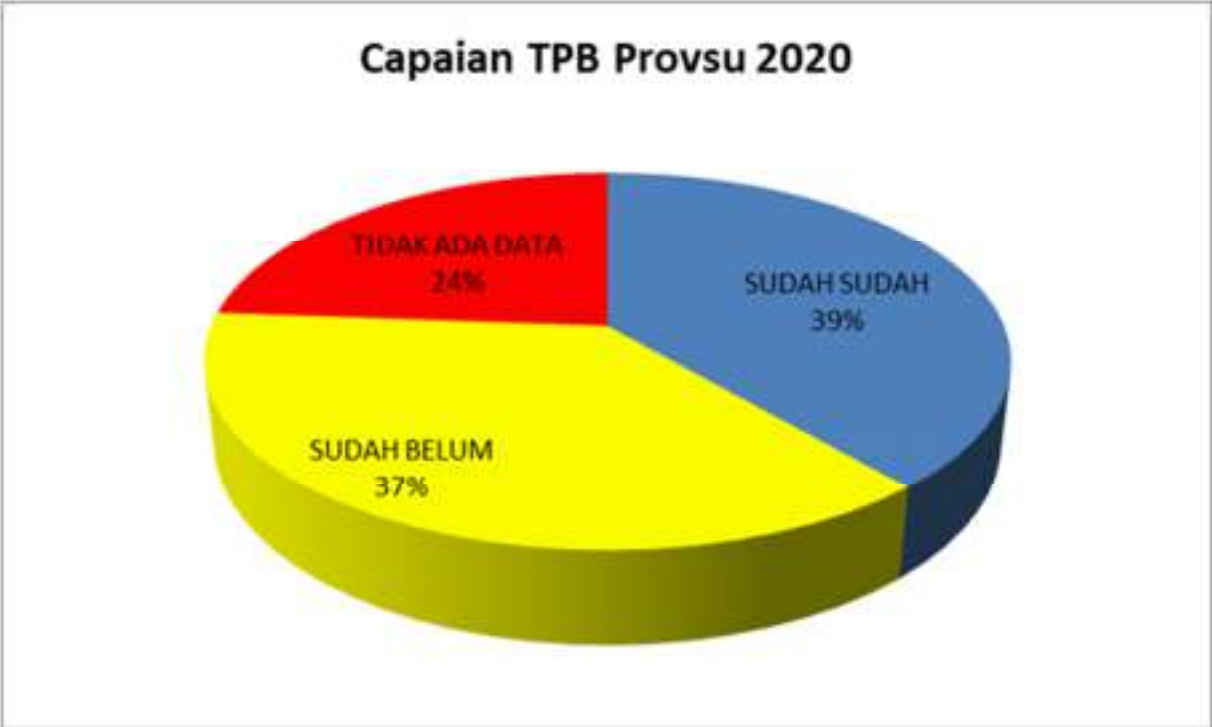


Sumber : Sensus Penduduk 2020

Grafik.2.5
Sebaran Penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota

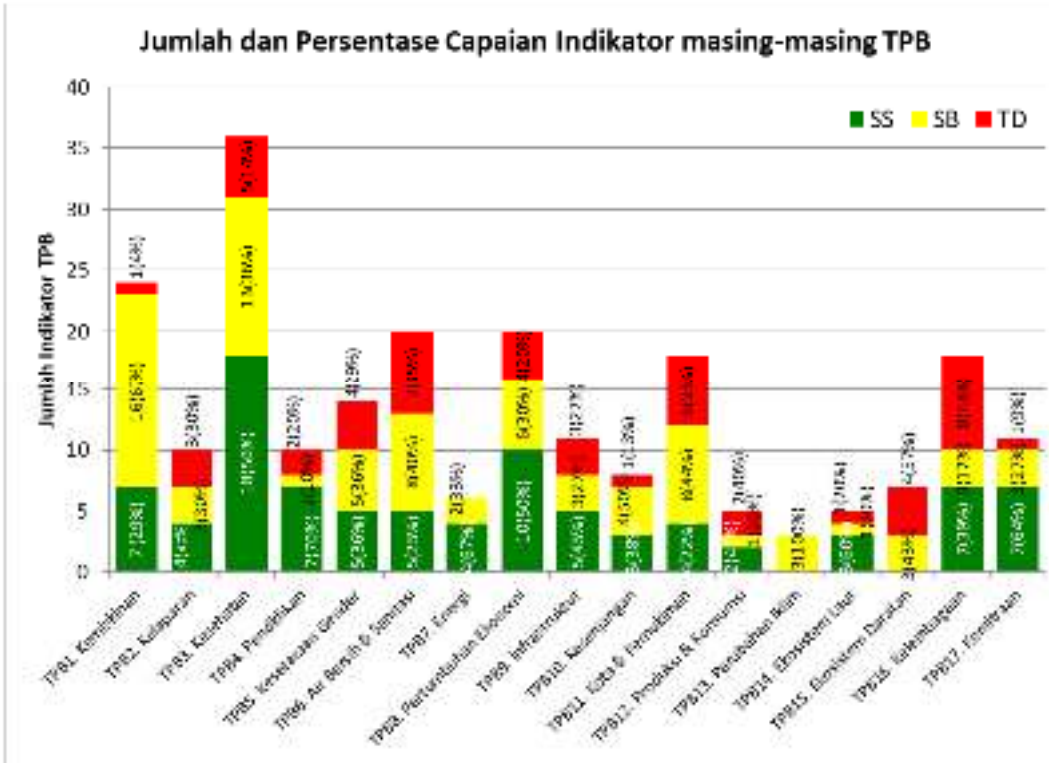
2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil indentifikasi indikator TPB yang bersesuaian dengan karakteristik wilayah Sumatera Utara diperoleh 235 indikator dari 17 TPB yang perlu dievaluasi pencapaiannya. Data capaian masing-masing indikator dihimpun dari tahun 2014-2020, dan dianalisa kecenderungan pencapaiannya dan dibandingkan dengan target pada Perpres 59/2017. Terdapat 9 indikator yang identik atau mempunyai kesamaan. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori, dimana 91 indikator (39%) diantaranya sudah mencapai target nasional, 83 indikator (37%) merupakan indikator yang belum mencapai target nasional dan 52 indikator (24%) tidak ada data.



Gambar 2. 3.
Persentase Capaian TPB Sumatera Utara Tahun 2020

Secara rinci jumlah dan Persentase Capaian Indikator masing-masing TPB di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Gambar berikut ini.



Gambar 2. 4.
Jumlah dan Persentase Capaian Indikator masing-masing TPB

Adapun indikator TPB di Sumatera Utara yang sudah dilakukan dan sudah mencapai target nasional disajikan pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel. 2.12
Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2020

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	86%	92%	155%	168%	176%	181%	176%
			1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	-	-	19,60%	20,75%	23,50%	30,20%	25,22%
1	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	-	-	76,80%	82,80%	83,80%	83,30%	62,93%
			1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	26,50%	25,20%	77,4%	82,1%	84,0%	86,2%	53,2%
			1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	NA	45,14%	60,58%	63,11%	68,02%	75,33%	77,05%
1	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	JKMSR = 0 JKHSR = 0	JKMSR = 0,007 JKHSR = 0,007	JKMSR = 0,794 JKHSR = 0,02	JKMSR = 0,01 JKHSR = 0	JKMSR = 0 JKHSR = 0	JKMSR = 0,239 JKHSR = 0,040	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	-	3	6	9	12	46	48
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	14,70%	19,50%	13,10%	18,20%	17,70%	14,30%	12,80%
2	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	13,10%	16,00%	12,10%	13,40%	13,40%	12,00%	11,70%
			2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	-	-	2,90%	2,11%	1,11%	2,11%	2,08%
			2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	37,60%	35,80%	42,90%	45,92%	50,08%	52,00%	42,00%

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	48.549.0 26,85	50.966.8 87,32	56.473.6 25.670	61.220.5 88.780	65.308.8 72.830	64.362.1 30	-
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	207	260	239	205	60,80	66,76	54,81
3	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	6,60	6,09	0,38	0,22	0,26	0,27	0,22
			3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	4,38	3,76	2,71	3,10	2,36	2,18	2,17

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	20	19	3,53	3,55	2,84	2,61	2,17
3	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	0,33%	0,32%
			3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	517/ 100.000	501/ 100.000	486/ 100.000	515/ 100.000	92/ 100.000	203/ 100.000	115/ 100.000
			3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	1/ 1.000	0,51/ 1.000	0,25/ 1.000	0,15/ 1.000	0,09/ 1000	0,08/ 1000	0,06/ 1000
			3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	-	16 kab/kota	19 kab/kota	21 kab/kota	21 kab/kota	21 kab/kota	21 kab/kota
			3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	6,06% (2 K/K)	12,12% (4 K/K)	45,45% (15 K/K)	54,55% (18 K/K)	66,67% (22 K/K)	72,72% (24 K/K)	72,72% (24 K/K)
			3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	176	205	177	153	177	192	96
			3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi
			3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	1 Kab/Kota	-	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
			3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	22 Kab/Kota	24 Kab/Kota	28 Kab/Kota	31 Kab/Kota	31 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota
3	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	-	-	-	69,5%	69,5%		
			3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	17,42%	18,68%	21,63%	23,80%	26,00%	-	-
3	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,072%	0,071%
3	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	72,07%	79,43%	78,59%	85,13%	93,36%	95,10%	87,00%

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63%	82,96%	84,14%	93,81%	96,79%	97,14%	100,83%	-
			4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun			9,03	9,12			
4	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63 %	82,96	84,14	93,81%	96,79%	97,14%	100,83%	-
4	4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	SD : 99,05%; SMP : 103,69%; SMA : 108,33%; PT : 26,75%	SD : 100,55%; SMP : 103,34%; SMA : 112,93%; PT : 20,21%	SD : 100,53%; SMP : 102,21%; SMA : 67,92%; PT : 24,31%	SD : 100,10%; SMP : 103,48%; SMA : 68,54%; PT : 26%	SMA : 71,19%;	SMA : 80,61%;	
4	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	97,84	98,82	98,96				

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	97,84	98,82	99,80				
4	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	87%	75%	78%				
5	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16				PERGUB : 2, PERDA : 1, SK GUBSU : 5, MoU : 1	Perda : 1		
5	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	-	-	seksual : 0,0038%; Fisik: 0,0061%; fisik + seksual : 0,01%; emosional (psikis) : 0,004%	SEKSUAL : 0,0017%; FISIK : 0,0027%; FISIK DAN SEKSUAL : 0,045%; EMOSIONAL (Psikis) : 0,0017%.		
			5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	-	-	-	FISIK ANAK PR (UMUR 13-17 tahun) : 0,0081;	FISIK ANAK PR (UMUR 13-17 tahun) : 0,0043%;		

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SEKSUAL ANAK PR (UMUR 13 - 17 tahun) : 0,0269%; PSIKIS PADA ANAK UMUR 13 - 17 tahun) : 0,0108%	SEKSUAL ANAK PR (UMUR 13 - 17 tahun) : 0,0123%; PSIKIS PADA ANAK UMUR 13 - 17 tahun) : 0,0049%		
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005
5	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63%	82,96%	84,14%	93,81%	96,79%	97,14%	100,83%	-
6	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	0	32,40%	45,56%	48,69%	58,49%	60%	80%
			6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	0	88	535 Desa	543 Desa	1.769 Desa	3.229 Desa	3.665 Desa
			6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	0	12	34 Desa	116 Desa	519 Desa	545 Desa	647 Desa

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	-	RPDAST ASAHAN TOBA	RPDAST BATANG GADIS, DAS PADANG	DAS DELI	5 RPDDAST (ASAHAN TOBA, BATANG GADIS, DELI, WAMPU DAN PADANG) (DATA DARI BAPPEDA)	-	-
	6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	71 DAS Prioritas	10 DAS	10 DAS	10 DAS	12 DAS	14 DAS	15 DAS	15 DAS
7	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Meningkat menjadi 96,6%	89,44	91,08	92,72	96,72	98,90	-	-
	7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	-	18%	6%	15%	34%	-	-
	7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	9,80	8,90	8,60	8,30	-	-	-
8	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	5,23%	5,10%	5,18%	5,12%	5,40%	-	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	37,91 Juta	41,02 Juta	44,56 Juta	47,96 Juta	50,75 juta	-	-
8	8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	-	-	Jumlah kantor bank : 15,19 Jumlah ATM : 42,17	Jumlah kantor bank : 17,16 Jumlah ATM : 42,39	Jumlah kantor bank : 18,03 Jumlah ATM : 42,77	Jumlah kantor bank : 19,01 Jumlah ATM : 43,06	Jumlah kantor bank : 20,42 Jumlah ATM : 43,27
			8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	-	-	4,18	3,65	3,44	3,21	2,96
			8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	24,87%	25,71%	27,53%	26,51%	26,85%	26,97%	26,76%
8	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	24%	26%	23%	28%	30%	-	-
			8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	-	31,61%	34,83%	32,34%	38,95%	35,64%	38,48%
8	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Rp.1.505. 850 per Bulan Rp.9.411, 56 per Jam	Rp.1.625. 000 per Bulan Rp.10.15 6,25 per Jam	Rp.1.811. 875 per Bulan Rp.11.32 4,22 per Jam	Rp. 1.961.35 5 per bulan Rp.12.25 8,47 per Jam	Rp. 2.132.18 8 per bulan Rp.13.32 6,18 per hari	Rp. 2.303.40 3,43 per bulan Rp.13.71 0,73 per hari	Rp. 2.499.42 3,06 per bulan Rp.14.87 7,52 per hari

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	6%	7%	6%	6%	5,59%	5,41%	6,91%
8	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	267.078	275.090	283.343	-	-	-	-
9	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 km	-	-	423.129	423.129	423.129	530.129	530.129
			9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	8	8	12	12	12	13	13
9	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	7,84%	7,55%	7,61%	9,53%	10,26%	9,94%	9,59%
9	9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	-	-	14,92%	16,26%	17,34%	19,37%	21,12%

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	16,33%	17,65%	20,41%	27,63%	-	-	-
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,32	0,34	0,319	0,315	0,318	0,317	0,316
10	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	78,86	82,02	82,71	-	-	-	-
12	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Ada					Ada		

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	17 UNIT	30 UNIT	30 UNIT	44 UNIT	52 UNIT	-	-
11	11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang	1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang	1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang	1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang	1 Kawasan Perkotaan Metropolitan 8 Kota Sedang	-	-
11	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	NA	NA	NA	NA	NA	Perda Nomor 8 Tahun 2013	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										
11	11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan		
12	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	5,865 ton	864,6256 ton	1911,799 2 ton	235883,4 107 ton	60412,93 26 ton	-	-
12	12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	4	4	2	25	3	-	-
14	14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	11 WPP	2 WPPN RI	2 WPPN RI	2 WPPN RI	2 WPPN RI	2 WPPN RI	2 WPPN RI	2 WPPN RI

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
			14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Meningkat	1.210	-	24.973	42.557	-	10.000	10.000
15	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	3.742.120 Ha	3.055.795.02 Ha	3.055.795.02 Ha	3.009.212,24 Ha	3.009.212,24 Ha	3.009.212,24 Ha	3.009.212,24 Ha
	15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)			-	-	467	400	-
			15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional)	Penanaman HTI : 839 Ha; 47,988.89 Ha	Penanaman HTI : 839 Ha; 47,988.89 Ha	15.177,80 Ha (HTI)	15.078,43 Ha (HTI); 498 Ha (RTL TPL)	368.697,38 Ha	368.697,38 Ha	368.697,38 Ha
			15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Meningkat	-	-	-	16 KPH dan 1 UPT TAHURA	16 KPH dan 1 UPT TAHURA	16 KPH dan 1 UPT TAHURA	16 KPH dan 1 UPT TAHURA
	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	0,35	0,40	0,46	0,48	0,52	0,54	0,56

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	-	-	-	Telah tersosialisasi permenlh nomor 29 tahun 2009 tentang pedoman konservasi kehati di daerah	-	-	-
16.			16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%	-	-	Indeks RB 45,31 kategori "C"	Indeks RB 58,88 kategori "CC"	Indeks RB 52,87 kategori "CC"	Indeks RB 60,05 kategori "B"	Indeks RB 65 kategori "B"
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	12%	10%	8%	11%	14%		
17	17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada	0	0	0	0	1	-	-
	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	93,62%	92,73%	95,10%	94,67%	98,81%	94,85%	93,02%

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat		81,50%	95,26%	91,71%	94,05%	97,12%	95,35%
	17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	59.756	49.634	71.543	45.602	105.373	87.515	144.846
			17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat		88,00%	93,77%	97,04%	91,42%	95,00%	93,02%
	17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	16,33%	17,65%	20,41%	27,63%	-	-	-

Tabel. 2.13
Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Yang Sudah Dilakukan Namun Belum Mencapai Target Nasional di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2020

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	9,38	10,53	10,35	10,22	9,22	8,83	8,75
1	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	4,49%	5,53%	6,04%	3,62%	4,73%	5,01%	4,91%
1	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	66,92	67,18	72,43	72,56	74,60	76,96	78,89
			1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta	12,36	12,19	11,48	7,98	6,82	5,9	4,23
			1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta	12,36	12,19	11,48	7,98	6,82	5,9	4,23
			1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63%	64,36	67,74	67,92	68,54	71,19%	80,61%	-
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	4,54	5,07%	20,02%	4,79%	4,67	-	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	200 KK	230 KK	157 KK	210 KK	295 KK	208 KK	171 KK
			1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	100 Org	100 Org	300 Org	150 Org	100 Org	60 Org	90 Org
			1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	-	-	1	-	4	0	0
			1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	NA	NA	NA	NA	NA	150	150
			1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	NA	NA	NA	NA	NA	3 SOP	NA
1	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	Penddika n : 20,03 % Kesehata n : 4,99 % Perlindun gan Sosial : 1,10 %	Pendidika n : 26,09 % Kesehata n : 3,99 % Perlindun gan Sosial : 0,94 %	Pendidika n : 31,13 % Kesehata n : 4,63 % Perlindun gan Sosial : 0,92 %	Pendidika n : 40,58 % Kesehata n : 3,92 % Perlindun gan Sosial : 0,93 %	Pendidika n : 38,93%; Kesehata n : 4,44%; Perlindun gan Sosial : 0,78%	Pendidika n : 21,00%; Kesehata n : 3,00%; Perlindun gan Sosial : 0,85%	Pendidika n : 12,20%; Kesehata n : 2,46%; Perlindun gan Sosial : 0,55%
2	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	14,70%	19,50%	13,10%	18,20%	32,39%	30,7%	30,11%

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPd)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	-	27,80%	19,10%	20,20%	32,11%	32,14%	30,11%
			2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/ta hun	84,80	85,200	85,700	88,5	89,1	89,6	83,7
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	87,20%	76,10%	84,70%	90,30%	86,00%	85,50%	62,30%
			3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	-	-	76,80%	82,80%	83,80%	83,30%	62,93%
3	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	63,30%	80,00%	48,48%	30,30%	60,61%	57,58%	
3	3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	14,30%	24,10%	36,90%	29,20%	22,60%	-	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	-	26,50%	35%	33,40%	29,20%	33%	27%
			3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	6,60%	22,84%	64,40%	25,57%	68,30%	64,7%	68,3%
3	3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	3,06 (300.134 orang)	3,3	2,8	2,53 (256.657 orang)	-	-	-
3	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	51,87%	49,06%	45,59%	44,35%	59,00%	-	-
			3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	-	2,61	-	2,9	-	-	-
3	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	48,02%	58,83%	61,68%	68,63%	72,24%	72,38%	72,43%
3	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	66,30%	29,15%	27,88%	32,60%	34,80%	-	-
3	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	-	-	0,2	0,23	0,26	0,12	0,12

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,6%	0,05	0,13	0,28	171	19,26%	11,02%	-
5	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	-	-	-	60%	65,64%	-	-
5	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	-	-	-	-	-	21,8	-
5	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	14%	14%	13%	13%	14,08%	-	-
			5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	-	-	-	-	-	29,25%	24,59%
5	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	-	37,46%	25,30%	-	15%		
			5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	63,03%	64%	67%	65%	-	-	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	89%	52,87%	54,28%	55,55%	-	-	-
6	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	36,54%	40,46%	59,78	60,32	60,36	60,25	72,50
			6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	43	36,05	41,68	38,68	41,26	-	-
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%		60,62%	59,78	60,32	60,36	60,25	72,50
6	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	66,92	67,18	72,43	72,56	74,60	76,96	78,89
			6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	-	-	-	-	15 KABUPATEN/KOTA	-	-
6	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	-	-	-	-	10 KABUPATEN/KOTA	-	-
			6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	-	-	CEMAR BERAT	-	-	-	-
			6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	-	-	CEMAR RINGAN	CEMAR BERAT	-	-	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	5,5 juta ha (skala nasional)	9735,37 Ha (DISHUT) 950 Ha (BPDASW U)	1113,81 Ha (DISHUT) 254 Ha (BPDASW U)	142,06 Ha (DISHUT) 1.115 Ha (BPDASW U)	1.167 (BPDASW U)	665 (BPDASW U)	3957,5 (BPDASW U)	1517
7	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Meningkat menjadi 1.200 KWh	600,79 KWH/Ka pita	624,46 KWH/Ka pita	655,21 KWH/Ka pita	680,64 KWH/Ka pita	359,14 KWH/Ka pita	-	-
			7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	1,1 juta sambungan rumah tangga	19.195	19.021	19.888	19.707	19.545	24.937	27.984
			7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Meningkat	0,038	0,038	0,039	0,038	0,038	-	-
8	8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	8,81%	3,67%	4,67%	1,07%	-	-	-
8	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	40,10%	41,81%	40,03%	42,00%	47,71%	45,64%	45,88%
			8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	531927 UMKM	609114 UMKM	681413 UMKM	704968 UMKM	716104 UMKM	-	-
8	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	8%	10%	10%	9%	8,18% Februari 2018	8,42%	11,15%

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8	8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat					21,87%	10,56%	18,56%
8	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	2,17	2,25	2,31				
			8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	270.837	229.288	233.643	261.461	88.464		
9	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	1000 km (skala nasional)				52,13	10,75		
			9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)			2	2	2	3	3
9	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	21,18%	20,54%	20,05%	20,28%	20,01%	18,98%	19,26%
			9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	-1,08%	11,72%	4,48%	2,31%	3,66%	1,23%	-0,66%
9	9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	0.07%	0.05%	0.003%	0.065%	0,013%	-	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	89%	52,87%	54,28%	55,55%	-	-	-
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 kabupaten (skala nasional)	-	4 KABUPATEN (NIAS 2 DESA; NIAS BARAT 5 DESA; NIAS SELATAN 5 DESA; NIAS UTARA 8 DESA)	4 KABUPATEN (NIAS 2 DESA; NIAS BARAT 5 DESA; NIAS SELATAN 5 DESA; NIAS UTARA 8 DESA)	3 KABUPATEN (NIAS 9 DESA; NIAS SELATAN 12 DESA; NIAS UTARA 3 DESA)			
			10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	5,05%	5,16%	4,73%	4,71%			
			10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%	Nias 22,21%; Nias Selatan 54,46%; Nias Utara 38,95%; Nias	Nias 18,05%; Nias Selatan 19,05%; Nias Utara 32,62%; Nias	Nias 17,64%; Nias Selatan 17,64%; Nias Utara 30,92%; Nias	Nias 18,11%; Nias Selatan 18,48%; Nias Utara 29,06%; Nias			

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						Barat 23,76%	Barat 29,96%	Barat 28,36%	Barat 27,23%			
10	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL			
10	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	-	-	19,60%	20,75%	23,50%	30,20%	25,22%
11	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	1 (Kawasan Mebidang)	1 (Kawasan Mebidang)	1 (Kawasan Mebidang)	1 (Kawasan Mebidang)	1 (Kawasan Mebidang)	-	-
11	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	34.346	39.374	52.187	72.050	92.523	-	-

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Minimal 20 kota sedang (skala nasional)	3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an)	3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an)	3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an)	3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an)	3 Kota (Tebing Tinggi Binjai dan Padang Sidempu an)		
			11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)	1 PKN (Kawasan Mebidang ro)	1 PKN (Kawasan Mebidang ro)	1 PKN (Kawasan Mebidang ro)	1 PKN (Kawasan Mebidang ro)	1 PKN (Kawasan Mebidang ro)		
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	JKMSR = 0 JKHSR = 0	JKMSR = 0,007 JKHSR = 0,007	JKMSR = 0,794 JKHSR = 0,02	JKMSR = 0,01 JKHSR = 0	JKMSR = 0 JKHSR = 0	JKMSR = 0,24 JKHSR = 0,04 JKLSR = 0,32 JKUSR = -	JKMSR = 4,74 JKHSR = 0,07 JKLSR = 0,42 JKUSR = 670,76
			11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 118,6	150	150	150	150	150	150	150
			11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	-	-	1	-	-	-	-
11	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%			16,88	18,65	19,30	21,48	23,70
12	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)		34511,12 1468 kg	38345,69 052 kg	42542,08 28 kg	18969,88 2 kg	24155,52 02 kg	28326,45 84 kg
13	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	-	-	-	-	1 dokumen tingkat nasional	1 dokumen tingkat nasional	1 dokumen tingkat nasional

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	JKMSR = 0 JKHSR = 0	JKMSR = 0,007 JKHSR = 0,007	JKMSR = 0,794 JKHSR = 0,02	JKMSR = 0,01 JKHSR = 0	JKMSR = 0 JKHSR = 0	JKMSR = 0,24 JKHSR = 0,04 JKLSR = 0,32 JKUSR = -	JKMSR = 4,74 JKHSR = 0,07 JKLSR = 0,42 JKUSR = 670,76
13	13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Ada	-	-	Ada	-	-	-	-
14	14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Meningkat menjadi 87%	-	-	-	-	100%	87%	90%
15	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	752,78 Ha (RHL-APBD); 6.015,15 Ha (KBR); 45,87 Ha (HR Kemitraan); 11,77 Ha (Hutan Kota);	-	19,80 Ha (Penghijauan); 106,65 Ha (RHL-APBD); 16,47 Ha (Lain-lain); 9 Ha (TNI/POLRI)	35 Ha (Reboisasi); 90,26 Ha (Penghijauan); 50 Ha (KBR); 60 Ha (Hutan kota); 30 Ha (Agrofore	1222 (reboisasi)	16859 (reboisasi)	3082 Ha (reboisasi)

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPd)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						158,03 (Penghija uan); 506,03 Ha (Lain- lain)			sty HL); 30 Ha (Restorasi BBTNGL & Mitra OIC); 0,6 Ha (ASN Tahura BB); 1,5 Ha (Gerakan penanam an 25 Pohon setiap PNS); 1 Ha(TNI/P OLRI); 0,4 Ha (CS Badan Usaha); 12,50 Ha (DLH Kab/Dair i)			
15	15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)			-	-	467	400	-
			15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional)	-	Penanam an HTI : 839 Ha; 47,988.8 9 Ha	15.177,8 0 Ha (HTI)	15.078,4 3 Ha (HTI); 498 Ha (RTL TPL)	368.697, 38 Ha	-	-
			15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Meningkat	-	-	-	16 KPH dan 1 UPT TAHURA	16 KPH dan 1 UPT TAHURA	16 KPH dan 1 UPT TAHURA	16 KPH dan 1 UPT TAHURA
15	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurungan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	0,0066	1,188	0,000151	0,0132	0,1291	1,7816	0,3257

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPD)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										
15	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	-	-	-	Telah tersosialisasi permenlh nomor 29 tahun 2009 tentang pedoman konservasi kehati di daerah	-	-	-
16	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	85,60%	69,34%	98,24%	96,24%	88,62%	91,20%	59,49%
			16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi 80%			93,94%	98,80%	66,72%	-	-
16	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	14	14	14	14	14	-	-
16	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	-	-
17	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	a. Pendapat an Pemerint ah sebagai proporsi terhadap	a. Pendapat an Pemerint ah sebagai Proporsi terhadap	a. Pendapat an Pemerint ah sebagai Proporsi terhadap	a. Pendapat an Pemerint ah sebagai Proporsi terhadap	a. Pendapat an Pemerint ah sebagai Proporsi terhadap	a. Pendapat an Pemerint ah sebagai Proporsi terhadap	a. Pendapat an Pemerint ah sebagai Proporsi terhadap

NO TPB	NO. TERGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR TPB (EVALUASI RKPd)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						PDB : 0,10 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,98 %	PDB : 0,09 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,81 %	PDB : 0,0810% b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,7506 %	a PDB : 0,0913 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,7392 %	PDB : 0,0878 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,7728%	PDB : 0,0886 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,7186%	PDB : 0,2293 % b. Pendapat an Pemerint ah Daerah : 0,8156%
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	3,61%	4,23%	4,79%	4,42%	-	-	-
17	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	-	10	18	13	7	15	10
			17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	-	-	-	-	27%	-	

Tabel. 2.14
Tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Diperoleh Data Di Provinsi Sumatera Utara

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
			2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
			2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
3	3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
3	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
3	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.
3	3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.
4	4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
4	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).
5	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
			5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
5	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
6	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
6	6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.
			6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
6	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
			6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.
			6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
			6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
8	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.
			8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
9	9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
9	9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca.
			9.4.1*	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
10	10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
11	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.
11	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
			11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
11	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
12	12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
12	12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
14	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.
15	15.6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
16	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16	16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
			16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16	16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
16	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
			16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
17	17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
17	17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
17	17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
			17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
17	17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

Tabel. 2.15
Matriks Evaluasi Capaian Irisan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
dengan P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase Penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Persen	8,63	8,43	9,14	8,57	8,40	8,22
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	-	80		85	90	95
			1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Orang	1.167	-	1.167	1.225	1.287	1.351
			1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.								
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (a)	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/Balita	Persen	-	31	-	30	29	28
			1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situs KLB Provinsi	Persen	-	100	-	100	100	100
			1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur	Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	Persen	56,25	-	NA	58,50	60,75	63,00

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
				(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.								
			1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	Persen			89,66	90,02	90,33	90,61
				Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	Meter	255.000	-	254.560	267.288	280.652	294.685
				Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persen			65	75	85	100
			1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	(SR)		29		30	30	30
			1.4.1 (f)	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh.	Persentase luasan permukiman kumuh di perkotaan	Persen		40		60	80	100
			1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA sederajat.	Persen		73		73	74	74
			1.4.1 (j)	Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	Persen		100		100	100	100
	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Kab/ Kota		33		33	33	33

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN		kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jumlah korban bencana dan keluarga miskin yang mendapatkan pemenuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidupnya	Orang		469		469	524	2.535
			1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		Orang			40	40	40	40
			1.5.1 (e)	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Kab/ Kota		33		33	33	33
	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89,60	92,30	83,77	86,68	89,59	92,50
			2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun	Persen		18,7		18,3	17,8	17,4
			2.1.2*	Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan)	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89,60	92,30	83,77	86,68	89,59	92,50
	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun/Balita	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun	Persen		30,5		29,5	28,5	27,5
			2.2.1 (a)	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah dua Tahun/Baduta	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun	Persen		30,5		29,5	28,5	27,5
			2.2.2	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun	Persen		30,5		29,5	28,5	27,5

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA			2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun	Persen		30,5		29,5	28,5	27,5
	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa				71,35	67,78	64,39
			3.1.2*	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen		100		100	100	100
	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jiwa				1.940	1.834	1.730
			3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jiwa				862	815	769
			3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jiwa				3,85	3,39	2,94
			3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization / UCI)	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Persen				89,00	92,00	95,00
	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV / Prevalensi HIV AIDS	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Persen		< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
			3.3.2*	Kejadian TB per 1.000 orang / Case Notification Rate (CNR) Program TB per 100.000 Penduduk	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Per 100 ribu Penduduk		194		203	213	223

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI		Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
			3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi						
			3.3.3*	Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API)	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Per 100 ribu Penduduk	0,07		0,06	0,05	0,04
			3.3.3 (a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Kab/Kota	33		33	33	33
	3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		Persen	21,6		21,1	20,6	20,1
			3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		Persen	29,0		28,9	28,8	28,7
			3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		Persen	68,1		68	67,9	67,8
			3.4.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.		Kab/ Kota	33		33	33	33
	3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		Persen	PM		PM	PM	PM
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana,	3.7.1*	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen			22,99	27,57	32,15
			3.7.1 (a)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS		Persen	59,39		59,57	59,75	60

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS		informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1 (b)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen				34,76	36,49	38,32
			3.7.2*	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Persen		PM		PM	PM	PM
			3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	Persen				2,96	2,88	2,80
	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1 (a)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen				11,50	10,92	10,37
			3.8.2*	Jumlah penduduk yang di cakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		Persen		0,080		0,084	0,089	0,094
			3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	-	80		85	90	95
	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	APK SM Sederajat	Persen		97,80		98,14	98,47	98,81
	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	APK SM Sederajat	Persen		97,80		98,14	98,47	98,81

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER	4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	APM SM Sederajat	Persen		87,55		90,20	92,85	95,50
	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-Rata Lama Sekolah (Proksi)	Persen		99,41		99,56	99,71	99,86
	4.c	ada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik./ Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen		97,00		97,29	97,57	97,86
					Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen		54,70		56,20	57,70	59,20
					Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen		43,00		45,40	47,80	50,20
					Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen		94,72		95,24	95,76	96,28
	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persen		79		82	86	90
	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1 (a)	Rasio kekerasan terhadap Anak (/ 10,000)	Meningkatnya kulaitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Persen		5		4	2	1
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak	Rasio kekerasan terhadap Perempuan			2/ 100.000		2/ 100.000	2/ 100.000	2/ 100.000

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK				perempuan (umur 15 - 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
			5.2.2 (a)	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Meningkatnya kulaitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Persen		72		78	84	96
	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	Usia		NA	NA	20,92	21,97	22,41
			5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	APK SM Sederajat	Persen		97,80		98,14	98,47	98,81
	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		Persen		20		23	25	30
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1 (a)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen				11,50	10,92	10,37
			5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen				34,76	36,49	38,32
	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	Persen		76,95		80,80	84,84	89,08
				Cakupan Akses Minum Perpipaan								

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
			6.1.1 (b)	Kapasitas Prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	m3		350.000		360.000	370.000	380.000
			6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR)	Persen		89,66		90,02	90,33	90,61
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.			PM	PM	PM	PM	PM	PM
			6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Cakupan Pelayanan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR)	Sambungan Rumah (SR)		29.450		29.550	29.650	29.750
			6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).	Persen		65		75	85	100
			6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).	Persen		65		75	85	100
			6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Cakupan Pelayanan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR)	Sambungan Rumah (SR)		29.450		29.550	29.650	29.750
	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, Menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi	6.3.2 (a)	Kualitas Air Danau								
			6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	m3		350.000		360.000	370.000	380.000

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI		Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
		setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Terbangunnya sistem Informasi Sumber Daya Air serta tercapainya peningkatan keterampilan SDM.	Dokumen	0		2	4	5
			6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisas	Pengelolaan Hidrologi/Hidrometri dan data/ informasi sumber daya air	Unit	101		101	109	121
			6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Terbangunnya sistem Informasi Sumber Daya Air serta tercapainya peningkatan keterampilan SDM.	Aplikasi	1		1	1	1
			6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	965		970	974	980
			6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Kapasitas dan peran kelembagaan Forum DAS, dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung.	Kegiatan	2		4	6	6
	6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1 (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	276.226		276.116	276.000	275.900
			6.6.1 (e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DAS	71		71	71	71

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	99,11	98,8	99,55	99,98	100
			7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi Listrik Perkapita	KWH/ Kapita		5.307		6.496	6.546	6.683
	7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan	Persen		32		34	36	36
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHB)	PDRB per kapita (ADHB)	Persen	6,34	NA	0,48	NA	NA	NA
			8.1.1 (a)	PDRB per kapita (ADHB)	PDRB per kapita (ADHB)	Juta	54,91	59,00	55,18	57	59	61
	8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Produktivitas Tenaga Kerja Bruto	Juta Rp/TK	21,95	22,59	9,61	14,42	21,62	21,82
	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.				PM		PM	PM	PM
			8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	45,01	PM	40,38	PM	PM	PM
			8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	PM		PM	PM		PM	PM	PM
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
			8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Angka Penganggur Terbuka	Persen	5,41	5,45	6,91	5,30	5,20	5,10
			8.5.2 (a)	8.5.2 (a)	Tingkat Setengah Pengangguran	Persen	5,41	5,45	6,91	5,30	5,20	

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUK TUR	8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	0,66	NA	8,24	7,72	7,94	7,8
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Persen	7,46	8,56	6,66	7,02	7,10	7,18
			8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	258.822	300.000	44.285	45.000	46.000	46.000
			8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Struktur Lapangan Kerja Utama Sektor Pariwasata (Rata-rata Transportasi dan Pergudangan & Akomodasi Makan Minum)	Persen	5,96	NA	5,84	NA	NA	NA
	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1 (a)	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi	Persen		82,10		83,12	84,14	85,16
			9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan		Persen		68,12		71,01	75,36	81,16
	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secarasignifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	18,98	NA	19,29	NA	NA	NA
			9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	1,23	3,29	-0,84	0,61	1.00	1,39

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 10 : BERKURANGN YA KESENJANGA N		meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Struktur Lapangan Kerja Utama Sektor Industri Pengolahan	Persen	9,91	NA	9,59	NA	NA	NA
	9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.								
	9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1 (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Jt Ton CO2Eq	22,06	64,00	22,07	26,56	31,06	35,55
	9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.		Persen		2,42		2,33	2,40	2,34
	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan Pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Indeks Gini	Indeks Gini	Persen	0,315	0,32	0,314	0,313	0,311	0,309
			10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi,sosial budaya dan formal maupun non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan	Persen		100		100	100	100

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI		Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJU TAN											
			10.1.1 (c)	Jumlah Desa Tertinggal			100		100	100	100
			10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri.			100		100	100	100
			10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.			100		100	100	100
	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat							
	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	Persen		NA	NA	83,60	79,42	75,45
			11.1.1 (a)	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Persen	92,72	NA		94,34	94,92	95,50
	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap system transportasi yang aman,	11.2.1 (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persen		50		60	70	80

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI		Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
		terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.									
	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.5.1 (a)	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Kab/ Kota	33		33	33	33
			11.5.1 (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Kab/Kota	Kab/ Kota	3		3	4	5
	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1 (a)	Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten / kota (TPA Regional)	Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten/ kota (TPA Regional)	TPA	0		0	0	1
	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Meningkatnya peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu.	Persen	65		75	85	90
			11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Meningkatnya peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu.	Persen	65		75	85	90

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI PANGAN YANG BERTANGGUN GJAWAB		bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										
	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1 (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.								
			12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan Proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan.	Ton		198.630		233.091	267.452	310.863
TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklimdan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Meningkatnya peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu.	Persen		65		75	85	90
	13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Dokumen		1	1	1	1	1
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN	14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1 (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan								
	14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Kawasan Konservasi Perairan	Ha		11.345		11.500	12.000	12.500

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI		Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN		hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia									
	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dokumen		8		8	8	8
			14.b.1 (a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	KK		100		120	500	500
			14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Jiwa		12.000		14.000	16.000	18.000
	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Ha		3.055.795		3.055.795	3.055.795	3.055.795
			15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen		41,25		41,25	41,25	41,25
	15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1 (b)	Luas Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Ha		368.697,38		368.697,38	368.697,38	368.697,38
			15.2.1 (d)	Jumlah Kesatuan pengelolaan hutan	KPH		16 KPH dan 1 UPT Tahura		16 KPH dan 1 UPT Tahura	16 KPH dan 1 UPT Tahura	16 KPH dan 1 UPT Tahura

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI			Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS		INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAA N YANG TANGGUH	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	Ha		275. 861		242. 286	208. 711	175. 136
	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persen		100		100	100	100
	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1 (a)	Angka Kriminalitas yang tertangani	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah		21.603		21.143	20.684	20.270
			16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan								
	16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan Penyiksaan terhadap anak.	16.2.1 (b)	Rasio kekerasan terhadap Anak	Meningkatnya kulaitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Persen		5		4	2	1
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) / Opini BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			16.6.1 (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	B	B	PM	BB	BB	A

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS		SINKRONISASI		Satuan	Capaian 2019	2020		Target (Tahun)		Target Akhir RPJMD 2023
			INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD			Target	Capaian	2021	2022	
				Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).							
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	19	22	PM	24	27	30
			16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Orang	14	14	14	14	14	14
	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen		51		55	59	63
			16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Persen		51		55	59	63
			16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran / (Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur)	Persen	12		NA	16	20	24
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB		PM	PM	PM	PM	PM	PM
			17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		PM	PM	PM	PM	PM	PM
			17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.							

2.1.6. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

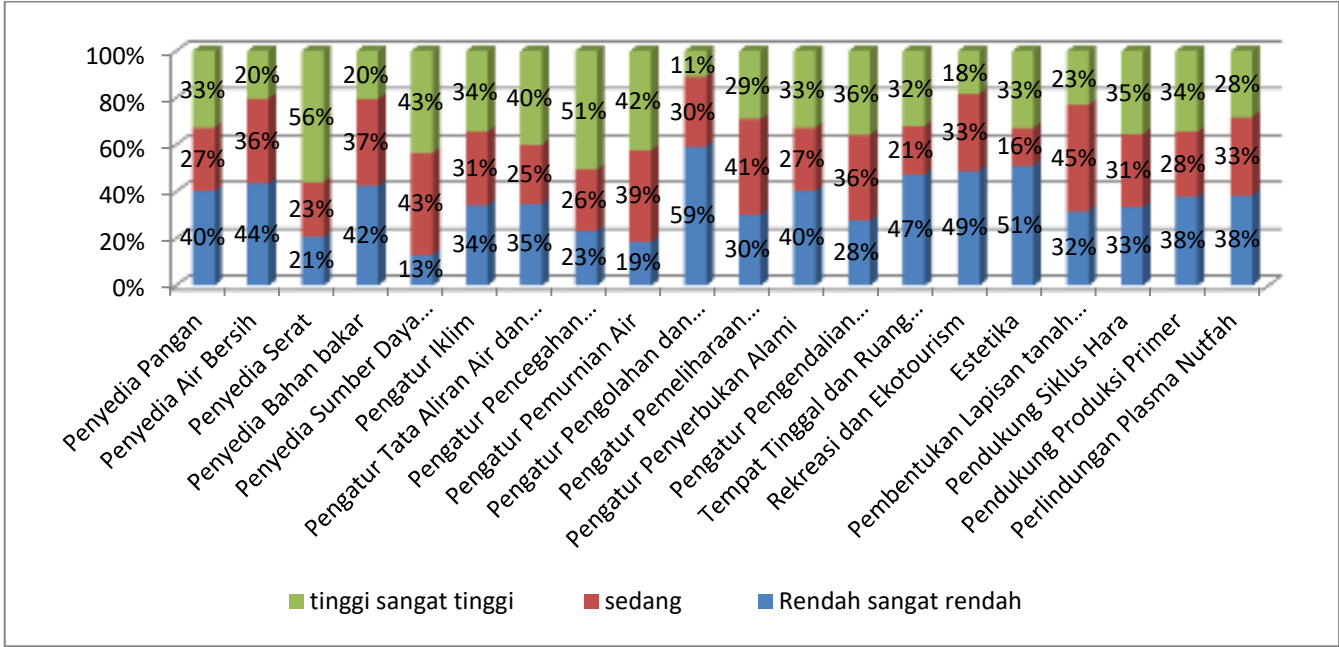
Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara dikaji dengan menggunakan pendekatan jasa ekosistem, dimana keluarannya berupa nilai persentase. Nilai persentase ini merupakan gambaran dari tinggi rendahnya nilai jenis-jenis ekosistem di Provinsi Sumatera Utara. Jasa ekosistem dapat dikelompokkan atas empat jenis yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting). Masing-masing kelompok jasa ini terdiri dari beberapa jenis jasa ekosistem.

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem memberikan asumsi dasar sebagai berikut :

Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, semakin tinggi pula kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya (jasa penyediaan, budaya, dan pendukung)

Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, semakin tinggi pula kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (jasa pengaturan).

Berdasarkan kelompok diatas, maka Rata-rata persentase nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara ditampilkan pada Grafik 2.46.



Grafik.2.6
Persentase Nilai Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Dari grafik diatas terlihat bahwa jasa ekosistem penyedia serat dan pengatur pencegahan bencana alam memiliki nilai persentase terbesar (56% dan 51% dengan kategori tinggi sangat tinggi). Sedangkan nilai tertinggi pada kategori rendah hingga sangat rendah yaitu jasa pengatur pengolahan dan penguraian limbah yang memiliki persentase 59% dan jasa budaya estetika, rekreasi dan ekoturisme memiliki persentase sebesar 51% dan 49%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas agar mampu mengatur pengolahan dan penguraian sampah dan mendorong peningkatan budaya rekreasi dan ekoturisme.

Untuk jasa ekosistem penyediaan pangan, luas wilayah Sumatera Utara yang memiliki jasa penghasil pangan kategori tinggi hingga sangat tinggi adalah 32.61% sedangkan yang memiliki jasa penghasil pangan sangat rendah hingga rendah mencapai 40.25% dari luas wilayah.

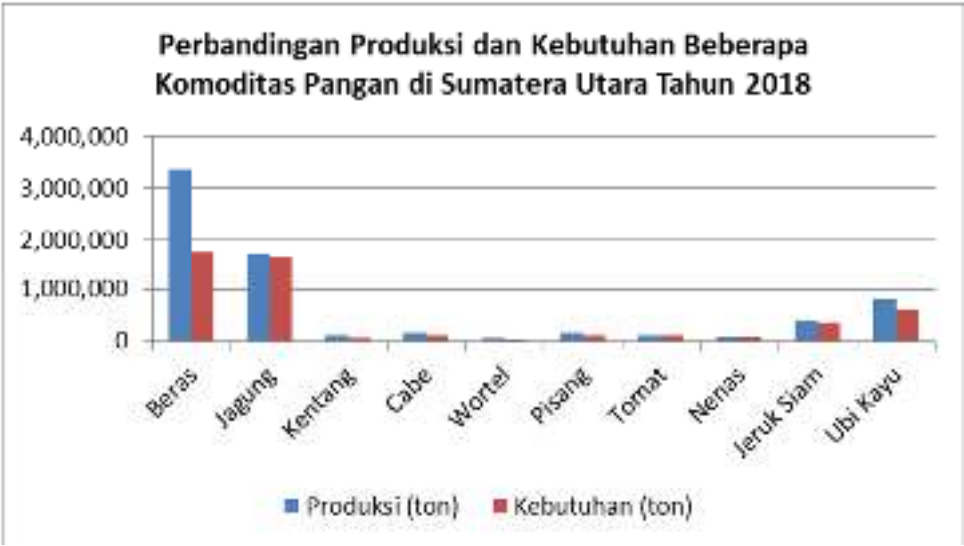
Berdasarkan data produksi pertanian tahun 2018, produksi beberapa komoditas pertanian rata-rata melebihi kebutuhan penduduk Sumatera Utara. Dengan kata lain tanpa mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi lahan pertanian, produksi pangan Sumatera Utara masih mencukupi.

Tabel. 2.16
Produksi Beberapa Komoditi Pangan
Di Sumatera Utara Tahun 2018

No	Komoditi (ton)	Produksi (ton)	Kebutuhan Penduduk (ton)
1	Beras	3,384,473	1,780,055
2	Jagung	1,757,126	1,681,520
3	Kentang	107,949	46,710
4	Cabe	151,782	110,651
5	Wortel	56,251	25,590
6	Pisang	150,691	111,862
7	Tomat	103,330	97,322
8	Nenas	82,780	81,138
9	Jeruk Siam	376,194	343,749
10	Ubi Kayu	803,403	608,295

Meskipun secara umum produksi pangan melebihi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, namun distribusi jasa ekosistem penyediaan pangan tidak merata. Berdasarkan Peta Indikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan terlihat bahwa jasa ekosistem penghasil pangan berkategori tinggi hingga sangat tinggi dominan berada pada bagian Timur Sumatera Utara, sedang pada bagian Barat dominan jasa ekosistem penyediaan pangannya

berkategori rendah dan sangat rendah. Perbedaan kemampuan alam dalam penyediaan pangan ini dapat menimbulkan kesenjangan ketersediaan pangan; pada bagian Timur kondisi surplus pangan sangat mungkin terjadi, sedangkan pada bagian Barat kekurangan pangan sangat mungkin terjadi. Peran pemerintah dalam mengatur distribusi pangan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antar wilayah-wilayah ini.



Gambar 2. 5.
Perbandingan Produksi dan Kebutuhan beberapa
Komoditas Pangan di Sumatera Utara Tahun 2018

Berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air, hanya 20.09% wilayah Sumatera Utara yang memiliki jasa penyediaan air bersih dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi dan 44 % dengan kategori rendah hingga sangat rendah. Berdasarkan data Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2019, ketersediaan air di Sumatera Utara mencapai 41.606.470.693,46 m3, sedangkan kebutuhan hanya mencapai 17.874.637.754,87 m3, dengan demikian ketersediaan air bersih masih surplus. Namun demikian ketersediaan dan kebutuhan air bersih tidak terdistribusi secara merata, sehingga beberapa wilayah mengalami defisit air (16.95%) dan daerah lainnya surplus air (83.65%).

Jika dibandingkan Peta Indikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih dengan Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Sumatera Utara, terlihat bahwa pada wilayah-wilayah yang memiliki jasa penyediaan tinggi, justru terjadi defisit air, khususnya pada bagian Timur Sumatera Utara. Dibutuhkan pengelolaan sumberdaya air yang baik pada wilayah-wilayah ini

untuk mencegah defisit berkepanjangan dan harus diupayakan peningkatan daya dukung penyediaan air bersih.

Salah satu faktor yang berperan dalam penyediaan air bersih adalah jasa pengaturan tata aliran air. Pengaturan tata air sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air.

2.1.7. Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.17
Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kawasan Strategis Nasional
1	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sumatera Utara (Pulau Berhala)
2	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)
3	Kawasan Danau Toba dan sekitarnya

Sumber : PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Pulau Berhala, merupakan pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara dari 34 pulau kecil terluar di Pulau Sumatera, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ditetapkan bagian kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam. Selain Pulau Berhala masih ada 2 (dua) pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara yaitu, Pulau Simuk dan Pulau Wunga.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo bahwa Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hampan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di

Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Kawasan danau Toba telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional dengan fungsi lingkungan dan telah memiliki rencana tata ruang sendiri seperti yang dituangkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2014, Cakupan Kawasan Danau Toba berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 terdiri dari badan danau, DTA dan CAT, mencakup 25 sub DAS pada 7 (tujuh) kabupaten dan 28 kecamatan yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir dan 4 (empat) CAT di 8 (delapan) Kabupaten dan 57 Kecamatan yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Karo, Simalungun, Toba Samosir dan Pakpak Bharat.

Disamping Kawasan Strategis Nasional, untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan perekonomian nasional, di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Sei Mangkei, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, seluas 2.002,77 ha yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. KEK Sei Mangkei tersebut direncanakan menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional. KEK Sei Mangkei ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang akan berimplikasi terhadap dinamika pembangunan di kawasan sekitarnya, seperti peningkatan kegiatan ekonomi, perubahan tata guna lahan, kebutuhan SDM/tenaga kerja, maupun kebutuhan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada terbentuknya konsep kota baru disekitar KEK Sei Mangkei.

Kawasan Strategis Provinsi yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, yakni antara lain:

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;
5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

6. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;
7. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
8. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
9. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;
11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan
14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

Tabel. 2.18
Kawasan Strategis Sumatera Utara

No	Kawasan Strategis	Nilai/Aspek Strategis
1	Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara India/Thailand/Malaysia di Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai	Pertahanan dan Keamanan
2	Kawasan Perkotaan Mebidangro	Ekonomi
3	Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi: • Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang; • Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan; • Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.	Sosial Budaya
4	Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya	Lingkungan Hidup
5	Kawasan Ekosistem Leuser dan Bohorok	Lingkungan Hidup
6	Kawasan Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru)	Lingkungan Hidup
7	Kawasan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;	Lingkungan Hidup
8	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias	Ekonomi
9	Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya	Sosial Budaya
10	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya • Kawasan Labuan Angin – Sibolga • Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan • Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya	Ekonomi
11	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan • Kawasan Tanjung Balai – Asahan • Kawasan Simalungun – Batubara • Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke	Ekonomi

No	Kawasan Strategis	Nilai/Aspek Strategis
12	Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi • Merek Karo; • Siborong borong, Tapanuli Utara; • Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan; • Lumban Julu Toba Samosir; • Harian, Samosir; • Silimakuta Simalungun; • Sitinjo, Dairi, • Siempat Rube Pakpak Bharat • Siantar Martoba Kota Pematangsiantar	Ekonomi
13	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhan Batu dan sekitarnya	Ekonomi
14	Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah	Sosial Budaya
15	Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir	Sosial Budaya
16	Kawasan Religi dan Situs Candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara	Sosial Budaya
17	Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak	Lingkungan Hidup

Sumber: PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang revisi PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

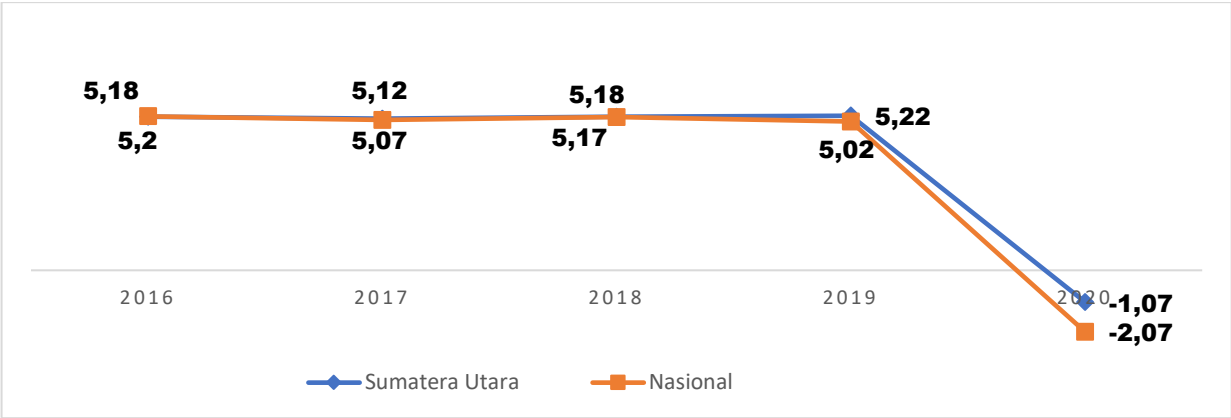
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tahun 2019 tumbuh sebesar 5,22 persen atau berada diatas pertumbuhan Nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen. Akibat dampak timbulnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar -1,07 persen, namun kondisi ini masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional sejak Tahun 2017 s.d 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

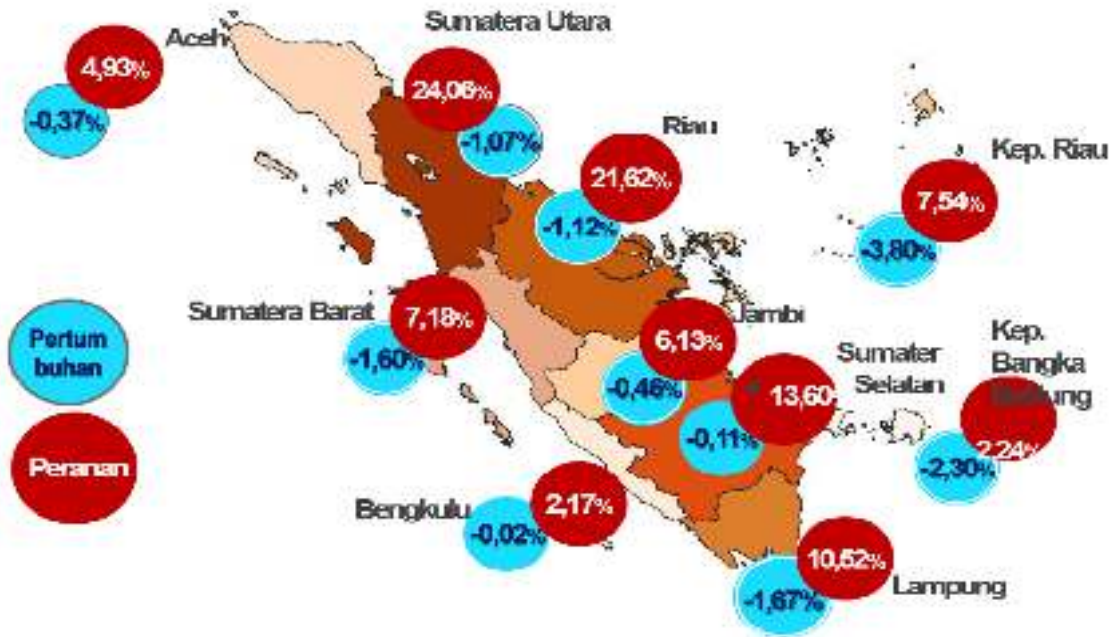


Sumber : BRS BPS Sumut, 2020 dan BRS BPS Indonesia 2020

Grafik.2.7
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2016 s.d. 2020

Jika dilihat perkembang Laju Pertumbuhan Ekonomi se-Pulau Sumatera sampai dengan tahun 2020 (Y-on-Y) Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah ada di Provinsi Kep. Riau sebesar -3,80 persen dan tertinggi ada di Provinsi Bengkulu sebesar -0,02 persen.

Selain itu jika dilihat dari kontribusi ekonomi Sumatera Utara menduduki posisi *share* terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain se-Pulau Sumatera dengan capaian 24,06 persen. Kondisi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2020 (persen) terlihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
di Pulau Sumatera 2020 (Persen)

2. PDRB Provinsi Sumatera Utara

a. Nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara

Nilai PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 799,608 Triliun jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 741,347 Triliun. Pada Tahun 2020 PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp 811,282 Triliun.

Nilai PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tahun 2019 sebesar Rp 539,513 Triliun atau meningkat jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 512,762 Triliun. Pada Tahun 2020 PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 533,746 Triliun. Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.19
PDRB Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)					Harga Konstan (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	134.915,98	146.366,37	155.077,17	164.152,76	173.083,46	115.179,69	121.300,04	127.202,64	133.726,02	136.332,43
2	Pertambangan dan Penggalan	8.474,41	8.870,35	9.552,01	10.160,52	10.373,46	6.144,99	6.436,60	6.792,01	7.099,76	6.936,05
3	Industri Pengolahan	125.513,75	138.823,78	148.430,31	152.246,63	156.503,60	90.680,99	92.777,25	96.174,60	97.362,09	96.548,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	668,83	788,34	840,58	908,22	932,38	622,76	677,08	694,58	728,78	751,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	654,34	766,84	754,74	796,70	831,18	446,05	475,82	489,60	516,28	535,76
6	Konstruksi	84.232,49	92.589,58	102.921,37	113.764,68	110.280,63	57.286,44	61.175,99	64.507,11	69.212,03	66.843,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	114.009,27	122.584,63	134.161,13	150.445,27	153.138,15	80.702,74	85.440,69	90.652,79	96.936,19	95.052,13
8	Transportasi dan Pergudangan	31.832,84	34.277,08	37.043,61	40.566,53	36.382,79	21.390,03	22.961,90	24.372,50	25.786,49	22.492,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.934,25	16.330,13	17.636,58	19.379,41	17.692,13	10.512,20	11.282,16	12.131,73	13.209,11	11.985,58
10	Informasi dan Komunikasi	12.194,59	13.582,77	15.154,95	17.139,66	18.467,11	11.913,13	12.933,95	14.024,31	15.375,55	16.323,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.716,72	21.729,04	22.643,28	23.344,41	23.529,58	14.531,04	14.601,55	14.854,35	15.138,89	15.334,75
12	Real Estate	29.716,16	33.387,32	37.338,15	40.942,91	42.721,95	19.187,89	20.637,93	21.740,02	22.792,55	23.149,98

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)					Harga Konstan (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
13	Jasa Perusahaan	6.287,02	7.089,63	7.649,068	8.667,23	8.710,08	4.065,41	4.368,69	4.678,85	4.950,74	4.717,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.949,55	24.023,93	27.127,84	29.505,60	30.254,28	15.083,58	15.463,27	16.406,84	17.736,89	17.866,22
15	Jasa Pendidikan	11.799,10	12.443,05	13.527,65	14.767,59	15.423,48	9.341,37	9.802,14	10.418,74	10.924,94	11.091,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.958,50	6.453,79	7.273,25	8.155,27	8.366,11	4.366,28	4.699,93	4.977,04	5.207,26	5.079,18
17	Jasa Lainnya	3.523,51	3.962,86	4.215,03	4.665,50	4.592,37	2.320,88	2.496,24	2.644,91	2.810,24	2.705,20
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		628.381,15	684.069,49	741.347,42	799.608,95	811.282,83	463.775,46	487.531,23	512.762,62	539.513,84	533.746,35

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Berdasarkan distribusi lapangan usaha Tahun 2020, perekonomian Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh 4 sektor yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,54 persen; Industri Pengolahan sebesar 18,09 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,81 persen; dan Konstruksi sebesar 12,52 persen.

Tabel. 2.20
Tabel Laju Pertumbuhan dan Distribusi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara

No	Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)					Distribusi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,74	5,31	4,87	5,13	1,95	21,55	24,88	24,81	24,79	25,54
2	Pertambangan dan Penggalian	5,68	4,81	5,46	4,53	-2,31	1,35	1,32	1,32	1,32	1,30
3	Industri Pengolahan	5,34	2,31	3,66	1,23	-0,84	20,05	19,03	18,76	18,05	18,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,85	8,72	2,58	4,92	3,55	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,71	6,67	2,90	5,44	3,79	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	5,60	6,79	5,45	7,29	-3,43	13,45	12,55	12,58	12,83	12,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,76	5,87	6,11	6,93	-1,94	17,84	17,52	17,68	17,97	17,81
8	Transportasi dan Pergudangan	6,07	7,35	6,14	5,80	-12,77	5,08	4,71	4,75	4,78	4,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,54	7,32	7,53	8,88	-9,26	2,39	2,31	2,37	2,45	2,25
10	Informasi dan Komunikasi	7,76	8,57	8,43	9,63	6,17	1,95	2,65	2,74	2,85	3,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,11	0,49	1,73	1,92	1,29	3,31	2,99	2,90	2,81	2,87
12	Real Estate	5,90	7,56	5,34	4,84	1,57	4,75	4,23	4,24	4,22	4,34
13	Jasa Perusahaan	5,95	7,46	7,10	5,87	-4,71	1,00	0,90	0,91	0,92	0,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,02	2,52	6,12	8,15	0,73	3,67	3,17	3,20	3,29	3,35
15	Jasa Pendidikan	4,90	4,93	6,29	4,86	1,52	1,88	2,01	2,03	2,02	2,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	7,64	5,90	4,63	-2,46	0,95	0,96	0,97	0,97	0,95
17	Jasa Lainnya	6,50	7,56	5,96	6,25	-3,74	0,56	0,51	0,52	0,52	0,51
18	PDRB	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumut, 2020

b. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2020 terhadap 2019 (y-on-y) terjadi kontraksi pada semua komponen. Nilai kontraksi terbesar terjadi pada komponen Impor yang mengalami kontraksi sebesar -14,97 persen, kemudian diikuti oleh Ekspor sebesar -10,36 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -0,87 persen diikuti Komponen PMTB sebesar -1,17 persen; dan Komponen PK-RT sebesar 2,98.

Komponen PDRB menurut pengeluaran Tahun 2020 masih didominasi oleh Komponen PK-RT yaitu sebesar 52,32 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,09 persen; Komponen PMTB sebesar 30,63 persen; Komponen PK-P sebesar 6,93 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,9 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,92 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 25,81 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Pengeluaran ADHK 2010 (persen) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.21
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut
Pengeluaran ADHK 2010 (persen) Tahun 2016 – 2020

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Ekonomi					Distribusi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	4,98	5,12	5,87	4,45	-2,98	53,27	53,18	53,61	53,87	52,32
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,73	3,26	11,38	9,95	-4,02	0,91	0,88	0,94	0,96	0,92
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,38	5,76	6,16	0,61	-0,87	7,36	7,57	7,59	7,18	6,93
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,85	5,03	6,96	8,25	-1,17	31,72	31,16	31,43	30,85	30,63
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	1,45	1,18	1,5	1,44	1,9
6	Ekspor Barang & Jasa	2,68	7,06	6,72	-2,17	- 10,36	35,25	38,11	37,63	33,33	33,09
7	Dikurangi Impor Barang & Jasa	-2,23	6,80	10,3	-3,68	- 14,97	29,46	32,08	32,7	27,63	25,81
Produk Domestik Regional Bruto			5,18	5,12	5,22	-1,07		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2020

Tabel. 2.22
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016-2020

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	333.511.725,39	364.057.391,98	397.072.809,82	430.663.912,21	424.494.987,37
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.708.823,29	6.058.240,70	6.948.327,40	7.669.433,28	7.503.894,60
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	46.072.715,84	51.838.128 ,31	56.298.765,87	57.417.178,40	56.258.272,38
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	198.592.880,92	213.362.357,91	233.019.084,31	246.657.703,24	248.510.594,37
5	Perubahan Inventori	9.047.441,96	-	11.112.526,94	11.488.676,61	15.387.320,69
6	Ekspor Barang dan Jasa	258.825.612,37	260.910.862,87	278.953.293,10	266.523.226,28	268.487.488,42
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	218.434.782,38	219.634.378,67	242.407.379,8	220.913.618,80	209.359.717,90
PDRB		626 062 907,40	686.634.426,63	741.347.427,64	799.608.954,24	811.282.839,90

Sumber : BRS Sumatera Utara, 2020

Tabel. 2.23
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
(Juta Rupiah) Tahun 2016-2020

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	237.147.363,27	249.298.155,74	263.925.548,74	275.496.715,66	267.464.077,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.683.867,25	4.386.359,67	5.386.839,56	5.922.969,67	5.684.627,93
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	30.933.126,92	32.714.160,00	34.729.078,02	34.942.086,67	34.638.828,02
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	135.207.978,12	142.013.726,39	150.803.365,98	163.244.133,22	161.327.639,76
5	Perubahan Inventori	7.797.441,55	-	8.271.619,97	8.558.283,71	11.079.927,30
6	Ekspor Barang dan Jasa	205.698.265,75	208.689.478,59	222.718.555,76	217.882.126,02	195.305.115,47
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	155.202.362,82	156.909.032,45	173.072.381,11	166.702.469,32	141.753.858,05
	PDRB	463.775.464,86	487.531.231,87	512.762.626,90	539.513.845,63	533.746.358,26

Sumber : BRS Sumatera Utara, 2020

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara diraih oleh Kabupaten Nias sebesar 1,8 persen; Kabupaten Nias Barat sebesar 1,66 persen; dan kemudian Kabupaten Nias Utara sebesar 1,58 persen. Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah tercatat dialami oleh Kota Medan sebesar -1,98 persen; Kota Pematang Siantar sebesar -1,89 persen; dan disusul Kota Binjai sebesar -1,83 persen.

Tabel. 2.24
Laju Pertumbuhan Ekonomi MenurutKabupaten/Kota Provinsi se-Sumatera Utara Tahun 2016-2020

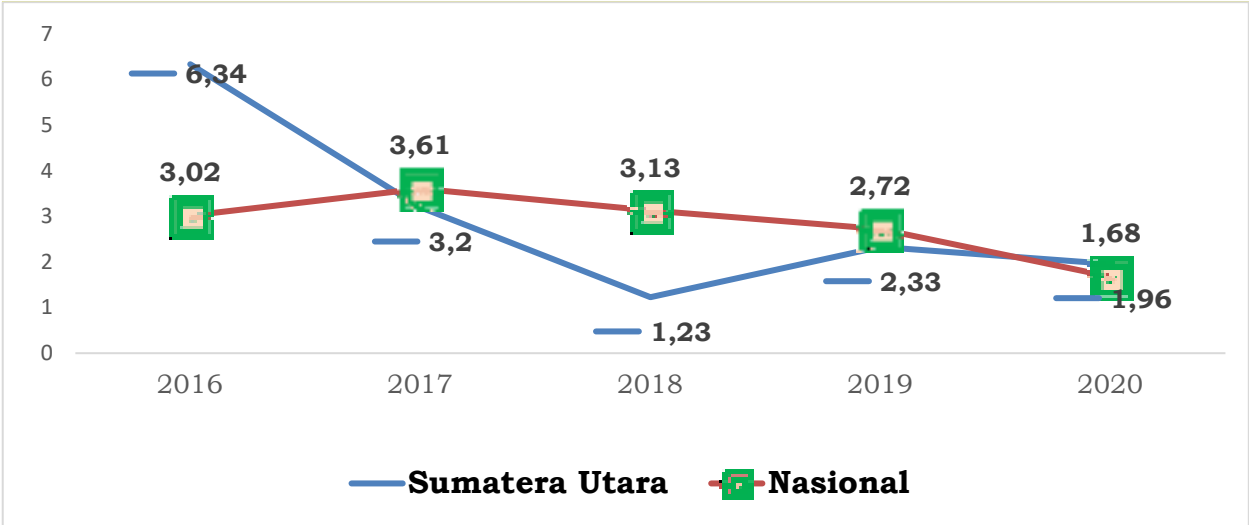
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Nias	5,03	5,01	4,95	5,04	1,8
Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,30	-0,94
Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19	5,23	0,39
Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,20	5,18	-0,76
Tapanuli Utara	4,12	4,15	4,35	4,62	1,50
Toba Samosir	4,76	4,90	4,96	4,88	-0,27
Labuhan Batu	5,06	5,00	5,06	5,07	0,09
Asahan	5,62	5,48	5,61	5,64	0,21
Simalungun	5,40	5,13	5,18	5,20	1,01
Dairi	5,07	4,93	5,01	4,82	-0,94
Karo	5,17	5,21	4,55	4,60	-0,80
Deli Serdang	5,32	5,10	5,15	5,18	-1,78
Langkat	4,98	5,05	5,02	5,07	-0,86
Nias Selatan	4,41	4,56	5,02	5,03	0,61
Humbang Hasundutan	5,00	5,02	5,04	4,94	-0,13
Pakpak Bharat	5,97	5,94	5,85	5,87	-0,18
Samosir	5,27	5,35	5,58	5,70	-0,59
Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17	5,28	-0,44
Batu Bara	4,44	4,11	4,38	4,35	-0,31

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61	1,14
Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64	1,14
Labuhan Batu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35	0,80
Labuhan Batu Utara	5,21	5,11	5,20	5,15	0,27
Nias Utara	4,59	4,43	4,42	4,65	1,58
Nias Barat	4,83	4,81	4,77	4,82	1,66
Kota Sibolga	5,15	5,27	5,25	5,20	-1,36
Kota Tanjung Balai	5,76	5,51	5,77	5,79	-0,47
Kota Pematang Siantar	4,86	4,41	4,80	4,82	-1,89
Kota Tebing Tinggi	5,11	5,14	5,17	5,15	-0,70
Kota Medan	6,27	5,81	5,92	5,93	-1,98
Kota Binjai	5,54	5,39	5,46	5,51	-1,83
Kota Padangsidimpuan	5,29	5,32	5,45	5,51	-0,73
Kota Gunungsitoli	6,03	6,01	6,03	6,05	0,38
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,85

Sumber : BRS Sumatera Utara, 2020

3. Laju Inflasi

Pada tahun 2020 inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 1,96%, Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan nasional Inflasi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 1,68%. Inflasi Sumatera Utara kedepan diharapkan dapat terus stabil tentunya dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Tim Pengendali Inflasi (TPID) Sumatera Utara. Perkembangan Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional adalah sebagai berikut :



Sumber : BPRS BPS 2020

Grafik.2.9
Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

Pada Desember 2020, seluruh kota IHK di Sumatera Utara mengalami inflasi, yaitu Kota Sibolga sebesar 1,32 persen; Kota Pematangsiantar sebesar 1,47 persen; Kota Medan sebesar 0,65 persen; Kota Padangsidimpuan sebesar 1,00 persen; dan Kota Gunung Sitoli sebesar 1,87 persen. Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada Desember 2020 inflasi 0,75 persen.

Bulan Desember 2020, Medan tercatat inflasi 0,65 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,48 pada November 2020 menjadi 104,15 pada Desember 2020. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,00 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,07 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,19 persen. Tiga kelompok lainnya tidak mengalami perubahan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok pendidikan.

Inflasi Desember 2020 menyebabkan inflasi tahun kalender Desember 2020 (m-to-m) dan inflasi tahun ke tahun (y-o-y) masing-masing kota sebagai berikut: Sibolga inflasi 2,42 persen; Pematangsiantar inflasi 2,78 persen; Medan inflasi 1,76 persen; Padangsidempuan inflasi 3,27 persen; dan Gunung Sitoli inflasi 5,32 persen. Dengan demikian, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara sebesar 1,96 persen.

Tabel. 2.25
Inflasi 5 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Medan	4,76	3.10	1,00	2,43	1,76
2	Pematangsiantar	6,60	3.18	2,15	1,54	2,78
3	Sibolga	7,39	3.08	2,86	2,58	2,42
4	Padangsidempuan	4,28	3.82	2,22	2,15	3,27
5	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	5,32
Gabungan 5 Kota IHK di Sumatera Utara		6,34	3,24	1,23	2,33	1,96

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Utara, 2020

Inflasi Pulau Sumatera dapat dilihat dari Dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera, seluruh kota tercatat inflasi. Inflasi tertinggi di Gunung Sitoli sebesar 1,87 persen dengan IHK sebesar 107,85 dan terendah di Bengkulu sebesar 0,14 persen dengan IHK sebesar 104,33.

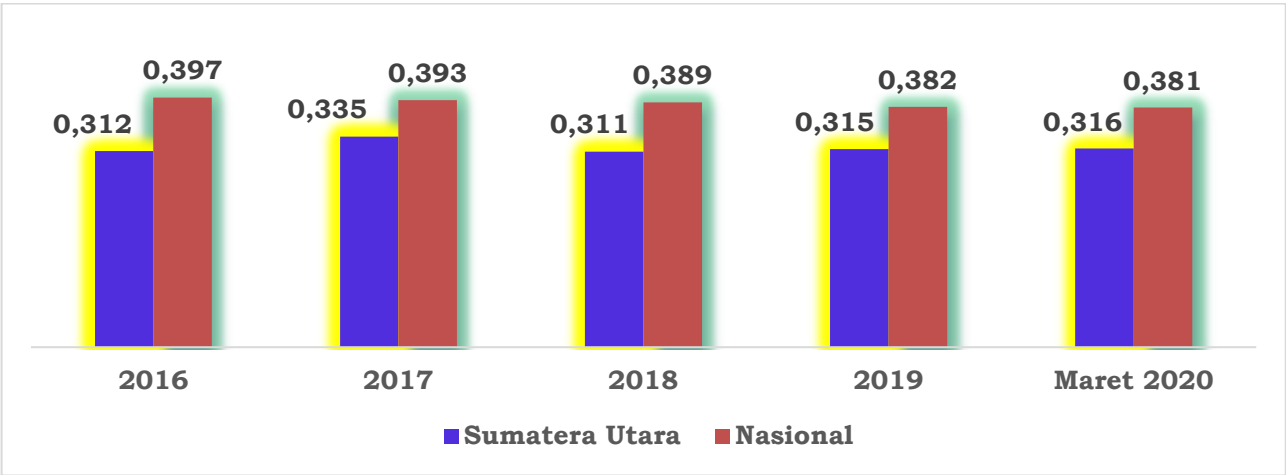
Tabel. 2.26
Perbandingan IHK dan Inflasi/Deflasi Kota-Kota di Pulau Sumatera

Desember 2020			Desember 2020		
Kota	IHK	Inflasi/ Deflasi	Kota	IHK	Inflasi/ Deflasi
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1 Meulaboh	109,12	1,02	13 Dumai	105,94	0,80
2 Banda Aceh	105,93	0,85	14 Bungo	105,94	0,56
3 Lhokseumawe	106,61	1,27	15 Jambi	106,23	0,72
4 Sibolga	106,17	1,32	16 Palembang	104,62	0,58
5 Pematangsiantar	105,55	1,47	17 Lubuklinggau	105,08	0,39
6 Medan	104,15	0,65	18 Bengkulu	104,33	0,14
7 Padangsidempuan	107,08	1,00	19 Bandar Lampung	106,36	0,67
8 Gunungsitoli	107,85	1,87	20 Metro	106,31	0,51
9 Padang	105,38	0,71	21 Tanjung Pandan	106,64	1,49
10 Bukittinggi	104,82	0,39	22 Pangkal Pinang	103,44	0,71
11 Tembilahan	106,26	0,34	23 Batam	104,67	1,05
12 Pekanbaru	104,90	0,51	24 Tanjung Pinang	104,80	0,98

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Utara, Desember 2020

4. Indeks Gini

Pada Maret 2020, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,316. Terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,001 poin jika dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,315. Peningkatan Gini Rasio ini berarti terjadi kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran sementara Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,382 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,381.



Sumber : BRS BPS, Maret 2020

Grafik.2.10
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,338 sedikit meningkat dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,337. Demikian juga Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,255 meningkat dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,262.

Pada Maret 2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,53 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,99 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,63 yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.



Grafik.2.11
Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan
Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2019 – September 2019 diantaranya adalah Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), mencatat bahwa penurunan distribusi pengeluaran perkapita per bulan pada penduduk kelompok 20 persen teratas relatif seimbang dengan penurunan pada penduduk kelompok 40 persen terbawah. Tercatat penurunan distribusi pengeluaran perkapita September 2019 – Maret 2020 untuk penduduk kelompok 20 persen teratas sebesar 0,12 poin dan penduduk kelompok 40 persen terbawah juga sebesar 0,12 poin. Selain itu perkembangan Gini Ratio Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif, sebagaimana tabel dibawah ini :

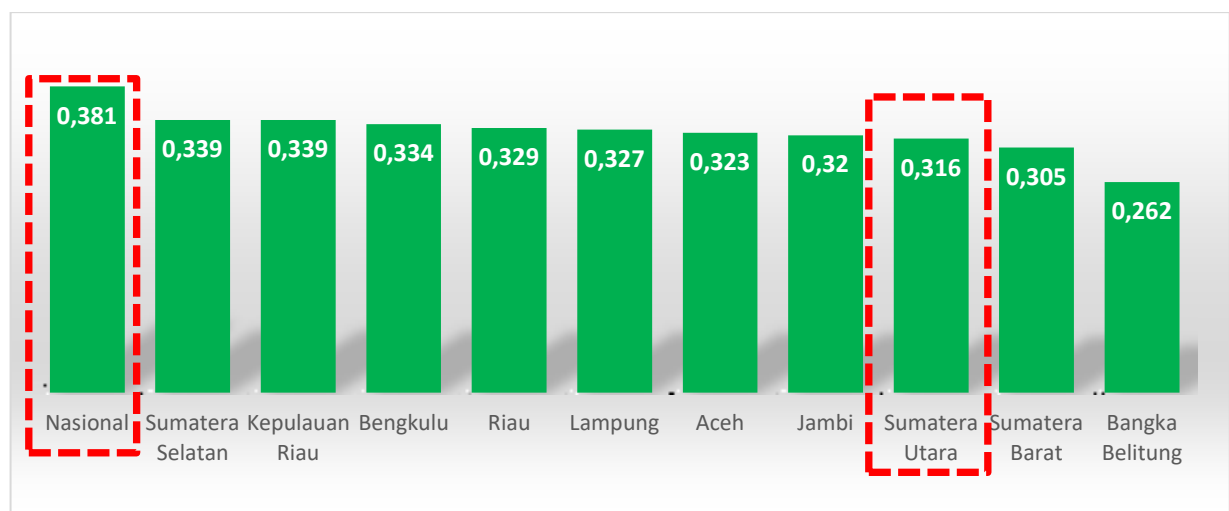
Tabel. 2.27
Perkembangan Gini Ratio seluruh Kabupaten/Kota
se-Sumatera Utara Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Gini Ratio				
	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Nias	0,274	0,249	0,265	0,265	0,265
Mandailing Natal	0,270	0,252	0,257	0,257	0,257
Tapanuli Selatan	0,273	0,253	0,273	0,273	0,273
Tapanuli Tengah	0,306	0,306	0,317	0,317	0,317
Tapanuli Utara	0,309	0,329	0,282	0,282	0,282
Toba Samosir	0,308	0,292	0,328	0,328	0,328
Labuhanbatu	0,308	0,279	0,294	0,294	0,294
A s a h a n	0,283	0,267	0,291	0,291	0,291
Simalungun	0,296	0,255	0,290	0,290	0,290
D a i r i	0,301	0,240	0,265	0,265	0,265
K a r o	0,328	0,268	0,268	0,268	0,268
Deli Serdang	0,282	0,281	0,294	0,294	0,294
L a n g k a t	0,283	0,249	0,253	0,253	0,253
Nias Selatan	0,214	0,269	0,330	0,330	0,330
Humbang Hasundutan	0,275	0,298	0,291	0,291	0,291
Pakpak Bharat	0,264	0,256	0,239	0,239	0,239
Samosir	0,276	0,287	0,285	0,285	0,285
Serdang Bedagai	0,255	0,275	0,283	0,283	0,283
Batu Bara	0,268	0,234	0,249	0,249	0,249
Padang Lawas Utara	0,253	0,250	0,299	0,299	0,299
Padang Lawas	0,326	0,248	0,299	0,299	0,299
Labuhanbatu Selatan	0,244	0,220	0,243	0,243	0,243
Labuhanbatu Utara	0,255	0,267	0,282	0,282	0,282
Nias Utara	0,266	0,269	0,237	0,237	0,237
Nias Barat	0,290	0,247	0,283	0,283	0,283
S i b o l g a	0,344	0,323	0,303	0,303	0,303
Tanjungbalai	0,373	0,278	0,332	0,332	0,332
Pematangsiantar	0,321	0,349	0,334	0,334	0,334
Tebing Tinggi	0,358	0,304	0,340	0,340	0,340
M e d a n	0,333	0,352	0,314	0,314	0,314
B i n j a i	0,316	0,316	0,309	0,309	0,309
Padangsidempuan	0,334	0,324	0,359	0,359	0,359
Gunungsitoli	0,357	0,346	0,361	0,361	0,361
SUMATERA UTARA	0,319	0,315	0,317	0,316	0,314

Sumber : BRS Sumut, 2020

Jika dilihat dari Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera, rata-rata capainnya masih di bawah Nasional, Gini Ratio tertinggi wilayah Sumatera ada di Provinsi Sumatera Selatan dan terendah ada di Kepulauan Bangka Belitung. Sementara posisi Sumatera Utara berada di tiga terbawah setelah Bangka Belitung dan Sumatera Utara.

Perbandingan capaian Gini Rasio Provinsi se Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BRS Sumut, Maret 2020

Grafik.2.12
Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kondisi Kemiskinan

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan baik di Sumatera Utara maupun Nasional, tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 1.356 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 9.14 persen, dan jumlah penduduk miskin nasional 27.55 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 10.19 persen. Persentase penduduk miskin Sumatera Utara berada di bawah Nasional.

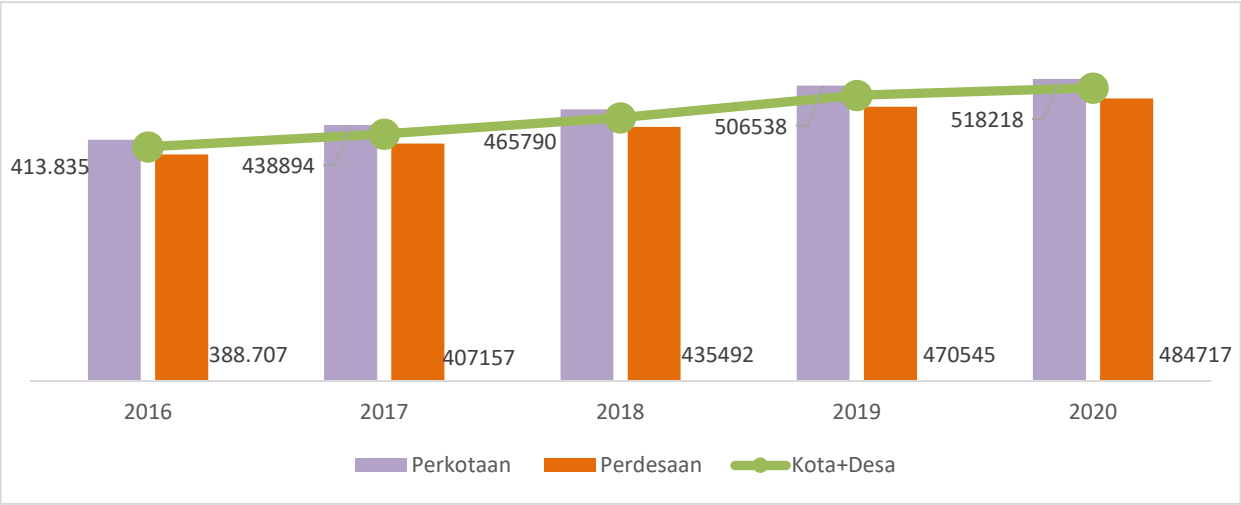
Tabel. 2.28
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2016 – 2020

Tahun	Provinsi Sumatera Utara		Nasional	
	Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Juta jiwa)	Persentase (%)
September 2016	1.453	10.27	27.76	10.86
September 2017	1.327	9,28	26.58	10.12
September 2018	1.292	8,94	25.67	9.66
September 2019	1.260	8,63	24.79	9.22
September 2020	1.356	9,14	27.55	10,19

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.. Pada September 2020 garis kemiskinan di Sumatera Utara sebesar Rp.505.236,- per kapita per bulan. Untuk daerah

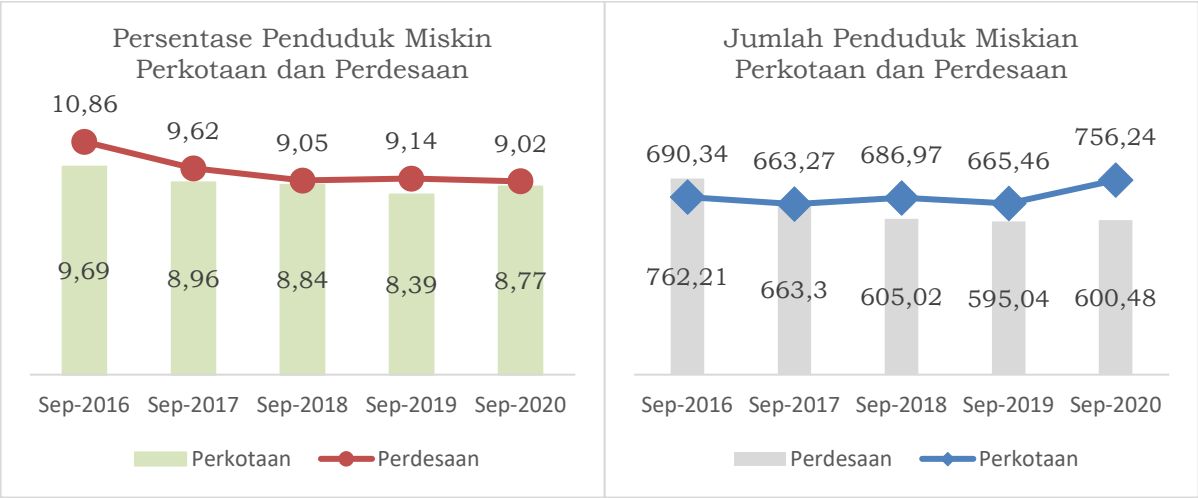
perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.520.529,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.486.642,- per kapita per bulan.



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Grafik.2.13
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan garis kemiskinan dapat dilihat jumlah dan persentase penduduk miskin di Perkotaan dan perdesaan, Diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berhasil ditekan mencapai sekitar 8.63 persen. Akan tetapi angka tersebut meningkat cepat pada tahun 2020 menjadi 9.14 persen. bila dilihat menurut perbandingan desa dan kota pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 756,24 rb jiwa, sedangkan di perdesaan sebanyak 600,48 ribu jiwa.



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Grafik.2.14
Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

Tabel. 2.29
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
1	Nias	23,12	16,60
2	Mandailing Natal	41,31	9,18
3	Tapanuli Selatan	23,96	8,47
4	Tapanuli Tengah	47,19	12,38
5	Tapanuli Utara	28,41	9,37
6	Toba	16,05	8,71
7	Labuhan Batu	42,17	8,44
8	Asahan	66,32	9,04
9	Simalungun	73,64	8,46
10	Dairi	22,93	8,04
11	Karo	36,57	8,70
12	Deli Serdang	86,26	3,88
13	Langkat	101,87	9,73
14	Nias Selatan	53,88	16,74
15	Humbang Hasundutan	17,92	9,36
16	Pakpak Bharat	4,59	9,28
17	Samosir	15,80	12,48
18	Serdang Bedagai	49,18	7,97
19	Batu Bara	49,78	11,88
20	Padang Lawas Utara	26,79	9,70
21	Padang Lawas	23,87	8,37
22	Labuhan Batu Selatan	28,63	8,34
23	Labuhan Batu Utara	34,86	9,53
24	Nias Utara	34,75	25,07
25	Nias Barat	22,33	25,69
26	Kota Sibolga	10,49	11,95
27	Kota Tanjung Balai	23,54	13,33
28	Kota Pematang Siantar	21,23	8,27
29	Kota Tebing Tinggi	16,32	9,85
30	Kota Medan	183,54	8,01
31	Kota Binjai	15,91	5,71
32	Kota Padangsidimpuan	16,56	7,40
33	Kota Gunungsitoli	23,54	16,41

Sumber : Statistik Indonesia 2020

Selanjutnya jika dilihat dari Grafik Analisa Kuadran Lokus Prioritas Intervensi terdapat pengelompokan wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Pendapatan Perkapita (Rp. Juta/Jiwa) Sumatera Utara Tahun 2020. Dari pengelompokan wilayah tersebut terdapat 2 kelompok prioritas wilayah yaitu prioritas wilayah 1 (satu) dan prioritas wilayah 3 (tiga), untuk prioritas wilayah 1 (satu) terdiri dari Kota Gunungsitoli, Tanjung Balai, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Samosir, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Batubara. Sedangkan untuk prioritas wilayah 3 (tiga) terdiri dari Kota Medan, Padang Sidimpuan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Labuhanbatu Utara, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Asahan, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Tapanuli

Selatan, Padang Lawas Utara, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Selatan, Tapanunli Utara, Dairi, Labuhanbatu dan Simalungun.

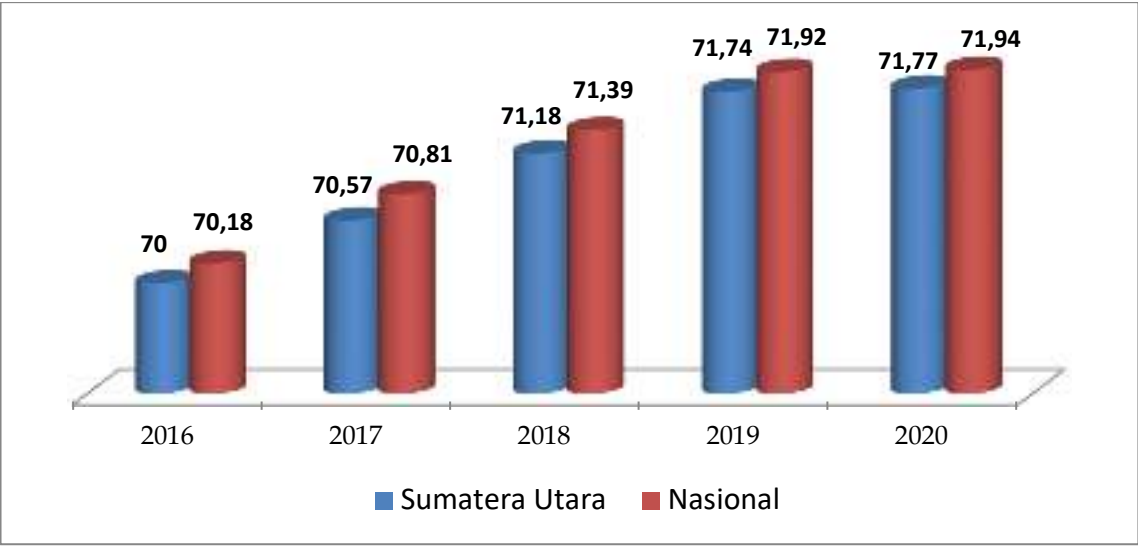


Prioritas 1 (10 Kab/Kota)	: Kota Gunungsitoli, Tanjung Balai, Sibolga, Kabupaten Tapteng, Samosir, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Batubara.
Prioritas 3 (23 Kab/Kota)	: Kota Medan, P.Sidimpunan, Binjai, Tebing Tinggi, P. Siantar Kabupaten Tobasa, Labura, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, PadangLawas, Asahan, Madina, Langkat, Deli Serdang, Tapsel, Paluta, Karo, Humbahas, Labusel, Taput, Dairi, Labuhanbatu, Simalungun.

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2020

Grafik.2.15
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Pendapatan Perkapita (Rp Juta/Jiwa) Sumatera Utara - 2020

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,77. Angka ini meningkat sebesar 0,03 poin atau tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Nasional walaupun terjadi peningkatan Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara masih berada dibawah capaian Nasional.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2020

Grafik.2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen, 2016-2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,33	68,37	68,61	68,95	69,10
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,00	13,10	13,14	13,15	13,23
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,12	9,25	9,34	9,45	9,54
Pengeluaran Perkapita	Rp	9.744	10.036	10.391	10.649	10.420
IPM	%	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77
Pertumbuhan IPM	%	0,71	0,81	0,86	0,79	0,04

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2020 UHH mencapai 69,10 tahun. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Selama periode 2010 hingga 2020, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 1,27 persen per tahun. Namun, kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mengakibatkan penurunan pada pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara hingga sebesar 10,42 juta rupiah per tahun.

Peningkatan IPM di tingkat Provinsi Sumatera Utara juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2019 hingga 2020, IPM di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (0,81 persen), Kabupaten Nias Utara (0,61 persen), dan Kabupaten Nias Barat (0,61 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut terutama didorong oleh perbaikan dimensi Pendidikan.

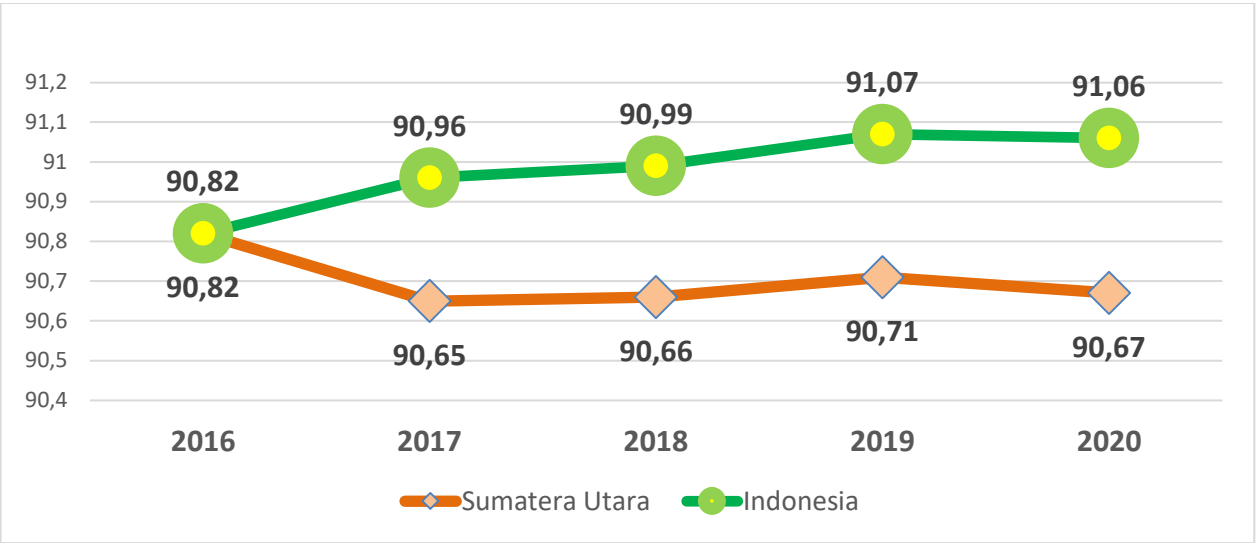
Tabel. 2.31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan IPM
Nias	61,93	0,45
Mandailing Natal	66,79	0,41
Tapanuli Selatan	70,12	0,14
Tapanuli Tengah	69,23	69,23
Tapanuli Utara	73,47	0,19
Toba	75,16	0,32
Labuhan Batu	72,01	0,10
Asahan	70,29	0,53
Simalungun	73,25	0,37
Dairi	71,57	0,21
Karo	74,43	0,24
Deli Serdang	75,44	0,01
Langkat	71,00	0,34
Nias Selatan	61,89	0,49
Humbang Hasundutan	68,87	0,06
Pakpak Bharat	67,59	0,18
Samosir	70,63	0,11
Serdang Bedagai	70,24	0,04
Batu Bara	68,36	0,01
Padang Lawas Utara	69,85	0,81
Padang Lawas	68,25	0,13
Labuhan Batu Selatan	71,40	0,01
Labuhan Batu Utara	71,61	0,25
Nias Utara	62,36	0,61
Nias Barat	61,51	0,61
Sibolga	73,63	0,30
Tanjung Balai	68,65	0,20
Pematang Siantar	78,75	0,23
Tebing Tinggi	75,17	0,12
Medan	80,98	0,01
Binjai	75,89	0,00-
Padangsidempuan	75,22	0,21
Gunungsitoli	69,31	0,01
Sumatera Utara	71,77	0.04

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Kondisi IPG di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan adanya trend positif (kenaikan) pada kurun waktu 2016 – 2019 dengan rata rata kenaikan sebesar 0,03 point. Bila melihat dengan capaian IPG secara nasional, maka dapat diketahui bahwa kurun waktu tahun 2016 – 2019 capaian IPG Sumut masih berada di bawah capaian nasional, sehingga hal ini memberikan gambaran bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan IPG dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Indonesia, Februari 2020

Grafik.2.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

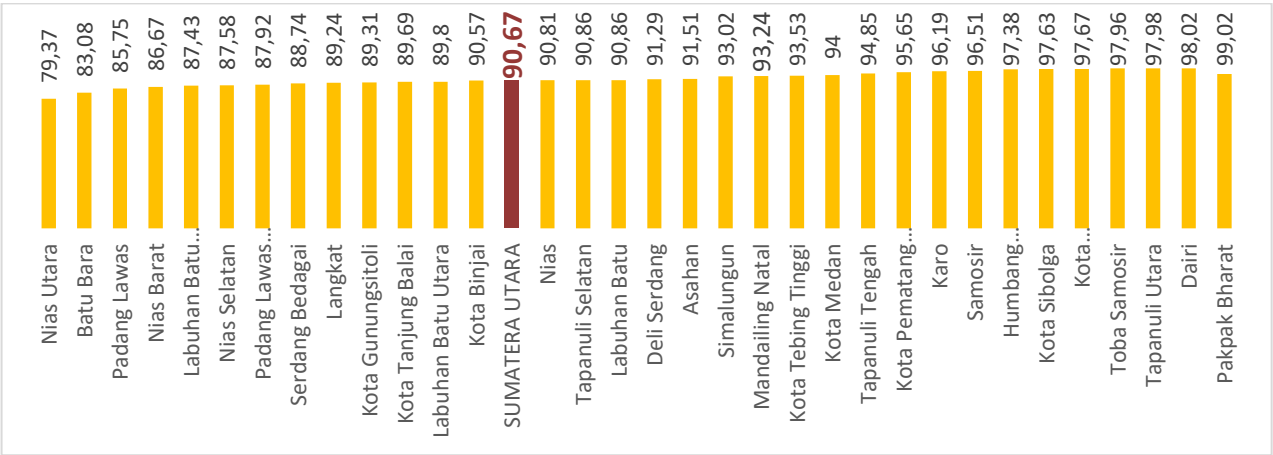
Bila melihat pada masing – masing variabel pendukung IPG perkembangan dari tahun 2016 – 2020 memperlihatkan kesenjangan yang paling menonjol adalah pada variabel Pengeluaran per Kapita, dimana pengeluaran per kapita untuk penduduk perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki – laki dengan kesenjangan rata – rata sebesar 50 persen. Sedangkan Rata Rata Lama Sekolah, kesenjangan tidak terlalu terlihat (kecil) dengan rata rata sebesar 0,6 tahun. Namun jika dilihat dari Harapan Lama Sekolah, penduduk perempuan di Sumatera Utara lebih besar dibandingkan penduduk laki – laki dengan rata – rata sebesar 0,4 tahun, begitu juga dengan variabel angka harapan hidup, memperlihatkan bahwa Harapan Hidup perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan rata – rata sebesar 3,8 tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.32
Perkembangan Variabel Pendukung
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2016-2020

Tahun	Usia Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2016	66,48	70,29	12,67	13,34	9,48	8,78	14.153	7.772
2017	66,49	70,29	12,92	13,35	9,55	8,96	14.552	7.915
2018	66,73	70,52	16,96	13,37	9,61	9,08	15.124	8.138
2019	67,07	70,92	12,97	13,40	9,76	9,17	15.471	8.315
2020	69,29	73,16	13,13	13,41	9,82	9,28	15,058	8,176

Sumber : BPS Indonesia, Februari 2020

Jika dilihat dari Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota maka IPG tertinggi ada di Kabupaten Pakpak Bharat kemudian Kabupaten Dairi dan Tapanuli Utara, angka ini lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 90,67 pada tahun 2020. Sementara capaian terendah ada di Kabupaten Nias Utara yaitu sebesar 79,37 persen. Perkembangan capaian IPG kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut :

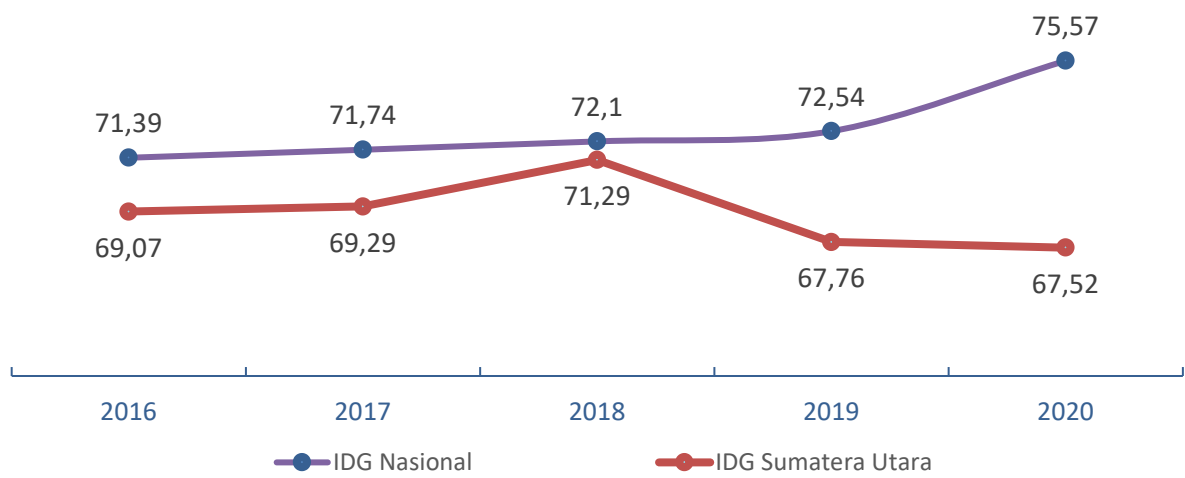


Sumber : BPS Indoneisa, Februari 2020

Grafik.2.18
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten/Kota, 2020

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 hingga 2020 memperlihatkan adanya penurunan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara sebesar 69,07 poin pada Tahun 2016, sementara tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 67.52 poin. Namun bila melihat perbandingan antara capaian IDG Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian IDG

Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Nasional dari tahun 2016 – 2020, sebagaimana grafik berikut:



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kemen PP PA, RI

Grafik.2.19
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumatera Utara dan Nasional

Bila melihat pada masing – masing variabel pendukung IDG yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi, dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja maka trend dari tahun 2016 – 2020 memperlihatkan belum adanya perkembangan yang cukup baik dan masih rendahnya peran perempuan dalam sektor publik, terutama untuk Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebagai satu indikator affirmative sebagaimana tabel berikut :

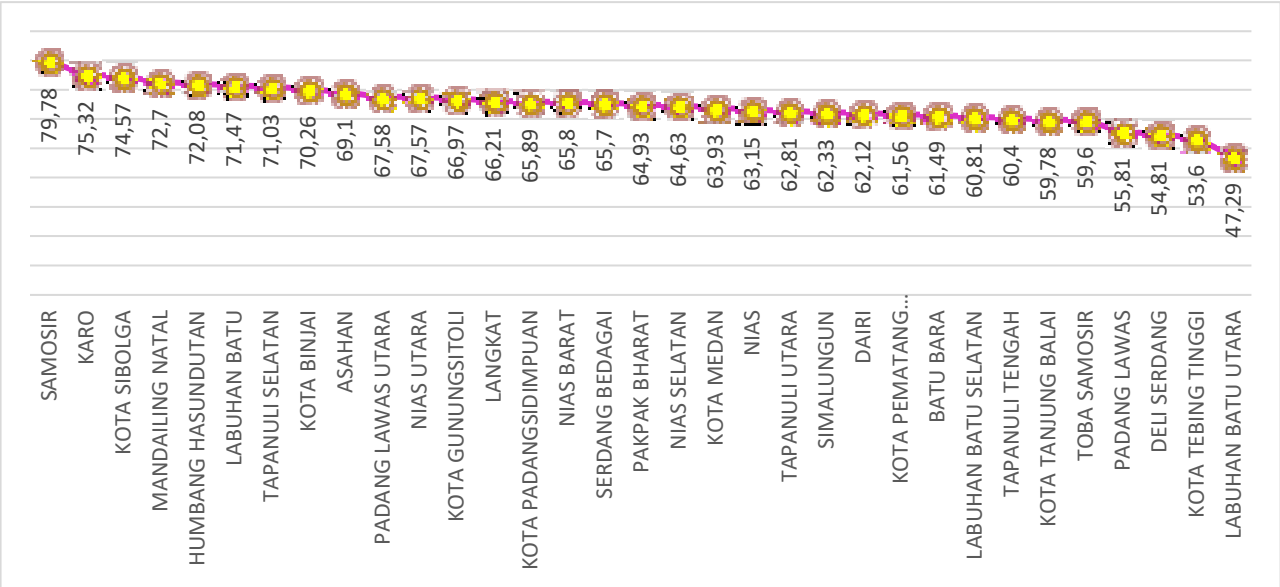
Tabel. 2.33
Perkembangan Variabel Pendukung
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara 2016-2020

Tahun	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
2016	36,01	52,59	15
2017	36,03	52,46	15
2018	36,03	54,51	17,17
2019	36,15	54.16	13.00
2020	36,12	54,26	13,00

Sumber : BPS Indonesia

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi ada di Kabupaten Samosir sebesar 75,32 dan Kabupaten Karo sebesar 75,32, capaian ini lebih tinggi dari Provinsi

Sumatera Utara pada tahun yang sama yaitu sebesar 67,76 persen. Perkembangan IDG Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik.2.20
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota

Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Sumatera Utara telah mencapai 13,23 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga Diploma 1. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,54 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Jika dibandingkan dengan Nasional maka capaian Sumatera Utara sejak 5 tahun terakhir berada diatas capaian nasional.

Tabel. 2.34
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Sumatera Utara dan Nasional, 2016-2020

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
	Nasional	Sumatera Utara	Nasional	Sumatera Utara
2016	12.72	13.00	7.95	9.12
2017	12.85	13.10	8.10	9.25
2018	12.91	13.14	8.17	9.34
2019	12.91	13.15	8.34	9.45
2020	12.98	13.23	8.48	9.54

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia dan Sumatera Utara 2020

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Harapan Lama Sekolah tertinggi ada di Kota Medan sebesar 14,74 kemudian Kota Padang Sidempuan dan Kota Pematang Siantar masing-masing sebesar 14,54 dan 14.45,

sementara Harapan Lama Sekolah terendah ada di Kabupaten Nias Selatan. Sementara capaian Rata-rata Lama Sekolah tertinggi juga ada di Kota Medan sebesar 11,39 disusul Kota Pematang Siantar sebesar 11,16 dan Kota Padang Sidempuan yaitu 11,00. Dan capaian Rata-Rata Lama Sekolah terendah ada di Kabupaten Nias sebesar 5.36 tahun, Nias Selatan 5.85 tahun, Nias Barat 6.49 dan Nias Utara 6.58 tahun.

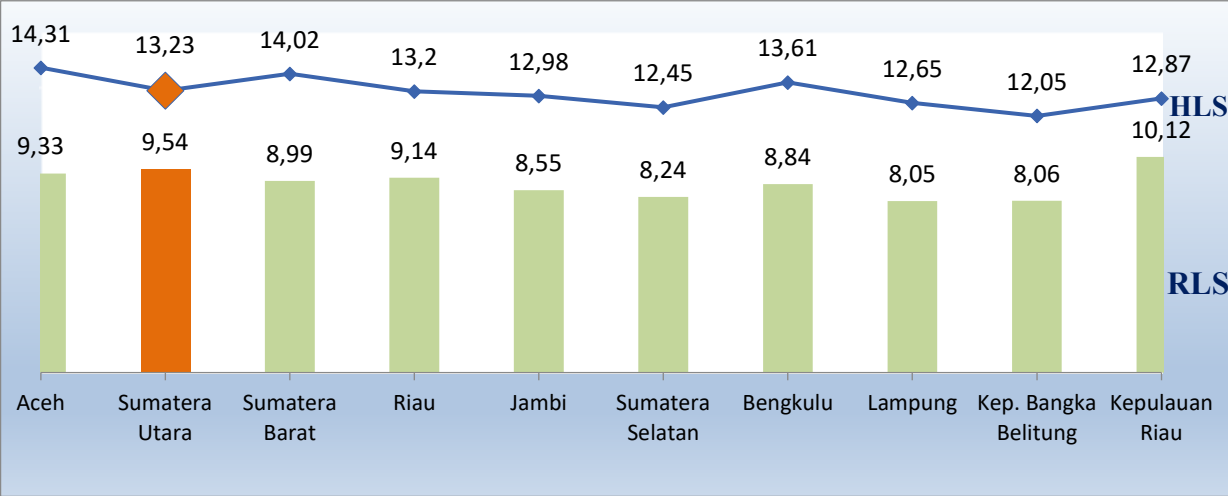
Tabel. 2.35
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten/Kota sesumatera Utara, 2020

Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-Rata Lama Sekolah
Nias	12,57	5,36
Mandailing Natal	13,32	8,62
Tapanuli Selatan	13,24	9,28
Tapanuli Tengah	13,06	8,62
Tapanuli Utara	13,69	9,85
Toba	13,45	10,52
Labuhan Batu	12,73	9,24 1
Asahan	12,60	8,79
Simalungun	12,78	9,60 1
Dairi	13,10	9,58
Karo	12,76	9,79
Deli Serdang	13,35	10,09
Langkat	13,05	8,65
Nias Selatan	12,23	5,85
Humbang Hasundutan	13,28	9,54
Pakpak Bharat	13,86	9,03
Samosir	13,47	9,43
Serdang Bedagai	12,60	8,54
Batu Bara	12,63	8,06
Padang Lawas Utara	12,87	9,37
Padang Lawas	13,03	9,01
Labuhan Batu Selatan	13,00	8,75
Labuhan Batu Utara	13,04	8,40
Nias Utara	13,03	6,58
Nias Barat	12,94	6,49
Sibolga	13,16	10,40
Tanjung Balai	12,50	9,44
Pematang Siantar	14,45	11,16
Tebing Tinggi	12,72	10,31
Medan	14,74	11,39
Binjai	13,62	10,93
Padangsidempuan	14,54	11,00
Gunungsitoli	13,74	8,61
Sumatera Utara	13,23	9,54

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Jika dibandingkan dengan wilayah yang setara (Pulau Sumatera), maka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-4

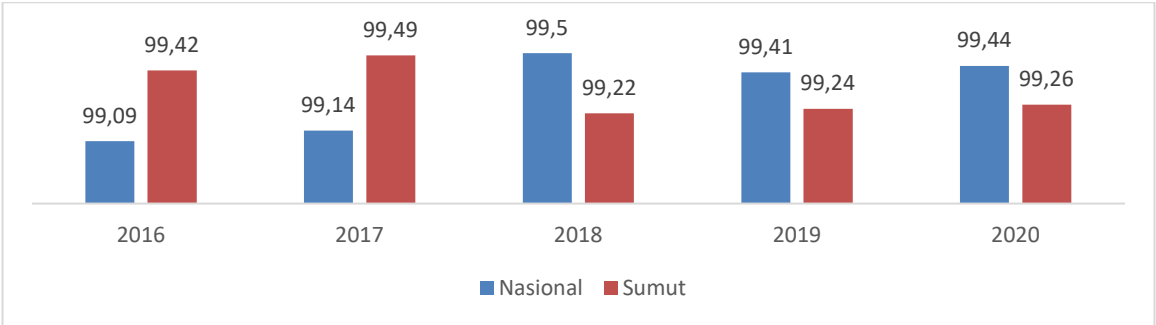
setelah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan wilayah setara Sumatera Utara berada pada urutan ke-2 setelah Kepulauan Riau, capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah setara adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.21
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020

Sementara jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 99.26 persen dan Nasional sebesar 99.44 persen, APS Provinsi Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan Nasional.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.22
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada usia tertentu Berdasarkan data dari BPS-RI, Susenas 2020 menunjukkan bahwa APS di Provinsi Sumatera Utara pada kelompok usia 7-12 tahun 99,44 persen, kelompok usia 13-15 tahun 97,04 persen, kelompok usia 16-18 tahun 78,21 persen dan kelompok usia 26,98 persen. Ternyata semakin tinggi kelompok

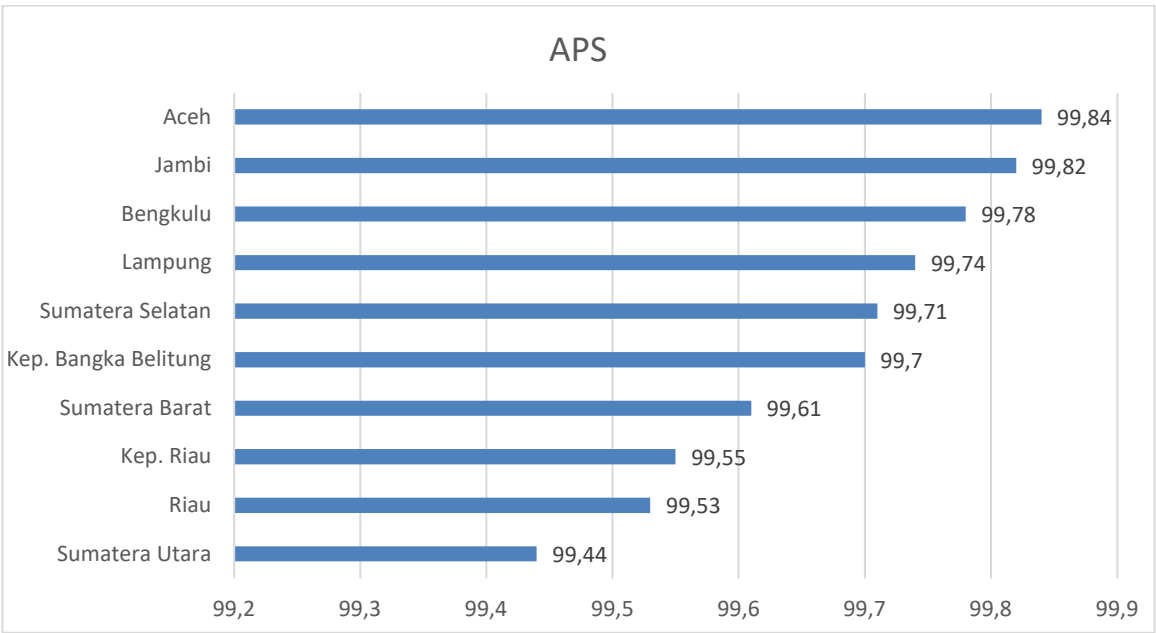
usia, APS di Sumatera Utara semakin menurun. Hal ini menyatakan bahwa partisipasi pada kelompok usia 13 tahun ke atas untuk bersekolah masih rendah.

Tabel. 2.36
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2016-2020

Tahun	7-12	13-15	16-18	19-24
2016	99,42	96,48	76,43	26,62
2017	99,49	96,60	76,76	26,80
2018	99,50	96,75	77,4	25,31
2019	99,41	96,89	77,67	25,75
2020	99,44	97,04	78,21	26,98

Sumber : BPS Indonesia, Susenas 2020

Sementara jika melihat capaian wilayah sumatera, pada tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Utara berada di posisi paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah sumatera lainnya, sementara APS tertinggi ada di Provinsi Aceh.



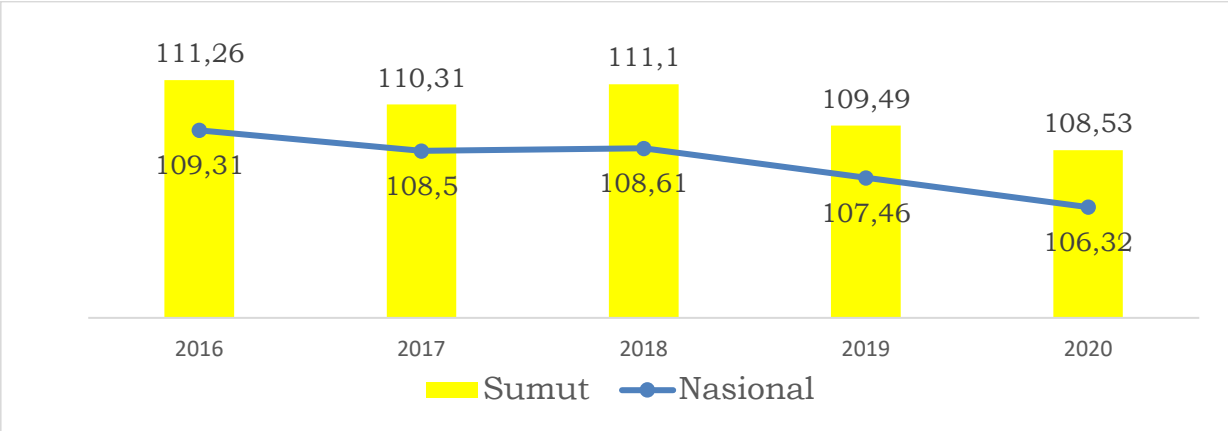
Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.23
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Sumatera 2020

Bila APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang berpartisipasi sekolah, dapat menikmati fasilitas pendidikan, tanpa melihat jenjang pendidikannya, maka Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan perbandingan antara murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah. APK bisa lebih besar dari 100 persen

karena populasi anak yang sekolah di suatu jenjang pendidikan mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Jika dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian Sumatera Utara berada diatas capaian Nasional, hingga tahun 2020 APK sumatera utara sebedar 108.53 persen dan nasional sebesar 106.32 persen.



Grafik.2.24
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumatera Utara dan Nasional

APK pada kelompok usia SD/MI di Sumatera Utara pada tahun 2020 tercatat sebesar 108,53 persen, kelompok usia SMP/MTs sebesar 91.68 persen, dan kelompok usia SMA/SMK/MA sebesar 94,68 persen. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

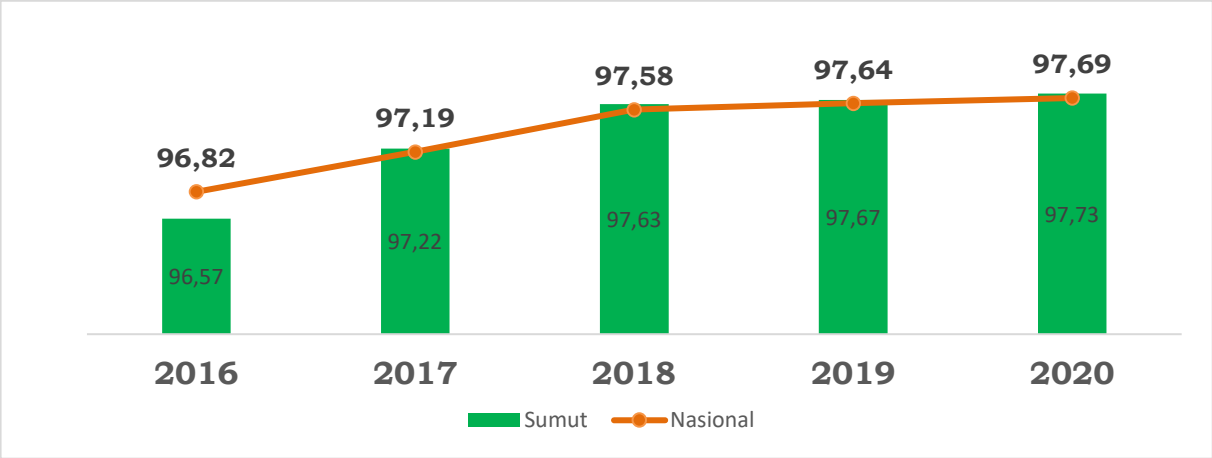
Tabel. 2.37
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan 2016-2020

Tahun	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C
2016	110,89	90,71	93,25
2017	109,50	90,74	93,64
2018	111,10	89,98	91,57
2019	109,49	90,38	94,04
2020	108,53	91,68	94,68

Sumber : BPS Indonesia, Susenas 2020

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai. APM pada suatu tingkat pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu tingkat pendidikan untuk setiap 100 penduduk usia sekolah.

Jika dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SM Sederajat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian Sumatera Utara berada diatas capaian Nasional, hingga tahun 2020 APM Sumatera Utara mencapai 97.73 persen sedangkan nasional 97.69 persen



Grafik.2.25
Angka Partisipasi Murni (APK) Sumatera Utara dan Nasional

Pada tahun 2020 APM pada kelompok usia 7-12 tahun tingkat pendidikan SD/MI sebesar 97.73 persen, kelompok usia 13-15 tahun tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 80.56 persen, dan kelompok usia 16-18 tahun tingkat pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 68.00 persen. Menurunnya angka APM pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi menandakan bahwa masih sedikit anak yang dapat menyenjam pendidikan sesuai tingkat pendidikan pada usianya saat itu.

Tabel. 2.38
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan 2016-2020

Tahun	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C
2016	96,57	78,71	66,85
2017	97,22	79,12	67,05
2018	97,63	79,25	67,27
2019	97,67	80,26	67,53
2020	97,73	80,56	68,00

Sumber : BPS Indonesia, Susenas 2020

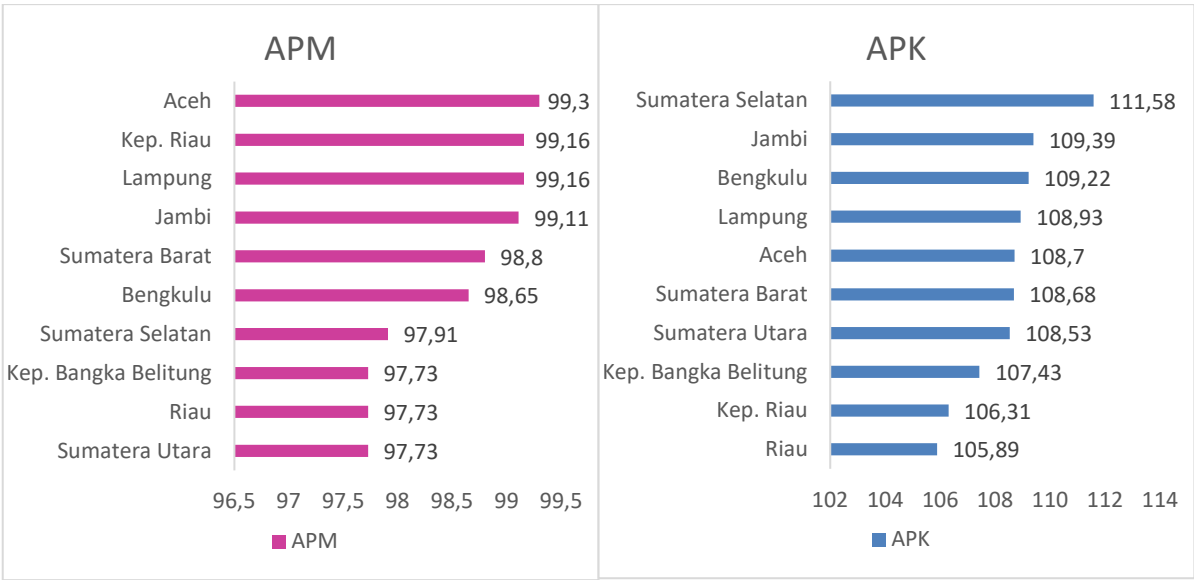
Jika dilihat dari perkembangan APM dan APK Kabupaten/Kota maka APM tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 86.51 persen dan APM terendah ada di Kabupaten Batubara sebesar 60.19 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar 112.6 persen dan terendah ada di Kabupaten Asahan sebesar 76.06 persen.

Tabel. 2.39
Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten/Kota 2020

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	SD	SMP	SMTA	SD	SMP	SMTA
Kabupaten						
01 N i a s	98,78	78,11	62,52	114,38	88,5	93,62
02 Mandailing Natal	99,22	83,14	62,57	110,06	91,72	79,62
03 Tapanuli Selatan	98,57	82,07	66,93	112,01	86,85	90,1
04 Tapanuli Tengah	99,07	88,26	70,66	116,96	100,38	82,31
05 Tapanuli Utara	99,35	88,2	78,23	113,72	92,64	97,86
06 Toba	98,52	89,22	82,07	108,98	94,35	106,52
07 Labuhanbatu	99,37	86,94	68,22	108,19	94,56	94,72
08 A s a h a n	99,82	81,91	60,93	109,59	84,62	76,06
09 Simalungun	98,64	77,48	63,7	109,53	82,75	85,87
10 D a i r i	99,36	90,53	80,65	108,98	99,66	90,77
11 K a r o	98,64	83,15	73,18	107,8	89,81	90,17
12 Deli Serdang	95,03	70,82	67,81	104,03	89,59	96,4
13 L a n g k a t	98,93	78,86	64,43	112,72	86,61	102,64
14 Nias Selatan	95,91	70,74	66,73	109,39	85,25	87,81
15 Humbang Hasundutan	99,29	92,94	86,51	111,76	95,95	95,02
16 Pakpak Bharat	99,05	88,02	80,01	111,28	99,3	95,62
17 Samosir	99,57	91,58	81,78	117,62	99,69	93,14
18 Serdang Bedagai	99,14	77,67	67,95	115,39	85,85	83,65
19 Batu Bara	99,2	74,37	60,19	113,22	81,78	94,68
20 Padang Lawas Utara	98,78	83,28	69,18	113,22	89,66	98,3
21 Padang Lawas	98,95	82,82	62,62	109,65	91,38	107,03
22 Labuhanbatu Selatan	98,8	84,44	71,75	105,17	89,01	101,05
23 Labuhanbatu Utara	99,8	74,57	64,27	110,13	83,51	112,6
24 Nias Utara	98,61	80,79	74,03	113,17	88,56	102,06
25 Nias Barat	99,52	82,58	78,85	120,6	90,63	107,05
Kota						
71 S i b o l g a	99,14	87,91	74,27	109,82	91,99	96,25
72 Tanjungbalai	98,38	81,82	71,75	107,93	82,86	87,74
73 Pematangsiantar	99,58	81,55	75,78	114,28	84,42	108,67
74 Tebing Tinggi	98,04	82,62	67,17	110,62	84,38	89,44
75 M e d a n	93,47	80	61,43	106,79	100,07	98,43
76 B i n j a i	99,26	83,43	72,62	106,74	86,72	93,73
77 Padangsidimpuan	99,64	84,38	77,46	107,81	88,41	89,56
78 Gunungsitoli	98,83	82,87	75,07	114,04	92,47	95,23
Sumatera Utara	97,67	80,26	67,53	109,49	90,38	94,04
- Pedesaan	96,6	80,39	67,63	107,24	92,76	93,61
- Perkotaan	98,8	80,12	67,42	111,87	87,98	94,55
Source : BPS-National Sosio Economic Survey 2019						

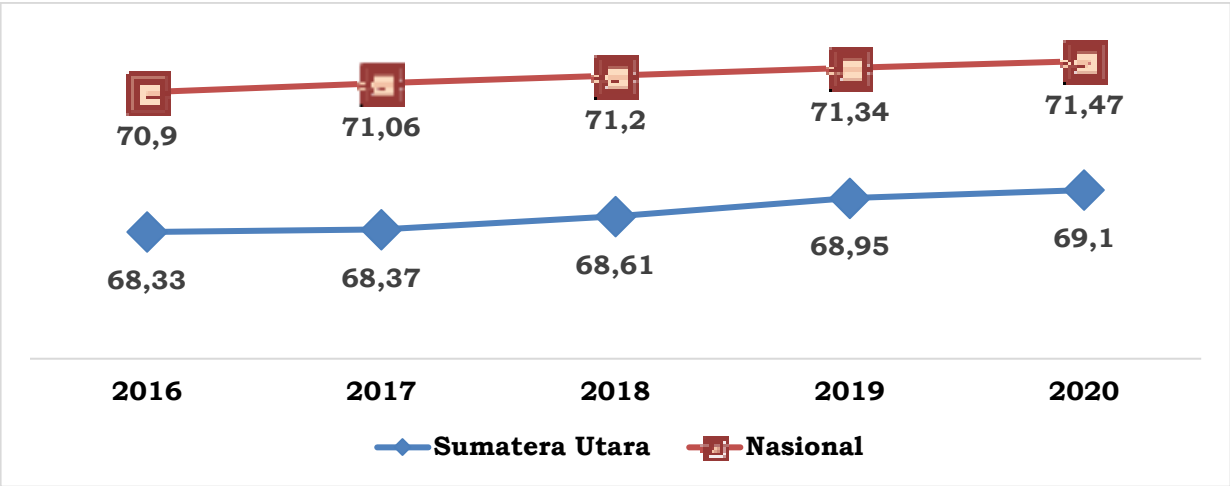
Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Sedangkan jika dilihat dari perkembangan daerah yang setara (wilayah Sumatera), APM Sumatera Utara sama dengan Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Riau posisi ini lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Sumatera lainnya, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi ada di Provinsi Sumatera Selatan, sementara posisi Sumatera Utara ada di posisi ke-4 terendah dengan capaian 108.53 persen setelah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Provinsi Riau.



Grafik.2.26
Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Sumatera 2020

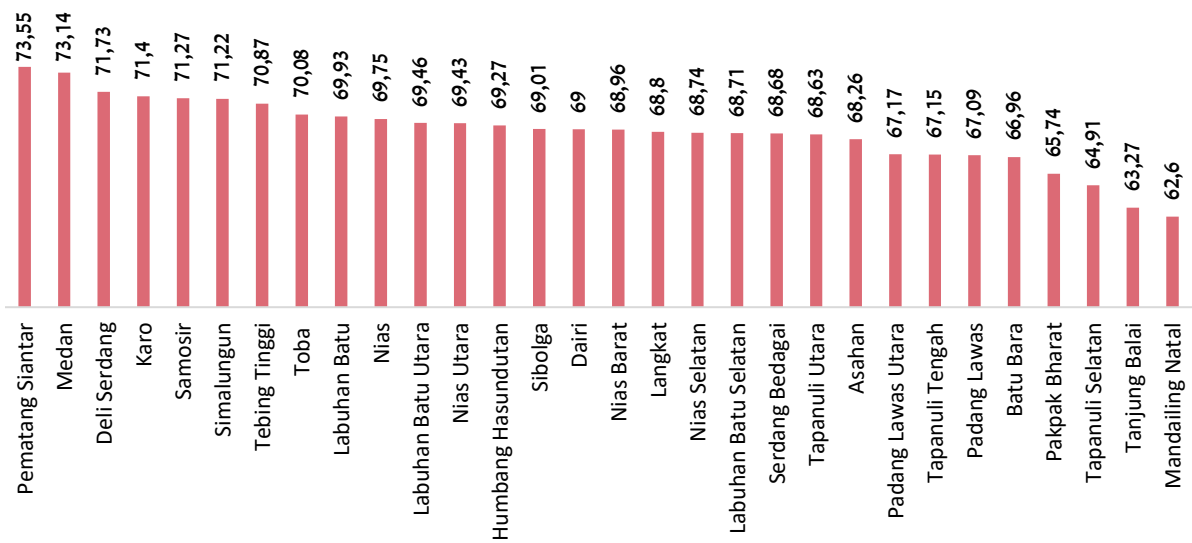
Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara pada tahun 2020 telah mencapai 69,10 tahun. Sementara UHH Nasional mencapai 71,47 tahun. UHH Indonesia mengalami perlambatan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Sumatera Utara masih berada di bawah nasional.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.27
Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020

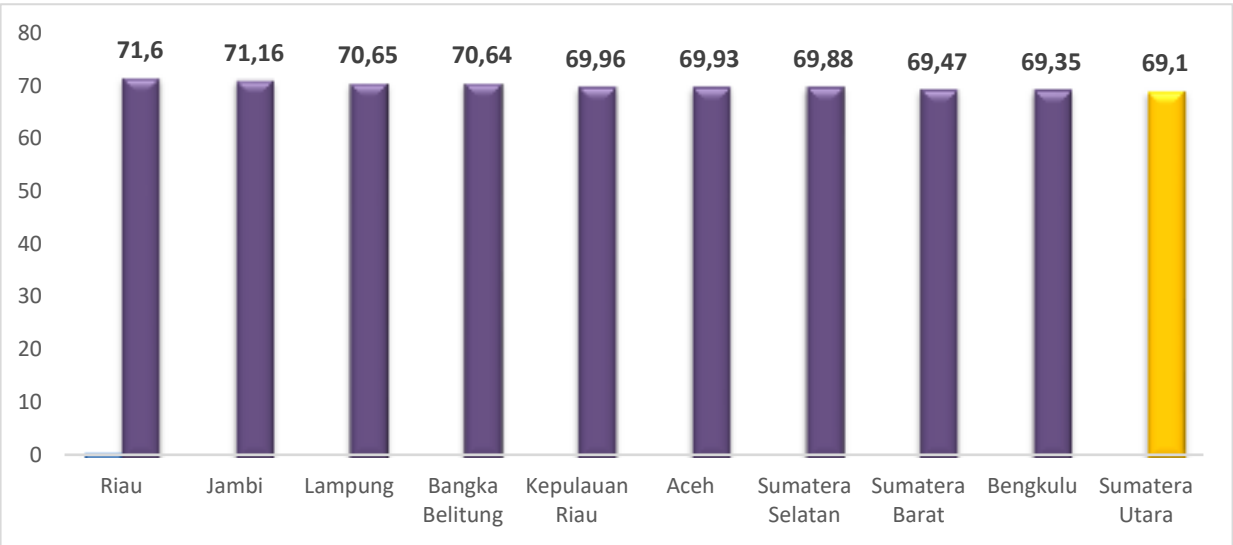
Jika dilihat dari perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota, maka capaian tertinggi ada di Kota Pematang Siantar yaitu sebesar 73.55 tahun kemudia kota Medan dan Kabupaten Deli Sedang masing-masing sebesar 73.14 dan 71.47 tahun, sementara Umur Harapan Hidup terendah ada di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 62.60 tahun, capaian Umur Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Grafik.2.28
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020

Jika dibandingkan dengan wilayah se Kepulauan Sumatera. Usia Harapan Hidup tertinggi ada di Provindi Riau dan Jambi, dan UHH terendah ada di Provinsi Sumatera Utara , capaian UHH wilayah se Sumatera dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Indonesia, 2020

Grafik.2.29
Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu Perangkat Daerah. Sampai dengan Tahun 2020, SDM yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara termasuk UPT berjumlah 888 orang, terdiri dari 303 orang laki-laki (34,12%) dan 585 orang perempuan (65,88%).

Tabel. 2.40
SDM Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No	Unit Kerja / UPT	Jumlah	Jenis Kelamin			
			L	(%)	P	(%)
1	Dinas Kesehatan	381	142	37,27	239	62,73
2	UPT.RS Khusus Mata	96	19	19,79	77	80,21
3	UPT RS. Khusus Paru	115	36	31,30	79	68,70
4	UPT. RS Kusta Lausimomo	83	27	32,53	56	67,47
5	UPT. RSU Indrapura	81	25	30,86	56	69,14
6	UPT. Laboratorium Kesehatan	71	24	33,80	47	66,20
7	UPT. Pelatihan Kesehatan	53	27	50,94	26	49,06
8	Dipekerjakan di luar Dinkes	8	3	37,50	5	62,50
	Jumlah	888	303	34,12	585	65,88

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2020

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Pada tahun 2020 Penduduk usia kerja sebanyak 10,7 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 68,67 persen atau 7,35 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 6,84 juta orang penduduk bekerja dan 508 ribu orang pengangguran.

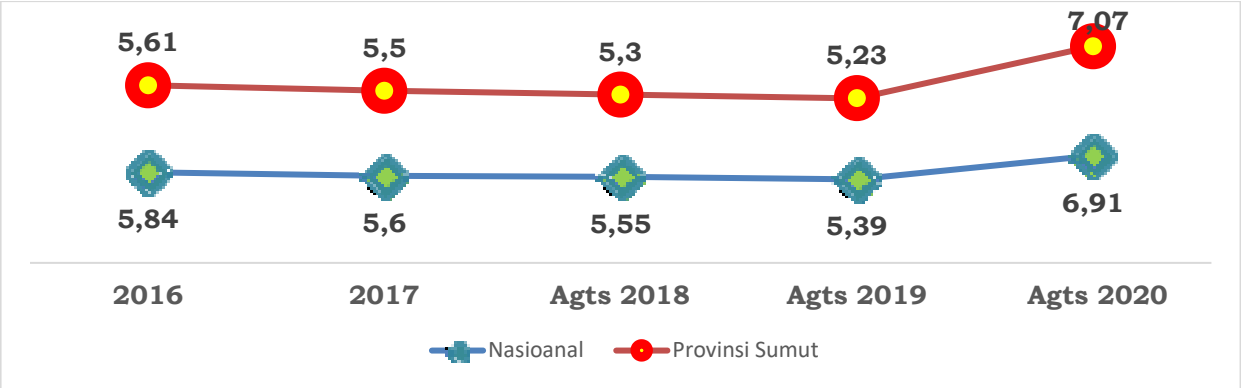
Tabel. 2.41
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2016-2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2016 (ribu Org)	Agustus 2017 (Ribu Org)	Agustus 2018 (Ribu Org)	Agustus 2019 (Ribu Org)	Agustus 2020 (Ribu Org)
Penduduk Usia Kerja	9.642	9.789	10.356	10.532	10.703
Angkatan Kerja	6.636	6.743	7.453	7.411	7.350
Bekerja	5.991	6.336	7.039	7.012	6.842
Bukan Angkatan Kerja	3.279	3.046	2.903	3.121	3.353
	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.84	5.60	5,55	5,39	6,91
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.99	68.88	71,97	70,37	68,67

Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatra Utara 2020

Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun menjadi 68,67 persen. Pada Agustus 2020, TPAK perempuan turun sebesar 0,65 persen. Sedangkan TPAK laki-laki juga turun sebesar 2,78 persen.

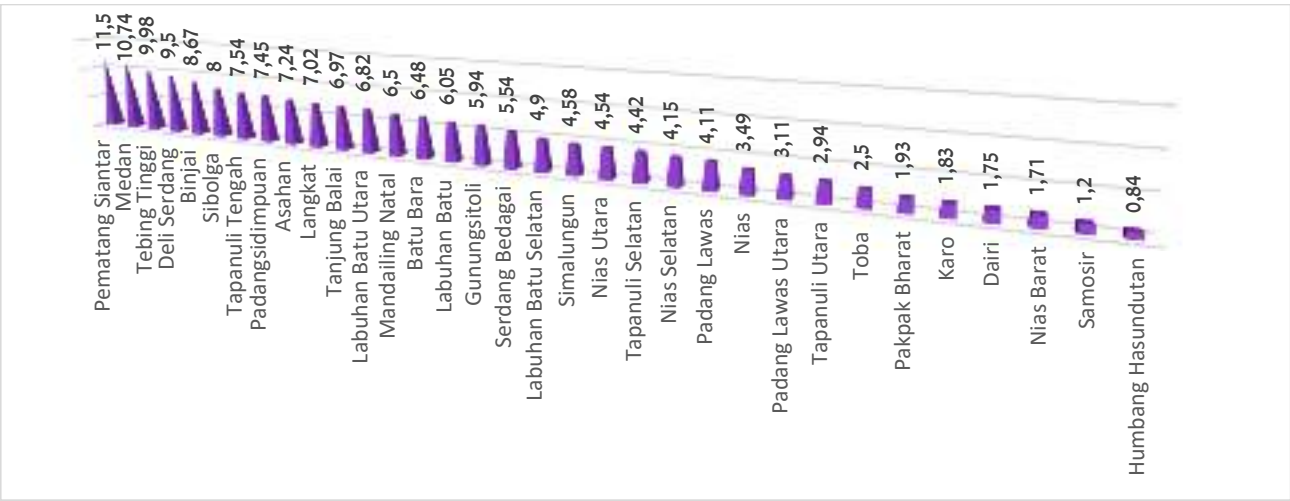
Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Agustus 2020 TPT mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 1,52 persen. Sementara di tingkat nasional sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen. TPT Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan Nasional.



Sumber : BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2020

Grafik.2.30
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2016-2020

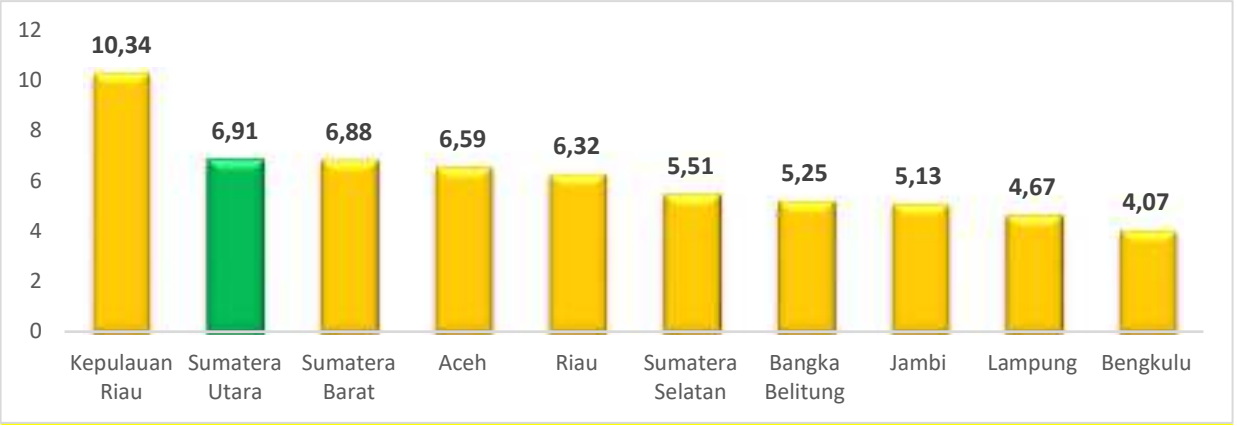
Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Pematangsiantar sebesar 11.5 persen, kemudian Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi, masing-masing sebesar 10,74 persen dan 9,98 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka terendah ada di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0.84 persen dan Kabupaten Samosir sebesar 1.2 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota dapat dilihat dibawah ini.



Grafik.2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Berdasarkan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Pulau Sumatera pada Tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-

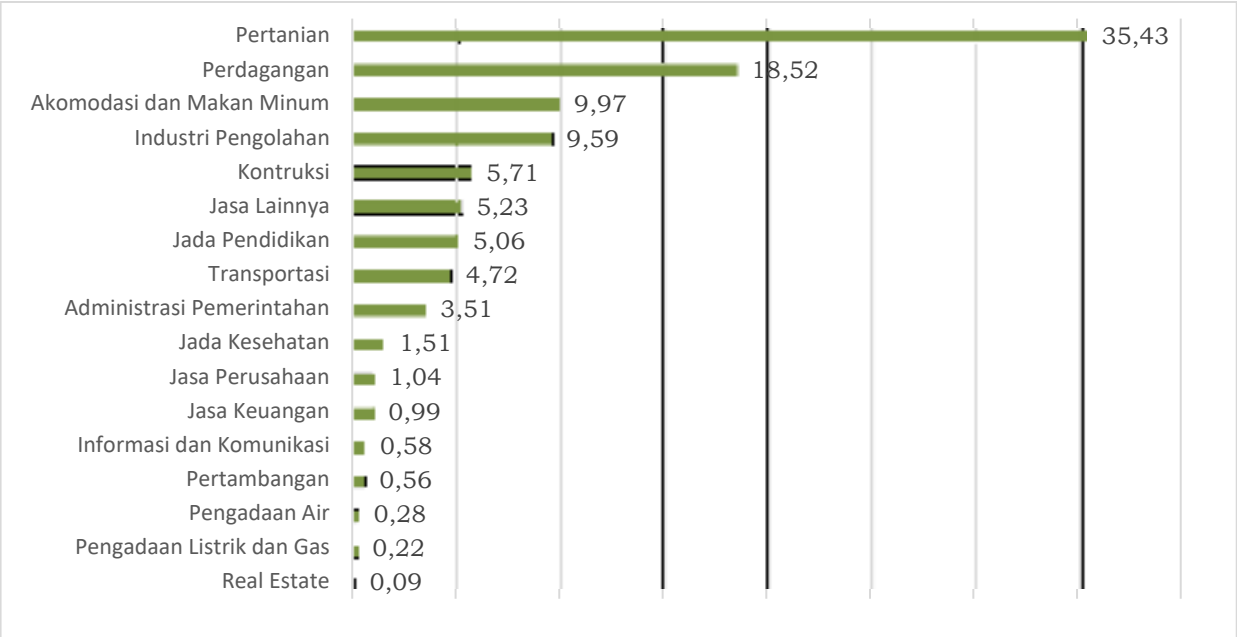
2 tertinggi dari 10 Provinsi se-Pulau Sumatera. Perbandingan Nilai TPT Provinsi se-Pulau Sumatera dapat terlihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatra Utara, Agustus 2020

Grafik.2.32
Perbandingan TPT Provinsi Se-Pulau Sumatera 2020

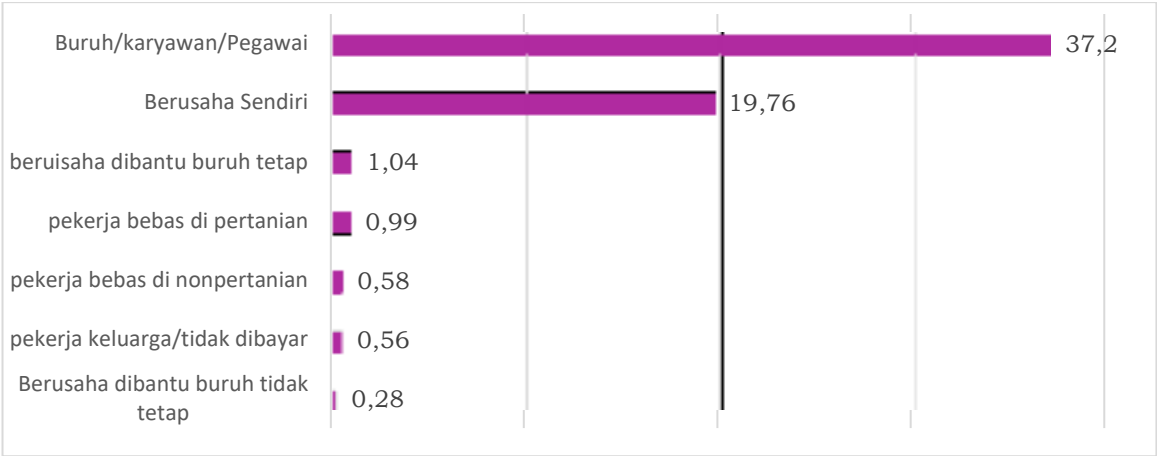
Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,43 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,52 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,59 persen.



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatra Utara, Agustus 2020

Grafik.2.33
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

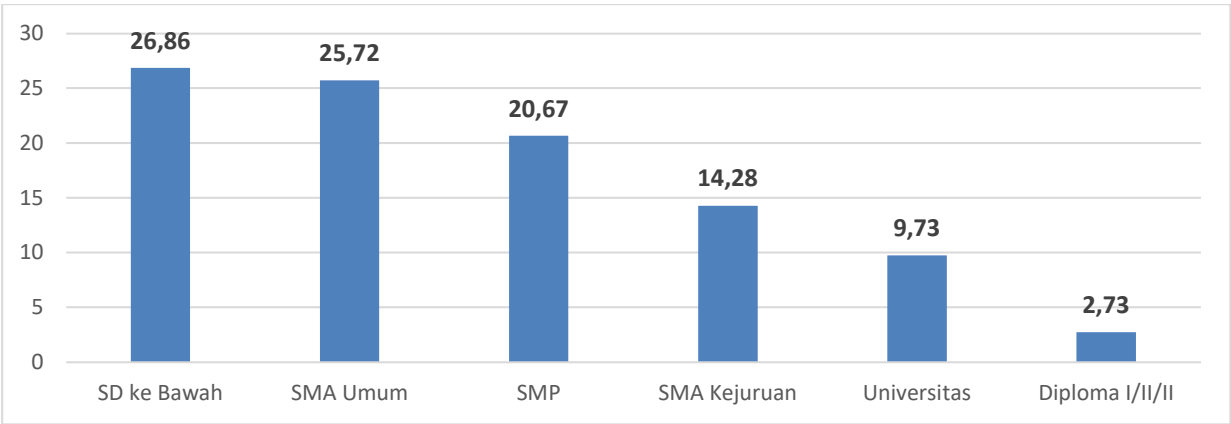
Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Sumatera Utara yaitu sebesar 37,2 persen.



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatera Utara, Agustus 2020

Grafik.2.34
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Saat ini, tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 26,86 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,46 persen pada Agustus 2020.



Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatera Utara, Agustus 2020

Grafik.2.35
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pandemi Covid 19 mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 mencapai 1,23 juta orang atau 11,51 persen. Secara total, jumlah laki laki yang terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 14,24 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 7,98 persen, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.42
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total (ribu orang)
	Laki-laki (ribu orang)	Perempuan (ribu orang)	Perkotaan (ribu orang)	Perdesaan (ribu orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengangguran ¹ Karena Covid-19	59	48	84	23	107
Bukan Angkatan Kerja (BAK) ² Karena Covid-19	13	26	27	13	39
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	36	28	50	14	64
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	601	419	697	324	1020
Total	710	521	858	374	1230
Penduduk Usia Kerja (PUK)	5.305	5.398	6.024	4.680	10.703
Persentase terhadap PUK	13,39	9,66	14,24	7,98	11,51

Sumber : Berita Resmi Statistik Sumatera Utara, 2020

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. PENDIDIKAN

Kondisi Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari capain Indikator sebagai berikut :

Tabel. 2.43
Capaian Indikator Pendidikan Provsu Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	NA	90,20	96,43	97.00	97,00
Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	NA	51.70	51.70	53.20	57,40
Persentase Guru SMK bersertifikasi	NA	33.90	38.20	39.90	43,40
Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	NA	91.90	92.7	94.20	94,72

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu 2020

Selain indikator kinerja Pendidikan di atas, kondisi Pendidikan juga dipengaruhi oleh Angka Putus Sekolah, semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Angka Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah siswa Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 tertinggi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 3.342 dan jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 677, dan terendah ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 3.

Tabel. 2.44
Jumlah Siswa Putus Sekolah Dan Angka Putus Sekolah
Per Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Siswa Putus				Angka Putus Sekolah			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kab. Deli Serdang	548	427	144	628	0,27	0,56	0,44	1,50
2	Kab. Langkat	93	272	106	200	0,09	0,70	0,55	1,06
3	Kab. Karo	56	44	29	72	0,12	0,21	0,24	1,57
4	Kab. Simalungun	162	117	172	136	0,16	0,31	0,89	1,10
5	Kab. Dairi	77	53	23	78	0,18	0,26	0,24	1,16
6	Kab. Asahan	106	118	86	133	0,13	0,42	0,59	1,09
7	Kab. Labuhan Batu	142	34	49	60	0,25	0,19	0,38	0,69
8	Kab. Tapanuli Utara	46	43	39	61	0,10	0,19	0,32	0,86
9	Kab. Tapanuli Tengah	130	63	20	84	0,32	0,35	0,23	1,36
10	Kab. Tapanuli Selatan	35	22	33	30	0,09	0,19	0,71	0,74
11	Kab. Nias	108	81	7	31	0,42	0,77	0,21	0,88
12	Kab. Mandailing Natal	73	83	43	64	0,11	0,51	0,58	1,03
13	Kab. Toba Samosir	35	16	14	127	0,13	0,12	0,18	2,15
14	Kab. Nias Selatan	677	299	175	214	1,37	1,43	1,39	2,74
15	Kab. Pakpak Bharat	3	9	8	3	0,05	0,30	0,44	0,32
16	Kab. Humbang Hasudutan	18	14	13	26	0,06	0,09	0,17	0,51
17	Kab. Samosir	35	14	7	6	0,18	0,15	0,13	0,25
18	Kab. Serdang Bedagai	75	96	100	193	0,10	0,39	0,83	1,67
19	Kab. Batubara	82	94	56	105	0,16	0,58	0,78	1,39
20	Kab. Padang Lawas utara	120	23	14	15	0,31	0,37	0,34	0,96
21	Kab. Padang Lawas	42	20	20	15	0,11	0,32	0,62	0,37
22	Kab. Labuhan Batu Utara	58	47	38	138	0,12	0,36	0,51	2,18
23	Kab. Labuhan Batu Selatan	68	16	2	12	0,18	0,15	0,04	0,26
24	Kab. Nias Barat	50	30	16	13	0,35	0,45	0,45	0,59
25	Kab. Nias Utara	74	54	23	21	0,34	0,52	0,58	0,52
26	Kota Medan	286	362	224	425	0,11	0,31	0,30	0,75
27	Kota Binjai	17	21	36	110	0,05	0,14	0,35	1,19
28	Kota Tebing Tinggi	8	26	31	39	0,04	0,26	0,49	0,65
29	Kota Pematangsiantar	36	16	9	81	0,12	0,09	0,06	0,67
30	Kota Tanjung Balai	16	68	23	5	0,09	0,78	0,36	0,18
31	Kota Sibolga	27	18	6	27	0,18	0,30	0,14	0,79
32	Kota Padang Sidempuan	16	34	8	103	0,06	0,33	0,10	1,57
33	Kota Gunungsitoli	23	17	9	32	0,12	0,19	0,21	0,62
Sumatera Utara		3.342	2.651	1.583	3.287	0,19	0,40	0,43	1,10

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2020

Tabel. 2.45
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk
Usia Sekolah Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	SMA/MA/SMK					
1.	Jumlah murid usia 16-18 tahun	689.795	747.016	747.016	747.016	747.016
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	794.800	796.300	796.300	796.300	796.300

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI

Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah dapat dilihat dari Rasio Jumlah Guru dan siswa jenjang pendidikan menengah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut

Tabel. 2.46
Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	SMA/MA/SMK					
1.	Jumlah murid usia 16-18 tahun	689.795	747.016	747.016	747.016	747.016
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	794.800	796.300	796.300	796.300	796.300

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2020

Sementara Rasio Jumlah Guru dan siswa jenjang pendidikan menengah dapat dilihat bawah:

Tabel. 2.47
Rasio Jumlah Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	SMA			SMK		
		Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa
1	Kab. Asahan	794	14.814	18,66	698	12.294	17,61
2	Kab. Batubara	401	7.324	18,26	365	7.653	20,97
3	Kab. Dairi	526	9.965	18,94	399	7.133	17,88
4	Kab. Deli Serdang	1.865	32.653	17,51	2.068	42.728	20,66
5	Kab. Humbang Hasudutan	457	7.982	17,47	377	5.333	14,15
6	Kab. Karo	714	12.294	17,22	361	4.526	12,54
7	Kab. Labuhan Batu	674	12.403	18,40	513	9.165	17,87
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	336	5.472	16,29	247	4.938	19,99
9	Kab. Labuhan Batu Utara	442	7.523	17,02	384	6.595	17,17
10	Kab. Langkat	1.067	19.423	18,20	1.055	19.950	18,91
11	Kab. Mandailing Natal	661	7.174	10,85	522	6.500	12,45
12	Kab. Nias	183	3.537	19,33	256	3.620	14,14
13	Kab. Nias Barat	246	3.699	15,04	210	2.173	10,35
14	Kab. Nias Selatan	849	12.223	14,40	707	7.402	10,47
15	Kab. Nias Utara	270	4.285	15,87	372	4.204	11,30
16	Kab. Padang Lawas	268	3.336	12,45	313	4.083	13,04
17	Kab. Padang Lawas Utara	273	4.145	15,18	140	1.541	11,01
18	Kab. Pakpak Bharat	124	1.920	15,48	69	852	12,35
19	Kab. Samosir	315	5.515	17,51	165	2.395	14,52
20	Kab. Serdang Bedagai	664	12.185	18,35	639	11.619	18,18
21	Kab. Simalungun	1.060	19.278	18,19	743	12.311	16,57
22	Kab. Tapanuli Selatan	305	4.518	14,81	371	4.153	11,19
23	Kab. Tapanuli Tengah	539	8.941	16,59	370	6.491	17,54

No	Kabupaten/Kota	SMA			SMK		
		Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa
24	Kab. Tapanuli Utara	715	12.478	17,45	489	7.185	14,69
25	Kab. Toba Samosir	444	7.686	17,31	426	5.828	13,68
26	Kota Binjai	714	10.024	14,04	533	9.318	17,48
27	Kota Gunungsitoli	274	4.588	16,74	371	5.189	13,99
28	Kota Medan	3.989	71.196	17,85	3.219	56.684	17,61
29	Kota Padang Sidempuan	551	7.563	13,73	490	6.420	13,10
30	Kota Pematangsiantar	874	15.489	17,72	769	12.112	15,75
31	Kota Sibolga	245	4.344	17,73	254	3.448	13,57
32	Kota Tanjung Balai	308	6.265	20,34	172	2.680	15,58
33	Kota Tebing Tinggi	364	6.356	17,46	415	6.019	14,50
	Provinsi Sumatera Utara	21.511	366.598	17,04	18.482	302.542	16,37

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2020

Tabel. 2.48
Kualifikasi Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	SMA							SMK						
		SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
1	Kab. Asahan	12	1	1	16		685	60	19	1	2	21	1	590	29
2	Kab. Batubara	9		1	8	1	359	20	11		1	10	4	343	13
3	Kab. Dairi	11		2	12		442	14	3	3		17	1	349	7
4	Kab. Deli Serdang	26			15	1	1.560	186	34	5		43	1	1.938	107
5	Kab. Humbang Hasudutan	13		1	12		380	14	6	2	1	13		294	15
6	Kab. Karo	13		1	15		505	22	5			14	3	274	13
7	Kab. Labuhan Batu	26		2	22		583	33	16		1	25		436	22
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	4					264	15	6	1		14	1	244	6
9	Kab. Labuhan Batu Utara	10			6		352	11	31		1	20		314	4
10	Kab. Langkat	25			17		829	39	54	1		25	1	921	29
11	Kab. Mandailing Natal	3			10		510	16	11			12		431	17
12	Kab. Nias	4		2	4		154	5	5			9		227	4
13	Kab. Nias Barat	5			4		209	4	1			5		180	4
14	Kab. Nias Selatan	16		4	29		753	20	13		4	41	3	587	22
15	Kab. Nias Utara	2			3		203	11	2		3	15	1	283	7
16	Kab. Padang Lawas	2	1		2	1	195	12	11	2		7	9	254	6
17	Kab. Padang Lawas utara	4			4		219	12				2	2	121	3
18	Kab. Pakpak Bharat	1				1	107	9	1			3		57	3
19	Kab. Samosir	7	1		5		230	9	3			4		140	4
20	Kab. Serdang Bedagai	15	1		8		558	41	24	3	2	29	2	605	26
21	Kab. Simalungun	12	1	2	22		863	59	25	4		42		717	27
22	Kab. Tapanuli Selatan	1			11		216	25	5	1	1	3	3	295	17
23	Kab. Tapanuli Tengah	13			9		399	32	5		1	10		298	17

No	Kabupaten/Kota	SMA							SMK						
		SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
24	Kab. Tapanuli Utara	25			17		829	39	54	1		25	1	921	29
25	Kab. Toba Samosir	10			8		343	39	9	2		32	2	358	14
26	Kota Binjai	19			7	4	528	77	15	2		12		520	15
27	Kota Gunungsitoli	4			3		237	17	7			14		281	14
28	Kota Medan	38	6		40	2	3.105	587	33	2	2	69	4	2.838	261
29	Kota Padang Sidempuan	4		1	11		417	30	5		2	13	2	407	13
30	Kota Pematangsiantar	6			11		646	61	10	1		36	1	609	29
31	Kota Sibolga	1			4	5	155	19		1		2	2	175	8
32	Kota Tanjung Balai	6			6		247	31	1			4	1	138	6
33	Kota Tebing Tinggi	4			2		292	24	15			12	5	330	24
Grand Total		332	12	17	331	15	17.115	1.577	398	33	21	597	49	15.956	797

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan DAPODIK Kemendikbud RI, 2020

Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan jenjang pendidikan menengah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.49
Jumlah Bangunan Gedung Sekolah Menengah dan Kondisi Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Kondisi Baik			Jumlah Bangunan Kondisi Rusak		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kab. Asahan	255	163	418	8	1	9
2	Kab. Batubara	69	34	103	0	5	5
3	Kab. Dairi	62	22	84	35	1	36
4	Kab. Deli Serdang	323	520	843	15	55	70
5	Kab. Humbang Hasudutan	124	7	131	6	7	13
6	Kab. Karo	87	94	181	16	1	17
7	Kab. Labuhan Batu	68	76	144	3	4	7
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	82	21	103	0	4	4
9	Kab. Labuhan Batu Utara	127	30	157	3	0	3
10	Kab. Langkat	207	132	339	27	7	34
11	Kab. Mandailing Natal	154	13	167	5	0	5
12	Kab. Nias	23	0	23	10	8	18
13	Kab. Nias Barat	18	0	18	52	1	53
14	Kab. Nias Selatan	73	18	91	43	19	62
15	Kab. Nias Utara	32	5	37	29	1	30
16	Kab. Padang Lawas	66	9	75	12	0	12
17	Kab. Padang Lawas Utara	61	0	61	0	0	0
18	Kab. Pakpak Bharat	34	0	34	4	0	4
19	Kab. Samosir	40	36	76	17	0	17
20	Kab. Serdang Bedagai	180	85	265	13	6	19
21	Kab. Simalungun	200	101	301	13	3	16
22	Kab. Tapanuli Selatan	48	3	51	11	2	13
23	Kab. Tapanuli Tengah	111	24	135	43	12	55
24	Kab. Tapanuli Utara	51	3	54	65	27	92
25	Kab. Toba Samosir	60	49	109	2	0	2
26	Kota Binjai	94	88	182	24	1	25
27	Kota Gunungsitoli	75	28	103	3	0	3

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Kondisi Baik			Jumlah Bangunan Kondisi Rusak		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
28	Kota Medan	388	1716	2104	8	35	43
29	Kota Padang Sidempuan	153	15	168	8	4	12
30	Kota Pematangsiantar	75	181	256	13	1	14
31	Kota Sibolga	41	34	75	14	0	14
32	Kota Tanjung Balai	101	47	148	0	0	0
33	Kota Tebing Tinggi	62	121	183	0	1	1
Jumlah Total		3.544	3.675	7.219	502	206	708

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2020

Jumlah Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Pendidikan Khusus menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.50
Jumlah Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SISWA
1	Kab. Deli Serdang	498
2	Kab. Langkat	197
3	Kab. Karo	106
4	Kab. Simalungun	39
5	Kab. Dairi	33
6	Kab. Asahan	141
7	Kab. Labuhan Batu	71
8	Kab. Tapanuli Utara	118
9	Kab. Tapanuli Tengah	34
10	Kab. Tapanuli Selatan	82
11	Kab. Mandailing Natal	123
12	Kab. Toba Samosir	59
13	Kab. Pakpak Bharat	32
14	Kab. Humbang Hasudutan	24
15	Kab. Serdang Bedagai	107
16	Kab. Batubara	131
17	Kab. Padang Lawas Utara	43
18	Kab. Labuhan Batu Utara	48
19	Kab. Nias Barat	16
20	Kota Medan	1257
21	Kota Binjai	400
22	Kota Tebing Tinggi	417
23	Kota Pematangsiantar	151
24	Kota Tanjung Balai	96
25	Kota Sibolga	63
26	Kota Padang Sidempuan	99
27	Kota Gunungsitoli	96
Provinsi Sumatera Utara		4.481

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2020

Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Pendidikan Khusus menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.51
Jumlah Guru Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PK-LK) Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH GURU
1	Asahan	7
2	Batubara	29
3	Deli Serdang	54
4	Karo	9
5	Labura	11
6	Madina	21
7	Paluta	13
8	Pak-pak Bharat	13
9	Sergei	20
10	Tapsel	17
11	Taput	21
12	Tobasa	8
13	Binjai	51
14	Gunungsitoli	7
15	Medan	244
16	P.Sidimpuan	17
17	P.Siantar	7
18	Tebing Tinggi	37
Provinsi Sumatera Utara		586

Sumber : PDSPK Kemdikbud, 2020

2. KESEHATAN

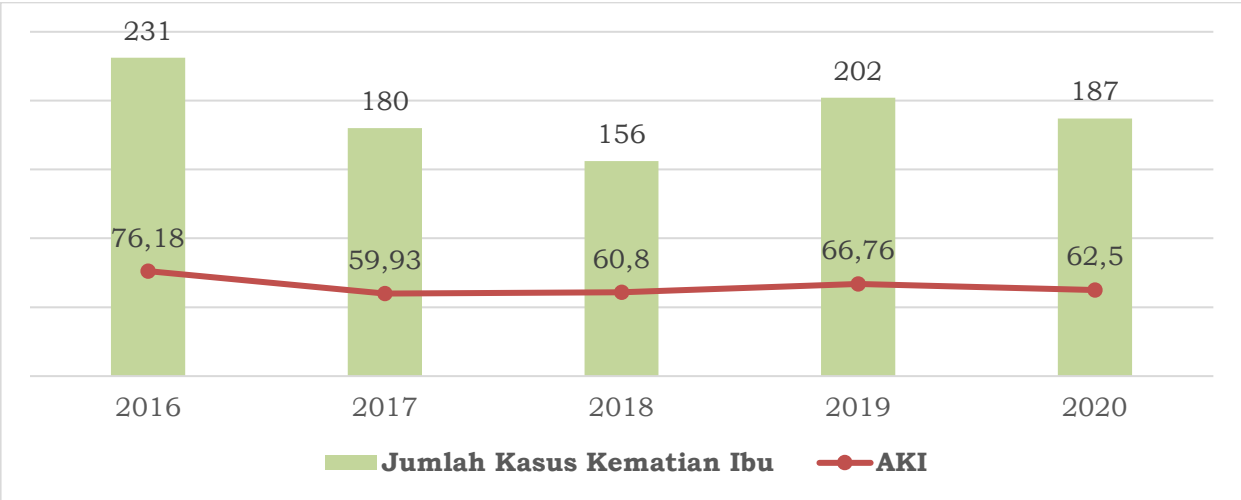
a. Dinas Kesehatan

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara salah satunya dapat dilihat dari capaian indikator Angka Kematia Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Morbiditas dan Stunting.

Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebanyak 187 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversikan maka Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah sebesar 62,50 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini menunjukkan penurunan AKI jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 66,76 per 100.000 Kelahiran Hidup (202 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup). Namun capaian ini belum dapat diturunkan dari capaian tahun 2018 yakni 60,8 per 100.000 Kelahiran Hidup (186 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup) dan tahun 2017 yakni 59,93 per 100.000 Kelahiran Hidup (180 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup). Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu 75,1 per 100.000

Kelahiran Hidup, maka Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sudah melampaui target.

Jumlah kasus kematian ibu di Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2016 kasus kematian ibu sebesar 231 kasus, namun pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu menurun menjadi 180 kasus, pada tahun 2018 jumlah kematian kembali meningkat menjadi 186 kasus, pada tahun 2019 meningkat menjadi 202 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 187 kasus, seperti terlihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.36
AKI dan Kasus Kematian Ibu
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 jika dilihat per kabupaten/kota seperti pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.37
Kasus Kematian Ibu per Kabupaten/Kota Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa hanya ada satu kabupaten yang yang tidak memiliki kasus kematian ibu di sepanjang tahun 2020 yaitu Kabupaten Samosir. Sedangkan untuk kasus kematian ibu tertinggi pada tahun 2020 adalah Kabupaten Asahan yakni 15 kasus, diikuti oleh Kabupaten Serdang Bedagai (14 kasus), Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang (masing-masing 12 Kasus), Kabupaten Langkat (11 Kasus) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (10 Kasus). Untuk kasus kematian ibu terendah tahun 2020 adalah Kabupaten Nias, Kota Sibolga dan Kota Kota Binjai, masing-masing 1 kasus.

Penyebab kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang terbesar adalah perdarahan sebanyak 67 kasus (35,83%), hipertensi sebanyak 51 kasus (27,27%), gangguan darah sebanyak 8 kasus (4,28%), infeksi sebanyak 3 kasus (1,60%), gangguan metabolik sebanyak 1 kasus (0,53%), dan sebab lain-lain (abortus, partus macet, emboli obstetri) mencapai 57 kasus (30,48%). 75 kasus (37,13%). Sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

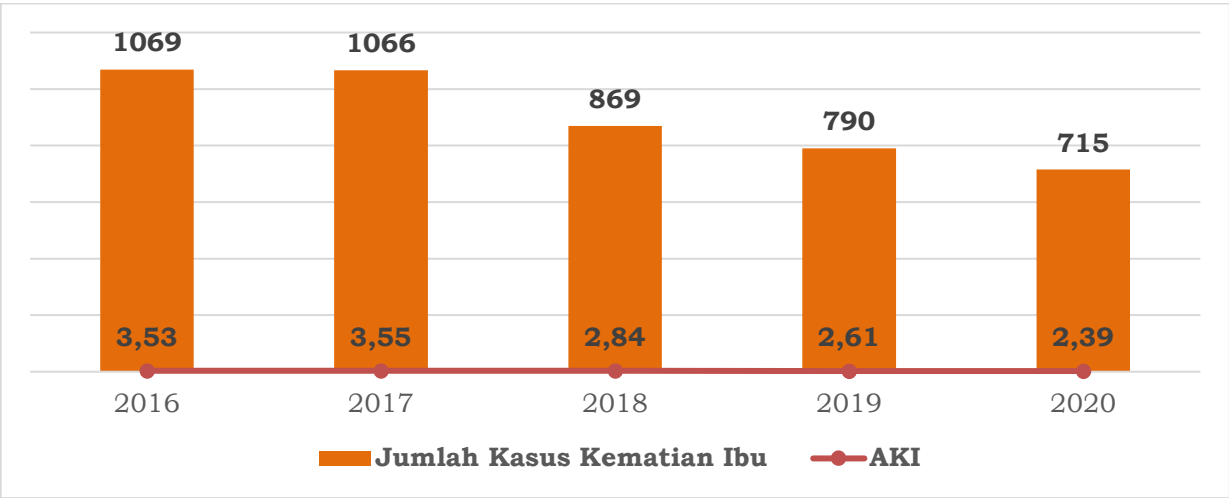


Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.38
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2020

Selain itu Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 715 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversikan maka Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah sebesar 2,39 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan penurunan AKB jika dibandingkan dengan AKB tahun 2019 yaitu 2,61 per 1.000 Kelahiran Hidup (790 dari 302.555 sasaran lahir hidup), 2018 yaitu 2,84 per 1.000 Kelahiran Hidup (869 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup), AKB tahun 2017 yaitu

3,55 per 1.000 Kelahiran Hidup (1.066 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup) dan AKB tahun 2016 yakni 3,53 per 1.000 Kelahiran Hidup (1.069 kasus dari 303.230 sasaran lahir hidup). Kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan trend penurunan seperti terlihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.39
AKB dan Kasus Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara

Grafik di atas menunjukkan adanya trend penurunan AKB dan jumlah kasus kematian bayi, dimana pada tahun 2016 jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.066 kasus (AKB : 3,55 per 1.000 KH), menurun menjadi 1.069 kasus pada tahun 2017, kemudian menurun tajam pada tahun 2018 yaitu 869 kasus (AKB : 2,84 per 1.000 KH), menurun menjadi 780 kasus (AKB : 2,61 per 1.000 KH) pada tahun 2019 dan menjadi 715 kasus (AKB : 2,39 per 1.000 KH) pada tahun 2020.

Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 jika dilihat per kabupaten/kota seperti pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.40
Kasus Kematian Bayi per Kabupaten/Kota Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian bayi terbanyak tahun 2020 adalah Kabupaten Langkat (57 kasus), diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Utara (50 kasus), Kabupaten Serdang Bedagai (48 kasus), Kabupaten Karo (44 kasus), Kabupaten Dairi (42 kasus) dan Kabupaten Deli Serdang (40 kasus). Sedangkan untuk kasus kematian bayi yang terendah tahun 2020 adalah Kabupaten Simalungun (1 kasus), Kota Binjai (2 kasus), Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kota Sibolga (masing-masing 7 kasus).

Penyebab kematian bayi tahun 2020 seperti terlihat pada grafik berikut ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.41
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2020

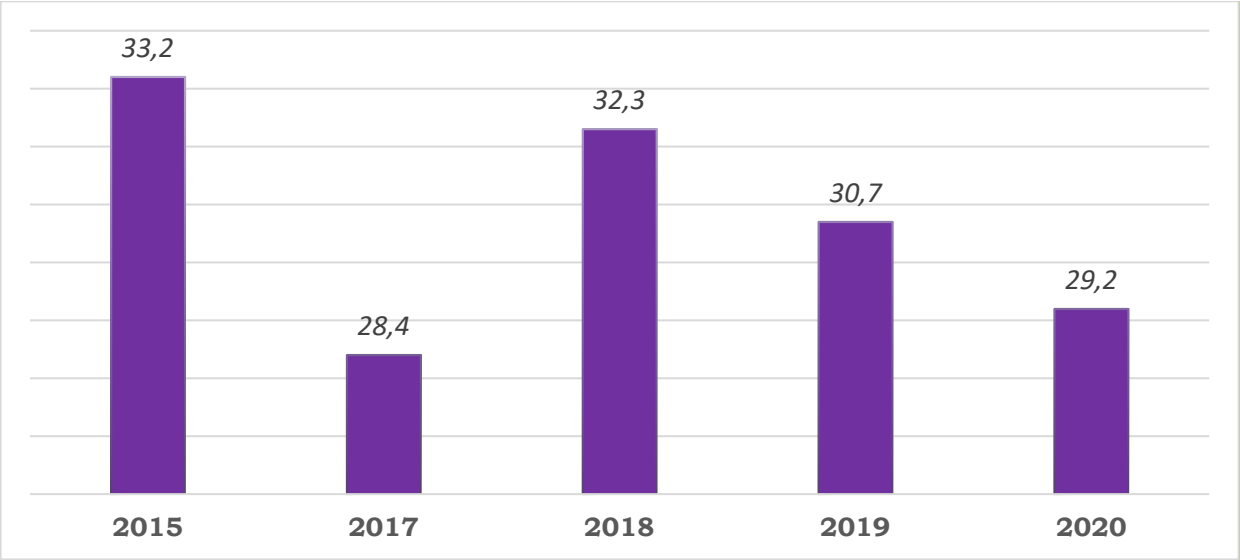
Grafik di atas menunjukkan bahwa penyebab kematian bayi yang terbesar di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah asfiksia sebanyak 178 kasus (24,90%), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 161 kasus (22,52%), Kelainan sebanyak 64 kasus (8,95%), Sepsis sebanyak 17 kasus (2,38%), Diare dan Saluran Cerna sebanyak 16 kasus (2,24%), Pneumonia sebanyak 11 kasus (1,54%), Tetanus sebanyak 6 kasus (0,84%), dan sebab lain-lain sebanyak 262 kasus (36,64%).

Kinerja Kesehatan provinsi Sumatera utara juga diukur dari ketercapaian stunting. Kejadian stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di Indonesia dan prevalensinya cenderung statis. Untuk Provinsi Sumatera Utara, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 juga menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara berhasil diturunkan sekitar 1,6% menjadi 30,7% pada tahun 2019 dari 32,3% hasil Riskesdas Tahun 2018. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 dimana prevalensi stunting pada balita di Sumatera Utara Tahun 2013 adalah 42,5%.

Namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid – 19 yang menyebabkan Survei Status Gizi Balita Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Status gizi balita diperoleh dari data e-PPGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis

Masyarakat). Dari hasil e-PPGM Tahun 2020, diketahui bahwa Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah sebesar 29,2%. Terjadi penurunan angka prevalensi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 30,7%. Meskipun terjadi penurunan capaian, namun Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Utara tahun 2019 masih berada di atas angka nasional yaitu 27,67% dan masih jauh dari besar prevalensi yang disarankan WHO (di bawah 20%). Namun bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu 30,50%, maka Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 telah mencapai target.

Kejadian Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 5 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.42
Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara

Dari grafik di atas dapat dilihat trend penurunan prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir yakni dari 32,3% pada tahun 2018 menjadi 39,2% pada tahun 2020.

Penyebaran Stunting per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.52
Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota, 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PREVALENSI STUNTING (%)
1.	Kab Nias	58,5
2.	Kab Mandailing Natal	25,5
3.	Kab Tapanuli Selatan	25,75
4.	Kab Tapanuli Tengah	40,5
5.	Kab Tapanuli Utara	33,4

NO	KABUPATEN/KOTA	PREVALENSI STUNTING (%)
6.	Kab Toba Samosir	26,8
7.	Kab Labuhan Batu	23,6
8.	Kab Asahan	22,01
9.	Kab Simalungun	25,45
10.	Kab Dairi	37,3
11.	Kab Karo	26,54
12.	Kab Deli Serdang	22,11
13.	Kab Langkat	28,7
14.	Kab Nias Selatan	42,14
15.	Kab Humbang Hasundutan	38,4
16.	Kab Pakpak Bharat	33,4
17.	Kab Samosir	21,58
18.	Kab Serdang Bedagai	23,3
19.	Kab Batu Bara	20,8
20.	Kab Padang Lawas Utara	44,63
21.	Kab Padang Lawas	39,8
22.	Kab Labuhan Batu Selatan	32,0
23.	Kab Labuhan Batu Utara	27,95
24.	Kab Nias Utara	40,45
25.	Kab Nias Barat	43,06
26.	Kota Sibolga	10,03
27.	Kota Tanjung Balai	23,2
28.	Kota Pematang Siantar	15,4
29.	Kota Tebing Tinggi	13,5
30.	Kota Medan	24,1
31.	Kota Binjai	15,3
32.	Kota Padangsidimpuan	26,2
33.	Kota Gunungsitoli	32,2
	SUMATERA UTARA	29,20

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat kabupaten/kota y ang Prevalensi Stunting pada Balita tertinggi adalah Kabupaten Nias (58,5%), Kabupaten Padang Lawas Utara (44,63%), Kabupaten Nias Barat (43,06%), Kabupaten Nias Selatan (42,14%), Kabupaten Tapanuli Tengah (40,5%), Kabupaten Nias Utara (40,45%), dan Kabupaten Padang Lawas (39,8%). Prevalensi Stunting pada Balita terendah dan di bawah 20% sesuai yang disarankan oleh WHO adalah Kota Sibolga (10,03%), Kota Tebing Tinggi (13,5%), Kota Binjai (15,3%) dan Kota Pematang Siantar (15,4%).

Pada tahun 2020 ditetapkan 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebagai Lokasi Fokus (Lokus) Intervensi Penurunan Stunting sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Lokasi Fokus (Lokus) Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Adapun kabupaten/kota yang menjadi lokus intervensi stunting sampai tahun 2020 adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.53
Lokasi Fokus Intervensi Stunting
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

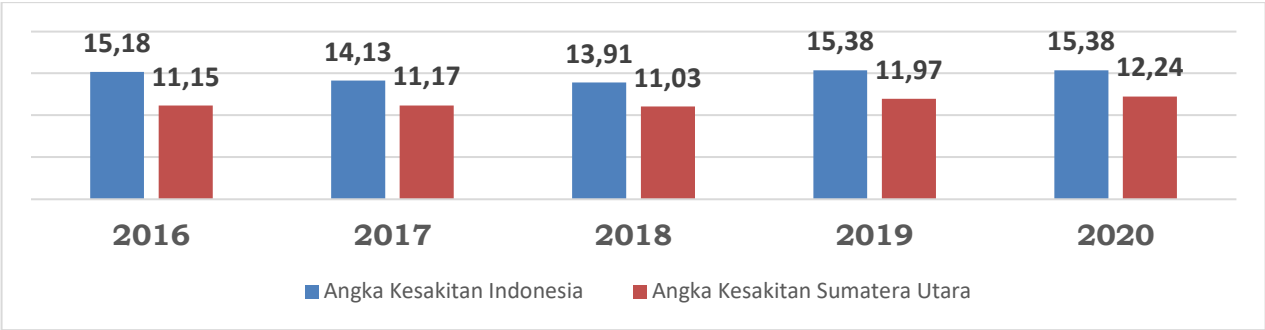
2018	2019	2020
1. Langkat	1. Langkat	1. Langkat
2. Padang Lawas	2. Padang Lawas	2. Padang Lawas
3. Gunung Sitoli	3. Gunung Sitoli	3. Gunung Sitoli
4. Nias Utara	4. Nias Utara	4. Nias Utara
	5. Simalungun	5. Simalungun
		6. Mandailing natal
		7. Nias
		8. Pakpak Bharat
		9. Dairi
		10. Nias Selatan
		11. Nias Barat
		12. Padang Lawas Utara
		13. Tapanuli Tengah
		14. Deli Serdang
		15. Medan

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 penambahan daerah lokus intervensi stunting di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten MAndailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

Selanjutnya Saat ini, Provinsi Sumatera Utara masih dihadapkan pada beban ganda penyakit “*triple burden of diseases*”, dimana penyakit-penyakit infeksi yang belum mampu dituntaskan dan muncul kembali (*reemerging*), di pihak lain penyakit tidak menular sudah menunjukkan eksistensinya ditambah dengan munculnya penyakit-penyakit menular baru (*new-emerging diseases*) dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, seperti yang sedang dihadapi yakni Covid – 19. Sampai akhir Desember 2020, sebanyak 18.233 orang di Provinsi Sumatera Utara terkonfirmasi positif Covid – 19 dan sebanyak 681 orang meninggal dunia artinya CFR/Case Fatality Rate/tingkat kematian akibat Covid – 19 sebesar 3,7%. Pandemi Covid – 19 ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan manusia tetapi juga sendi-sendi perekonomian dan kehidupan lainnya.

Angka Kesakitan (*Morbiditas*) di Sumatera Utara adalah 11,84% pada tahun 2016 sebesar 11,17% pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 11,03% pada tahun 2018, namun tahun 2019 meningkat menjadi 11,97% dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 12,24%, seperti terlihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Grafik.2.43
Angka Kesakitan (*Morbiditas*) di Indonesia
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2020, angka kesakitan di Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah angka nasional. Selain itu kondisi *morbiditas* per Kabupaten/Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.54
Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kab/Kota	Angka Kesakita (%)
1.	Nias	12,89
2.	Mandailing Natal	13,48
3.	Tapanuli Selatan	7,88
4.	Tapanuli Tengah	11,93
5.	Tapanuli Utara	8,80
6.	Toba Samosir	9,81
7.	Labuhan Batu	9,82
8.	Asahan	11,86
9.	Simalungun	10,73
10.	Dairi	9,48
11.	Karo	12,73
12.	Deli Serdang	12,98
13.	Langkat	14,62
14.	Nias Selatan	14,23
15.	Humbang Hasundutan	6,22
16.	Pakpak Bharat	9,39
17.	Samosir	9,52
18.	Serdang Bedagai	16,98
19.	Batubara	20,13
20.	Padang Lawas Utara	12,59
21.	Padang Lawas	12,34
22.	Labuhan Batu Selatan	13,24
23.	Labuhan Batu Utara	19,02
24.	Nias Utara	14,47
25.	Nias Barat	10,20
26.	Sibolga	18,85
27.	Tanjung Balai	16,61
28.	Pematang Siantar	11,33
29.	Tebing Tinggi	14,78
30.	Medan	8,58
31.	Binjai	8,23
32.	Padang Sidempuan	14,19
33.	Gunung Sitoli	16,50
SUMATERA UTARA		12,24

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kesakitan tertinggi dan bearada di atas angka nasional adalah Kabupaten Batubara (20,13%), Kabupaten Labuhanbatu Utara (19,02%), Kota Sibolga (18,85%), Kabupaten Serdang Bedagai (16,98%), Kota Tanjung Balai (16,61%) dan Kota Gunung Sitoli (16,50%). Sedangkan angka kesakitan terendah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan (6,22%), Kabupaten Tapanuli Selatan (7,88%), Kota Binjai (8,23%), Kota Medan (8,58%) dan Kabupaten Tapanuli Utara (8,80%).

Untuk kondisi penyakit terbesar tahun 2020 di fasilitas kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.55
10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di FKTP
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

No.	Nama Penyakit	Jumlah Kasus
1.	Dyspepsia/Dispepsia	462.152
2.	Acute upper respiratory infection, unspecified/ISPA	359.396
3.	Acute nasopharyngitis [common cold]/Influenza	315.447
4.	Essential (primary) hypertension/Hipertensi	259.787
5.	Fever, unspecified/Demam	248.667
6.	Cough/Batuk	202.178
7.	Myalgia/Gangguan pada Otot	153.082
8.	Headache/Sakit Kepala	150.479
9.	Gastritis, unspecified/Tukak Lambung/Maag	127.778
10.	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin/Diare dan Gastoenteritis	126.310

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu, 2020

b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Capaian Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera utara dapat dilihat dari capaian indikator dibawah ini :

Tabel. 2.56
Capaian Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi
Sumatera Utara 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	92.92	92,92	98.12	73,85	68,34
2	Rata-rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa	66.36	66,36	66,36	70,59	79,83

Sumber : Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provsu, 2020

Jika dilihat dari capaian diatas terjadi penurunan *Bed Occupancy Rate* (BOR) dari tahun 2019 ke tahun 2020, kecenderungan penurunan pemanfaatan perawatan di Rumah Sakit Jiwa selain disebabkan karena menjadi Target Capaian Renstra RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem yang menurunkan persentase BOR untuk mencapai BOR Ideal 80%, juga disebabkan adanya terkait upaya RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem dalam penanganan Covid 19 dengan mengurangi kepadatan/kapasitas pasien dalam setiap ruangan rawat inap.

Penurunan Kelas RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem terjadi dikarenakan perubahan standarisasi Rumah Sakit Khusus yang merujuk kepada Peraturan yang baru dari Kementerian Kesehatan, salah satunya bahwa Rumah Sakit Jiwa mesti memiliki sejumlah Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan professional serta Ketersediaan sarana prasarana serta alat Kesehatan yang sesuai dengan standarisasi baru. Karena tidak tersedia sejumlah Dokter Spesialis tertentu di Rumah Sakit Jiwa, sarana prasarana dan ketersediaan alat Kesehatan yang belum memenuhi standar, maka menyebabkan Rumah Sakit Jiwa turun Kelas Rumah Sakit dari kelas A menjadi kelas B. Dengan turunnya Kelas tersebut, mengakibatkan aturan BPJS menjadikan Rumah Sakit Jiwa sebagai Rumah Sakit rujukan.kelas B, Hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pasien yang memanfaatkan fasilitas pelayanan Rumah Sakit Jiwa tersebut.

c. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Selain Rumah Sakit jiwa, Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai Rumah Sakit Umum Haji. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD.

Bila dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit yaitu tingkat pemakaian sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan indikator pemanfaatan tempat tidur (*BOR; bed ocoupancy rate*) di rumah sakit di Sumatera Utara masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 60%-80%. Capaian Pelayanan Rumah Sakit Haji dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.57
Capaian Indikator Rumah Sakit Haji Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Haji		58%	49%	46%	28%
2.	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji		5 hari	5 hari	4 hari	4 hari
3.	Bed Turn Over (BTO) 40-50 Rumah Sakit Haji		43 kali	36 kali	38 kali	23 kali
4.	Turn Over Interval (TOI) Rumah Sakit Haji		4 hari	5 hari	5 hari	3 Hari

Sumber : Rumah Sakit Haji Medan Provsu 2020

Capaian Rumah Sakit Haji Medan terhadap *Bed Occupancy Rate* (BOR) pada tahun 2020 sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan Rumah Sakit Haji Medan ini sangat kurang. Sedangkan target *Length Of Stay* (LOS) Rumah Sakit Haji pada tahun 2020 adalah 4 hari. LOS menurut DepKes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan rawat inap yang tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama dengan interpretasi BOR dan TOI. Selain tu capaian TOI juga menrun Ini menunjukkan bahwa sepinya penggunaan tempat tidur sebagai salah satu fasilitas Rumah Sakit Haji Medan sebagai pelayanan Kesehatan.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. PEKERJAAN UMUM

Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Kontruksi

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi kemantapan jalan Provinsi menurun menjadi 82,27 persen, sementara persentase jembatan dalam kondisi baik meingkat pada tahun 2020 sebesar 84.06 persen. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli meningkat ditahun 2020 sebesar 10,88 persen. Hal ini disebabkan adanya skema kerjasama yang dilakukan dengan badan wilayah jasa konstruksi provinsi Aceh dan pihak swasta sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga ahli konstruksi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan. capaian Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Kontruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.58
Kondisi Jalan, Jembatan dan Tenaga Kerja Kontruksi
Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	80.93	84.31	81,17	82,19	75,02
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	NA	76,34	81,88	83,71	84.06
3.	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	NA	NA	2,65	10,71	10,88

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provsu, 2020

Survey kondisi jalan sebesar 82,27 persen diperoleh pada tahun 2020 dengan menggunakan metode International Roughness Index (IRI) dengan menggunakan alat NAASRA (National Association of Australian State Road (Asosiasi Nasional Otoritas Jalan Negara Bagian Australia) yang sudah dilakukan sejak tahun 2014-2019. Terjadi perubahan capaian indicator kinerja penanganan jalan Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi mantap pada tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan metode RCS (Road Condition Survey) dengan parameter SDI (Surface Distress Indeks) menghasilkan capaian 75,02 persen, hal ini diakibatkan adanya arahan dari Kementerian PUPR di tahun 2020 untuk menggunakan metode tersebut mengingat secara substansi metode RCS (Road Condition Survey) lebih detail dan akurat dalam menghitung jumlah retak, jumlah dan ukuran lubang tetapi menggunakan waktu yang lebih lambat. Sedangkan dengan menggunakan metode IRI (International Roughness Index) dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang dipasang alat NASSRA (National Association of Australian State Road (Asosiasi Nasional Otoritas Jalan Negara Bagian Australia) dengan keunggulan hasil yang lebih cepat. Dengan adanya perbedaan hasil yang diperoleh tersebut bukan terjadi penurunan kualitas melainkan hanya perbedaan metode survey.

b. Irigasi dan Air Baku

Daerah Irigasi Permukaan di Provinsi Sumatera terdiri dari 76 Daerah Irigasi (D.I) seluas 86.999 ha, dan Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) terdiri dari 14 Daerah Irigasi Rawa seluas 26.846 Ha. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengkajian kembali terhadap Daerah Irigasi di Provinsi Sumatera Utara, baik yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Hasil kajian tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan luasan Daerah Irigasi. Beberapa Daerah Irigasi kewenangan Provinsi luasannya sudah lebih dari 3000 Ha, akan beralih menjadi kewenangan Pusat

yang dalam hal ini berada dibawah pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-II. Sebagian daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Utara telah mengalami pengurangan luas kurang dari 1000 Ha, akibat terjadinya alih fungsi menjadi area bukan pertanian atau penggunaan lainnya, sehingga akan beralih kewenangan penanganannya kepada Kabupaten/Kota. Sebaliknya beberapa Daerah Irigasi yang berada pada daerah lintas Kabupaten/Kota yang selama ini tidak tertangani, akan beralih menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Perubahan luasan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi ini telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ditetapkan status kewenangannya.

Sementara itu Penyediaan Air Baku di Provinsi Sumatera Utara hingga 2019 tidak ada embung baru yang dibangun hanya terbatas pada rehabilitasi embung yang sudah ada. Tidak tercapainya target pembangunan embung untuk penyediaan air baku disebabkan kesulitan kabupaten/kota dalam penyediaan lahan.

Capaian Indikator Irigasi dan Air Baru dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.59
Indikator Irigasi dan Air Baku 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	87,01	88,07	88,51	76,94	76,95
2	Cakupan Akses Minum Perpipaan (%)	12,54	14,12	12,78	32,26	32,26
3	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR	72,43	72,56	74,60	76,96	76,96
4	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	NA	NA	NA	255.000	254.560
5	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	75.16	79,03	81,82	82,43	83,28
6	Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal (%)	46.75	51,00	53,48	53,48	57,45
7	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	280.000	320.000	325.000	32.000	35.000

Sumber : Dinas Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tata ruang Provsu, 2020

c. PENATAAN RUANG

Pasca ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, penyelenggaraan penataan ruang daerah di Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara terkait sasaran bidang penataan ruang adalah terwujudnya

tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang serasi baik dengan RTRW Kabupaten/Kota maupun dengan kepentingan pembangunan sektoral Provinsi Sumatera Utara bidang tata ruang diamanatkan untuk mewujudkan keserasian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga kemudian rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor.

Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang, dan efektivitas penerapan serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Capaian Indikator Penatan Ruang Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.60
Capaian Indikator Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	NA	82	70	70	50
2.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	NA	60	73	50	55

Sumber : Dinas Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang Provsu, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa:

1. Sehubungan dengan indikator tersedianya Perda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditargetkan pada 2019 belum tercapai (Non Perda), hal ini dikarenakan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara bahwa dari 14 wilayah Kawasan Strategis Provinsi masih 10 wilayah yang sudah di susun Rencana Rinci Tata Ruangnya (materi teknis), sehingga masih ada 4 wilayah Kawasan Strategis Provinsi lagi yang belum di susun, hal ini sesuai dengan target RPJMD pada 2019 dan belum ada yang di Perdakan/Proses Perda.
2. Mengenai regulasi daerah tentang pengendalian dan pemanfaatan ruang dimana target RPJMD 2019 adalah menerbitkan 1 Pergub hal ini belum dapat tercapai, dikarenakan produk arahan zonasi masih baru disusun pada tahun 2019 dan perencanaan legal drafting masih akan dilakukan pada tahun 2021.

Sehubungan dengan Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR wilayah Provinsi dan kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah masih sesuai dengan target yang ada pada RPJMD Tahun 2019 dalam hal ini masih stagnan, tidak ada perubahan secara signifikan.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.61
Capaian Indikator Perumahan Rakyat
dan Kawasan permukiman 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah Layak Huni (%)	NA	92,02	94,10	94,10	95,77
2	Pengurangan luas Permukiman Kumuh (Ha/tahun)	NA	218	311	88	28,40
3.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	NA	NA	2.531	3.491	482

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BPS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Rumah Layak huni Di Provinsi Sumatera Utara meningkat hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah yang direhabilitasi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pendataan rehabilitasi rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebanyak 649 Unit melalui berbagai kegiatan yang direncanakan di RKPD tahun 2019. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melaksanakan rehabilitasi rumah layak huni sebanyak 13.594 unit pada tahun 2019 di Provinsi Sumatera. Dengan demikian, pada tahun 2019 ada sebanyak 14.243 unit penambahan rumah layak huni di Provinsi Sumatera Utara (hasil dari upaya rehabilitasi rumah layak huni oleh pemerintah daerah dan pusat).

Selain itu, penanganan kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Utara juga meningkatkan pencapaian rasio rumah layak huni. Target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun lebih kurang 135 Ha. Pada tahun 2019 kegiatan

penanganan kawasan kumuh dilaksanakan di Medan Marelan, Medan Area, Medan Johor, Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat, Karo, Gunung Sitoli, Batu Bara, Asahan dengan luas Area tertangani adalah 88 Ha atau 65,17 % dari target 135 Ha. Pengurangan

Dalam rangka meningkatkan pencapaian rasio rumah layak huni ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas di perumahan baru masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa perumahan yang dilaksanakan pembangunan PSU tersebar di beberapa lokasi, Kab. Serdang Bedagai (2 lokasi, Kab. Deli Serdang (34 lokasi, Kab. Simalungun (1 lokasi), Kota Tanjung Balai (2 lokasi), Kab. Karo (1 lokasi) Kab. Tapanuli Tengah (3 lokasi). Pembangunan PSU tersebut telah membantu pembangunan sekitar 3.491 rumah MBR.

Dalam rangka pencapaian SPM penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana, telah dilakukan melalui Program Pengembangan Perumahan dalam rangka Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Mandailing Natal yang direlokasi, pada tahun 2019 dan 2020 telah dilakukan pembangunan sebanyak 26 unit dan 80 unit. Selain penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana, penyelenggaraan SPM bidang perumahan rakyat juga diselenggarakan melalui pendataan atau identifikasi sebaran rumah terdampak program provinsi, sehingga perlu direlokasi. Hal ini untuk mewujudkan pengembangan perumahan untuk mendukung program kegiatan prioritas maupun proyek strategis nasional dan provinsi di Sumatera Utara. Identifikasi rumah masyarakat untuk direlokasi juga menargetkan rumah-rumah yang berada di wilayah negatif list, hal ini ini untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana. Salah satu program kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara adalah pengembangan KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Strategis Kuala Tanjung di daerah Simalungun – Batu Bara – Asahan (Sibasa). Penyediaan perumahan bagi masyarakat baik untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan perumahan karena perkembangan wilayah maupun akibat terdampak program pembangunan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional yang ada di Sumatera Utara memiliki sasaran yaitu tersedianya perumahan sebagai bagian dari pengembangan KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Strategis Kuala Tanjung.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2020 meningkat sebesar 87,12 persen, Sementara itu penegakan Perda pada tahun 2019 sebesar 59 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 26,67 persen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kasus pelanggaran Perda. Capaian indikator Petugas LINMAS, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Penegakan PERDA dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.62
Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Belum ada pendataan	Belum ada pendataan	3.182	10.383	55.103
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	105	73	73	59	87,12
3.	Persentase Penegakan PERDA	25	33	33	59	26,67

Sumber : Satpol PP Provsu 2020

b. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.63
Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase LSM Aktif	NA	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Partisipasi Pemilih	Tidak ada Pemilu	Tidak ada Pemilu	63	79.91%	72,86%
3	Persentase Pertambahan Ormas	160	160	160	155% (31)	85 Ormas
4	Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik social	9	9	9	10	12
5	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	1753	1753	1753	161,5 % (2100)	36%

Sumber : Bakesbangpol Provsu 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif pada tahun 2020 sebesar 72,86, terjadi penurunan dari tahun 2019. hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menentukan hak pilihnya berkurang. Selain itu Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan menurun hingga 36 persen pada tahun 2020.

c. Penanggulangan Bencana

Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena : 1) Bencana adalah masalah yang kompleks yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan; 2) Kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh; 3) Pemaduan dan pengarustamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Indikator Kinerja Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.64
Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	33	33	33	16	16
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	3	3	6	20
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	2	2	2	6	3
4	Indeks Resiko Bencana	150	150	150	145	145

Sumber : BPBD Provinsi Sumatra Utara

6. SOSIAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah. Capaian Indikator Kinerja Bidang Sosial sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.65
Indikator Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	1.277	1.277	1.277	1.167	1.167
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	440	440	440	530	530
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	310	310	310	293	293

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Pant	320	320	320	285	285
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	2.000	2.000	2.000	2.000	NA

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pant jika dilihat dari data Tahun 2017 dan 2018 berkurang sebanyak 110 Orang pada Tahun 2019 dan 2020 serta telah dikembalikan ke daerah asal karena dianggap sudah produktif. Sementara Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pant dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Pant telah mencapai target RPJMD tahun 2019.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. TENAGA KERJA

Kondisi Tenaga Kerja di Provnsi Sumatera Utara dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang tertuang didalam RPJMD Provini Sumatera Utara. Capaian Indikator Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.66
Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	93,20	93,20	94,4	94,59	93,03
2	Angka Kesempatan Kerja (jiwa)	6.743.386	6.743.386	6.728.431	6.452.182	6.966.127
3	Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK)	21,56	21,56	21,78	21,95	9,61
4	Angka Penganggur Terbuka (jiwa)	377.288	377.288	396.027	383,088	508.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran di Sumatera Utara mencapai 508.000 orang pada Agustus 2020, meningkat sebanyak 124.912 orang dibandingkan dengan Agustus 2019 (y-o-y). Peningkatan jumlah pengangguran ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja dan pengaruh pandemi Covid-19.

Pada tabel diatas terlihat juga bahwa produktivitas tenaga kerja bruto mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sebesar Rp 21,59 jt/TK menjadi Rp 9,61 jt/TK.

Tabel. 2.67
Jumlah Tenaga Kerja Penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah Perusahaan (perusahaan)	24.479
2	Jumlah Tenaga Kerja WNI (orang)	1.227.106
3	Jumlah Tenaga Kerja WNA (orang)	1.521
4	Jumlah Penerima Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (orang)	3.042
5	Jumlah Penerima Jaminan Kematian (orang)	3.042
6	Jumlah Penerima Jaminan Hari Tua (orang)	3.042
7	Jumlah Penerima Jaminan Kesehatan (orang)	12.311

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan data jumlah penerima relaksasi iuran BPJS bermanfaat bagi pelaku usaha (Perusahaan) dan Pekerja diatas,pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara yang memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.227.106 orang berkewarganegaraan Indonesia dan sebanyak 1.521 orang berkewarganegaraan asing.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.68
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	10%	21%	30%	73%	98%
2	Persentase cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	30	30	45	97	94
3	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	26/100.000	26/100.000	17/100.000	5/100.000	5/100.000
4	Rasio kekerasan terhadap Anak	29/100.000	29/100.000	21/100.000	11/100.000	12/100.000

Sumber : Dinas PPPA 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data diatas perkembangan IPG sejak tahun 2017 menunjukkan perbaikan hingga pada tahun 2019 mncapai 90,71persen. Selaian itu dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan capaian Kabupaten/Kota layak anak, hingga tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki 14 Kabupaten/Kota layak anak.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu berhasil menaikkan capaian Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara, sejak tahun 2016 hingga 2019 telah mencapai 73 persen, namun pada tahun 2020 berdasarkan data dari evaluasi TW.4 capaiannya menurun menjadi 50 persen, hal ini banyak disebabkan OPD mengalami refocusing anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan.

Dalam mendukung perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, mengeluarkan indikator terkait dengan ketersediaan data gender dan anak yang *up to date* sejak tahun 2017 – 2019 dengan trend peningkatan setiap tahun, yang mana pada tahun 2019 telah tersedia sebanyak 63 persen data terpilah, gender dan anak, namun pada tahun 2020 Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang *up to date* mengalami penurunan menjadi 30 persen.

3. PANGAN

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Berdasarkan data menunjukkan nilai

Pola Pangan Harapan (PPH) di Sumatera Utara mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 83,77 poin dari Tahun 2019 sebesar 89,2 poin atau menurun sebesar 5,43 poin.

Sementara Produksi Daging hingga 2020 mencapai 218.083,49 ton Produksi Telur 470.179,22 ton dan Produksi Susu 5.150,72 ton.

Tabel. 2.69
Kondisi pangan di Sumatera Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,7	88,5	89,10	89,60	83,77
2	Produksi Daging (ton)	153.136,43	160.498,61	164.748,17	258.090,36	218.083,49
3	Produksi Telur (ton)	159.945,50	173.605,33	265.515,36	541.234,15	470.179,22
4	Produksi susu (ton)	776,16	1.402,56	1.843,20	3.489,84	5.150,72

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi daging dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun untuk tahun 2020 mengalami penurunan, untuk produksi telur pada tahun 2018-2019 melonjak tinggi dikarenakan perubahan metode pengumpulan data untuk produksi telur ayam ras yang awalnya berasal dari laporan dinas kab/kota yang menangani fungsi peternakan di kab/kota sekarang berasal dari Laporan Perunggasan Nasional yang diolah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

4. LINGKUNGAN HIDUP

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pada tahun 2020 realisasi IKLH Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,37 yang didukung oleh system data informasi lingkungan hidup dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada IKLH 2020 dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain itu dapat digunakan juga acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan

referensi ideal (Benchmark). Pada periode ini status mutu air yang digunakan adalah status mutu air kelas I Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang dipergunakan:

1. Luas tutupan hutan (*Forest cover index*) dan perubahan tutupan hutan (*Forest performance index*),
2. Kondisi tutupan tanah (*Soil condition index*). Indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan air limpasan,
3. Konservasi sepadan sungai/danau/pantai (*Water health index*).
4. Kondisi tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian) dan Kondisi habitat (*Land habitat index*). Tingkat fragmentasi hutan/habitat.
5. Untuk indeks kualitar air laut, akan dihitung mulai tahun 2021 dengan memperhatikan parameter yang dibutuhkan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup.

Nilai IKLH Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.70
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	IKA	75,43	80	77,50	78,8	80
2	IKU	79,20	87,32	85,59	86,6	89,30
3	IKTL	50,21	45,32	45,60	46,45	46,45
4	IKAL	NA	NA	NA	NA	NA
5	IKLH	66,47	68,34	67,17	68,2	69,37

Sumber : Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Utara
Catatan : 1. IKA (Indeks Kualitas Air) ; Indeks semakin tinggi, semakin baik
2. IKU (Indeks Kualitas Udara); Indeks semakin tinggi, semakin baik
3. IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan); Indeks semakin tinggi, semakin baik
4. IKAL (Indeks Kualitas Air Laut); Indeks semakin tinggi, semakin baik
5. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) ; Indeks semakin tinggi, semakin baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua indikator indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan baik dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara maupun indeks kualitas tutupan lahan. Pada tahun 2019 indeks kualitas air sebesar 78,8 dan mengalami peningkatan menjadi 80 pada tahun 2020, begitu juga indeks kualitas udara juga mengalami peningkatan

dari 86,60 pada tahun 2019 dan meningkat sebesar 89,30 pada tahun 2020. Adapun untuk indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2019 sebesar 46,45 dan pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan dan masih bertahan sebesar 46,45.

b. Timbulan Sampah

Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah daerah tidak terkecuali Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2020 yang mengamanatkan terget pengurangan sampah sebesar 22% di tahun 2020. Namun kenyataannya produksi sampah di Sumatera Utara per Februari 2020 mencapai 10.091 ton per hari atau 3,69 juta ton per tahun, tetapi yang terkelola di Sumatera Utara baru 11%. Pada 2019, Pemprov telah membangun satu unit Pusat Daur Ulang (PDU) di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang. PDU ini akan mengubah sampah menjadi kompos, biogas dan bahan bakar untuk produksi. Teknologi briket dan eco enzyme adalah salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik yang potensinya sangat besar. Karena, 60% sampah di Sumut adalah sampah organik yang harusnya dapat dimanfaatkan menjadi lebih bernilai atau lebih dikenal dengan konsep *circular economy*.

Tabel. 2.71
Data timbulan sampah di Sumatera Utara tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kabupaten Asahan	706,283	128,896,648	726,287	508	729,795	3,015	718,718	503.1	786,696	3,250
2	Kabupaten Batubara	400,803	58,517,238	414,301	290	416,493	1,721	409,091	286.4	371,231	1,534
3	Kabupaten Dairi	279,090	40,747,140	283,068	198	284,304	1,175	281,876	197.3	315,943	1,305
4	Kabupaten Deli Serdang	2,029,308	444,418,452	2,176,159	1,523	2,195,709	9,071	2,114,627	1,480.2	1,844,104	7,618
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	182,991	26,716,686	189,119	132	190,186	786	186,694	130.7	200,482	828
6	Kabupaten Karo	389,591	56,880,286	412,561	289	415,878	1,718	403,207	282.2	407,600	1,684
7	Kabupaten Labuhan Batu	462,191	67,479,886	490,466	343	494,178	2,042	478,593	335.0	503,229	2,079
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	313,884	45,827,064	336,113	235	338,982	1,400	326,825	228.8	323,308	1,336
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	351,097	51,260,162	361,995	253	363,816	1,503	357,691	250.4	394,018	1,628
10	Kabupaten Langkat	1,013,385	221,931,315	1,043,249	730	1,041,775	4,304	1,042,076	729.5	1,046,291	4,322
11	Kabupaten Mandailing Natal	430,894	62,910,524	444,858	311	447,287	1,848	439,505	307.7	487,324	2,013
12	Kabupaten Nias	136,115	19,872,790	143,095	100	138,771	592	142,110	99.5	154,215	637
13	Kabupaten Nias Barat	84,917	9,298,412	81,606	57	86,702	339	81,279	56.9	95,959	396
14	Kabupaten Nias Selatan	308,281	45,009,026	318,263	223	319,902	1,322	314,395	220.1	366,128	1,513
15	Kabupaten Nias Utara	133,897	19,548,962	137,207	96	137,967	570	136,090	95.3	151,258	625
16	Kabupaten Padang Lawas	258,003	37,668,438	278,404	195	281,239	1,162	269,799	188.9	262,059	1,083
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	252,589	36,877,994	270,294	189	272,713	1,127	262,895	184.0	268,367	1,109
18	Kabupaten Pakpak Bharat	45,516	4,984,002	48,591	34	48,935	202	47,183	33.0	54,304	224
19	Kabupaten Samosir	123,789	18,073,194	125,693	88	126,188	521	125,099	87.6	139,762	577
20	Kabupaten Serdang Bedagai	608,691	111,086,108	614,152	430	616,396	2,546	612,924	429.0	659,889	2,726

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Kabupaten Simalungun	849,405	155,016,413	864,390	605	867,922	3,586	859,228	601.5	1,034,443	4,274
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	275,098	40,164,308	280,586	196	281,931	1,165	278,587	195.0	311,492	1,287
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	350,017	51,102,482	373,615	262	376,667	1,556	363,705	254.6	363,823	1,503
24	Kabupaten Tapanuli Utara	293,399	42,836,254	300,583	210	301,789	1,247	297,806	208.5	317,670	1,312
25	Kabupaten Toba	179,704	26,236,784	182,780	128	183,712	759	181,790	127.3	212,374	877
26	Kota Binjai	264,687	38,644,302	275,068	193	276,597	1,143	270,926	189.6	287,743	1,189
27	Kota Gunung Sitoli	135,995	19,855,270	141,517	99	142,426	588	139,281	97.5	136,002	562
28	Kota Medan	2,210,624	484,126,656	2,269,588	1,589	2,279,894	9,419	2,247,425	1,573.2	2,512,880	10,381
29	Kota Padang Sidempuan	209,796	30,630,216	220,472	154	221,827	916	216,013	151.2	227,143	938
30	Kota Pematang Siantar	247,411	36,122,006	254,010	178	255,317	1,055	251,513	176.1	271,942	1,123
31	Kota Sibolga	86,519	9,473,831	87,313	61	87,626	362	87,090	61.0	93,049	384
32	Kota Tanjung Balai	167,012	24,383,752	174,049	122	175,223	724	171,187	119.8	176,935	731
33	Kota Tebing Tinggi	156,815	22,894,990	163,292	114	164,402	679	160,686	112.5	174,289	720
	Total	13,937,797	2,489,491,589	14,482,744	10,138	14,562,549	60,162	14,275,914	9,993	14,951,952	61,770

c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan Limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini.

Beberapa pelaku industri tidak menyadari, bahwa limbah yang dihasilkan termasuk dalam kategori limbah B3, sehingga limbah dibuang begitu saja ke sistem perairan tanpa adanya proses pengolahan. Pada dasarnya prinsip pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan atau konsentrat belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Untuk itu limbah B3 perlu dikelola antara lain melalui pengolahan limbah B3.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri belum memiliki pengelolaan secara khusus untuk limbah B3, sampai saat ini masih dikelola oleh swasta yang terfokus pada pengelolaan limbah B3 medis. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki Aplikasi Kinerja Pengelolaan limbah B3 Provinsi Sumatera Utara yaitu “Si Raja Limbah Sumut”.

Tabel. 2.72
Data Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

NO	KODE LIMBAH	NAMA LIMBAH	LIMBAH DIHASILKAN (TON)					RERATA (TON)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	A101a	Tetrakloroetilen		10.00				10.00
2	A102d	Aki/baterai bekas	104.95	4,079.58	3,182.66	331.54	159.71	1,571.69
3	A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (crocidolite) asbes coklat (amosite) asbes abu-abu (anthrophyllite)		0.00	0.38	1.64	22.22	6.06
4	A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (landfill) Limbah B3	0.07	0.15	0.06			0.10
5	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)		0.05	0.01		0.02	0.03
6	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	4.82	9.07	30.06	317.36	69.35	86.13
7	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	5.60	14.77	60.61	977.55	161.97	244.10
8	A108c	Natrium Hidroksida				11.94		11.94
9	A108d	Limbah terkontaminasi B3	2.68	167.54	2,370.81	306.30	99.73	589.41
10	A109c	Asam Suflat				0.16		0.16
11	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi			6.57	3.32	2.92	4.27
12	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar			3.43	300.13	114.79	139.45

NO	KODE LIMBAH	NAMA LIMBAH	LIMBAH DIHASILKAN (TON)					RERATA (TON)
			2016	2017	2018	2019	2020	
		sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a A101b sampai dengan A121b A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d						
13	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik		0.03	0.00	0.00		0.01
14	A112b	Toluena		19.68				19.68
15	A116b	Piridina		0.10	0.41	0.37	0.28	0.29
16	A117b	Benzena		9.60			59.20	34.40
17	A2216	alfaalfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida 1-metil-1-feniletil-			0.22			0.22
18	A2256	Metil iodida atau Metana, iodo-	0.02					0.02
19	A2073	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina N-metil-N-nitroso-				12.00		12.00
20	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis		48.00			81.48	64.74
21	A303-3	Absorben dan filter bekas				0.02	0.05	0.03
22	A303-6	Sludge IPAL			22.30			22.30
23	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan			2.44			2.44
24	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	0.98	7.42	7.97	22.07	17.77	11.24
25	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan			21.15	64.19		42.67
26	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi			4.65			4.65
27	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian polimer absorben fraksinasi.			0.83	1.66		1.25
28	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam		0.70		32.36		16.53
29	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi: 1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. Sludge tersebut termasuk yang dihasilka	531.67	5.20	518.47	2,000.21	354.30	681.97
30	A307-2	Residu dasar tanki	4.00	16.00	81.19	111.77	58.52	54.30
31	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air					4.74	4.74
32	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing		14.18	43.70	111.68	3.87	43.36
33	A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan			32.34	192.00		112.17
34	A316-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan			0.37			0.37
35	A318-4	Debu slag dan dross peleburan aki bekas					0.03	0.03
36	A322-1	Pelarut bekas (cleaning)		72.00	23.00			47.50
37	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning)	14.60					14.60
38	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing perakitan dan pemeliharaan			1.97			1.97

NO	KODE LIMBAH	NAMA LIMBAH	LIMBAH DIHASILKAN (TON)					RERATA (TON)
			2016	2017	2018	2019	2020	
39	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing perakitan dan pemeliharaan		78.02	35.44	23.48	4.93	35.47
40	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian			8.23	7.44	4.61	6.76
41	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik		0.50	1.66	0.01	0.07	0.56
42	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik			0.20			0.20
43	A326-4	Metal powder				22.69		22.69
44	A327-1	Larutan asam bekas		0.06				0.06
45	A328-2	Lampu fluoresen (Hg)				0.01		0.01
46	A329-2	Lampu fluoresen (Hg)				0.00	0.00	0.00
47	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi		4.50	33.80	383.84		140.71
48	A330-2	Residu proses produksi		144.11	335.33	26.58		168.67
49	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan		38.09	182.21	72.65	7.08	75.00
50	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan		7,138.03	29,000.04	3,025.96	203.35	9,841.84
51	A334-1	Asam kromat bekas			0.01			0.01
52	A334-3	Limbah degreasing yang mengandung pelarut					0.83	0.83
53	A335-1	Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan.					7.16	7.16
54	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis kedaluwarsa dan sisa			0.05			0.05
55	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	3.17	902.31	1,863.75	4,580.67	67,521.74	14,974.32
56	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa		0.03	0.49	4.14	2.04	1.68
57	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	0.04	10.47	45.78	38.44	15.05	21.96
58	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3			0.13	0.12	0.13	0.12
59	A337-5	Peralatan medis mengadung logam berat termasuk merkuri (Hg) kadmium (Cd) dan sejenisnya	17.07	0.00	0.34	0.00	0.60	3.60
60	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	0.36	70.39	359.69	90.68	41.08	112.44
61	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	0.01	8.94	49.35	41.45	3.34	20.62
62	A338-3	Residu sampel Limbah B3		0.83	3.32	2.84	1.07	2.01
63	A338-4	Sludge IPAL		1.99	65.81	29.15	1.08	24.51
64	A339-1	Larutan developer fixer dan bleach bekas		2.38	2.06	6.05	1.08	2.89
65	A340-2	Residu minyak emulsi sludge dan dasar tangki (DAF)			28.00			28.00
66	A342-2	Residu proses destilasi					20.88	20.88
67	A343-1	Glycerine pitch		597.01	3,311.11	5,591.13	5,751.84	3,812.77
68	A343-2	Residu filtrasi		986.36	1,676.64	2,480.44	1,835.18	1,744.65
69	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak			2.81	1.23	0.52	1.52
70	A347-1	Fly ash insinerator			275.99	69.45	95.57	147.00
71	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator		2.90			0.02	1.46
72	A348-2	Filter dan absorben bekas				0.09	0.17	0.13
73	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa		4.59	1.50	0.40		2.16
74	A351-2	Alkali pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang				0.20		0.20

NO	KODE LIMBAH	NAMA LIMBAH	LIMBAH DIHASILKAN (TON)					RERATA (TON)
			2016	2017	2018	2019	2020	
		terkontaminasi logam minyak gemuk.						
75	A351-3	Sludge brine			11.62			11.62
76	A352-1	Alkali pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam minyak gemuk.		1.49	4.64	133.88		46.67
77	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan			1.80	9.63	14.61	8.68
78	A355-1	Pelarut (cleaning degreasing)				0.28		0.28
79	A357-2	Tar sludge			72.63	134.38	160.44	122.48
80	B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 03 ppm (nol koma tiga parts per million)		0.05	0.19	0.62	0.04	0.23
81	B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysotile)		0.04	11.61	0.75	0.03	3.11
82	B103d	Lead scrap				1.25		1.25
83	B104d	Kemasan bekas B3	8.87	268.82	2,617.13	12,439.08	976.20	3,262.02
84	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik mesin gear lubrikasi insulasi heat transmission grit chambers separator dan/atau campurannya	61.31	2,741.24	31,155.87	6,874.86	2,832.40	8,733.13
85	B106d	Limbah resin atau penukar ion	0.38	4.16	173.79	134.07	247.42	111.96
86	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT) lampu TL printed circuit board (PCB) karet kawat (wire rubber)	0.53	16.62	71.71	76.82	31.58	39.45
87	B108d	Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri		67.36	285.14	366.52	258.69	244.43
88	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	4.05	102.36	843.42	217.12	117.77	256.94
89	B110D	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	1.66	293.63	928.54	995.85	253.37	494.61
90	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d				3.30	2.28	2.79
91	B301-3	Katalis bekas			27,243.61	27.48	19.16	9,096.75
92	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan		0.01			3.43	1.72
93	B301-6	Limbah iron sponge yang digunakan pada unit desulfurisasi	0.01					0.01
94	B301-7	Sludge IPAL				1.40	0.15	0.77
95	B304-2	Sludge IPAL		0.31	3.41	0.20	1.44	1.34
96	B305-1	Katalis bekas		0.40	2.72	7.35	0.35	2.70
97	B305-5	Sludge IPAL		19.03	43.15	454.74	224.12	185.26
98	B307-1	Katalis bekas		93.60	12.80		367.16	157.85
99	B306-4	Sludge IPAL			254.24	9.76		132.00
100	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d		302.43	331.06	117.25		250.25
101	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter			4.06	0.05		2.06
102	B309-1	Dross dari peleburan				4.97	4.53	4.75

NO	KODE LIMBAH	NAMA LIMBAH	LIMBAH DIHASILKAN (TON)					RERATA (TON)
			2016	2017	2018	2019	2020	
103	B309-3	Pasir foundry (sand foundry) dan debu cupola				4.00		4.00
104	B312-2	Ash dross dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder				0.24	6.85	3.55
105	B313-1	Anode scraps		2,803.00	2,625.37	1,673.00	1,741.57	2,210.73
106	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder			30.09	55.27	64.91	50.09
107	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder		1,949.32	4,986.47	4,667.20	5,062.42	4,166.35
108	B313-4	Katoda (spent pot lining)			9,280.00	4,915.20	3,740.57	5,978.59
109	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara		2,090.92	1,572.18	1,363.01	6,597.00	2,905.78
110	B313-7	Sludge dan filter cakes dari gas treatment		21.91				21.91
111	B313-8	Sludge dari IPAL		1,182.44	719.43	790.50	369.34	765.43
112	B314-1	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder		9.85	8.42	12.49		10.25
113	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara.				22.53		22.53
114	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya			4.02	6.93	12.40	7.78
115	B321-4	Kemasan bekas tinta	0.07	0.34	3.07	4.70	0.49	1.73
116	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa		0.00	0.07		0.01	0.03
117	B322-1	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya				1.54		1.54
118	B323-1	Sisa proses blasting		1.60	2.48	10.81	11.57	6.61
119	B323-2	Sludge painting			0.23	0.51		0.37
120	B324-1	Dross slag			0.01	0.00	14.84	4.95
121	B324-2	Filter bekas	0.00			0.46	0.32	0.26
122	B323-4	Scrap timah solder			16.00			16.00
123	B325-1	Filter bekas	0.26	0.02	0.08	0.11		0.12
124	B326-1	Baterai bekas baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan baterai kedaluwarsa			7.13	76.91	35.53	39.86
125	B326-3	Sludge IPAL				8.29	3.00	5.65
126	B327-1	Baterai bekas baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan baterai kedaluwarsa			0.17	1.01		0.59
127	B328-4	Printed circuit board (PCB)			1.08			1.08
128	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya		0.91	0.81	1.43	2.42	1.39
129	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil			1.38	13.48		7.43
130	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil				3.27		3.27
131	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d		0.01				0.01
132	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas		0.37	0.22	0.35	0.01	0.24
133	B331-1	Limbah fire assay seperti ceramic flux dan cuppel 2		49.32	71.37	64.38	44.55	57.40
134	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410			613.21	941.55	14.05	522.94
135	B333-3	Sludge IPAL			0.80			0.80

NO	KODE LIMBAH	NAMA LIMBAH	LIMBAH DIHASILKAN (TON)					RERATA (TON)
			2016	2017	2018	2019	2020	
136	B335-2	Sludge IPAL			0.00	7.49		3.74
137	B337-1	Kemasan produk farmasi	0.47		0.00	0.30	0.18	0.24
138	B337-2	Sludge IPAL			3.60		0.09	1.84
139	B339-2	Tinta tonner	0.05	0.04	0.26	0.58	0.23	0.23
140	B340-1	Filter dan absorban bekas	0.03	0.09	0.07	0.31		0.12
141	B342-1	Sludge minyak atau lemak	0.16	0.96	1.22	2.84	5.20	2.08
142	B343-1	Katalis bekas	0.25	364.10	1,240.01	1,446.97	398.82	690.03
143	B343-2	Sludge IPAL		429.13	1,394.66	1,899.47	2,089.26	1,453.13
144	B344-2	Sludge IPAL				0.00		0.00
145	B351-1	Lime mud		2,779.63	6,452.02	4,846.32	3,565.51	4,410.87
146	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.		928.60	1,070.55	956.65	506.01	865.45
147	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan			11.73			11.73
148	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking.		1,241.20	4,981.80	6,454.34	5,893.00	4,642.59
149	B353-1	Toner bekas	0.24	0.89	2.93	16.55	2.50	4.62
150	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton brick dan keramik yang mengandung B3	-		0.98			0.49
151	B354-2	Gelas plastik dan kayu yang terkontaminasi B3			3.51			3.51
152	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3		0.07	0.26	6.06		2.13
153	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos				0.26		0.26
154	B355-1	Limbah cat		0.65		2.00	2.11	1.59
155	B355-2	Baterai bekas	4.53	7.04	8.10	3.50	0.49	4.73
156	B402	Steel slag		3.97		6.00	0.41	3.46
157	B406	Mill scale		42.15	18.44		27.44	29.34
158	B409	Fly ash	625.48	29,287.46	17,160.11	2,535,000.10	345,900.97	585,594.82
159	B410	Bottom ash		142,435.24	36,012.29	38,572.72	77,699.82	73,680.02
160	B411	Sludge IPAL		5,623.85	5,639.42	5,206.54	2,107.25	4,644.27
161	B412	Dreg dan grits		5,296.66	7,265.74	8,057.80	4,682.01	6,325.55
162	B413	Spent bleaching earth	400.00	21,887.75	119,421.89	109,671.51	125,676.41	75,411.51
163	B416	Tailing			4,327,103	7,753,044	2,648,726	4,909,624.33
164	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal		0.40	28.46	143.00	153.10	81.24

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provsu

d. Penurunan Emisi GRK (TEqCO2)

Berikut adalah tabel kondisi Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co2Eq) di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2016 – 2020.

Tabel. 2.73
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton Co2Eq)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

Total Emisi GRK (Juta ton Co2Eq)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
	15,031	18,215	21,936	22,06	22,07

Sumber : <https://pep.pprk.bappenas.go.id>. data diolah



Grafik.2.44
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 22,07 Juta Ton Co2Eq dari target 64 Juta Ton Co2Eq dari masing-masing sektor sesuai Pergub 36 Tahun 2012. Tetapi masih diperlukan penanganan yang lebih optimal sehingga mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga mencapai target yang diharapkan.

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sampai dengan tahun 2020 Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di Provinsi Sumatera Uara terus mengalami peningkatan hingga mencapai 97,23 persen, angka ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.74
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	NA	85,98%	87,76%	94%	98,91%
2	Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun	60,58%	63,11%	68,02%	72%	78,63%
3	Cakupan Akte Perkawinan		4	8	12	12
4	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	2	17	17
5	Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan	-	4 OPD	20 OPD	30 OPD	32 OPD

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu 2020

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM. LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Lokus Prioritas KPPN yaitu: Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata di Kabupaten Toba Samosir; Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba di Kabupaten Samosir; Kawasan Perdesaan Pakpak Bharat di Kabupaten Pakpak Bharat (berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024).

NO	Provinsi	Kabupaten	Kawasan	Keterangan
1	Sumatera Utara	Pakpak Bharat	Kawasan Perdesaan Pakpak Bharat	Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
2	Sumatera Utara	Toba samosir	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata	Lokus Prioritas 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
3	Sumatera Utara	Pakpak Bharat	Kawasan Perdesaan Pakpak Bharat	Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian

Terlampir capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait perkembangan Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tertinggal, Berkembang dan Mandiri.

Capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.75
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	600	800	1000	3.4% (208)	3.4% (208)
2	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	78%	78%	82%	95%	-
3	Jumlah Bumdes berdasakan status					
	a. Bumdes Aktif	-	-	-	-	2215
	b. Bumdes Tidak Aktif	-	-	-	-	705
	c. Bumdes Dasar	-	-	-	-	1484
	d. Bumdes Tumbuh	-	-	-	-	1280
	e. Bumdes Berkembang	-	-	-	-	135
	f. Bumdes Maju	-	-	-	-	21

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Capaian indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.76
Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,6	2,9	2,82	3,04	3,07
2	Rata-rata Anak Per Keluarga	2,66	2,46	2,46	2,28	2,4
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	51,17	58,9	54	68.72	70,69
4	Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	NA	21,8	21,92	20.8	20,7
5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	20,07	24,65	18,41	23,3
6	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	21	10,7	11,54%	12.1	15,2
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,6	40,18	33.1%	39.21	25,03
8	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	-	56,88	57,77	57,11
9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	-	38,35%	71,23	72,31
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	2,9	50,20%	72,52	70,71

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 hampir semua target capaian mengalami peningkatan, ada dua indikator yang mengalami penurunan yaitu Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari 39.21 persen menjadi 25.03 persen dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB dari 75.52 persen menjadi 70.71 persen.

Tabel. 2.77
Capaian Akta Perceraian dan Akta Kematian Provinsi Sumatera Utara

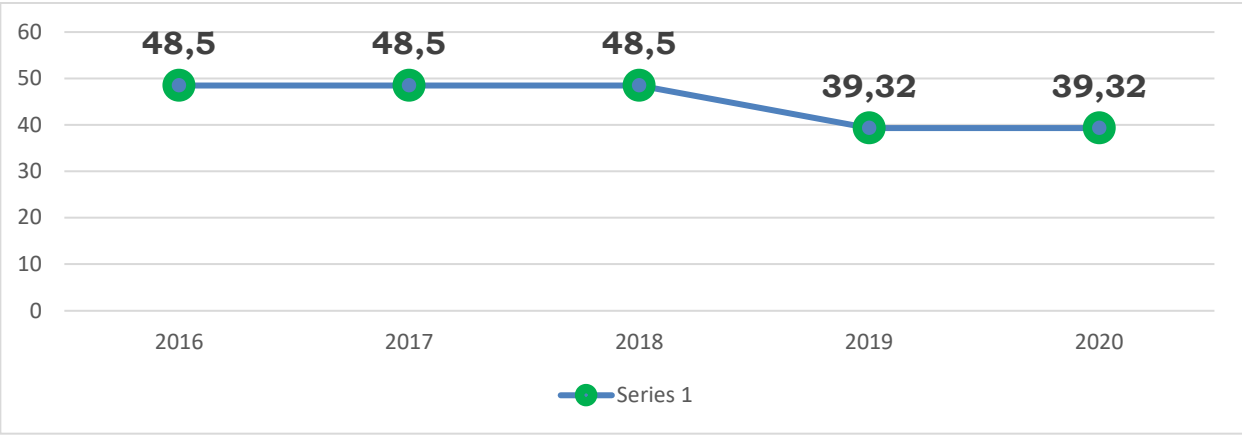
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,6	2,9	2,82	3,04	3,07
2	Rata-rata Anak Per Keluarga	2,66	2,46	2,46	2,28	2,4
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	51,17	58,9	54	68.72	70,69
4	Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	NA	21,8	21,92	20.8	20,7
5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	20,07	24,65	18,41	23,3
6	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	21	10,7	11,54%	12.1	15,2
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,6	40,18	33.1%	39.21	25,03
8	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	-	56,88	57,77	57,11

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	-	38,35%	71,23	72,31
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	2,9	50,20%	72,52	70,71
11	Akta kematian				142.331	167.125
12	Akta perceraian				33.112	47.063

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9. PERHUBUNGAN

Kondisi Perhubungan dapat dilihat dari capaian persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi sebagaimana pada tabel dibawah ini :



Sumber : Dinas Perhubungan Provsu, 2020

Grafik.2.45
Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan
Lalu Lintas pada Jalan Provinsi 2016-2020

Pada tahun 2020 ketersediaan fasilitas keselamatan jalan dapat dilihat dari Rambu Lalu Lintas sebesar 45,56 persen, guardrail 38,93 persen, delineator 44,07 persen, paku jalan 42,79 persen, marka jala 58,28 persen dan LPJU 6,30 persen.

Selain tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas Trateyek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) juga menjadi sasaran prioritas Dinas Perhubungan dimana pada saat ini kondisi Trayek masih belum maksimal di kabupaten labuhan Batu Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan kota Medan merupakan kota dengan jumlah trayek terbanyak. Rekapitulasi jumlah lintasan trayek antar kota dalam provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.80
Terminal Tipe B di Provinsi Sumatera Utara, 2020

No.	Terminal	Kab. /Kota	Keterangan
1	Kabanjahe	Karo	Sudah diserahkan
2	Sijambi	Tanjung Balai	Sudah diserahkan
3	Tanjung Berlingin	Langkat	Sudah diserahkan
4	Bahorok	Langkat	Sudah diserahkan
5	Gunung Tua	Paluta	Belum diserahkan
6	Sosorsaba Parapat	Simalungun	Dalam proses serah terimakan
7	Perdagangan	Simalungun	Belum diserahkan
8	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Belum diserahkan
9	Dolok Sanggul	Humbahas	Belum diserahkan
10	Ikan Paus Binjai	Binjai	Belum diserahkan
11	Tanjung Pura	Langkat	Belum diserahkan
12	Selesai	Langkat	Belum diserahkan
13	Pangururan	Samosir	Belum diserahkan
14	Sipirok	Tapsel	Belum diserahkan
15	Aek Kanopan	Labura	Belum diserahkan
16	Kota Pinang	Labusel	Belum diserahkan
17	Faekhu	Gunung Sitoli	Belum diserahkan
18	Gamo	Gunung Sitoli	Belum diserahkan

Sumber: Dinas Perhubungan Provsu 2020

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian clean government dan good government melalui e-government. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.81
Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumatera Utara	67%	67%	67%	89%	61%
2	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	80%	80%	80%	89%	89%
3	Rasio sistem pelayanan berbasis online	6%	6%	6%	20%	31%

Sumber : Dinas Kominfo Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Sumatera Utara mengalami penurunan capaian dari tahun 2018, hal ini disebabkan oleh adanya Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah Tidak aktif lagi di kabupaten/kota.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

meningkatkan nilai tambah, pembentukan KIM ini sebagai tindaklanjut atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010. Sumatera Utara saat ini telah memiliki jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 193 kelompok tersebar di 103 Kecamatan yang berada di 20 Kabupaten/kota.

Sedangkan untuk pencapaian indikator rasio sistem pelayanan berbasis online pada tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 31%. Adapun pencapaian ini diperoleh dari jumlah aplikasi yang terhubung dengan Smart Province pada 11 OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Biro Pembangunan dan Biro Hukum.

Indikator ini juga merupakan ukuran kinerja Pemprovsu dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait Sistem pemerintahan berbasis Elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Capaian Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.82
Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif	25,68	56.68	57,26	35,91	20,19
2	Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	2.855.847	2.857.124	2.858.131	2.860.248	2.145.788

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif pada tahun 2020 sebesar 20,1%, kondisi ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 35,91%. Kondisi ini diasumsikan disebabkan oleh masih lemahnya pengelolaan koperasi baik dari sisi permodalan, akses informasi pasar maupun kualitas SDM pengelola koperasi.

Usaha mikro kecil dan menengah pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan. Jika pada tahun 2019 jumlah UMKM tercatat sebesar 2.860.248, maka

pada tahun 2020 jumlah UMKM tercatat sebanyak 2.145.788. Permasalahan UMKM antara lain akses permodalan diharapkan akan dapat diatasi dengan pembentukan Jamkrida, akses UMKM ke *marketplace* dan berorientasi ekspor diharapkan akan terus meningkatkan kinerja UMKM Sumut.

12. PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Perkembangan Penanaman modal (Investasi) di Provinsi Sumatera Utara baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian Indikator Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.83
Indikator Penanaman Modal

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor PMDN (Proyek)	145	187	309	525	594
2	Jumlah Investor PMA (Proyek)	301	330	380	424	581
3	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	4,95	11,68	3,74	14,289	9,85
4	Jumlah Nilai Investasi PMA (RP. Triliun)	14,43	20,24	6,86	4,490	9,18
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	NA	1.12	31,92	18.50	20,11
6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA	NA	5.79	10,69	10.93	10,0
7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	15.57	135,8	136	24.34	66

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investor PMDN yang tumbuh sebesar 525 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 14,28 Triliun, dan investor PMA sebesar 424 proyek yang nilai investasi sebesar Rp. 4,49 Triliun. Tingginya pertumbuhan penanaman modal tersebut didorong oleh giatnya pengembangan bangunan dan non-bangunan dari pihak pemerintah maupun swasta.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tujuan pembangunan kepemudaan adalah menjadikan pemuda yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan kompetensi/ daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.84
Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	55%	55%	58%	62%	NA
2	Persentase Wirausaha Muda	17%	17%	16%	33%	2,36%
3	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	86	86	86	88	1,85%
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	88	88	89	90	1,55%
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	68	68	70	71	0,30

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu data diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya dimana pada tahun 2017 sebesar 55% dan pada tahun 2019 sebesar 62%. Kurangnya kaderisasi didalam internal organisasi merupakan salah satu penyebab kurang berkembangnya jumlah organisasi tersebut. Hal lain yang menjadi penghambat yaitu kurangnya minat pemuda serta masih terbatasnya kegiatan-kegiatan yang mendukung program kepemudaan untuk berperan aktif dalam pembentukan karakter.

Wirausaha muda harus mempunyai sikap yang mandiri, inovatif, kreatif dan berjiwa *leadership*, untuk dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan membantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Yang perlu menjadi perhatian adalah mengubah pola pikir pemuda untuk tidak takut berwirausaha dan bantuan permodalan yang diberikan kepada mereka. Persentase wirausaha muda pada tahun 2017 sebesar 17% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 33%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup jauh menjadi 2,36, penurunan ini terjadi karena kondisi Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Pandemi Covid dan refocusing anggaran, sehingga banya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran

Pembinaan cabang olahraga dan pembinaan atlet muda di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan pada tahun 2019. Untuk pembinaan cabang olahraga sebesar 88% di tahun 2019 dan telah memenuhi target RPJMD Tahun 2019, sedangkan pembinaan atlet muda sebesar 71 % di tahun 2019 dan juga telah memenuhi target RPJMD Tahun 2019 sebelum evaluasi. Namun pada tahun 2020 pembinaan atlit muda mengalami penurunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap untuk mendukung pembinaan dari semua cabang olahraga dan pembinaan atlet muda yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selain untuk mendapatkan bibit-bibit atlet muda berprestasi untuk siap bersaing dikancah nasional maupun internasional, tetapi juga persiapan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah PON XXI Tahun

2024. Namun pada tahun 2020 sebagian kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kondisi pandemi dan Refocussing anggaran.

Penyediaan, peningkatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas baik dan memadai yang disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan serta potensi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja khususnya di bidang pemuda dan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga terdiri dari segala bentuk jenis peralatan olahraga dan tempat berbentuk bangunan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan olahraga.

14. STATISTIK

Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam hal pelaksanaan Statistik Sektoral yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Untuk Capaian pelaksanaan statistik sektoral di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.85
Data Statistik sektoral yang terintegrasi

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Data Statistik sektoral	69%	69%	69%	69%	69%

Sumber : Diskominfo Provsu , 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan Data Statistik Sektoral pada tahun 2020 sebesar 69 % telah melampaui dari target yang ditetapkan, pencapaian ini diperoleh dari jumlah data sektoral pembangunan Sumatera Utara yang telah dihimpun dari 34 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

15. PERSANDIAN

Setelah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

- 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
- 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capain Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.86
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan
Pengamanan Informasi dan Persandian

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami Persandian dan Keamanan Informasi	10%	10%	10%	10%	10%

Sumber : Diskominfo Provsu , 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami persandian dan Keamanan Informasi pada tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 10 %. Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memahami dan menggunakan keamanan informasi sebanyak 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah antarlain Dinas Kominfo Provsu, BPKAD, Bappeda, BKD dan Inspektorat.

Indikator ini juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tindaklanjut atas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

16. KEBUDAYAAN

Provinsi Sumatera Utara terkenal dengan kekayaan budayanya. Didukung oleh berbagai jenis etnis yang tinggal di Sumatera Utara, khasanah budaya dan adat istidat yang ada sangat beragam. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengembangan dan kelestarian budaya yang telah ada.

Pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Sumatera Utara, dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya, dan Revitalisasi-Inventarisasi karya budaya. Capain Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.87
Indikator Kebudayaan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	15	20	20	55	6
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	4	8	8	10	2
3	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	220	608	608	608	NA

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah penyelenggaraan. Bahkan pada tahun 2019 ini jumlah penyelenggaraam Festival Seni dan Budaya telah terlaksana sebanyak 55 kali, melebihi yang ditargetkan dalam RPJMD sebelum perubahan untuk tahun 2019 yang berjumlah 21 kali. Namun sejak pandemi covid 19 dan refocussing anggaran pada tahun 200 pelaksanaan hanya diselenggarakan sebanyak 6 kali.

Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2019 ini antara lain : Markas Sisingamangaraja di Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan; Rumah adat Hutabolon di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir; Rumah adat Datuk Sei Besilam Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat; Situs Bau Basika di Kecamatan Balige kabupaten Toba Samosir; dan Rumah Adat Istana Niat Limalaras Kabupaten Batubara. Namun kondisi pada tahun 2020 mengalami penurunan.

17. PERPUSTAKAAN

Realisasi Pengunjung Perpustakaan hingga tahun 2020 (52.664 jiwa) menurun signifikan jika dibandingkan pada tahun 2019 (237.706 jiwa). Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kunjungan perpustakaan akibat mewabahnya *Coronavirus Disease* 19 atau Covid-19. Layanan perpustakaan dibatasi sesuai dengan protocol Kesehatan.

Jumlah Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara sebanyak 32 orang dan diluar Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu sebanyak 45

orang sehingga jumlah pustakawan di Provinsi Sumatera Utara adalah 77 Orang. Indeks Minat membaca Provinsi Sumatera, Capain Indikator perpustakaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.88
Indikator Perpustakaan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	84.683	84,785	129.562	237.706	52.664
2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	1.847	13,522	14,790	10.100	1.150
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,58	0,58%	0,61%	0,06%	0.01%
4	Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	7.057	9.547	9.547	2.864	106
5	Koleksi Judul Buku Perpustakaan	97.472	98.326	98.326	3.441	1.150
6	Indeks Minat Membaca	NA	NA	NA	1,98	0,44

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2020

18. KEARSIPAN

Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.89
Indikator Kearsipan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	NA	14	15	8,16	6,12
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	NA	NA	NA	65	50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 8.16 persen menurun tahun 2020 sebesar 6.12. Untuk tahun 2018 kondisi persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Sumatera Utara mencapai pada tahun 2020 mencapai 50 persen.

2.3.3. Urusan Pilihan

1. PARIWISATA

Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara, Lama Kunjungan Wisata (*Length of Stay*), Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Sumatera Utara, Laju pertumbuhan sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui empat pintu masuk pada Tahun 2020 mencapai 44.285 kunjungan, mengalami penurunan sebesar atau turun sebesar 82,89 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 258.822 kunjungan.

Lama tinggal atau lama kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diterima suatu daerah yang mengandalkan pendapatannya dari industri pariwisata. Semakin lama seseorang wisatawan tinggal di suatu Daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang akan dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Lama tinggal wisatawan (*length of Stay*) di Provinsi Sumatera Utara tercatat 1,15 hari pada tahun 2020, dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 6,36 persen pada tahun 2020.

Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan, sampai dengan tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara mencapai 10.270.955 kunjungan.

Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.90
Indikator Pariwisata

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	233.643	270.792	231,465	258.822	44.285
2	Lama Kunjungan Wisata	NA	1,57	1,51	1,38	1,15
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	2,38	2,39	7,38	7,48	6,36
4	LPE Pariwisata (Rata-rata Transportasi dan Pergudangan & Akomodasi Makan Minum)	6,31	7,34	6,84	7,34	-11,02
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	9.398.998	9.364.706	10.345.256	10.270.955	NA

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata
BRS BPS Sumatea Utara 2020

Dari data diatas penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara disebabkan oleh : Pembatasan pergerakan sosial akibat Pandemi Covid-19, aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Sarana-prasarana penunjang pariwisata yang perlu penanganan, jumlah dan keterampilan SDM pariwisata yang perlu ditingkatkan, serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat juga diperlukan adanya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. PERTANIAN

Peningkatan Produksi pangan terutama komoditi padi/beras merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang kebutuhan/konsumsi pokok masyarakatnya terutama adalah beras/nasi. Komoditi padi/beras ini mempunyai nilai yang sangat strategis karena ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya keamanan/ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Capaian Jumlah Produksi Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.91
Indikator Pertanian Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Tanaman Pangan					
1.1	Padi (ton GKG)	4.609.791	5.136.186	5.340.200	4.693.563	4.200.112
1.2	Jagung (ton pipilan kering)	1.557.463	1.741.258	1.692.704	1.960.424	1.965.444
1.3	Kedele (ton)	5.062	7.778	18.074	9.627	4.003
2.	Produktivitas Tanaman Pangan					
2.1	Padi (ton/Ha)	5,21	5,20	4,74	4,66	5,10
2.2	Jagung (ton/Ha)	6,16	6,19	5,72	6,14	6,12
2.3	Kedele (ton/ha)	1,28	1,30	0,70	1,73	1,56
3	Produksi Tanaman Holtikultura					
3.1	Bawang Merah (ton)	13.368	16.103	16.337	18.072	29.222
3.2	Cabe (ton)	152.630	159.131	155.835	154.008	193.862
3.3	Sayur-sayuran (ton)	956.197	1.001.024	986.031	1.130.462	1.270.084
3.3	Buah - buahan (ton)	1.143.362	1.219.288	1.188.030	1.107.154	1.249.380
4	Produktivitas Tanaman Holtikultura					
4.1	1. Bawang Merah (ton)	8,69	7,70	7,84	8,05	9,55
4.2	2. Cabe (ton)	10,56	9,70	9,84	9,61	10,48

Sumber : Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura, 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa produksi tanaman pangan di Sumatera Utara khususnya padi mengalami penurunan dari 4.693.563 ton gabah kering giling pada tahun 2019 menjadi hanya sebesar 4.200.112 ton gabah kering giling, hal ini terjadi karena adanya penurunan luas lahan pertanian dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pertanian. Selain padi, kedelai juga belum dapat memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara, hal ini terjadi karena kondisi lahan yang belum mendukung dan stabilitas harga yang belum terjamin.

Untuk kebutuhan tanaman hortikultura seperti bawang merah, buah-buahan, cabe, sayuran secara trend masih memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara, tetapi untuk bawang putih masih mengalami kekurangan sehingga masih memerlukan impor dari daerah lain.

Selain indikator diatas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumatera Utara (Sumut) masih terus melakukan verifikasi terhadap data luas lahan baku sawah yang ada di Sumut. Pada tahun 2020 tercatat 368.830 hektare lahan pertanian di daerah tersebut. Luas itu berbeda dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Potensi Baku Lahan Sawah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.92
Potensi Baku Lahan Sawah

No	Kab/Kota	2017	2018		2019		2020
		SP Lahan BPS	ATR/BPN	Surat Gubernur	ATR/BPN	SP Lahan BPS	Kab/Kota
1	Nias	7.558	4.858	.120	5.903,8	6.070,9	6.070,9
2	Mandailing Natal	22.053	11.564	22.053	11.581,0	22.053,0	22.053,0
3	Tapanuli Selatan	17.817	10.995	18.096	12.377,3	13.924,0	13.924,0
4	Tapanuli Tengah	15.017	6.934	13.877	8.533,4	13.877,0	13.877,0
5	Tapanuli Utara	18.803	18.684	18.993	20.535,3	18.803,0	18.803,0
6	Toba Samosir	18.856	15.420	18.615	17.083,7	17.438,0	17.438,0
7	Labuhan Batu	24.318	1.468	18.071	16.244,2	18.071,0	16.244,2
8	Asahan	9.577	5.738	9.089	6.538,8	8.521,0	6.538,8
9	Simalungun	33.150	24.797	31.232	25.342,7	30.946,0	30.946,0
10	Dairi	10.031	9.137	8.164	5.694,2	6.399,0	6.399,0
11	Karo	11.706	10.696	10.223	14.518,5	10.223,0	14.472,0
12	Deli Serdang	40.272	24.736	38.435	33.992,1	33.992,0	33.992,1
13	Langkat	35.481	14.835	30.375	19.442,6	34.038,0	34.038,0
14	Nias Selatan	11.521	4.104	8.834	8.603,2	8.834,0	8.834,0
15	H. Hasundutan	13.620	12.128	13.620	11.837,2	13.620,0	13.620,0
16	Pakpak Barat	1.298	976	1.156	1.121,3	1.336,0	1.121,3
17	Samosir	6.530	6.258	6.406	7.289,2	7.428,0	7.289,2
18	Serdang Bedagai	38.725	27.543	36.518	28.017,0	28.173,0	28.173,0
19	Batubara	16.678	11.504	16.648	12.059,7	16.226,9	16.226,9
20	Pd. Lawas Utara	18.225	6.294	17.429	6.854,0	18.225,0	18.225,0
21	Padang Lawas	11.307	5.511	10.502	5.732,0	9.636,0	9.636,0
22	Lab. Batu Selatan	606	75	431	174,5	442,9	214,7
23	Lab. Batu Utara	22.831	713	22.831	11.992,6	13.003,0	13.003,0
24	Nias Utara	8.109	2.283	7.377	7.172,8	7.377,0	7.172,8
25	Nias Barat	2.831	1.137	2.556	1.812,8	2.330,0	2.330,0
26	Sibolga	-				-	
27	Tanjung Balai	156	55	101	72,7	72,0	72,7
28	Pematang Siantar	2.136	1.675	1.683	1.519,7	1.683,0	1.519,7
29	Tebing Tinggi	230	272	230	255,6	230,2	230,2
30	Medan	1.264	806	1.109	927,5	1.029,0	927,5

No	Kab/Kota	2017	2018		2019		2020
		SP Lahan BPS	ATR/BPN	Surat Gubernur	ATR/BPN	SP Lahan BPS	Kab/Kota
31	Binjai	1.748	1.169	1.365	1.208,4	1.208,4	1.208,4
32	P. Sidempuan	3.166	2.649	3.166	3.066,2	3.166,0	3.066,2
33	Gunung Sitoli	1.642	716,92	1.643	1.163,5	1.551,6	1.163,5
	SUMATERA UTARA	427.262	245.729	397.947	308.667,58	369.927,9	368.830,2

Sumber : Dinas TPH

Dari data luas lahan sawah di atas dapat kita lihat bahwa perbedaan perhitungan luas lahan yang diterbitkan ATR BPN sangat jauh, hal ini mempengaruhi luas panen dan produksi lahan pertanian. Sehingga perlu dilakukan pendataan ulang lahan pertanian dan intensifikasi lahan pertanian untuk pemanfaatan lahan yang ada.

3. PERKEBUNAN

Dari luas areal perkebunan adalah 2.167.671,49 ha sebesar 1.133.290,25 Ha merupakan perkebunan rakyat dengan komoditi utamanya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa. Dimana jika kita melihat data yang disajikan pada table dibawah produksi untuk 5 komoditi ini terus mengalami peningkatan yaitu dari 6.526.594,94 pada tahun 2016 menjadi 7.572.816,00 pada tahun 2020 dengan kontribusi sektor perkebunan pada tahun 2020 sebesar 21,33 persen.

Sementara itu capaian perkebunan dapat dilihat dari keberhasilan indikator sebagai berikut :

Tabel. 2.93
Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	2,92%	9,93%	1,49%	3,96%	0,04%
2	Produksi	6.526.594,94	7.174.375,72	7.281.442,25	7.569.995,70	7.572.816,00
	K. Sawit/TBS (Ton)	5.955.621,41	6.621.409,42	6.729.162,09	6.860.095,45	7,151,006.12
	Karet (Ton)	331.761,25	311.076,66	309.760,12	309.976,12	324,024.91
	Kopi Arabika (Ton)	53.962,36	58.155,09	63.233,94	64031	70,666.65
	Kopi Robusta (Ton)	7.352,90	8.484,72	8.835,09	8090	10,107.50
	Kelapa (Ton)	94.624	96.256,55	97.033,44	98132	105,011.66
	Kakao (Ton)	44.391,25	42.191,33	35.430,38	34.795,06	43,016.44
	Komoditi perkebunan lainnya (ton)	38,881.77	37,472.76	40,346.19	44,190.34	44,809.00
	Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao	40,157.93	37,430.09	36,489.99	39,445.02	39,910.14
	1. K. Sawit (kg/Ha/tahun)	16,563.09	17,500.41	17.686,64	18.273,20	18.263,87
	2. Karet (kg/Ha/tahun)	1,132.68	1.082,33	1.143,99	1.144,76	1,144.85
	3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun)	722.93	783.52	758,70	778,80	779,37
	3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun)	722.93	783.52	758,70	778,80	779,37

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	4. Kelapa (kg/Ha/tahun)	1,028.81	1,063.15	1.074,15	1.096,36	1,099.38
	5. Kakao (kg/Ha/tahun)	1,005.85	1,010.25	930,41	947,55	957,71
	6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun)	18,520.73	14,854.49	13,750.65	16,001.27	16,462.07
3	Luas Areal	1,134,438.20	1,139,686.76	1,122,034.68	1,132,129.58	1,133,290.25
	1. K. Sawit (Ha)	418.993,24	429.261,31	433.019,71	439.315	440.003,00
	2. Karet (Ha)	394.530,26	393.189,02	369.406,43	369.391,00	369.392,00
	3. Kopi Arabika (Ha)	66.533,53	70.199,92	76.257,64	77.765,00	77.834,00
	3. Kopi Robusta (Ha)	17.499,05	18.942,17	17.437,64	17.609,00	17.643,00
	4. Kelapa (Ha)	110.626,49	109.226,35	109.631,71	110.345,00	110.464,00
	5. Kakao (Ha)	64.437,46	58.007,31	54.038,30	54.314,00	54.412,00
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	61,818.17	60,860.68	62,243.25	63,390.58	63,542.25
4	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	24,84	24,88	20,92	20,53	21,33

Sumber : Dinas Perkebunan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perkebunan rakyat untuk komoditi kelapa sawit, kopi arabika, kopi robusta dan kelapa secara umum terus mengalami peningkatan kecuali komoditi karet dan kakao yang mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal ini lebih dipengaruhi oleh menurunnya harga karet dunia yang menyebabkan menurunnya minat petani untuk tetap mempertahankan tanamannya.

Permasalahan utama pada sektor perkebunan adalah umur tanaman perkebunan di Sumatera Utara sudah tidak lagi muda, sehingga diperlukan adanya peremajaan pada tanaman perkebunan melalui replanting. Selain itu tanaman perkebunan rakyat di Sumatera Utara khususnya kelapa sawit belum memiliki standar ISPO. Hal ini perlu menjadi perhatian Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

4. KEHUTANAN

Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara seluas 1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No 306/2018) dan program perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 3511/2018). pada tahun 2017 hutan di Sumatera Utara yang harus direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 276.586 Ha, namun pada tahun 2018 Sumatera Utara dapat melakukan rehabilitasi sebanyak 3.460 Ha atau menjadi 276.336 Ha. Sampai dengan tahun 2020 rehabilitasi hutan sebanyak 275.861 Ha

Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha turun pada tahun 2020 turun menjadi 59.895 Ha. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pemantapan kawasan hutan dan pengusahaan hutan yang akan berdampak pada perbaikan iklim yang terkendali. Sementara itu Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB pada tahun

2020 sebesar 0.63 persen mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,84 persen. Adapun capaian Indikator Kehutanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.94
Indikator Kehutanan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	276.756	276.586	276,336	275.711	275.333
2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	66.500	61.500	56.500	59.780	58.727,87
3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0.87	0,83	0,84	0,84	0,83

Sumber : Dinas Kehutanan Provsu 2020

5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Capaian Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.95
Kondisi Daya Listrik Terpasang dan Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Daya Listrik Terpasang		4.189,88 MW	4.552,44 MW	4.814,4 MW	4.838,00 MW
2	Rasio Elektrifikasi		97.80	99,99	99.99	98,8

NB: $\cos \theta = 0,8$

Sumber : Statistik PT. PLN 2017-2018 dan Asumsi Sambungan Listrik 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat :

1. Bahwa kondisi tahun 2019 kapasitas mampu pembangkit sebesar 3.400 MW merupakan Kapasitas Mampu Pembangkit Tenaga Listrik PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Bagian Utara berdasarkan RUPTL PT. PLN (persero) tahun 2019-2028 dengan Daya Listrik Terpasang 4.552,445 MW ($\cos \theta = 0,8$). Pada Tahun 2019 PT. PLN (persero) merencanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 550 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2019 sehingga dapat menambah Kapasitas Mampu Pembangkit di Wilayah Sumatera bagian Utara menjadi 3.950 MW.
2. Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 direncanakan sebesar 99,90 persen. Berdasarkan statistik PT. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, rasio elektrifikasi pada tahun 2018 sebesar 100,73 persen jika diperhatikan $RE = \text{Jumlah Pelanggan PLN} / \text{Jumlah Rumah Tangga}$.

Potensi Sumber Energi

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Sumut terdiri dari potensi air sekitar 1.367,9 MW yang tersebar di beberapa lokasi, potensi panas bumi sekitar 1.870 MWe.

1) Energi Listrik

Sampai dengan kondisi 20 Desember 2021 laporan realisasi STL SBU (LWBP) dari PT. PLN adalah:

- BP SBU : 1878 MW
- B. Terlayani SBU : 1878 MW
- DMP KIT : 1888 MW
- Cad Operasi : 328 MW
- Cad Putar : 146 MW
- RS Total : 182 MW
- RS KIT BBM : 182 MW
- RS KIT NON BBM : 0 MW

PLTU OPERASI NORMAL (485 MW), dan PLTU Tidak Beroperasi (320 MW), yang terdiri dari:

- TU BLWAN 3 (35 MW)
- TU BLWAN 4 (35 MW)
- TU PSUSU 1 (180 MW)
- TU LBAGN 1 (70 MW)

PLTU DERATING (246 MW), yang terdiri dari:

- TU PSUSU 2 (180/78 MW)
- TU PSUSU 3 (180/109 MW)
- TU PSUSU 4 (180/107 MW)

Transfer antar subsistem SBU-SBT : -318 MW; SUTET 275 KV PSDEM-PYBUH: - 312 MW; SUTT 150 KV yang terdiri dari RTPAT-KTPNG -6 MW dan PBDAN-LNGSA : 54 MW (Transfer ke Aceh).

Untuk Wilayah SUMUT terdiri dari BP 1533 MW dan DMP KIT 1614 MW; sedangkan untuk Wilayah ACEH terdiri dari BP 345 MW dan DMP KIT 274 MW yang ditransfer dari SUMUT 72 MW

2) Kondisi Pembangkit

Sampai dengan akhir 2021 kondisi pembangkit untuk interkoneksi di Sumatera Bagian Utara adalah:

FO (Total 594 MW):

- TU BLWAN 3 (35 MW)

- TU BLWAN 4 (35 MW)
- TGU BLWAN ST 1.0 (80 MW)
- TGU BLWAN GT 2.1 (122 MW)
- TGU BLWAN GT 2.2 (122 MW)
- TGU BLWAN ST 2.0 (115 MW)
- TG BLWAN LOT 3 (85 MW)

MO (Total 4 MW):

- TD CTRNG (4 MW)

PO (Total 250 MW):

- TU PSUSU 1 (180 MW)
- TU LBAGN 1 (70 MW)

FD (Total 338 MW):

- TU PSUSU 2 (180/78 MW)
- TU PSUSU 3 (180/109 MW)
- TU PSUSU 4 (180/107 MW)
- TA ASHAN 1 (90/78 MW)
- TA ASHAN 2 (90/77 MW)
- TP SRULLA (243/246 MW)
- TA HSANG 1 (14/13 MW)
- TA HSANG 2 (14/12 MW)
- KIT 20 KV (159/80 MW)

RS (Total 182 MW):

- TGU BLWAN GT 1.1 (90 MW)
- TG MPP PPASR 1 (27 MW)
- TG MPP PPASR 2 (27 MW)
- TG MPP PPASR 3 (27 MW)
- TD 20 KV (11 MW)

3) Pengembangan Pembangkit

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sampai tahun 2028 diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Sumatera Utara dengan rekapitulasi dan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.96

Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
PLN											
PLTU	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
PLTGU	-	-	-	430	-	-	-	-	-	-	430
PLTG/MG	34	20	10	-	-	-	10	10	-	-	84
PLTA	-				87	87			90		264
PS	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	500
Jumlah	434	20	10	430	87	87	10	10	340	250	1.678
IPP											
PLTU	-										600
PLTP	45	45	50	50	50	195	235	-	-	-	670
PLTGU	-	-	-	200	-	300	-	-	-	300	800
PLTM	45	42	186	-	-	130	-	20	20	10	453
PLTA	26	23	510	-	-	-	720	129	62	-	1.470
PLT Lain	-	12	4	98	10	83	-	5	-	-	211
Jumlah	116	122	750	348	360	1.007	955	154	82	310	4.204
Kerjasama Wilus											
PLTU	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Jumlah	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
PLTU	400	300	-	-	300	300	-	-	-	-	1.300
PLTP	45	45	50	50	50	195	225	-	-	-	670
PLTGU	-	-	-	630	-	300	-	-	-	300	1.230
PLTG/MG	34	20	10	-	-	-	10	10	-	-	84
PLTM	45	42	186	-	-	130	-	20	20	10	453
PLTA	26	23	510	-	87	87	720	129	152	-	1.734
PS	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	500
PLT Lain	-	12	4	98	10	83	-	5	-	-	211
Jumlah	550	442	760	778	447	1.094	965	164	422	560	6.182,0

Sumber : RUPTL PT PLN 2019-2028

Tabel. 2.97
Potensi Energi Baru Terbarukan Berbasis Panas Bumi

NO	NAMA WKP	SK WKP		Kode Wilayah	luas (Ha)	Kab./Kota	Status	Titik Potensi		Sumber Daya (MWe)		Cadangan (MWwe)			Izin Pengusahaan
		Nomor	Tanggal					No	Nama	Spekulatif	Hipotesis	Terduga	Mungkin	Terbukti	
1	WKP SORIK MERAPI-ROBURAN-SAMPURAGA	2963/K/30/MEM/2008	30/12/2008	14FEBBPM 1202	62.900	Mandailing Natal	Pembangunan dan Produksi	31	Sorik Merapi Sampuraga	-	-	200	-	-	PT Sorik Merapi Geothermal Power
								32	Sampuraga						
								33	Roburan						
2	WKP SIPOHOLON RIA RIA	2961/K/30/MEM/2008	21/04/2015	14FEBBPM 1205	34.410	Tapanuli Utara	Persiapan Lelang	25	Hela Toba	25	-		-	-	-
								26	Sipaholon Ria Ria	-	-	147	-	-	
3	WKP SIMBOLON SAMOSIR	1827/K/30/MEM/2012	30/04/2012	12 00 1 26 12 00001	168.800	Samosir, Taput, Humbahas, Dairi	Proses Lelang	22	Pusik Buhit-Danau Toba	-	-	150	-	-	-
								23	Simbolon - Samosir						
								24	Pagaran						
4	WKP GUNUNG SIBUAL-BUALI	2067/K/30/MEM/2012	18 /06/2012	12 00 1 2 6 12 0001	448.300	Taput dan Tapsel	Produksi	27	Sarulla	-	100	200	-	80	PT Pertamina Geothermal Energy KOB Sarulla Operation Limited
								28	Sibual-Buali	-	-	376	160	230	
								29	Namorailangit						
5	WKP GUNUNG SIBAYAK - GUNUNG SINABUNG	2067/K/30/MEM/2012	18/ 06/ 2016	12 06 1 2 6 12 2012	152.800	Langkat, Karo, Deli serdang, Simalungun	Produksi	18	Beras Tepu	-	34	15	20	20	PT Pertamina Geothermal Energy
								19	Lau Debuk-Debuk/Sibayak						
								20	Marike	25	-	-	-	-	
6	POTENSI DOLOK MARAWA	-	-	-	-	Simalungun	-	21	Dolok Marawa	36	-	52	-	-	-
	TOTAL POTENSI PANAS BUMI									86	134	1140	180	330	
	TOTAL KESELURUHAN									1870					
*	Sumber : RUPTL PT. PLN 2019-2028 dan Buku Potensi Panas Bumi Jilid 1														

Tabel. 2.98
Potensi Pengembangan Energi Bersumber Biomassa, Biogas dan Matahari

No	JENIS	NAMA/LOKASI	KAPASITAS	
1	PLTBg	Pasir Mandoge	2,2	MW
2	PLTBg	Huta Bayuh Huta Bayu	1,7	MW
3	PLTBg	Langkat	1,7	MW
4	PLTBg	Padang Lawas	1,4	MW
5	PLTBg	Sei Suka	2	MW
6	PLTBg	Mandailing Natal	2	MW
7	PLTBm	Paya Bagas	9,9	MW
8	PLTBm	Deli Serdang	22	MW
9	PLTBm	Penggalangan	2	MW
10	PLTBm	Nias Utara	3	MW
11	PLTBm	Besitang	30	MW
12	PLTBm	Ononomolo Tumula	6	MW
13	PLTBm	Tanjung Putus	10	MW
14	PLTBm	Labura	10	MW
15	PLTBm	Pulau Nias	9,8	MW
16	PLTS	Nias	-	MW
17	PLTS	Sumut Tersebar	-	MW
TOTAL			113,7	MW

Sumber : RUPTL PT. PLN 2019-2028 dan Buku Potensi Panas Bumi Jilid 1

6. PERDAGANGAN

Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi sebesar -1,94 persen, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 6,93 persen atau turun sebesar 8,87 persen. Sektor Perdagangan sudah mencapai target RPJMD pada Tahun 2019 yang artinya secara garis besar transformasi ekonomi Sumut telah mengalami peningkatan, namun akibat pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pembatasan skala besar akses distribusi barang. Capaian Indikator Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.99
Indikator Perdagangan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan (dalam Ribu US\$)	3.856,25	4.581,88	3.992,69	2.906,75	2.495,79
2	Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	4,74	5.87	6,11	6,93	-1,94

Sumber : BPS,2020

7. PERINDUSTRIAN

Capaian Indikator Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.100
Indikator Perindustrian

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	5,34	2,31	3,66	1,23	-0,84
2	Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	0,21	-3,11	4,01	-5,11	-5,11
3	Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	10,75	0,66	7,90	9,01	9,01

Sumber : Disperindag Provsu

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat Pada Tahun 2020 Laju pertumbuhan Industri Terhadap PDRB ADHK adalah sebesar -0,84 persen, Kondisi ini menurun Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,23 persen.

Untuk nilai Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang Pada Tahun 2020 (Data Sementara), Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Utara turun menjadi -5,11 persen jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 4,01 persen. Untuk nilai Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 (Data Sementara) meningkat menjadi 9,01 persen jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 7,90 persen.

Laju pertumbuhan Industri, Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang serta Pertumbuhan Industri Mikro Kecil mengalami penurunan, kondisi tersebut diasumsikan terjadi karena :

1. Pandemi Covid-19
2. Sarana dan Prasarana Produk IKM yang belum menggunakan technology terbaru (up to date)
3. Masih rendahnya Daya Saing Produk IKM dibanding barang impor
4. Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri masih belum optimal
5. Promosi dan Pemasaran Produk IKM dan Industri yang belum optimal

8. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi di subsektor perikanan baik perikanan tangkap maupun

perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dan budidaya terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 produksi perikanan tangkap mencapai 540.421,7 ton. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pada produksi perikanan tangkap menjadi 420.419,50 ton. Sementara untuk perikanan budidaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 246.908,3 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 227.235,27 ton sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.101
Kondisi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	408.022,90	528.381,13	503.232,20	540.421,7	420.419,50
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	197.237,00	255.985,88	243.829,40	246.908,3	227.235,27

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan

Kebijakan-kebjakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap berupa Asuransi nelayan diberikan kepada 42.557 nelayan pantai timur, pantai barat dan dataran tinggi sebagai wujud perlindungan terhadap nelayan ketika melaut.

Selanjutnya data jumlah kapal perikanan sebgai berikut :

- KM < 5 GT : 13.416 unit
- KM 6-30 GT : 5.563 unit
- KM > 30 GT : 180 unit
- Motor Tempel : 8.992 unit dan
- Perahu tanpa motor : 9.757 unit

Adapun dampak kebijakan yang telah dilaksanakan diatas yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap Sumatera Utara tahun 2019. Namun pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid 19 sebagian kegiatan untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap di *refocussing*.

2.3.4. Urusan Penunjang

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Hingga tahun 2020 pemerintah menggunakan pendekatan *money follow program* dalam menyusun perencanaan yaitu pendekatan penganggaran

secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang sesuai/searah dengan pencapaian tujuan program prioritas, serta sasaran prioritas nasional dan pemerintah daerah.

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera utara tahun 2020 adalah tersedianya dokumen RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Dokumen Perubahan RKPD yang juga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam rangka mewujudkan Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Provsu sudah mencapai 100 persen hal ini disebabkan karena Perencanaan Provinsi Sumatera Utara sudah menggunakan Aplikasi *e-planning* dimana program RPJMD dan RKPD sudah diinput kedalam aplikasi. Sementara tingkat konsistensi Program RKPD kedalam penjabaran APBD sudah sesuai, hal ini dilihat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh bidang-bidang Perencanaan melalui Berita Acara hasil verifikasi RKA dan DPA serta kesesuaian dengan APBD dan RKPD. Sementara untuk tingkat pengendalian Target capaian Pembangunan belum mencapai target tahun 2020, hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian terhadap capaian pembangunan daerah. Capaian Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.102
Indikator Perencanaan Provsu

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100%	100%	100%	96,26%
2	Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam Penjabaran APBD		100%	100%	100%	95,15%
3	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah		74%	76%	78%	85%

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2020

2. KEUANGAN

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera hingga 2018, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, maka alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% diterjemahkan dalam alokasi anggaran fungsi Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total belanja sesuai dengan amanat regulasi. Anggaran kesehatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menguatkan program upaya kesehatan promotif preventif.

Capaian Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.103
Indikator Keuangan Provsu

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	11,2	6.99	7,69	3.21	10,50
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	24,36	24,65	22,60	24,74	12,20
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	17,83	18,05	4,43	18,24	2,40
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	34,66	35:65	40:60	22:78	10:53 (18,87)
6	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	NA	1.80	2.90	4.70	22,20
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Provsu

Selain itu dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 sebesar 10:53, sementara bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun 2019 sebesar 22.20 %, dan penetapan APBD selama ini telah tepat waktu.

3. PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.104
Inikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	20	20	20	20	20
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	-	-	-	49,47	58,47

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Reribusi Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah sejak tahun 2016-2020 tidak ada perubahan, namun persentase PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 58.47 persen dari tahun 2019 sebesar 49.47 persen.

4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.105
Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	36 hari	36 hari	36 hari	36 hari	36 hari
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	-	-	-	17,49	19,24

Sumber : BPSDM Provsu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan di Provinsi Sumatera Utara hingga dari tahun 2016 sampai 2020 adalah 36 hari, sementara Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural pada tahun 2020 masih sebesar 19.24 persen hal ini disebabkan oleh belum semua Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Managerial, serta diklat-dilkat terkait lainnya.

- **Kepegawaian Daerah**

Capaian Indikator Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.106
Indikator Capaian Kegiatan Kepegawaian Daerah Provsu

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	60	60	60	60	45
2	Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	389	389	398	398	399
3	Jabatan Pengawas Pada Instansi Pemerintah	1.122	1.122	1.122	1.201	1.017
4	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	15.630	15.630	18.130	18.346	18.265

Sumber : BKD Provsu, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah menurun dibandingkan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi dan belum dilantik, sementara Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah bertambah 1 orang hingga 2020 menjadi 399, jabatan Pengawas Pada Instansi Pemerintah dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah mengalami penurunan masing masing 1.017 dan 18.265 orang.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Data persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan setiap tahunnya mencapai 20 persen, dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan juga mencapai 20 persen. Sementara Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah perbandingan jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi dengan total perangkat daerah pada tahun 2020 mencapai 61 persen dan Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah pada tahun 2020 sebesar 50 persen

Perkembangan capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.107
Indikator Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	20	20	20	20	20
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	10	10	20	40	20
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	15	15	15	15	61
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	50	50	50	50	50

Sumber : Balitbang Provsu, 2020

6. BADAN PENGHUBUNG

Badan Penghubung Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu LintasJ alan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian serta Pengembangan Lingkungan Perhubungan dan tugas pembantuan. Capaian indikator Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.108
Indikator Badan Penghubung

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Hubungan Antar Lembaga	100%	100%	71%	82%	62%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	92%	92%	82%	79%	40%

Sumber : Badan Penghubung Provsu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase hubungan antar Lembaga sebesar 82 persen melebihi target 50 persen yang berarti capaian kinerja dapat diklasifikasi sangat baik, namun Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan, capaian 2020 hanya sebesar 40 persen.

7. PENGAWASAN

Tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sesuai kedudukannya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.109
Indikator Pengawasan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	60%	65%	78%	86%	78%
2	Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas	NA	40%	45%	52,4%	65%

Sumber: Inspektorat Provsu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwaPersentase Tindak Lanjut Temuan adalah jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan total jumlah total temuan, hingga 2020 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 78 persen sementara hasil penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas hingga 2020 mencapai 65 persen

2.3.5. Urusan Pendukung

1. SEKRETARIAT DEWAN

Adapun tugas yang diemban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian staf ahli DPRD. Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.110
Capaian Indikator Sekretariat Dewan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Kerja Tahunan
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program

Sumber : Setwan Provsu

2. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah serta Staf Ahli Gubernur;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
6. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Gubernur Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 menerbitkan Susunan Oerganisasi Baru Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, dimana terdapat 9 Biro pada Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Kondisi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah melalui Biro-biro adalah sebagai berikut :

1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerh

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2) Biro Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3) Biro Hukum

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

4) Biro Perekonomian

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

5) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

6) Biro Administrasi Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,

- pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
 4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

7) Biro Organisasi

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana. Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi serta akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

8) Biro Umum

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha. Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

9) Biro Administrasi Pimpinan

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, Penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta protokol. Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.4. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.063.964 rupiah/kapita/bulan, Pengeluaran penduduk untuk konsumsi tertinggi ada di Kota Medan 1.559.944 rupiah/kapita/bulan dan terendah di Kabupaten Nias sebesar 604.497 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2019. Secara rata-rata, konsumsi beras di Sumatera Utara mencapai 7,28 kg/kapita/bulan. Perkembangan rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.111
Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi
di Provinsi Sumatera Utara (rupiah/kapita/bulan)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020*
Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara	909.818	909.818	1.001.709	1.063.964	1.063.964

Sumber : BPS 2020
*) Angka Sementara

Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.063.964 rupiah/kapita/bulan. Nilai ini naik dari 1.001.709 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2018 dan 909.818 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2017. Jika dilihat dari trennya, pertumbuhan rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 s.d. 2019 terus meningkat. ada tahun 2019 terjadi peningkatan pengeluaran sebesar 6,21 persen terhadap tahun 2018. Begitu juga pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 10,10 persen terhadap tahun 2017. Dengan demikian secara umum di Sumatera Utara, pengeluaran penduduk untuk konsumsi juga meningkat.

Tren pengeluaran yang meningkat di Sumatera Utara terjadi di sebagian besar kabupaten/kota. Meskipun demikian, ada 8 Kabupaten Kota yang mengalami penurunan pengeluaran untuk konsumsi pada tahun 2019. Diantaranya adalah di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Asahan. Seperti halnya dengan tahun 2018, pada tahun 2019 pengeluaran per kapita sebulan penduduk di hampir semua kota di Sumatera Utara menempati posisi papan atas. Sedangkan Kota Gunungsitoli menempati posisi 21 dari 34 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara. Dan pengeluaran penduduk di Kota Gunungsitoli juga menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya yang berada di Pulau Nias. Hal ini

menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran per kapita sebulan di kota besar lebih tinggi jika dibandingkan wilayah kabupaten.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara, Nilai NTP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, nilai NTP sebesar 97,98 dan meningkat sebesar 0,1 poin pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar 10,92 poin sehingga nilai NTP sebesar 109,83 poin. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.112
Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tukar Petani	101,56	99,39	97,98	98,08	109,83
	- Peternakan	111,35	112,34	112,07	114,78	98,74
	- Pangan	98,11	93,11	93,11	91,92	96,90
	- Holtikultura	98,04	94,22	94,22	94,81	97,28
	- Perikanan	99,86	103,17	103,17	102,34	99,52
	- Perkebunan	96,74	98,53	98,53	97,38	125,05

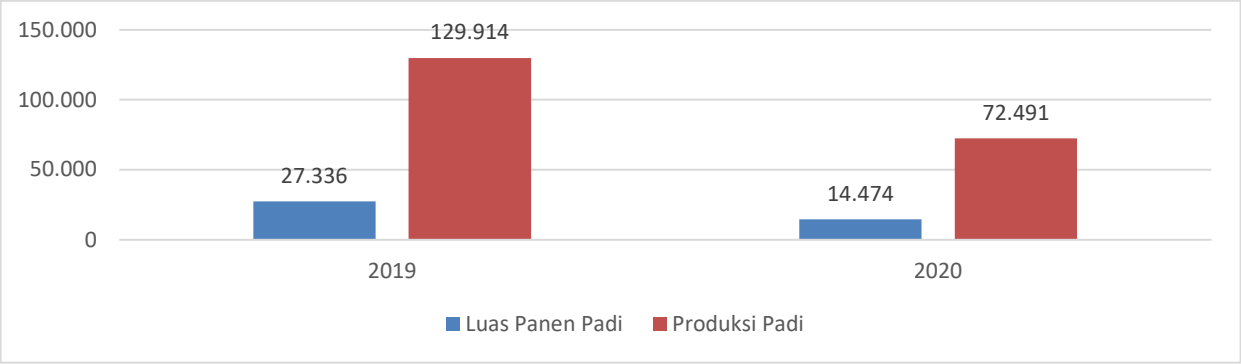
Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2020

Nilai tukar petani di Sumatera Utara dari 5 tahun terakhir menunjukan trend yang berfluktuatif, dimana jika dirata-ratakan hanya sebesar 101,36 point, artinya masih ada keuntungan yang dapat disimpan oleh petani. Namun angka ini jika kita lihat dari subsektornya yang menopang adalah sektor peternakan dan perikanan. Namun pada tahun 2020 terlihat bahwa terjadi pergeseran angka dimana sector perkebunan menjadi angka tertinggi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan perhitungan dari pengukuran Nilai tukar Petani.

Jika kita melihat data di atas, sector pangan dan hortikultura selalu berada di bawah nilai 100, hal ini menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi dan kebijakan apa yang harus kita ambil dalam meningkatkan nilai tukar petani dari kedua sector ini.

3. Luas Panen dan Produksi Padi di Sumatera Utara

Pada tahun 2020, luas panen padi sebesar 388,59 ribu hektar dengan produksi sebesar 2,04 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2020 mencapai 1,16 juta ton.



Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.46
Perkembangan Luas Panen Padi di Sumatera Utara, 2019-2020

Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 388,59 hektar, atau mengalami penurunan sekitar 24,55 ribu hektar (5,94 persen) dibandingkan 2019 yang mencapai 413,14 ribu hektar. Puncak panen padi pada 2020 sama dengan 2019. Pada 2020, puncak panen terjadi pada bulan Februari, yaitu mencapai 294,78 ribu hektar, dan puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 283,92 ribu hektar (Gambar 1). Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2021 mencapai 41,49 ribu hektar, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2021 diperkirakan seluas 144,52 hektar. Dengan demikian, total potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 mencapai 186,01 hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 21,31 ribu hektar (12,95 persen) dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 164,69 juta hektar.

Selain itu Produksi padi di Sumatera Utara sepanjang Januari hingga Desember 2020 sekitar 2,04 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami penurunan sekitar 38,40 ribu ton (1,85 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 2,07 juta ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 294,79 ribu ton sementara produksi terendah terjadi pada bulan. Desember, yaitu sebesar 72,49 ribu ton. Hal yang sama dengan produksi pada 2020, produksi tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 283,92 ribu ton

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2020 terjadi di Kabupaten Serdang Bedagei, Kabupaten

Langkat, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tiga kabupaten/ kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2020 adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagei, dan Kabupaten Simalungun. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah adalah Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kota Tebingtinggi.

Sementara itu, produksi padi pada Januari 2021 sebesar 218,53 ribu GKG, dan potensi produksi sepanjang Februari hingga April 2021 mencapai 735,88 ribu ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada subround Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 954,41 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sekitar 106,55 ribu ton (12,57 persen) dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 847,85 ribu ton GKG. Tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April 2021 adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagei, dan Kabupaten Simalungun. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama adalah Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kota Tebingtinggi .

4. Perkembangan Ekspor Sumatera Utara

Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Desember 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan November 2020, yaitu US\$720,94 juta menjadi US\$748,58 juta atau naik sebesar 3,83 persen. Bila dibandingkan dengan bulan Desember 2019, ekspor Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 19,23 persen. Berikut gambaran fluktuasi ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara sebagai berikut :

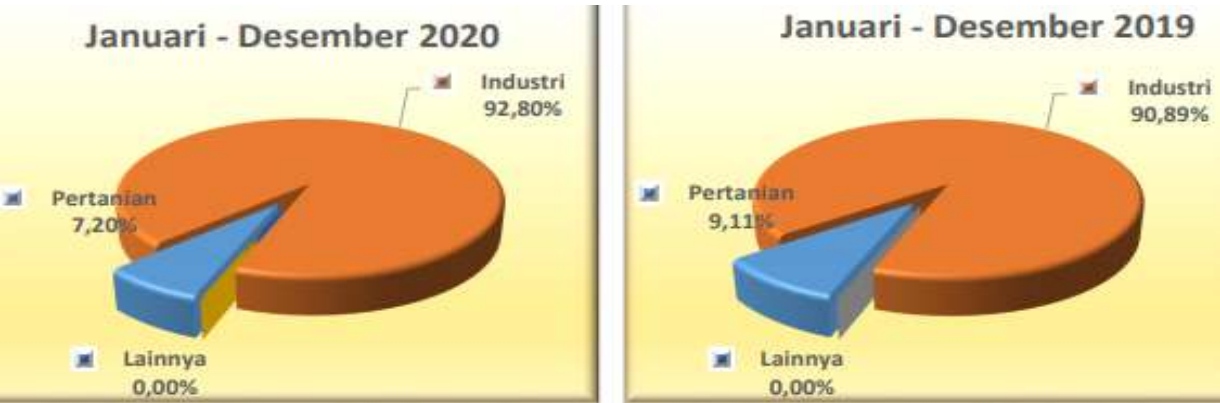
Tabel. 2.113
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara 2016-2020

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca (000 US\$)	Perubahan (%)		
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (000 US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CIF (000 US\$)		Nilai Ekspo	Nilai Impor	Neraca
2016	8 387 357	7 770 742	6 819 193	3 914 490	3 856 250	0.23	-1.85	2.44
2017	8 981 772	9 225 286	7 038 772	4 635 808	4 589 478	18.72	18.43	19.01
2018	9 645 621	8 787 224	7 214 945	5 652 347	3 134 878	-4.75	21.93	-31.69
2019	9 529 180	7 663 174	6 301 659	4 530 324	3 132 850	-12.79	-19.85	-0.57
2020	683 771	748 579	512 633	388 355	360 224	3.83	25.26	-12.34

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Perkembangan ekspor Sumatera Utara menurut sektor pada bulan Desember 2020 serta periode Januari-Desember 2020 dapat dilihat dari Sektor Pertanian pada bulan Desember mengalami kenaikan US\$14,41 juta (36,10%) dibandingkan bulan November 2020, sektor Industri naik sebesar US\$13,23 juta (1,94%), sementara sektorsektor lainnya relatif stabil. Kontribusi nilai

ekspor sektor industri terhadap total nilai ekspor Januari–Desember 2020, sebesar 92,80 persen, sektor pertanian sebesar 7,20 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian, sektor minyak dan gas, serta sektor lainnya sebesar 0,00 persen.



Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Grafik.2.47
Struktur Nilai Ekspor Sumatera Utara
Januari–Desember 2019 dan 2020

Ekspor golongan barang utama Sumatera Utara pada Desember 2020 terhadap November 2020 yang mengalami kenaikan terbesar adalah golongan kopi, teh, rempah-rempah sebesar US\$8,43 juta (33,07%), diikuti golongan berbagai produk kimia naik sebesar US\$7,00 juta (10,27%). Ikan dan udang mengalami penurunan ekspor terbesar pada 10 golongan barang utama yaitu turun sebesar US\$7,80 juta (-26,09%) diikuti sabun dan preparat pembersih turun sebesar US\$2,26 juta (-8,39%).

Tabel. 2.114
Nilai FoB (ribu US\$) Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan perubahannya (Δ) Desember 2020 dan Periode Januari–Desember 2020

Golongan Barang (HS 2 digit)	2020		Δ	Δ%	Peran (%) terhadap Des 2020	Januari – Desember		Δ	Δ%	Peran (%) terhadap Jan-Des 2020
	November	Desember				2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15 Lemak & Minyak Hewan / Nabati	284.426	283.658	-767	-0.27	37.89	2.843.441	3.117.257	273.816	9.63	38.55
40 Karet dan Barang dari Karet	112.789	119.245	6.446	5.71	15.93	1.061.316	1.142.190	60.872	5.63	14.13
38 Berbagai Produk Kimia	68.211	75.213	7.002	10.27	10.05	510.857	709.990	20.859	-2.57	9.77
29 Bahan Kimia Organik	33.483	31.983	-1.500	-4.48	4.27	332.091	394.611	62.519	18.83	4.88
09 Kopi, Teh, Rempah-rempah	25.501	33.933	8.432	33.07	4.53	457.490	378.126	-79.364	-17.35	4.68
03 Ikan dan Udang	29.880	22.083	-7.796	-26.09	2.95	277.660	333.749	56.089	20.20	4.13
34 Sabun dan Preparat Pembersih	26.968	24.706	-2.262	-8.39	3.30	279.360	319.010	39.650	14.19	3.95
24 Tembakau	16.828	20.653	1.825	9.69	2.76	303.145	253.564	-49.581	-16.36	3.34
44 Kayu, Berang dari Kayu	16.097	16.390	293	1.82	2.19	229.218	213.500	-15.718	-6.86	2.64
08 Buah-buahan	16.920	23.100	6.180	36.53	3.09	176.502	206.658	31.156	17.75	2.56
Total 10 Golongan Barang	633.113	658.965	17.852	2.82	88.96	6.790.082	7.148.662	358.580	5.28	88.41
Lainnya	87.826	97.614	9.788	11.14	13.04	873.092	937.358	64.467	7.38	11.59
Total	720.939	748.579	27.640	3.83	100.00	7.663.174	8.086.021	422.847	5.52	100.00

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Selama periode Januari–Desember 2020, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) mampu memberikan kontribusi sebesar 88,41 persen terhadap total ekspor Sumatera Utara. Sementara itu ekspor di luar 10 golongan barang memberikan kontribusi sebesar 11,59 persen. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang pada periode Januari–Desember 2020 naik 5,28 persen terhadap Januari–Desember 2019.

Sepanjang bulan Desember 2020 negara Tiongkok, Amerika Serikat dan Pakistan merupakan pangsa ekspor terbesar Sumatera Utara, masing-masing sebesar US\$105,59 juta, US\$89,44 juta dan US\$52,00 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,00 persen. Sekitar 38,16 persen barang ekspor dari Sumatera Utara dipasarkan ke kawasan Asia di luar ASEAN. Untuk kawasan Asia di luar ASEAN, India dan Jepang juga merupakan pangsa ekspor masingmasing sebesar US\$47,63 juta dan US\$41,71 juta.



Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Grafik.2.48
Pangsa Ekspor Sumatera Utara Januari–Desember 2019 dan 2020

5. Perkembangan Impor Sumatera Utara

Nilai impor melalui Sumatera Utara bulan Desember 2020 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar US\$388,36 juta, atau naik sebesar 25,26 persen dibandingkan bulan November 2020 yang mencapai US\$310,03 juta. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 1,63 persen.

Dari total impor Sumatera Utara pada Desember 2020 sebesar US\$388,36 juta, impor bahan baku/penolong memberikan peran terbesar, yaitu sebesar 76,58 persen dengan nilai US\$297,40 juta, diikuti oleh impor

barang konsumsi sebesar 14,37 persen (US\$55,80 juta), dan impor barang modal sebesar 9,05 persen (US\$35,16 juta). Nilai impor bulan Desember 2020 dibanding bulan November 2020, barang modal naik sebesar 21,22 persen, bahan baku/penolong naik sebesar 20,32 persen dan barang konsumsi naik sebesar 64,84 persen.



Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Grafik.2.49
Impor Sumatera Utara Menurut Kelompok Barang Ekonomi
Januari–Desember 2019 dan 2020

Nilai impor terbesar bulan Desember 2020 berasal dari golongan mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar US\$41,23 juta, diikuti bahan bakar mineral sebesar US\$36,89 juta dan golongan ampas/sisa industri makanan sebesar US\$33,49 juta. Dibandingkan bulan November 2020, nilai impor untuk sepuluh golongan barang (HS 2 digit) pada bulan Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar US\$54,15 juta atau 27,81 persen. Demikian pula untuk golongan barang lainnya mengalami kenaikan sebesar US\$24,18 juta (20,97%).

Tabel. 2.115
Nilai CIF (Ribuan US\$) Impor Beberapa Golongan Barang HS 2 Diji
Desember 2020 dan Periode Januari–Desember 2020

Golongan Barang (HS 2 digit)	2020		A	A%	Peran (%) terhadap Des 2019	Januari–Desember		A	A%	Peran (%) terhadap Jan–Des 2019
	November	Desember				2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
84 Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	33.637	41.237	7.600	22.60	10.62	614.396	496.089	-118.307	-19.26	12.54
23 Ampas / Sisa Industri Makanan	32.170	33.494	1.325	4.12	8.62	313.438	340.872	27.434	8.74	8.56
27 Bahan Bakar Mineral	22.796	36.887	14.091	61.86	9.50	460.432	510.328	49.896	10.83	7.80
39 Plastik dan Barang dari Plastik	25.386	21.841	-3.545	-14.01	-5.62	301.735	265.205	-36.530	-12.12	6.06
85 Mesin / Peralatan Listrik	14.425	16.948	2.523	17.44	4.36	236.366	221.725	-14.641	-6.19	5.57
28 Bahan Kimia Anorganik	7.727	30.947	23.220	300.53	7.97	265.355	204.993	-60.362	-22.90	5.14
40 Karet dan Barang dari Karet	21.954	27.227	5.273	24.02	7.01	173.074	202.064	28.990	17.10	5.09
31 Pupuk	9.756	15.732	5.976	61.26	4.06	154.154	188.225	34.071	22.12	4.23
72 Besi dan Baja	15.741	13.147	-2.594	-16.48	3.36	220.814	141.275	-79.539	-36.02	3.55
12 Bijih dan barangnya	11.141	11.407	266	2.39	2.54	125.933	127.363	1.430	1.13	3.20
Total 10 Golongan Barang	194.713	248.860	54.147	27.81	64.66	2.965.787	2.481.331	-484.456	-16.33	62.35
Lainnya	113.315	139.485	26.170	23.07	35.82	1.624.536	1.496.534	-128.002	-7.78	37.45
Total	318.027	388.345	70.317	22.26	100.00	4.590.323	3.977.865	-612.458	-13.33	100.00

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2021

Periode Januari–Desember 2020, nilai impor untuk sepuluh golongan barang utama turun sebesar US\$424,46 juta (-14,61%) dibanding periode yang sama tahun 2019, sementara golongan barang lainnya turun sebesar US\$126,00 juta (-7,76%). Peran impor untuk sepuluh golongan barang pada periode Januari–Desember 2020 mencapai 62,35 persen, dengan peran tertinggi berasal dari golongan mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 12,54 persen diikuti golongan ampas/sisa industri makanan sebesar 8,56 persen dan bahan bakar mineral sebesar 7,80 persen

6. Neraca Perdagangan Luar Negeri

Neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan Desember 2020 mengalami surplus sebesar US\$360,22 juta, dibandingkan bulan sebelumnya turun sebesar 12,34 persen yang mencapai US\$410,91 juta (Tabel 1). Apabila neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan Desember 2020 dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 46,59 persen yaitu dari US\$245,73 juta pada bulan Desember 2019 menjadi US\$360,22 juta di bulan Desember 2020.

Surplus neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara dengan negara mitra utama selama bulan Desember 2020 berturut-turut adalah senilai US\$54,46 juta dengan Amerika Serikat, senilai US\$37,85 juta dengan India, senilai US\$41,71 juta dengan Jepang, senilai US\$20,88 dengan Belanda dan senilai US\$19,35 juta dengan Kamboja,. Sedangkan defisit perdagangan luar negeri Sumatera Utara terjadi dengan Singapura sebesar US\$16,44 juta, dengan Argentina sebesar US\$12,17 juta, senilai US\$7,48 juta dengan Malaysia dan dengan Tiongkok sebesar US\$4,79 juta.

Tabel. 2.116
Kondisi Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara dengan Negara Mitra Utama Desember 2020 dan Periode Januari – Desember 2020 (ribu US\$)

Negara		Desember 2020			Januari–Desember 2020		
		Ekspor	Impor	Selisih	Ekspor	Impor	Selisih
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
411	Amerika Serikat	89 439	34 980	54 460	984 441	295 852	688 589
133	India	47 628	9 778	37 849	613 266	165 493	447 773
111	Jepang	41 712	0	41 712	410 988	83 290	327 698
126	Kamboja	19 347	0	19 346	228 490	0	228 490
512	Belanda	22 946	2 064	20 882	227 775	14 021	213 754
124	Malaysia	20 365	27 845	-7 480	324 741	419 420	-94 678
311	Australia	7 840	2 079	5 761	68 992	175 725	-106 734
116	Tiongkok	105 589	110 377	-4 788	1 097 145	1 250 337	-153 192
122	Singapura	5 625	22 063	-16 439	60 981	229 109	-168 128
433	Argentina	1 139	13 305	-12 166	10 284	207 846	-197 562
Total 10 Negara Mitra		361 628	222 491	139 137	4 027 102	2 841 093	1 186 010
Lainnya		386 951	165 864	221 087	4 059 119	1 138 773	2 920 346
Total		748 579	388 355	360 224	8 086 221	3 979 865	4 106 356

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2020

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus dikebut pemerintah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah.

1. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas infrastruktur oleh pemerintrah daerah, yang terdiri dari 6 variabel yaitu :

- a. Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)
- b. jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik (irigasi)
- c. rumah tangga terlayani akses air minum layak (air minum)
- d. rumah tangga terlayani layanan limbah domestik (sanitasi)
- e. rumah tangga terlayani pengolahan persampahan
- f. akses rumah layak huni

Capaian Indikator Indeks Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.117
Indeks Infrastruktur

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	80,93	84.31	81,17	82,19	75,02
2	Rasio Elektrifikasi	93,29	97.80	99,99	99.11	98,8
3	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	75,18	79,03	81,82	81,82	83,28
4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	87,01	88,07	88,51	76,94	76,95
5	Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan	72,43	72,56	74,60	76,96	76,96

Sumber : Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi, dan Dinas SDACKTR

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.118
Angka Kriminalitas

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara	NA	4,31 (per 1000 orang)	2,40 (per 1000 orang)	2,40 (per 1000 orang)	-

Sumber : BPS Provsu

Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,40 per 1000 orang, kondisi ini lebih baik dari tahun 2017 sebesar 4,31 per 1000 orang.

2. Lama Proses Perizinan

Tabel. 2.119
Lama Proses Perizinan Di Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama Proses Perizinan PMDN	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja
2	Lama Proses Perizinan Sektoral	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2020

3. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Tabel. 2.120
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sumut

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	20	20	20	20	20

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu, 2020

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 10,532 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,703 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 68,67 persen atau 7,35 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 6,842 juta orang penduduk bekerja dan 508 ribu orang pengangguran.

Tabel. 2.121
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara

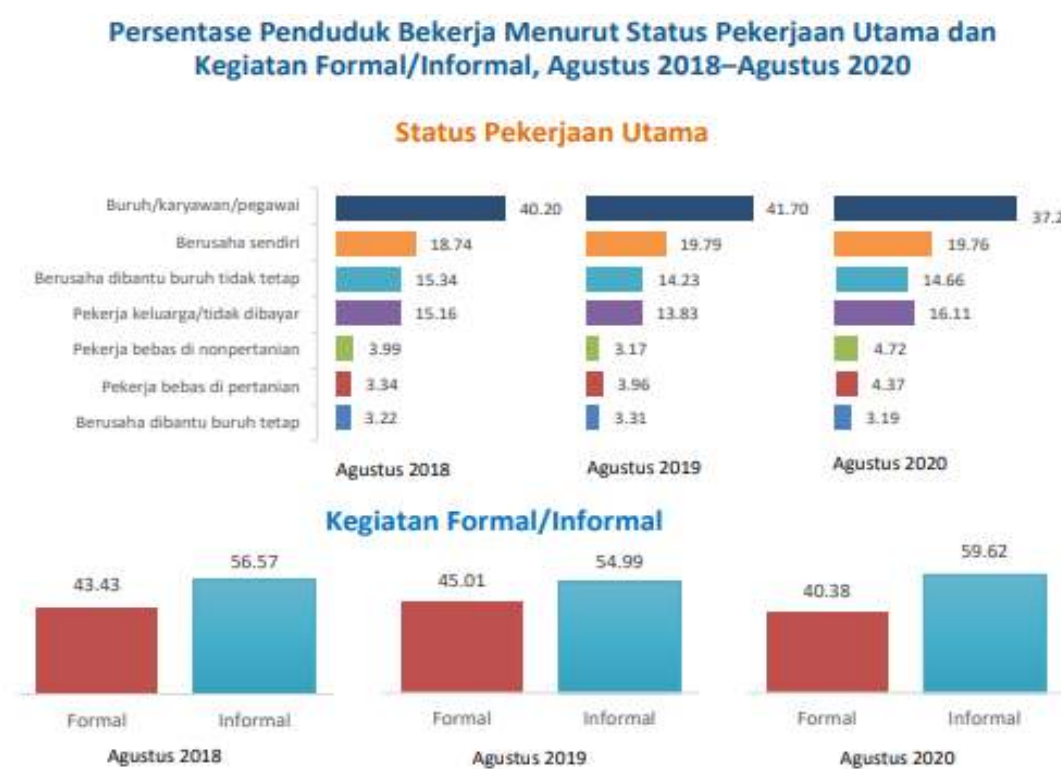
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	9.642	9.789	10.356	10.532	10.703
2	Angkatan Kerja (ribu orang)	6.363	6.743	7.453	7.411	7.350

Sumber : BPS Provsu, Agustus 2020

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 61 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun menjadi 68,67 persen pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019 (70,37 persen). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 37,2 persen. Walaupun demikian, mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 4,5 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sedangkan status pekerjaan utama yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pekerja keluarga/tak dibayar meningkat 2,28 persen poin, dan pekerja bebas di non pertanian yang meningkat sebesar 1,55 persenpoin. Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2020, penduduk yang bekerja di kegiatan informalsebanyak 4,079 juta orang (59,62 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 2,763 juta orang (40,38 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019.

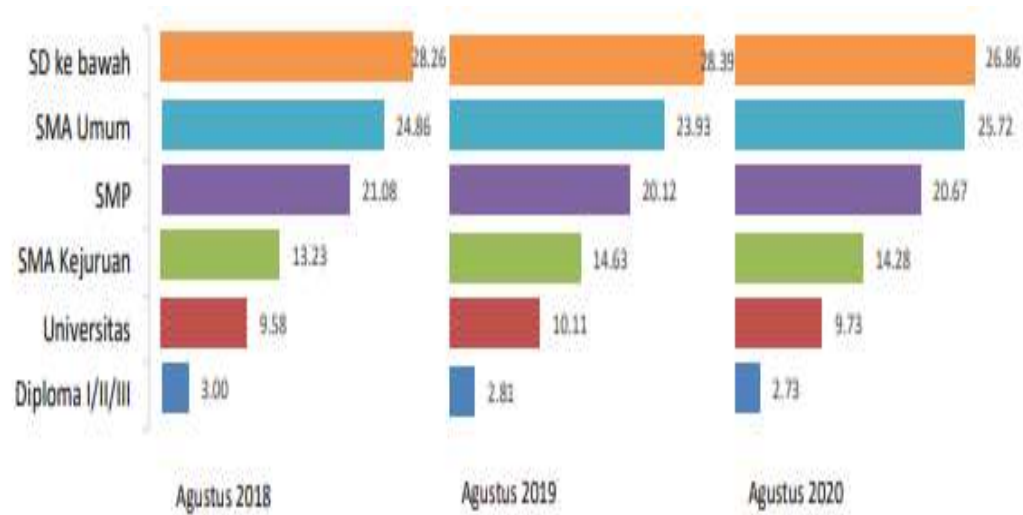


Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Grafik.2.50
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 26,86 persen pada Agustus 2020. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,46 persen pada Agustus 2020.



Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Grafik.2.51
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020

Dibandingkan dengan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (1,53 persen poin), Universitas (0,38 persen poin), SMA Kejuruan (0,35 persen poin) dan DI/II/III (0,08 persen poin). Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMA, dan SMP mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 1,79 persen poin.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan Angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 (Angkatan kerja)

Tabel. 2.122
Rasio Ketergantungan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketergantungan	56,11	55,88	55,69	55,51	55,28

Sumber : Dinas Tenaga Kerja/ BPS Provsu

2.4.5. Indikator Lain yang mendukung Aspek Daya Saing

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan.

Capain Reformasi Birokrasi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.123
Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	B	B

Sumber : Biro Organisasi Provsu

2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara

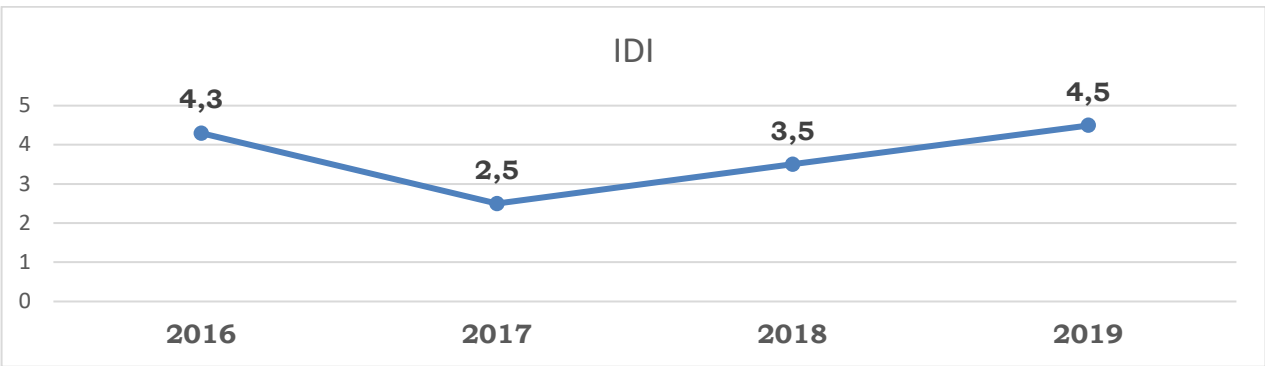
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2019 sebesar 67,65 dalam skala 0 sampai 100, berada dibawah IDI Nasional sebesar 74,92. Angka IDI Sumatera Utara 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 64,33. Capaian IDI Sumatera Utara ini masuk pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara dari tahun 2018 ke tahun 2019 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 4,00 poin (dari 76,54 menjadi 72,54), (2) Hak-Hak Politik turun 1,02 poin (dari 62,61 menjadi 61,59), dan (3) Lembaga-Lembaga Demokrasi Naik 19,43 poin (dari 51,69 menjadi 71,12).

Perkembangan IDI Sumatera Utara adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik.2.52
Perkembangan IDI Sumatera Utara

3. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu (1). Toleransi, (2). Kesetaraan, dan (3). Kerjasama. Indek Kerukunan Umat Beragama dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme

Indeks ini menarik beberapa rumusan. Salah satunya kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing. Selain itu juga menyoroti soal tidak boleh merendahkan agama satu atas agama yang lain. Hal ini terlihat dengan adanya kesetaraan para pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya dan tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama masing-masing.

Kerukunan Umat Beragama terwujud pada kerja sama dalam membangun masyarakat dalam prinsip saling bahu-membahu dan sama-sama mengambil manfaat dan eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.124
Indeks Kerukunan Umat Beragama

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA	73,5	69,1	76,3	76,3

Sumber : Kesbangpol
*) Angka Sementara

4. Indeks Resiko Bencana Daerah (IRB)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan

menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam Menyusun penjelasan peta risiko.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melakukan Tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Jika dilihat dari perkembangan daerah Pulau Sumatera, maka rata kelas resiko dinyatakan tinggi termasuk Sumatera Utara, sedangkan kelas Resiko sedang berada pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera selatan, capaian Indeks Resiko Bencana di Wilayah Sumatera dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.125
Indeks Resiko Bencana Indonesia Wilayah Sumatera

No	Provinsi	Skor	Kelas Resiko
1	Aceh	160	Tinggi
2	Sumatera Utara	150	Tinggi
3	Sumatera Barat	153	Tinggi
4	Riau	147	Tinggi
5	Kepulauan Riau	116	Sedang
6	Jambi	142	Sedang
7	Bengkulu	172	Tinggi
8	Sumatera Selatan	142	Sedang
9	Kepulauan Bangka Belitung	162	Tinggi
10	Lampung	153	Tinggi

Sumber : BPBD Provsu

2.4.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

- 1. Pendidikan, dengan SPM sebagai berikut :**
 - a. Pendidikan Menengah
 - b. Pendidikan Khusus
- 2. Kesehatan, dengan SPM sebagai berikut**
 - a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi
 - b. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan SPM sebagai berikut**
 - a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan SPM sebagai berikut**
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi
- 5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan SPM sebagai berikut**
 - a. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi
- 6. Sosial, dengan SPM sebagai berikut**
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera telah menerapkan keenam SPM tersebut sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.126
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2020	OPD
SPM Pendidikan				
1	Pendidikan menengah	Persentase Guru SMA berkualifikasi Akademik S1/D4	97	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	94,72	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru SMA bersertifikasi	54,7	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru SMK bersertifikasi	43	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan khusus	Persentase Guru SLB bersertifikasi	44.4 (2019)	Dinas Pendidikan
SPM Kesehatan				
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	977.949 Orang (100%)	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Dinas Kesehatan
SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	61,04	Dinas SDA CKTR
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Rasio pengolahan domestik oleh SPAM REgional	36,99	Dinas SDA CKTR
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	100%	Dinas PKP
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Rasio Rumah Layak Huni	100%	Dinas PKP
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	5.689.104.482 jiwa	Satpol PP

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2020	OPD
SPM SOSIAL				
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	1.167	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	530	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	293	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	285	Dinas Sosial
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	NA	

Keseluruhan capaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana telah diuraikan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, telah disajikan diatas. Sebagian dari realisasi kinerja tidak dapat disajikan setiap tahun sebab adanya perbedaan indikator kinerja untuk mengukur capaian pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah pada RPJMD Tahun 2013-2018. Terdapat beberapa indikator kinerja yang dipakai di kedua periode RPJMD ini, namun ada juga yang hanya digunakan di periode 2013-2018 demikian pula sebaliknya. Selain itu, pada Tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera melakukan perubahan RPJMD Tahun 2019-2023. Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.127
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2019-2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,3	5,22	5,4	-1,07	Seluruh Perangkat Daerah	<
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	55	55,05	59	55,55	Seluruh Perangkat Daerah	<
3	PDRB Per Kapita (ADHK 2010)	Juta Rupiah	36	37,05	37	36,31	Seluruh Perangkat Daerah	<
4	PDRB menurut Pengeluaran	Rupiah	950.000	1.063.964	1.050.000	1.042.000	Seluruh Perangkat Daerah	<
5	Laju Inflasi	Persen	2,95	2,33	2,9	1,96	Seluruh Perangkat Daerah	<
6	Indeks Gini	Poin	0,325	0,315	0,32	0,316	Seluruh Perangkat Daerah	<
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL							
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	8,43	9,14	Seluruh Perangkat Daerah	<
2	Jumlah Penduduk Miskin	oran	1.298.513	1.260	1.247.505	1.356	Seluruh Perangkat Daerah	<
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,12	71,74	71,67	71,77	Seluruh Perangkat Daerah	<
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,87	90,71	90,93	90,93	Dinas PP PA	<
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,34	72,5	71,61	90,93	Dinas PP PA	<
6	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,79	9,45	9,97	9,54	Dinas Pendidikan	<
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,15	13,81	13,23	Dinas Pendidikan	<
8	APK SM Sederajat	Persen	97,44	100,83	98,14	105,12	Dinas Pendidikan	<
9	APM SM Sederajat	Persen	71,49	80,61	73,19	73,69	Dinas Pendidikan	<
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,54	68,69	68,72	69,1	Dinkes	<
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,01	70,19	74,2	72	Dinas Tenaga Kerja	<
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,41	5,45	6,91	Dinas Tenaga Kerja	<
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA							
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Persen	-	55	-	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	Persentase Pembinaan cabang Olahraga	Persen	90	90	91	91	Dinas Pemuda dan Olahraga	=
3	Persentase Pembinaan Atlit Muda (Atlit Pelajar	Persen	88	88	90	90	Dinas Pemuda dan Olahraga	=

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB							
B.1.1	PELAYANAN DASAR							
1	PENDIDIKAN							
1.1	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	96,2	90.14	97	96,61	Dinas Pendidikan	<
1.2	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	56,1	52.07	57,4	48,97	Dinas Pendidikan	<
1.3	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	94,42	90.48	94,72	93,55	Dinas Pendidikan	<
1.4	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	42,7	40.77	43,4	38,72	Dinas Pendidikan	<
2	KESEHATAN							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	4,5	2,61	4,3	2,39	Dinkes	<
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	11,01	11,97	10,99	12,24	Dinkes	<
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	80,1	66,76	75,1	62,5	Dinkes	<
2.4	Prevalensi Stunting	Persen	31,5	30,7	30,5	29,2	Dinkes	<
2.5	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	100	73,85	95	68,34	Rumah Sakit Jiwa Daerah	<
2.6	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	65	70,59	61	79,83	Rumah Sakit Jiwa Daerah	=
2.7	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	55	46	60	27	Rumah Sakit Haji Medan	<
2.8	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	6	4	6	4	Rumah Sakit Haji Medan	<
2.9	Bed Turn Over (BTO) 40-50 Rumah Sakit Haji	Persen	40	38	42	23	Rumah Sakit Haji Medan	<
2.10	Turn Over Internal (TOI) Rumah Sakit Haji	Hari	3	5	3	1	Rumah Sakit Haji Medan	<
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
3.1	PEKERJAAN UMUM							
3.1.1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,99	82,19	84,52	75,02	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi	<
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,26	83,71	84,78	83,8	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi	<

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	-	10,71	2,68	10,88	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi	=
3.1.4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	Persen	89,23	76,94	89,66	76,95	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	<
3.1.5	Cakupan Akses Minum Perpipaan	Persen	15,28	32,26	15,77	32,26	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	=
3.1.6	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR)	Persen	100	29.086	200	29.086	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	<
3.1.7	Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten/kota (TPA Regional)	Persen	1	0	1	0	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	<
3.1.8	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	Persen	500.000	255.000	535.000	254.560	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	<
3.1.9	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal	Persen	82,5	82,5	84	83,31	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	<
3.1.10	Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal	Persen	55	55	57,5	57,45	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	<
3.1.12	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	Persen	5.000	330.000	20.000	350.000	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	>
3.2	PENATAAN RUANG							
3.2.1	Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	Persen	70	84,32	70	84,32	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	>
3.2.2	Tersedianya regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang (Perda/Pergub)	Perda	1 Perda/Pergub	0	1 Perda/Pergub	0	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	<
3.2.3	Tersedianya regulasi daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang diterbitkan (Perda)	Perda	0	0	1 Perda	0	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	<
3.2.4	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	Persen	20	86,67	40	86,67	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	>
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
4.1	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Persen	92,72	94.1	93,22	95.77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<
4.2	Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	Persen	135 ha	88	135 ha	28.4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	Unit	3000	3.491	3000	3.491	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	12,978	10.383	16,226	NA	Satpol PP	<
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	-	65	20	68	NA	Satpol PP	<
5.3	Persentase Penegakan PERDA	Persen	45	59	60	33,33		<
5.4	Persentase LSM Aktif	Persen	100%	100	100%	100	Bakesbangpol	=
5.5	Persentase Partisipasi Pemilih	Persen	64	80	64	80	Bakesbangpol	=
5.6	Persentase Pertambahan Ormas	Persen	20	155	20	155	Bakesbangpol	>
5.7	Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial	-	9	10	9	10	Bakesbangpol	>
5.8	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	0,0338	100	3,42	100	Bakesbangpol	>
5.9	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	Kab/Kota	33	33	33	33	BPBD	=
5.10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	3	3	4	3	BPBD	=
5.11	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	-	2	2	2	0	BPBD	<
5.12	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	150	134,4	150	BPBD	<
6	SOSIAL							
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Orang	1.167	1.167	1.167	1.167	Dinas Sosial	=
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	Orang	530	530	530	530	Dinas Sosial	=
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang	293	293	293	293	Dinas Sosial	=
6.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	Orang	285	385	285	285	Dinas Sosial	=

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	2.000	2.000	2.000	NA	Dinas Sosial	=
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR							
1	TENAGA KERJA							
1.1	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	Persen	5,47	93,13	5,47	95,27	Dinas Tenaga Kerja	<
1.2	Angka Kesempatan Kerja (jiwa)	Jiwa	6.452.182	6.452.182	6.683.245	6.966.127	Dinas Tenaga Kerja	<
1.3	Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK)	Juta Rp./TK	21,95	21,95	22,59	9,61	Dinas Tenaga Kerja	<
1.4	Angka Penganggur Terbuka (jiwa)	Jiwa	383.088	383.088	389.086	508.000	Dinas Tenaga Kerja	<
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.1	Pesentase Kabupaten/kota layak Anak (menuju)	Persen	30	14	45	NA	Seluruh Perangkat Daerah	<
2.2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	Persen	50	73	60	98	Dinas PP dan PA	>
2.3	Persentase Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persen	60	97	72	94	Dinas PP dan PA	>
2.4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	15	5/100.000	4	5/100.000	Dinas PP dan PA	>
2.5	Rasio kekerasan terhadap Anak	/100.000	20	11/100.000	10	12/100.000	Dinas PP dan PA	>
2.6	Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang <i>up to date</i>	Persen	60	63	65	30	Dinas PP dan PA	<
3	PANGAN							
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	89,60	92,3	83,77	Dinas Ketapang	<
3.2	Produksi Daging (ton)	Ton	169.775,74	258.090,36	175.551,96	218.083,49	Dinas Ketapang	>
3.3	Produksi Telur (ton)	Ton	186.062,33	541.234,15	191.961,45	470.179,22	Dinas Ketapang	>
3.4	Produksi susu (ton)	Ton	1.587,56	3.489,84	1.661,68	5.150,72	Dinas Ketapang	>
5	LINGKUNGAN HIDUP							
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	Persen	68	68,2	68,7	69,37	Dinas Lingkungan Hidup	>
	- Indeks Kualitas Air (%)	Persen	78	78,8	79	69,37	Dinas Lingkungan Hidup	<
	- Indeks Kualitas Udara (%)	Persen	86	86,6	87	89,3	Dinas Lingkungan Hidup	>
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Persen	47	46,45	47,26	46,45	Dinas Lingkungan Hidup	<

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
6.1	Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	Persen	84	91,78	87	98,91	Disdukcapil	>
6.2	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	71	75,33	76	78,63	Disdukcapil	>
6.3	Cakupan Akte Perkawinan	Persen	32	12	37	NA	Disdukcapil	
6.4	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	12 Kab/Kota	4	17 Kab/Kota	NA	Disdukcapil	>
6.5	Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan	Persen	26 OPD	26	32 OPD	NA	Disdukcapil	>
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
7.1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	Persen	30	3,4	32	3,4	Dinas Pemdes	>
7.2	Persentase Kelompok Binaan PKK	Persen	40	95	42	NA	Dinas Pemdes	>
7.3	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	5	95	6	NA	Dinas Pemdes	>
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	-	2,86	3,04	2,84	3,07	Dinas PP dan KB	<
8.2	Rata-rata Anak Per Keluarga	-	2,2	2,28	2,18	2,4	Dinas PP dan KB	<
8.3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	Persen	59,2	68,72	59,39	70,69	Dinas PP dan KB	<
8.4	Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	Tahun	22,02	20,8	22,11	20,7	Dinas PP dan KB	>
8.5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	19	18,41	18	23,3	Dinas PP dan KB	<
8.6	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	12,5	12,1	11,5	15,2	Dinas PP dan KB	<
8.7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	32	39,21	34	25,03	Dinas PP dan KB	<
8.8	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	59,1	57,77	62,25	57,11	Dinas PP dan KB	>
8.9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	43,2	71,23	45,15	72,31	Dinas PP dan KB	<

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	54,2	72,52	56,7	70,71	Dinas PP dan KB	<
9	PERHUBUNGAN							
9.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	90	39,32	92	39,32	Dinas Perhubungan	<
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
10.1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persen	84	61	86	61	Diskominfo	=
10.2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	Persen	20	20	41	31	Diskominfo	>
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	58	35,91	59	20,19	Dinas Koperasi dan UKM	<
11.2	Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	Unit	2.858.000	2.860.248	2.860.000	2.859.000	Dinas Koperasi dan UKM	<
12	PENANAMAN MODAL							
12.1	Investor PMDN (Proyek)	Proyek	309	525	200	594	DPM&P2TSP	>
12.2	Investor PMA (Proyek)	Proyek	380	424	337	581	DPM&P2TSP	>
12.3	Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	8,37	14,29	11,89	9,85	DPM&P2TSP	<
12.4	Nilai Investasi PMA (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	16,45	4,49	21,1	9,18	DPM&P2TSP	<
12.5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	Persen	38,19	18,5	33	20,11	DPM&P2TSP	<
12.6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA	Persen	11,26	10,93	11,3	10	DPM&P2TSP	<
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	28,35	24,34	68,5	66	DPM&P2TSP	<
12.8	Lama Proses Perizinan						DPM&P2TSP	<
	- PMDN	Hari	3	3	3	Mar-40		
	- Sektoral	Hari	Mar-40	Mar-40	Mar-40	Mar-40		
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	71	71	73	73	Dinas Pemuda dan Olah Raga	>
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	56	56	62	62	Dinas Pemuda dan Olah Raga	>
13.3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	Persen	90	90	91	91	Dinas Pemuda dan Olah Raga	>
13.4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	Persen	71	71	75	75	Dinas Pemuda dan Olah Raga	>

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.5	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	88	88	90	90	Dinas Pemuda dan Olah Raga	>
14	STATISTIK							
14.1	Data Statistik Sektoral	Persen	25	69	50	69	Diskominfo	>
15	PERSANDIAN							
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	10	10	25	10	Diskominfo	<
16	KEBUDAYAAN							
16.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	-	10	-	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<
17	PERPUSTAKAAN							
17.1	Persentse Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persen	160.395	237.706	192.474	52.664	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<
17.2	Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Persen	11,611	10.100	11,959	1.150	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Persen	0,06	0,01	0,08	0,01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<
17.4	Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	-	2.864	19.808	3.723	106	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<
17.5	Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Buku	3.441	1.720	4.474	1.150	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<
17.6	Indeks Minat Membaca	Poin	1	NA	1,4	0,4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<
18	KEARSIPAN							
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	4	20	4,62	6,12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Jiwa	50	15.432	60	NA	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
1	PARIWISATA							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Persen	8,15	7,46	8,56	6.36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<
1.2	Kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah	280.000	213.858	300.000	45.902	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<
1.3	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2,26	1,38	2,36	1.15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<
2	PERTANIAN/ PERKEBUNAN							
	Pertanian							
2.1	Produksi Tanaman Pangan						Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	
	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	5,375,167.60	4.693.563	5,498,796.45	4.200.112		<
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1,829,409.19	1,960,424	1,875,144.42	1.965.444		<
	3. Kedele (ton)	Ton	8.905,03	9.627	9.528,38	4.003		<
2.2	Produktivitas Tanaman Pangan						Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5,22	4,66	5,23	5,1		<
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6,24	6,14	6,27	6,12		<
	3. Kedele (ton/ha)	Ton/Ha	1,3	1,73	1,31	1,56		<
2.3	Produksi Tanaman Holtikultura						Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	16.918,42	18.072	17.341,39	29.196		
	2. Cabe (ton)	Ton	168.822,08	154.008	173.886,74	193.862		<
	3. Sayur-sayuran (ton)	Ton	998.498,42	1.130.462	1,008,483.41	1.270.084		<
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1.180.230,44	1.107.154	1.193.212.,98	1.249.380		<
2.4	Produktivitas Tanaman Holtikultura						Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	7,89	8,04	7,99	9,55		>
	2. Cabe (ton)	Ton	9,91	9,61	10,02	10,48		>
	Perkebunan							
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)		3%	3,74%	3%	2,36%	Dinas Perkebunan	<

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	Produksi		7.589.709,23	7.569.995,7	7.818.400,52	7.766.705,00	Dinas Perkebunan	<
	1. K. Sawit (ton)	Ton	7.004.659,63	7.006.986,36	7.223.006,12	7.199.750,00		<
	2. Karet (ton)	Ton	323.589,02	309.973,00	326.824,91	310.016,00		<
	3. Kopi Arabika (ton)	Ton	65.327,91	66.831,00	67.666,65	67.469,00		<
	3. Kopi Robusta (ton)	Ton	9.223,04	8.091,00	9.407,50	9.128,00		<
	4. Kelapa (ton)	Ton	102.943,95	99.132,00	106.311,66	99.992,00		<
	5. Kakao (ton)	Ton	41.936,76	34.792,00	42.146,44	35.696,00		<
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	Ton	42.028,92	44.190,34	43.037,24	48.057,00		<
2.7	Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao)						Dinas Perkebunan	
	1. K. Sawit (kg/Ha/tahun)	kg/Ha/ta hun	16.202,11	18.273,20	16.445,14	18.263,87		>
	2. Karet (kg/Ha/tahun)	kg/Ha/ta hun	1.091,35	1.144,76	1.098,25	1.144,85		>
	3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun)	kg/Ha/ta hun	1.158,65	1.203,08	1.181,83	1.202,87		>
	3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun)	kg/Ha/ta hun	795,27	778,8	807,2	779,37		<
	4. Kelapa (kg/Ha/tahun)	kg/Ha/ta hun	1.067,41	1.096,36	1.070,61	1.099,38		>
	5. Kakao (kg/Ha/tahun)	kg/Ha/ta hun	1.029,25	947,55	1.030,00	957,71		<
	6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun)	kg/Ha/ta hun						
2.8	Luas Areal	Ha					Dinas Perkebunan	
	1. K. Sawit (Ha)	Ha	437.889,03	439.315,00	443.581,59	440.003,00		>
	2. Karet (Ha)	Ha	393.189,02	369.391,00	393.189,02	369.392,00		<
	3. Kopi Arabika (Ha)	Ha	73.214,13	77.765,00	74.495,38	77.834,00		>
	3. Kopi Robusta (Ha)	Ha	19.609,88	17.609,00	19.805,98	17.643,00		<
	4. Kelapa (Ha)	Ha	109.935,50	110.345,00	110.760,02	110.464,00		<
	5. Kakao (Ha)	Ha	56.630,65	54.314,00	57.055,38	54.412,00		<
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	Ha	63.000,41	63.390,58	63.438,56	63.542,25		
2.9	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2018	Persen		20,48		26,77		
3	KEHUTANAN							
3.1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	Ha	276.336	275.711	276.226	275.861	Dinas Kehutanan	<

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Peurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	60,5	59.780	59,5	58.727.87	Dinas Kehutanan	>
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Persen	0.84	0,84	0.85	0,83	Dinas Kehutanan	<
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
4.1	Daya Listrik Terpasang	-	4,244.00	4.814,40	5,307.00	4.838	Dinas ESDM	<
4.2	Rasio Elektrifikasi	Persen	99.90	99,99	100.00	99,11	Dinas ESDM	<
5	PERDAGANGAN							
5.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	6,48	8,00	6,50	-1,94	Disperindag	<
5.2	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US\$	3.132,85	2.906.757	4.106,36*	2.495.790	Disperindag	>
6	PERINDUSTRIAN							
6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	3.27	1,23	3.29	-0,84	Disperindag	<
6.2	Pertumbuhan Industri						Disperindag	
	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Persen	5.00	-5,11	6.00	-5,11	Disperindag	<
	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Persen	8.50	9,01	9.10	9,01	Disperindag	<
7	TRANSMIGRASI							
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
8.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg/kap/tahun	44.24		45.57		Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.4	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	544,232.57	540.421,70	60,559.54	336.335,72	Dinas Kelautan dan Perikanan	>
8.5	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	237,222	246.908,30	244,339	146.603,40	Dinas Kelautan dan Perikanan	<
8.9	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	Ha	138,438.4	NA	25	11.345	Dinas Kelautan dan Perikanan	<
8.10	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m²)	m²	500	NA	500	230	Dinas Kelautan dan Perikanan	<
8.11	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	Ha	3	NA	3	2	Dinas Kelautan dan Perikanan	<
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
1.1	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	96,26	Bappeda	<
1.2	Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam Penjabaran APBD	Persen	100	100	100	95,15	Bappeda	<
1.3	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	Persen	80	78	85	85	Bappeda	=
2	KEUANGAN							
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	=
2.2	Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	11.5	3,21	1.73	10,5	BPKAD	>
2.3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	-	25.00	24,74	25.35	12,2	BPKAD	<
2.4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	-	19.00	18,24	19.35	2,4	BPKAD	<
2.5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	-	36:64	0,9708333	38:62	10:53	BPKAD	<
2.6	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	-	11.03	22,72	10.72	13	BPKAD	>
2.7	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD	=
3	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							
8,1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	48,25	49	50,38	51	BP2RD	<
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jam	36 hari	8	36 hari	NA	BPSDM	
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	17.49	NA	19.24	19,2	BPSDM	<
4	KEPEGAWAIAN DAERAH							
4.1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	-	60	60	60	45	BKD	<

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Jabatan Administrasi Pada Instasi Pemerintah	-	1	398	1	399	BKD	<
4.3	Jabatan Pengawas Pada Instasi Pemerintah	-	1,122	1.122	1,122	1.017	BKD	<
4.4	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instasi Pemerintah	-	25	18.346	26	18.265	BKD	<
	Nilai sistem Merit							
	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM)							
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	Persen	20	120	20	NA	Balitbang	<
5.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	20%	40	20%	NA	Balitbang	<
	Penerapan SIDA:							<
5.4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	Persen	15	150	20	61	Balitbang	<
5.5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	50		50	50	Balitbang	<
6	PENGAWASAN							
6.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	71	86	76	78	Inspektorat	>
6.2	Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas	Persen	50	52,4	55	65	Inspektorat	>
7	PENGHUBUNG							
7.1	Persentase hubungan antar lembaga	Persen	50	82	60	62	Badan Penghubung	>
7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	50	79	60	40	Badan Penghubung	<
8	SEKRETARIAT DEWAN							
8.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi	Laporan	10	10	10	NA	Setwan	=
8.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Program	9	9	9	9	Setwan	=

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Program	9	9	9	9	Setwan	=
9	SEKRETARIAT DAERAH							
9.1	Persentase penyelesaian batas daerah	Persen	20	11	15	28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	>
9.2	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	4	19	4	7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	>
9.3	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	Persen	100	100	100	50	Biro Hukum	<
9.4	Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	Persen	100	100	100	50	Biro Hukum	<
9.5	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	B	B	B	B	Biro Organisasi	=
9.6	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	Biro Organisasi	=
9.7	Nilai capaian pelaporan kinerja	Poin	B	B	B	B	Biro Organisasi	=
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.1.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	86.99	45,83	88.00		Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan	
1.2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100.10	98,91	100,1	115,21	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan	>
	- Peternakan	Skor	113.65	114,78	114.44	98.74	DKP	<
	- Pangan	Skor	100.62	91,92	100.64	96,90	DKP	<
	- Holtikultura	Skor	100.98	94,81	101.01	97,28	TPH	<
	- Perikanan	Skor	101.12	102,34	101.14	99,52	Diskanla	<
	- Perkebunan	Skor		97,38		125,05	Dinas Perkebunan	>

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2019		2020			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
2.1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,99	82,19	84,52	75,02	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi	<
2.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,26	83,71	84,78	83,8	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi	<
2.3	Rasio Elektrifikasi	Persen	99.90	99,99	100.00	99,11	Dinas ESDM	<
3	Fokus Iklim Berinvestasi							
3.1	Tingkat Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara	Persen	-	2.40	-	2,4	Kesbangpol	
4	Fokus Sumber Daya Manusia							
4.1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)			10.532		10.703		<
4.2	Angkatan Kerja (ribu orang)			7.411		7.350		<
4.3	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	96,2	97	97	97	Dinas Pendidikan	=
4.4	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	56,1	53,2	57,4	54,7	Dinas Pendidikan	<
4.5	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	94,42	39,9	94,72	43	Dinas Pendidikan	<
4.6	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	42,7	94,2	43,4	94,72	Dinas Pendidikan	>
5	Dukungan Terhadap Daya Saing							
5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	Biro Organisasi	=
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatra Utara	Persen	69,02	67,65	69,04	69,06	Bakesbangpol	>
5.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	77	76	80	80	Bakesbangpol	=
5.4	Indeks Resiko Bencana Daerah	Poin	145	150	134,4	150	BPBD	>

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (Money Follow Priority).

Secara ringkas, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan dilakukannya perubahan perencanaan, dimana kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun fiskal Tahun 2019 dan 2020. Realisasi beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan untuk dicantumkan dalam rangka memperkaya analisis. Data dan informasi dimaksud digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, khususnya pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara akan dijelaskan sebagaimana berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

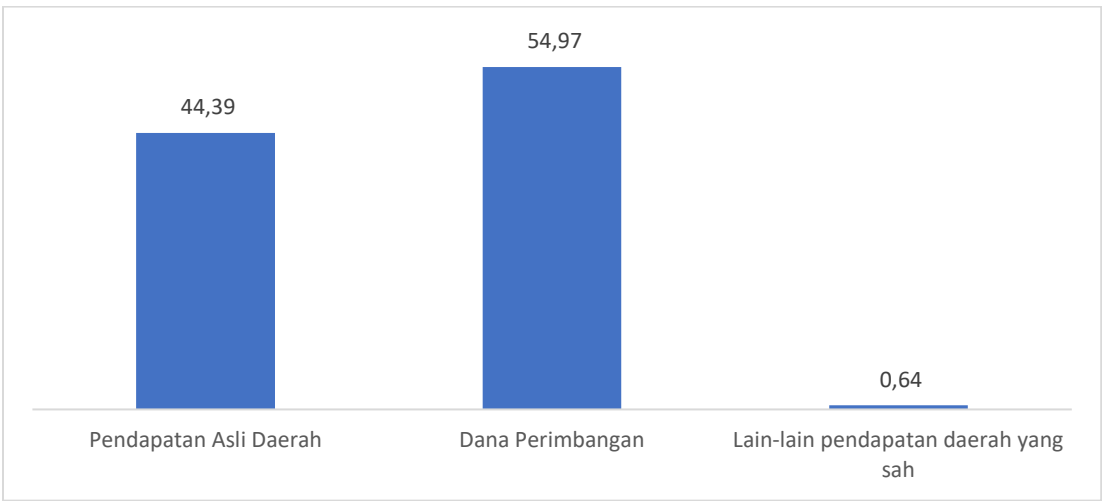
Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

No.	Pendapatan Daerah	Tahun					Rerataan	
		2016	2017	2018	2019	2020	Rp.	%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.954.833.100.869	5.287.469.401.500	5.638.960.579.479	5.761.270.412.051	5.531.237.378.775	144.101.069.476	1.22
1.1.1	Pajak daerah	4.446.393.905.465	4.823.549.139.196	5.219.324.543.311	5.058.443.944.654	5.071.597.922.390		
1.1.2	Retribusi daerah	34.505.500.522	34.289.674.008	36.614.846.458	38.408.031.263	30.218.319.711		
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	259.493.568.323	195.827.847.225	191.995.313.161	436.284.942.769	242.309.156.857		
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	214.440.126.559	233.802.741.071	191.025.876.549	228.133.493.365	187.111.979.817		
1.2	Dana Perimbangan	5.219.273.756.069	6.928.134.939.913	7.055.134.429.266	7.300.647.588.241	7.347.748.112.410	532.118.589.085	9.67
1.2.1	Dana bagi hasil pajak	511.083.219.609	446.154.989.086	455.531.997.729	381.304.117.881	426.453.173.226		
1.2.2	Dana bagi hasil bukan pajak	-	14.702.344.765	58.317.018.988	-	42.230.415.196		
1.2.3	Dana alokasi umum	1.604.505.673.000	2.629.224.545.000	2.629.224.545.000	2.713.750.553.000	2.474.465.343.000		
1.2.4	Dana alokasi khusus	3.103.684.863.460	3.838.053.061.062	3.912.060.867.549	4.205.592.917.360	4.404.599.180.988		
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	266.512.073.463	19.233.540.126	8.963.579.146	17.680.635.177	37.374.259.306	57.284.453.539	15.61
1.3.1	Hibah	221.411.401.185	6.123.603.000	8.963.579.146	17.680.635.177	27.501.580.306		
1.3.6	Lainnya	5.434.349.278	13.109.937.126	-	-	9.872.679.000		
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		10.440.618.930.401	12.234.837.881.539	12.703.058.587.891	13.079.598.635.469	12.916.359.750.491	618.935.205.022	5.68

Sumber : LRA Tahun 2016-2020 BPKAD Provsu

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun 2016–2020, realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat rata-rata 5,68% persen setiap tahunnya. Secara persentase pertumbuhan, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan rerataan pertumbuhan terbesar yaitu 15,61 persen kemudian diikuti oleh rerataan komponen Dana Perimbangan sebesar 9,67 persen kemudian komponen Pendapatan Asli Daerah.



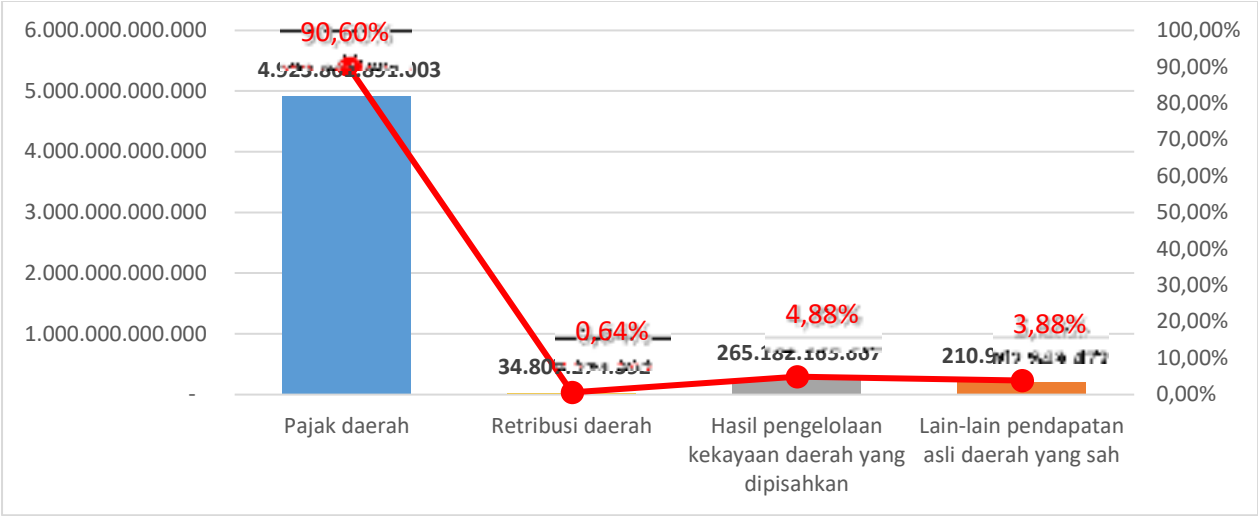
Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Gambar 3.1
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2020 (persen)

Dari Gambar 3.1 di atas dapat dilihat bahwa komponen Dana Perimbangan masih mendominasi struktur keuangan daerah kurun waktu tahun anggaran 2016-2020 dimana secara rerataan proporsi Dana Perimbangan mencapai 54,97 persen diikuti oleh komponen Pendapatan Asli Daerah mencapai 44,39 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tercatat rerataannya sebesar 0,64 persen.

a) Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 90,60 persen. Sisanya terdiri Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4,88 persen, Lain – lain pendapatan asli daerah 3,88 persen, dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 0,64 persen

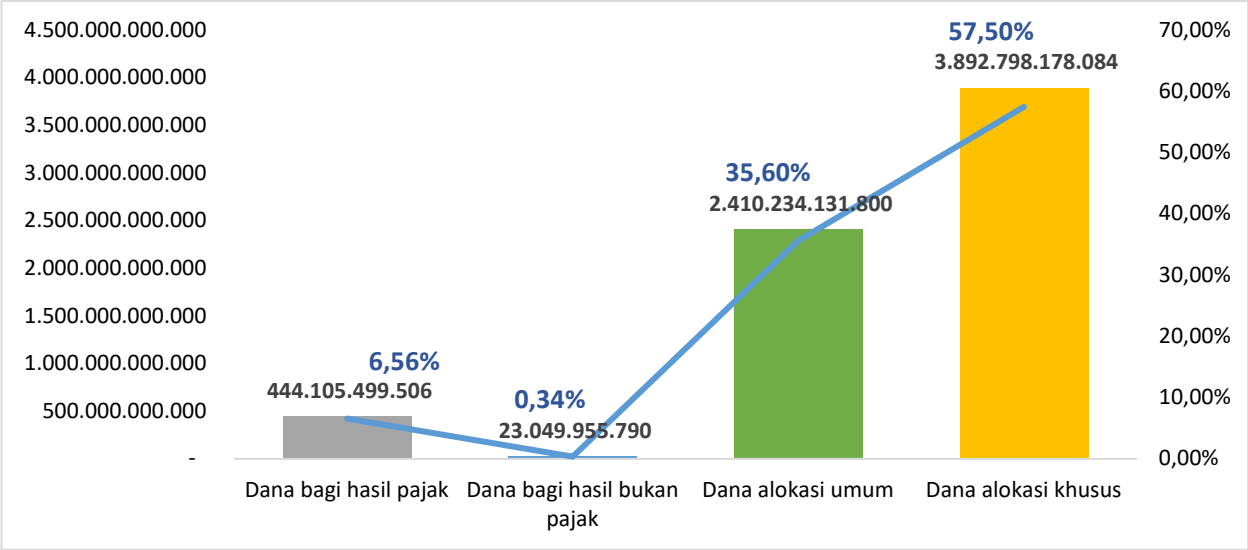


Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Gambar 3.2
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

b) Dana Perimbangan

Pada kelompok Dana Perimbangan selama Tahun 2016-2020 masih bertumpu kepada Dana Alokasi Khusus yang tercatat sebesar 57,50 persen atau senilai Rp. 3,89 Trilyun yang kemudian besaran Dana Alokasi Umum sebesar 35,60 persen atau sebesar Rp. 2,41 Trilyun selanjutnya besaran Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 6,56 persen atau Rp. 444,10 Milyar dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang tercatat sebesar 0,34 persen atau senilai Rp. 23,04 Milyar.



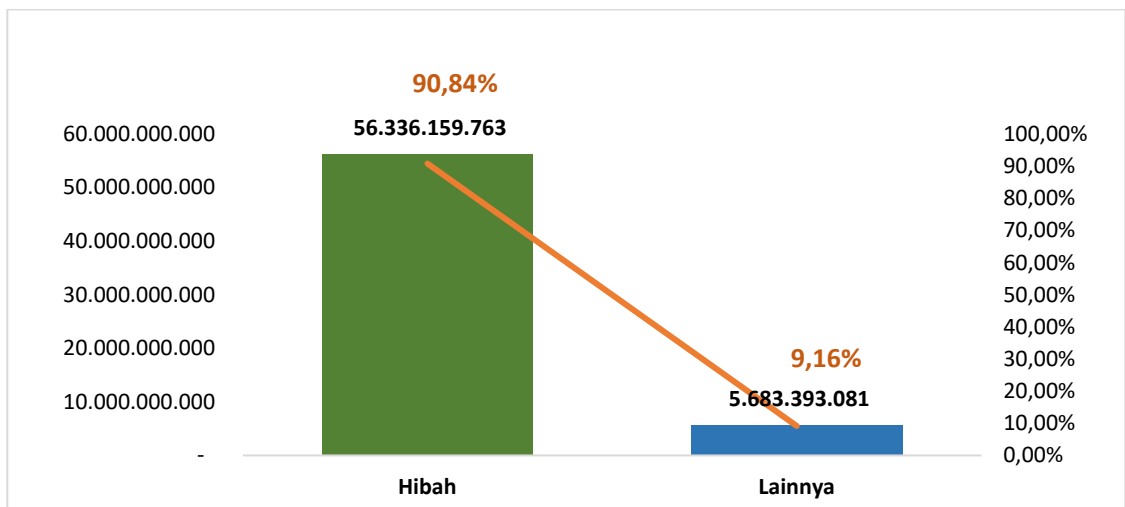
Sumber: LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020, diolah

Gambar 3.3
Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016-2020

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penyumbang terbesar dari pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah kurun waktu tahun anggaran 2016-2020 adalah Pendapatan Hibah

sebesar 90,84 persen atau senilai Rp. 56,33 Milyar. Lainnya berjumlah 9,16 persen atau senilai Rp. 5,68 Milyar.



Sumber: LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020, diolah

Gambar 3.4
Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020

A. Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi anggaran di Tahun 2021.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun Realisasi belanja daerah tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Rekening Kode	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	Belanja	9.476.423.914.545	12.518.868.105.165	12.563.387.549.665	13.440.442.948.918	12.653.607.434.218	8,40
5.1	Belanja Tidak Langsung	7.037.202.954.813	8.174.442.896.374	8.780.514.878.664	9.713.493.021.297	9.192.545.412.919	7,21
5.1.1	Belanja Pegawai	1.115.950.649.213	3.140.130.713.120	3.464.489.476.375	3.442.672.223.944	3.257.129.216.426	46,42
5.1.2	Belanja Subsidi						
5.1.5	Belanja Hibah	3.010.055.530.000	2.987.423.174.742	3.165.070.721.289	2.972.714.748.000	3.066.759.068.400	0,57
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.774.649.016.371	2.029.470.741.512	1.569.730.611.414	3.269.478.492.542	1.717.964.170.000	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	134.545.437.669	2.443.753.800	528.068.540.828	7.328.381.100	0	5.328,03
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.002.321.560	14.974.513.200	53.155.528.758	21.299.175.711	1.150.692.958.093	1.536,36
5.2	Belanja Langsung	2.439.220.959.732	4.344.425.208.791	3.782.872.671.001	3.726.949.927.621	3.461.062.021.299	14,14
5.2.1	Belanja Pegawai	150.934.730.809	111.765.770.470	119.909.842.025	84.865.411.799	80.693.955.366	-13,20
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.268.431.086.313	2.313.207.402.407	2.098.059.596.323	2.306.825.620.585	1.882.423.096.800	16,15
5.2.3	Belanja Modal	1.019.855.142.610	1.919.452.035.914	1.564.903.232.653	1.335.258.895.237	1.497.944.969.133	16,81

Sumber : LRA Tahun 2016-2020 BPKAD Provsu

Gambaran belanja daerah berdasarkan tabel 3.2 yaitu periode Tahun 2016-2020 bahwa belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,40 persen. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,21 persen. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah Belanja Bantuan Keuangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.303,03 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018, kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan realisasi Bantuan Keuangan tahun 2018 sebesar Rp. 525.624.787.028,- berarti periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.042.444.190.621,- Dari sisi Belanja Langsung diperoleh bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 56,57 persen. Komponen belanja langsung yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada komponen belanja modal yaitu sebesar 67,25 persen selama periode 2016-2020.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditentukan kurun waktu tahun 2016 s.d 2020 terus mengalami peningkatan dengan trend rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 8,40 persen sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 diatas. Dari sisi kelompok belanja, rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung mencapai 7,21 persen dan Belanja Langsung mencapai 14,14 persen.

Tabel 3.3
Kemampuan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Umum Daerah					
1	Pendapatan Asli Daerah	4.954.833.100.869	5.287.469.401.500	5.638.960.579.479	5.761.270.412.051	5.531.237.378.775
	Pajak Daerah	4.446.394.795.697	4.823.549.139.196	5.219.324.543.311	5.058.443.944.654	5.071.597.922.390
	Retribusi Daerah	34.505.500.522	34.289.674.008	36.614.846.458	38.408.031.263	30.218.319.711
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	259.493.568.323	195.827.847.225	191.995.313.161	436.284.942.769	242.309.156.857
	Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah	214.439.236.327	233.802.741.071	191.025.876.549	228.133.493.365	187.111.979.817
2	Dana Bagi Hasil	511.083.219.609	460.857.333.851	513.849.016.717	381.304.117.881	468.683.588.422
3	Dana Alokasi Umum	1.604.505.673.000	2.629.224.545.000	2.629.224.545.000	2.713.750.553.000	2.474.465.343.000
	Jumlah A	7.070.421.993.478	8.377.551.280.351	8.782.034.141.196	8.856.325.082.932	8.474.386.310.197
B	Belanja Pegawai					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	716.800.452.463	2.447.743.977.196	2.482.541.643.582	2.530.567.978.620	2.470.673.040.186
2	Tambahan Penghasilan PNS	295.242.816.230	561.626.446.628	839.302.805.260	790.290.455.952	745.181.990.113
	Jumlah B	1.012.043.268.693	3.009.370.423.824	3.321.844.448.842	3.320.858.434.572	3.215.855.030.299
	Kemampuan Keuangan Daerah	6.058.378.724.785	5.368.180.856.527	5.460.189.692.354	5.535.466.648.360	5.258.531.279.898

Sumber: LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Berdasarkan data tabel 3.3 di atas dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pada regulasi tersebut pengelompokan kemampuan keuangan daerah provinsi dibagi kepada 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Dari tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2016-2020 tercatat masuk kepada kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

B. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Rincian Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
6	PEMBIAYAAN DAERAH (netto)	203.664.303.687	1.125.526.746.836	841.496.523.210	697.322.808.436	236.597.738.158	86,05
6.1	Penerimaan Pembiayaan	536.274.841.423	1.167.706.526.836	841.496.523.210	981.167.561.436	336.597.738.158	10,18
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	536.274.841.423	1.167.706.526.836	841.496.523.210	981.167.561.436	336.597.738.158	10,18
	Koreksi	-	357.472.375	-	-	-	-
6.1.8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	1.000.000	-	-			-100
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	332.611.537.736	42.179.780.000	-	283.844.753.000	100.000.000.000	-84,03
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	332.611.537.736	42.179.780.000	-	283.844.753.000	100.000.000.000	-84,03
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.167.859.319.543	841.496.523.210	981.167.561.436	336.478.494.987	499.350.054.431	-7,16

Sumber: LRA Tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 86,05 persen. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,18 persen, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar -84,03 persen.

3.1.2. Alokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020 berdampak cukup signifikan terhadap keuangan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang disebabkan oleh dibatasinya seluruh aktivitas masyarakat yang berdampak kepada pendapatan daerah serta kebutuhan mendesak untuk penanganan pemutusan penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19 dimaksud, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Refocusing Anggaran Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan ke Belanja Tidak Terduga.

Adapun dasar pelaksanaan dari Refocusing dan Realokasi anggaran antara lain adalah :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (20 Maret 2020);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 (14 Maret 2020);
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (2 April 2020);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
- e. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (9 Maret 2020).

Refocusing untuk alokasi belanja penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada kelompok Belanja Tidak Terduga dibawah Belanja Tidak Langsung terdiri dari II tahap refocussing yang dialokasikan untuk 3 (tiga) prioritas penanganan sebagaimana tersaji pada tabel dibawah:

Tabel 3.5
Prioritas Penanganan Covid-19 Tahun 2020

No	Uraian	Tahap I (Rp.)	Tahap II (Rp.)
1	Penanganan Bidang Kesehatan	191,8 Milyar	257,78 Milyar
2	Penanganan Dampak Sosial (Social Safety Net)	300,3 Milyar	82 Milyar
3	Stimulus Ekonomi	10 Milyar	160,22 Milyar
Total		502,1 Milyar	500 Milyar

Untuk penanganan Bidang Kesehatan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain yaitu:

- a. Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment)
- b. Penguatan rumah sakit, sarana dan prasarana, serta fasilitas kesehatan bagi penyakit menular
- c. Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga medis
- d. Optimalisasi Protokol Disiplin dan Aman Covid- 19
- e. Penguatan rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan

Adapun penanganan terhadap dampak sosial (social safety net) dilakukan melalui pemberian bantuan pangan tunai atau non tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di provinsi sumatera utara. Selanjutnya Stimulus Ekonomi merupakan program pemulihan ekonomi dilakukan melalui beberapa sektor, diantaranya stimulus ekonomi dan optimalisasi ekonomi digital melalui pemberian stimulus bagi UMKM/IKM terdampak Covid-19, penguatan digitalisasi pada sektor UMKM, pasar tardisional, dan pada berbagai transaksi serta pendampingan dan stimulus usaha UMKM agar dapat melaksanakan diversifikasi usaha pada sektor-sektor strategis (masker non medis, lahan makanan dan lain sebagainya).

Selain itu juga untuk pemulihan ekonomi dilakukan penguatan sektor pariwisata, industri dan investasi, serta ketahanan pangan melalui penguatan hilirisasi industri penguatan mutu standarisasi dan ekspor daerah, penguatan implementasi industri *four point zero*, peningkatan parwisata dan budaya melalui penerapan CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan),

Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan), promosi, pelaksanaan event, dan penataan destinasi, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan peningkatan kemudahan perizinan dan harmonisasi peraturan. Untuk stimulus ekonomi sektor ketahanan pangan antara lain bantuan ketahanan pertanian, perikanan & peternakan dan Penguatan ketersediaan bahan pokok dalam menjaga daya beli masyarakat.

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai esset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan social bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Asset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan, dan (5) Aset Lainnya.

Neraca Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total asset. Rincian Neraca Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	1.154.661.149.826	832.429.227.070	975.840.502.146	235.273.302.585	476.782.631.305	4,02%
Kas Di Bendahara Penerimaan	78.346.980,00					-25,00%
Kas Di Bendahara Pengeluaran	3.412.129.613	7.196.551.383	40.191.082	144.694.295	1.106.640.436	234,07%
Kas Di BLUD	9.650.962.149	1.763.054.375	604.961.825	10.871.232.990	3.278.113.187	369,94%
Kas Lainnya (Kas di Bendahara Bos)			4.692.934.783	90.320.563.026	18.193.697.903	436,19%
Piutang Pendapatan	1.196.875.672.470	1.678.925.016.137	2.169.971.778.340	2.687.320.509.627	1.211.288.750.404	9,61%
Piutang Lainnya	178.496.550.269	104.091.710.584	99.713.235.593	99.584.021.247	94.851.355.650	-12,69%
Penyisihan Piutang	(505.253.703.445)	(16.881.855.713)	(952.260.526.538)	(1.244.362.707.992)	(78.164.852.031)	1345,26%
Beban Dibayar Dimuka	2.406.690.266	3.121.166.673	2.989.786.544	2.721.460.796	1.939.457.251	-3,06%
Persediaan	85.542.966.355	89.995.440.326	167.316.375.715	145.740.730.411	263.442.622.084	39,75%
JUMLAH ASET LANCAR	2.125.870.764.483	2.700.640.310.835	2.468.909.239.490	2.027.613.806.985	1.992.718.416.190	-0,28%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Dana Bergulir	2.550.500.000	874.750.000				-41,43%
Dana Penjaminan						
Penyisihan Dana Bergulir						
Investasi Jangka Panjang Pada Entitas Lainnya	24.268.280.639					-25,00%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	26.818.780.639	874.750.000				-49,18%
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.616.413.888.860	3.042.507.662.360	3.254.710.465.678	3.469.649.740.656	3.851.929.115.031	10,22%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	2.616.413.888.860	3.042.507.662.360	3.254.710.465.678	3.469.649.740.656	3.851.929.115.031	10,22%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	2.643.232.669.499	3.043.382.412.360	3.254.710.465.678	3.469.649.740.656	3.851.929.115.031	9,93%
ASET TETAP						
Tanah	4.277.340.160.666	4.806.946.632.643	4.861.926.933.583	4.908.160.075.088	4.993.827.352.864	4,06%
Peralatan dan Mesin	1.327.016.555.607	2.221.150.036.892	2.375.099.313.534	2.779.673.553.888	3.026.924.050.343	25,06%
Gedung dan Bangunan	1.549.967.305.031	3.864.573.384.735	4.270.077.145.650	4.467.056.226.389	4.707.965.062.691	42,46%

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.696.003.645.937	7.723.610.415.051	8.703.290.477.927	9.313.180.517.291	9.899.878.357.206	6,59%
Aset Tetap Lainnya	120.851.850.333	451.249.343.664	279.369.197.535,	280.183.866.535	293.480.316.270	60,08%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.495.177.898	70.261.754.800	70.425.861.228	36.835.367.272	52.747.100.182	24,85%
Akumulasi Penyusutan	(6.156.946.554.189)	(6.995.634.984.356)	(8.073.896.531.671)	(10.439.394.849.094)	(11.951.014.606.107)	18,20%
JUMLAH ASET TETAP	8.848.728.141.283	12.142.156.583.429	12.486.292.397.786	11.345.694.757.369	11.023.807.633.448	7,02%
ASET LAINNYA						
Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama	2.518.329.490	2.404.969.568	2.493.287.724	2.379.731.724	2.087.746.424	-4,41%
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga						
Aset Tak Berwujud	14.315.003.689	12.176.662.897	10.419.524.473	15.021.588.915	22.478.194.317	16,11%
Aset Lain - Lain	517.484.513.824	1.717.332.986.130	1.763.373.277.910	1.756.241.811.900	1.927.325.414.817	60,97%
JUMLAH ASET LAINNYA	534.317.847.003	1.731.914.618.595	1.776.286.090.107	1.773.643.132.539	1.951.891.355.558	59,15%
JUMLAH ASET	14.152.149.422.268	19.618.093.925.219	19.986.198.193.061	18.616.601.437.550	18.820.346.520.226	8,69%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17.714.752	62.462.332	11.028.400	12.054.738	11.028.400	42,76%

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Diterima Dimuka	888.093.386	618.137.053	370.207.971	1.177.181.090	1.033.942.590	33,83%
Utang beban	10.141.318.757	8.803.395.202	13.701.586.000	424.561.718.638	964.471.263.302	792,06%
Utang Jangka Pendek Lainnya	960.227.068.871	964.334.246.447	1.584.618.235.415	55.907.266.276	62.412.183.624	-5,02%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	971.274.195.766	973.818.241.033	1.598.701.057.787	481.658.220.742	1.027.928.417.916	26,99%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja - BLUD						
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
JUMLAH KEWAJIBAN	971.274.195.766	973.818.241.033	1.598.701.057.787	481.658.220.742	1.027.928.417.916	26,99%
EKUITAS						
EKUITAS	13.180.875.226.502	18.644.275.684.186	18.387.497.135.274	18.134.943.216.807	17.792.418.102.310	9,20%
JUMLAH EKUITAS	13.180.875.226.502	18.644.275.684.186	18.387.497.135.274	18.134.943.216.807	17.792.418.102.310	9,20%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14.152.149.422.268	19.618.093.925.219	19.986.198.193.061	18.616.601.437.550	18.820.346.520.226	8,69%

Sumber: Neraca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio lancar pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 hingga tahun 2017 menunjukkan rasio diatas 1 (satu) yang artinya kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.

2. *Quick Ratio* (rasio cair), yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat Tabel diatas, Rasio Cair Pemerintah Provinsi Sumatera Utara capaiannya kurang dari 1 (satu) pada 2016 hingga tahun 2017 rasio diperoleh lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek. Demikian juga pada tahun 2018-2019 rata – rata Quick Ratio (rasio cair) adalah 2,53 yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki selama kurun waktu tersebut.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu antara lain:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar

- nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tergolong kecil, hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil di bandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.
2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel dibawah ini, diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tergolong baik dengan nilai rasio.

Tabel 3.7
Analisis Rasio Keuangan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	2,1887	2,7732	1,5443	4,2097	1,9386
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	2,1007	2,6808	1,4397	3,9071	1,6823
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0686	0,0496	0,0800	0,0259	0,0546
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0736	0,0522	0,0869	0,0266	0,0578

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

3.1.4. Kinerja Pendanaan Non APBD

Selain pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Utara, pembangunan di wilyah ini juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Kolaborasi dalam pembangunan telah dilakukan sejak periode pembangunan jangka menengah yang lalu. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non APBD Sumatera Utara, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Sumatera Utara yang lainnya adalah Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka

pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka Panjang, yang sampai saat ini BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada 8 (delapan) BUMD.

Tabel 3.8
Perkembangan Pendanaan melalui Penyertaan Modal
di BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama BUMD	Penyertaan Modal di BUMD Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. Bank Sumut	24.268.280.639,00	-	-	283.844.753.000,00	100.000.000000,00
2	PT. KIM (BUMN)	-	-	-	-	-
3	PT. Pembangunan Prasarana (PT. PPSU)	-	-	-	-	-
4	PT. Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	-	-
5	PD. Aneka Indusri Jasa	-	-	-	-	-
6	PD. Perhotelan	-	-	-	-	-
7	PD. Perkebunan	50.000.000.000,00	42.179.780.000,00	-	-	-
8	PDAM Tirta Nadi	258.343.257.097,00	-	-	-	-
TOTAL		332,611,537,736	42,179,780,000	-	283,844,753,000	100,000,000,000

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Utara, diolah 2021

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan APBD.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2021 harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih dirasakan ditengah masyarakat, namun arahan terhadap upaya untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT-UPT yang tersebar dibeberapa kabupaten/kota.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dalam dana perimbangan pada alokasi Pendapatan Transfer Daerah; dan
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah di atas, untuk merealisasikan target perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Koordinasi intensif ke kementerian, instansi dan lembaga terkait untuk kepastian pengelolaan pajak yang masih bermasalah, seperti sengketa pajak air permukaan;
 - b. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - c. Meningkatkan koordinasi untuk penerimaan dana bagi hasil pajak perkebunan sebagai sumber pendapatan daerah yang baru;
 - d. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - e. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *Samsat Drive Thru*, Gerai Samsat (samsat corner) dan *samsat Gendong*;
 - g. Melakukan inovasi dalam rangka intensifikasi pajak daerah;
 - h. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
 - i. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - j. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur

- pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
- k. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - l. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer yang mencakup Dana Perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, strategi yang ditempuh melalui:
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;
 - c. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.

b. Kebijakan Belanja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja

Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
2. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
3. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2019-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs), serta percepatan penanganan pandemi Covid-19;
5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

c. Kebijakan Pembiayaan

Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan diatas, adalah:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan menjadi bagian dari sumber pembiayaan pada periode anggaran berikutnya;

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk mendorong investasi daerah, optimalisasi peranan BUMD sangat diperlukan guna mendorong Pendapatan Daerah dimasa mendatang;
3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.9
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

Kode	Uraian	2016			2017			2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	10.180.753.776.243	9.476.423.914.545	93,08	13.464.364.719.275	12.518.868.105.165	92,98	13.867.539.478.554	12.563.387.549.665	90,60
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.338.978.711.815	7.037.202.954.813	95,89	8.560.130.071.491	8.174.442.896.374	95,49	9.287.573.660.704	8.780.514.878.664	94,54
5.1.1	Belanja Pegawai	1.298.087.933.114	1.115.950.649.213	85,97	3.367.598.182.159	3.140.130.713.120,	93,25	3.435.906.084.188	3.464.489.476.375	100,83
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	3.075.431.364.477	3.010.055.530.000	97,87	3.145.617.394.020	2.987.423.174.742	94,97	3.621.014.794.289	3.165.070.721.289	87,41
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.775.338.083.176	2.774.649.016.371	99,98	2.029.470.741.512	2.029.470.741.512	100,00	1.577.209.028.427	1.569.730.611.414	99,53
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	179.313.717.102	134.545.437.669	75,03	2.443.753.800	2.443.753.800	100,00	589.443.753.800	528.068.540.828	89,59
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.807.613.946	2.002.321.560	18,53	15.000.000.000	14.974.513.200	99,83	64.000.000.000	53.155.528.758	83,06
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.841.775.064.428	2.439.220.959.732	85,83	4.904.234.647.784	4.344.425.208.791	88,59	4.579.965.817.850	3.782.872.671.001	82,60
5.2.1	Belanja Pegawai	171.666.160.000	150.934.730.809	87,92	128.702.496.882	111.765.770.470	86,84	158.837.939.041	119.909.842.025	75,49
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.504.353.900.264	1.268.431.086.313	84,32	2.654.397.927.907	2.313.207.402.407	87,15	2.520.660.694.154	2.098.059.596.323	83,23
5.2.3	Belanja Modal	1.165.755.004.164	1.019.855.142.610	87,48	2.121.134.222.995	1.919.452.035.914	90,49	1.900.467.184.655	1.564.903.232.653	82,34

Lanjutan Tabel 3.9

Kode	Uraian	2019			2020			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
5	BELANJA	14.726.662.153.406	13.440.442.948.918	91,27	13.212.635.656.409	12.653.607.434.218	95,77	32,12	92,38
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.322.571.556.660	9.713.493.021.297	94,10	9.138.650.490.440	9.192.545.412.919	100,59	16,29	95,86
5.1.1	Belanja Pegawai	3.714.764.358.169	3.442.672.223.944	92,68	3.345.632.696.232	3.257.129.216.426	97,35	181,43	95,15
5.1.3	Belanja Subsidi								
5.1.4	Belanja Hibah	3.230.010.871.200	2.972.714.748.000	92,03	2.778.861.171.922	3.066.759.068.400	110,36	(0,72)	95,01
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial								
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	3.345.467.946.191	3.269.478.492.542	97,73	1.717.964.170.000	1.717.964.170.000	100,00	(26,47)	99,46
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	7.328.381.100	7.328.381.100	100,00			88,77	114,92	75,70
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	21.299.175.711	85,20	1.296.192.452.286	1.150.692.958.093	84,96	702,83	76,41
5.2	BELANJA LANGSUNG	4.404.090.596.747	3.726.949.927.621	84,62	4.073.985.165.969	3.461.062.021.299	84,96	77,89	84,87
5.2.1	Belanja Pegawai	99.863.671.573	84.865.411.799	84,98	90.920.857.272	80.693.955.366	88,75	(26,22)	83,25
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	2.726.845.451.824	2.306.825.620.585	84,60	2.121.916.048.175	1.882.423.096.800	88,71	82,19	85,21
5.2.3	Belanja Modal	1.577.381.473.350	1.335.258.895.237	84,65	1.861.148.260.522	1.497.944.969.133	80,48	88,00	84,63

Sumber: LRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi rata-rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2016–2020 sebesar 32,12 persen, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 16,29 persen dan Belanja Langsung sebesar 77,89 persen. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia periode Tahun 2016–2020 rata-rata sebesar 92,38 persen. Lebih lanjut, rata-rata penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 95,86 persen dan Belanja Langsung sebesar 84,87 persen.

Pada Belanja Tidak Langsung, 3 (tiga) peringkat teratas rata-rata penyerapan anggaran terbesar selama periode 5 (lima) tahun tersebut berada pada jenis Belanja Bagi Hasil, Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Sementara rata-rata penyerapan anggaran pada Belanja Langsung paling besarpada jenis Belanja Barang dan Jasa, berikutnya adalah Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ditampilkan pada tabel di bawah. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Belanja Tidak Langsung	7.037.202.954.813	3.140.130.713.120	3.464.489.476.375	3.442.672.223.944	3.345.632.696.232
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	716.800.452.463	2.447.743.977.196	2.482.541.643.582	2.530.567.978.620	2.523.670.113.232
2	Belanja Tambahan Penghasilan	295.242.816.230	561.626.446.628	839.302.805.260	790.290.455.952	778.186.095.000
3	Biaya Pemungutan Pajak	-	-	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak	89.449.360.520	109.735.239.296	110.417.155.051	87.499.789.372	10.545.751.000
5	Insentif Pemungutan Retribusi		-	-		
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	14.458.020.000	21.025.050.000	32.227.872.482	34.314.000.000	33.230.737.000
B.	Belanja Langsung	2.439.220.959.731	688.855.414.117	627.166.499.815	673.394.719.262	559.915.016.028
1	Belanja Honorarium PNS Provinsi	78.582.360.063	111.765.770.470	60.481.701.297	69.631.558.718	64.567.542.704
2	Honorarium Non PNS Provinsi	69.972.400.746	59.436.611.220	58.677.640.728	14.443.553.081	25.967.927.068
3	Belanja Uang Lembur	-	-	-		
4	Uang Jahit Pakaian	-	-	-		
5	Belanja Premi Asuransi	75.040.450.883	82.919.734.463	93.796.028.085	93.678.269.965	139.127.747.242
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.812.442.308	6.548.057.710	6.537.793.268	8.511.295.510	5.020.854.960
8	Belanja Pakaian Kerja	2.286.910.600	3.125.714.206	2.995.409.750	2.503.198.425	1.699.621.020
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari2 Tertentu	8.690.755.700	246.960.000	9.820.462.843	9.545.514.500	3.277.772.600
10	Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi	289.850.940.293	424.812.566.048	394.857.463.844	475.081.329.063	320.253.550.435

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
11	Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi	-	-	-	-	-
12	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-
13	Belanja Pemulangan Pegawai	500.000.000	-	-	-	-
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	23.305.279.469,00	-	-	-	-
15	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)**	-	-	-	-	-
TOTAL		11.145.416.103.820	7.657.972.254.474	8.183.311.952.380	8.232.133.886.412	7.811.095.424.521

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020, diolah

c. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah yang disebabkan dengan berpindahnya aparatur dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2016	1.266.885.380.022	9.809.035.452.281	12,92%
2	2017	3.251.896.483.590	12.561.047.885.165	25,89%
3	2018	3.584.399.318.400	12.563.387.549.665	28,53%
4	2019	3.527.537.635.743	13.724.287.701.918	25,70%
5	2020	3.337.823.171.792	12.753.607.434.218	26,17%

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah alokasi pendanaan aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

d. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam setahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.12
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	1.115.950.649.213	3.140.130.713.120	3.464.489.476.375	3.442.672.223.944	3.257.129.216.426
2.1.6	Belanja hibah	3.010.055.530.000	2.987.423.174.742	3.165.070.721.289	2.972.714.748.000	3.066.759.068.400
2.1.9	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	2.774.649.016.371	2.029.470.741.512	1.569.730.611.414	3.269.478.492.542	1.717.964.170.000
2.1.10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	134.545.437.669	2.443.753.800	528.068.540.828	7.328.381.100	
2.1.11	Belanja tidak terduga	2.002.321.560	14.974.513.200	53.155.528.758	21.299.175.711	1.150.692.958.093
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.037.202.954.813	8.174.442.896.374	8.780.514.878.664	9.713.493.021.297	9.192.545.412.919
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.439.220.959.731	4.344.425.208.791	3.782.872.671.001	3.726.949.927.621	3.461.062.021.299
	TOTAL JUMLAH BELANJA	9.476.423.914.544	12.518.868.105.165	12.563.387.549.665	13.440.442.948.918	12.653.607.434.218
	SURPLUS / DEFISIT	964.195.015.857	- 284.030.223.626	139.671.038.226	- 360.844.313.449	262.752.316.273
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	536.275.841.422	1.167.706.526.836	841.496.523.210	981.167.561.436	336.597.738.158
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	536.275.841.422	1.167.706.526.836	841.496.523.210	981.167.561.436	336.597.738.158
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	332.611.537.736	42.179.780.000		283.844.753.000	100.000.000.000
C	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	332.611.537.736	42.179.780.000		283.844.753.000	100.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	203.664.303.686	1.125.526.746.836	841.496.523.210	697.322.808.436	236.597.738.158

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.2.3. Proporsi Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Utara

No.	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	10.440.618.930.401	12.234.837.881.539	12.703.058.587.891	13.079.598.635.469	12.916.359.750.491
2	Belanja Daerah	9.476.423.914.545	12.518.868.105.165	12.563.387.549.665	13.440.442.948.918	12.653.607.434.218
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	332.611.537.736	42.179.780.000		283.844.753.000	00.000.000.000
A.	Defisit Riil	631.583.478.120	-326.210.003.625,90	139.671.038.226	-644.689.066.449	162.752.316.272
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	536.274.841.422	1.167.706.526.836	841.496.523.210	981.167.561.436	336.597.738.158
B.	Total Realisasi Penerimaan	536.275.841.423	1.167.706.526.836	841.496.523.210	981.167.561.436	336.597.738.158
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		95.307.636.698	841.496.523.210	701.825.484.984	336.478.494.987	173,845,421,885

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Pada tabel 3.13 diatas, menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki defisit riil anggaran pada tahun 2017 dan 2019, namun demikian defisit tersebut dapat ditutupi dengan besarnya SILPA pada tahun tersebut. Untuk tahun 2016, 2018 dan 2020 defisti riil anggaran bernilai surplus yang didapat dari besaran SILPA pada tahun tersebut.

b. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat earmark dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD.

Tabel 3.14
Rasio/Kontribusi SiLPa terhadap Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	SiLPA	Belanja Daerah	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah
1	2016	536,275,841,422	9,476,423,914,545	5,66
2	2017	1,167,706,526,836	12,518,868,105,165	9,33
3	2018	841,496,523,210	12,563,387,549,665	6,70
4	2019	981,167,561,436	13,440,442,948,918	7,30
5	2020*	336,597,738,158	12,653,607,434,218	2,66

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 3.14 di atas secara umum Rasio SiLPA kurun waktu 2016-2020 sangat fluktuatif dan cenderung mengecil, dimana rasio SiLPA tertinggi terhadap belanja tercatat pada tahun 2017, dengan kontribusi sebesar 9,33%.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan

dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Keuangan daerah juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dan hal yang tidak kalah pentingnya perlu dibangun kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Saat ini pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri tersebut adalah untuk mengintegrasikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lampiran III dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019 APBD Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, namun di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), beberapa komponen Pendapatan dan Belanja terjadi pergeseran yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 tersebut.

Disisi lain, peningkatan pendapatan dilakukan melalui upaya optimalisasi potensi pendapatan. Pendapatan tersebut menjadi sumber pembiayaan program-program prioritas daerah untuk mencapai target dan sasaran, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional; Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Estimasi pemasaran industri otomotif Nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Sumatera Utara; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Untuk Pendapatan Daerah pada alokasi kelompok Pendapatan Transfer terdapat perubahan sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dimana terdapat penyesuaian alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik alokasi BOS Reguler, Afirmasi dan Kinerja yang ditransfer langsung ke kabupaten kota sehingga terdapat penyesuaian alokasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab di atas, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang

kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah, dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016 hingga Tahun 2020 dan target pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, disajikan pada Tabel 3.15 di bawah ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 s.d tahun 2023

No	Uraian	2021	2022	2023	2022	2023
		Target APBD	Proyeksi	Proyeksi	Pertumbuhan	
1.1	Pendapatan asli daerah	6.279.786.774.225	6.819.012.313.316	8.101.943.267.178	8,59%	18,81%
1.1.1	Pajak daerah	5.706.083.586.846	6.227.774.043.083	7.336.833.529.012	9,14%	17,81%
1.1.2	Retribusi daerah	30.370.035.040	68.415.527.040	78.415.527.040	125,27%	14,62%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	356.265.026.558	354.759.991.476	456.265.026.558	-0,42%	28,61%
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	187.068.125.781	168.062.751.717	230.429.184.568	-10,16%	37,11%
1.2	Pendapatan Transfer	7.317.180.888.300	5.093.345.250.400	5.093.345.250.400	-30,39%	0,00%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.317.180.888.300	5.077.512.782.400	5.077.512.782.400	-30,61%	0,00%
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	440.441.729.300	428.796.709.400	428.796.709.400	-2,64%	0,00%
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak	-	62.270.078.000	62.270.078.000		0,00%
1.2.1.3	Dana alokasi umum	2.463.686.589.000	2.463.686.589.000	2.463.686.589.000	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana alokasi khusus	4.413.052.570.000	2.122.759.406.000	2.122.759.406.000	-5,95%	0,00%
1.2.1.5	Transfer Dana Insentif Daerah`		15.832.468.000	15.832.468.000		0,00%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90.068.000.000	99.268.000.000	104.768.000.000	10,21%	5,54%
1.3.1	Hibah	59.568.000.000	74.268.000.000	74.268.000.000	24,68%	0,00%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	0,00%	0,00%

No	Uraian	2021	2022	2023	2022	2023
		Target APBD	Proyeksi	Proyeksi	Pertumbuhan	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	0,00%	0,00%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	0,00%	0,00%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	0,00%	0,00%
1.3.6	Lainnya	30.500.000.000	25.000.000.000	30.500.000.000	-18,03%	0,00%
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		13.687.035.662.525	12.011.625.563.716	13.300.056.517.578	-12,24%	10,73%

Keterangan * : APBD TA 2021 berdasarkan Pergub no.21 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021

** : Proyeksi TA 2022

*** : Proyeksi Tahun 2023

Sejalan dengan proyeksi pada tabel di atas, secara Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 di proyeksikan mengalami penurunan sebesar 12,24 persen dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan pada alokasi Pendapatan Transfer khususnya pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disebut di atas yang menyebabkan berkurangnya alokasi Dana Transfer pada Tahun Anggaran 2022 lebih kurang sebesar 30,39 persen dibanding Tahun Anggaran 2021. Namun dari komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 8,59 persen dibanding Tahun Anggaran 2021 dan pada Tahun Anggaran 2023 komponen ini juga diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 18,81 persen dari Tahun Anggaran 2022, dimana penopang terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah berada pada kelompok Pajak Daerah yang terus mengalami kenaikan seiring pulihnya kondisi perekonomian masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 masih didominasi oleh besaran Pendapatan Dana Transfer yang dihasilkan dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh besaran Pendapatan Pajak Daerah yang didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dari sisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah didominasi Dana Hibah.

Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Beberapa kebijakan dapat dilakukan ke depan dapat dilaksanakan antara lain;

1. Pinjaman Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dijelaskan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Untuk itu bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut di atas. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

2. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal yang pelaksanaannya juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah sebagai salah satu alternative dan skema pembiayaan pembangunan yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah yang aturan terkait tata laksana penerbitan obligasi pemerintah diatur oleh lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternative skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Sumatera Utara, khususnya bidang infrastruktur publik.

Tabel 3.16
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023	2022	2023
		Target APBD	Proyeksi	Proyeksi	Pertumbuhan	
5.1	Belanja Operasi	10.038.653.479.703	7.651.494.674.331	7.664.748.366.162	-23,78%	0,17%
5.1.01	Belanja pegawai	3.497.040.891.582	3.390.518.248.492	3.498.866.426.146	-3,05%	3,20%
5.1.02	Belanja barang dan jasa	3.105.254.088.787	2.532.332.077.246	2.558.066.237.824	-18,45%	1,02%
5.1.05	Belanja Hibah	3.413.035.623.506	1.693.301.376.043	1.562.533.017.432	-50,39%	-7,72%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.322.875.828	35.342.972.550	45.282.684.760	51,54%	28,12%
5.2	Belanja Modal	1.316.658.811.461	1.891.236.869.239	2.161.680.080.371	43,64%	14,30%
5.3	Belanja Tidak Terduga	21.058.512.853	100.000.000.000	50.000.000.000	374,87%	-50,00%
5.4	Belanja Transfer	2.576.947.489.813	3.006.894.020.146	3.723.628.071.045	16,68%	23,84%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.576.947.489.813	3.006.894.020.146	3.723.628.071.045	16,68%	23,84%
TOTAL JUMLAH BELANJA		13.953.318.293.830	12.649.625.745.716	13.600.056.517.578	-9,34%	7,51%

*Keterangan * : APBD TA 2021 berdasarkan Pergub no.21 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021*

*** : Proyeksi TA 2022*

**** : Proyeksi Tahun 2023*

Pada Tabel 3.16 di atas terlihat bahwa Belanja Daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,68 persen dari tahun 2021 yang disebabkan adanya penyesuaian kebijakan pada Pendapatan Daerah sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen, selain itu hal ini juga dilakukan dalam rangka pemenuhan belanja-belanja wajib dan prioritas dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah secara umum diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasi yang kebutuhannya dalam rangka menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Belanja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Alokasi Belanja Pegawai di atas sudah mengakomodir rencana penambahan Pegawai ASN di Provinsi Sumatera Utara.

Pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 juga mengalami penyesuaian kenaikan sebesar 16,68 persen dibanding tahun 2021, hal ini dilakukan untuk mengakomodir kekurangan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 sekaligus untuk pemenuhan bagi hasil dari Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana telah diatur pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2019-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs), serta percepatan penanganan pandemi Covid-19;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara

konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.

5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
6. Penganggaran Tahun Jamak sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat 28 menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Penganggaran kegiatan Tahun Jamak ini diarahkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, kesempatan kerja dan berusaha, pertanian, pariwisata, olahraga, jalan, penyediaan air minum, irigasi dan bidang-bidang pembangunan lainnya yang dimungkinkan sesuai ketentuan dan peraturan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian pembangunan daerah.

3.3.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana pada target Tahun 2021 diproyeksikan

mengalami defisit mengingat Pendapatan Daerah yang lebih kecil dibanding Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Pada jenis pengeluaran pembiayaan sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah melalui penyertaan modal (investasi daerah) kepada Badan Usaha Milik Daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan diproyeksikan pemberian Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dialokasikan sebesar Rp. 112.000.000.000,- Tahun 2022 dan Rp. 150.000.000.000,- di Tahun 2023.

Tabel 3.17
Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021 s.d tahun 2023* (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Uraian	2021*	2022	2023	% Pertumbuhan	
		Target APBD	Proyeksi	Proyeksi	2022	2023
	SURPLUS / DEFISIT	-266.282.631.305	-638.000.000.000,00	-300.000.000.000	136,59%	-52,98%
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	476.782.631.305	750.000.000.000	450.000.000.000	57,30%	-40,00%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	476.782.631.305	750.000.000.000	450.000.000.000	57,30%	-40,00%
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	210.500.000.000	112.000.000.000	150.000.000.000	-46,79%	33,93%
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	210.500.000.000	112.000.000.000	150.000.000.000	-46,79%	33,93%
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		266.282.632.305	638.000.000.000,00	300.000.000.000	136,59%	-52,98%

Keterangan * : APBD TA 2021 berdasarkan Pergub no.21 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021

Pada Tabel 3.17 di atas terlihat bahwa terdapat defisit anggaran terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 266.282.631.305,- atau 1,91 persen terhadap Total Belanja Daerah pada tahun 2021, defisit anggaran juga diproyeksikan terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. -638.000.000.000,- atau 5,04% persen dan sebesar Rp. 300.000.000.000,- atau 2,21 persen pada tahun 2023.

Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, SiLPA Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp. 476.782.631.305. atau sebesar 3,42 persen dari total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 750.000.000.000.- atau sebesar 5,93 persen terhadap total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan pada Tahun Anggaran 2023 SiLPA diproyeksikan sejumlah Rp. 450.000.000.000.- atau sebesar 3,31 persen dibanding total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 210.500.000.000,- yang digunakan untuk penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp. 100.000.000.000,-, PT Perkebunan sebesar Rp. 80.000.000.000,-, PT PDAM Tirtanadi sebesar Rp. 11.000.000.000,-, PD Dirga Surya sebesar Rp. 10.000.000.000,-, dan PT Aneka Industri dan Jasa sebesar Rp. 9.500.000.000,-

Pada tahun 2022 pengeluaran pembiayaan diperkirakan dialokasikan sebesar Rp. 112.000.000.000,- dan tahun 2023 sebesar Rp.150.000.000.000,- yang diprioritaskan untuk menjaga saham mayoritas pada PT Bank Sumut dan untuk meningkatkan kinerja PD Perkebunan dan PD Dirga Surya serta BUMD lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu perumusan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi dua yaitu Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Identifikasi Masalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Tahapan dalam perumusan permasalahan tersebut harus terstruktur dan mampu memberikan relevansi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan akan terus muncul dan berkembang seiring pelaksanaan pembangunan tersebut. Begitu pula dengan pembangunan yang relatif dinamis pada setiap periode pembangunannya sehingga kebijakan dapat berubah dengan syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan. Berbagai permasalahan pembangunan perlu diantisipasi dan diminimalisir dampaknya terhadap capaian pembangunan

4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi Midterm Review RPJMD tahun 2019-2023 (pelaksanaan Tahun 2019-2020) serta hasil analisis interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan utama pembangunan daerah. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Provinsi Sumatera Utara, sehingga poin-poin kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing

bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, yakni: **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud akan menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan lima tahunan yang dijabarkan lebih rinci ke **permasalahan pokok Pembangunan Sumatera Utara** sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas Pendidikan;

Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Sumatera Utara telah mencapai 13,23 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga Diploma 1. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,54 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Jika dibandingkan dengan nasional maka capaian Sumatera Utara sejak 5 (lima) tahun terakhir berada diatas capaian Nasional.

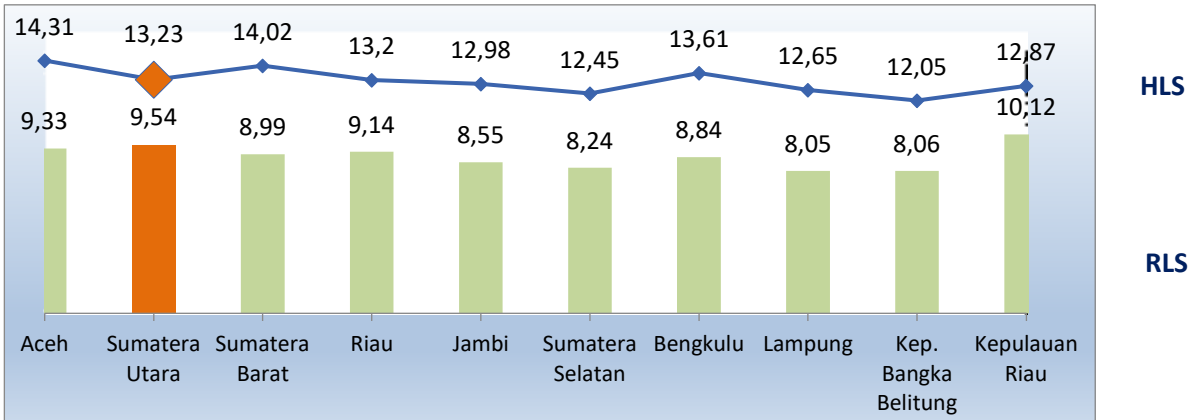
Tabel 4.1
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Sumatera Utara dan Nasional, 2016-2020

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
	Nasional	Sumatera Utara	Nasional	Sumatera Utara
2016	12.72	13.00	7.95	9.12
2017	12.85	13.10	8.10	9.25
2018	12.91	13.14	8.17	9.34
2019	12.91	13.15	8.34	9.45
2020	12.98	13.23	8.48	9.54

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia dan Sumatera Utara 2020

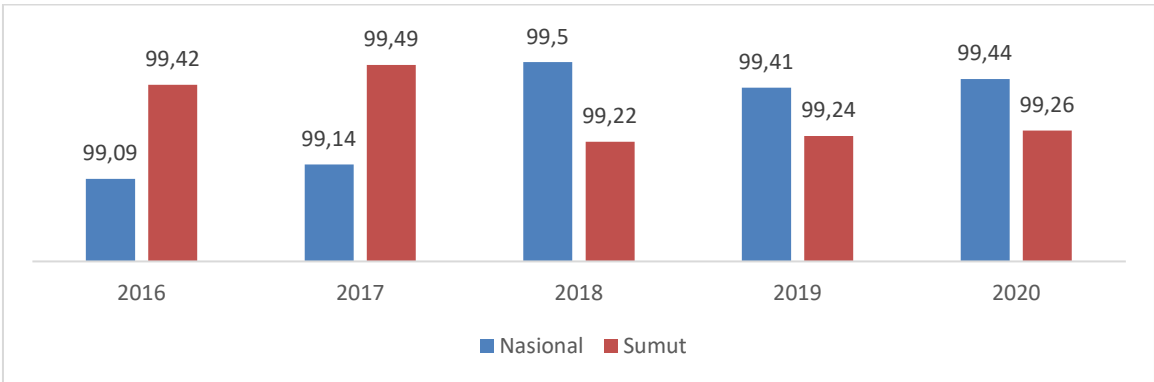
Walaupun masih berada di atas capaian Nasional untuk RLS dan HLS namun jika dibandingkan dengan wilayah yang setara (Pulau Sumatera), maka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke 4 (empat) setelah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan Rata Rata lama Sekolah jika dibandingkan dengan wilayah setara Sumatera Utara berada pada urutan ke-2 setelah Kepulauan Riau, capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah setara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Sementara jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 99.26 persen dan nasional sebesar 99.44 persen, APS Provinsi Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan Nasional. APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang berpartisipasi sekolah, dapat menikmati fasilitas pendidikan, tanpa melihat jenjang pendidikannya.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik 4.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020

Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada usia tertentu Berdasarkan data dari BPS-RI, Susenas 2020 menunjukkan bahwa APS di Provinsi Sumatera Utara pada kelompok usia 7-12 tahun 99,44 persen, kelompok usia 13-15 tahun 97,04 persen, kelompok usia 16-18 tahun 78,21 persen dan kelompok usia 26,98

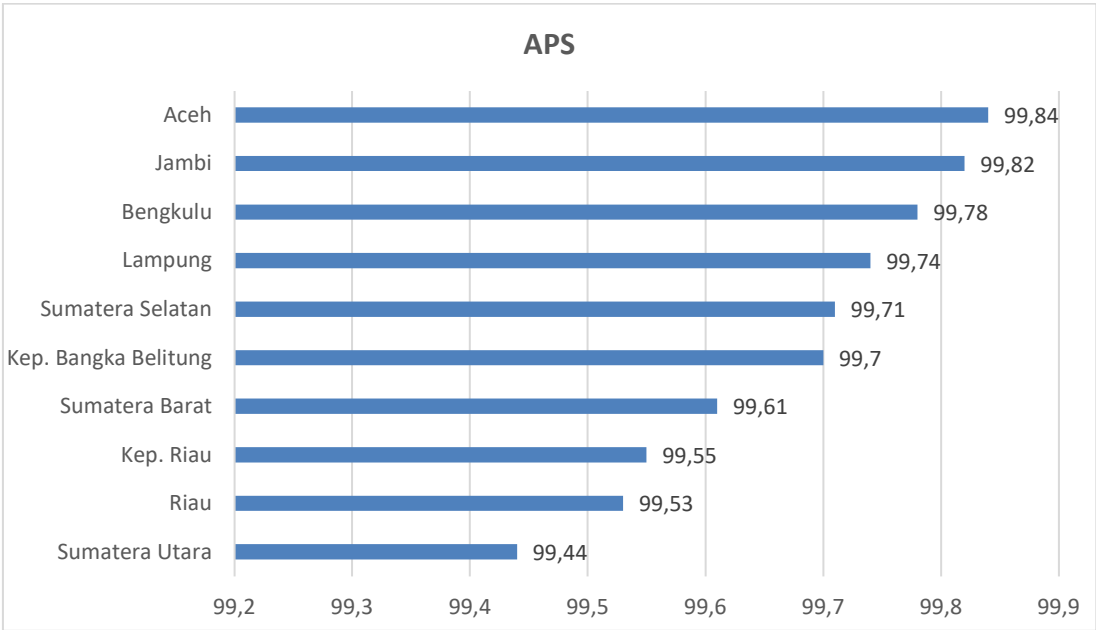
persen. Ternyata semakin tinggi kelompok usia, APS di Sumatera Utara semakin menurun. Hal ini menyatakan bahwa partisipasi pada kelompok usia 13 tahun ke atas untuk bersekolah masih rendah.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Kelompok Umur, 2016-2020

Tahun	7-12	13-15	16-18	19-24
2016	99,42	96,48	76,43	26,62
2017	99,49	96,60	76,76	26,80
2018	99,50	96,75	77,4	25,31
2019	99,41	96,89	77,67	25,75
2020	99,44	97,04	78,21	26,98

Sumber : BPS Indonesia, Susenas 2020

Sementara jika melihat capaian wilayah Sumatera, pada tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Utara berada di posisi paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah sumatera lainnya, sementara APS tertinggi ada di Provinsi Aceh.

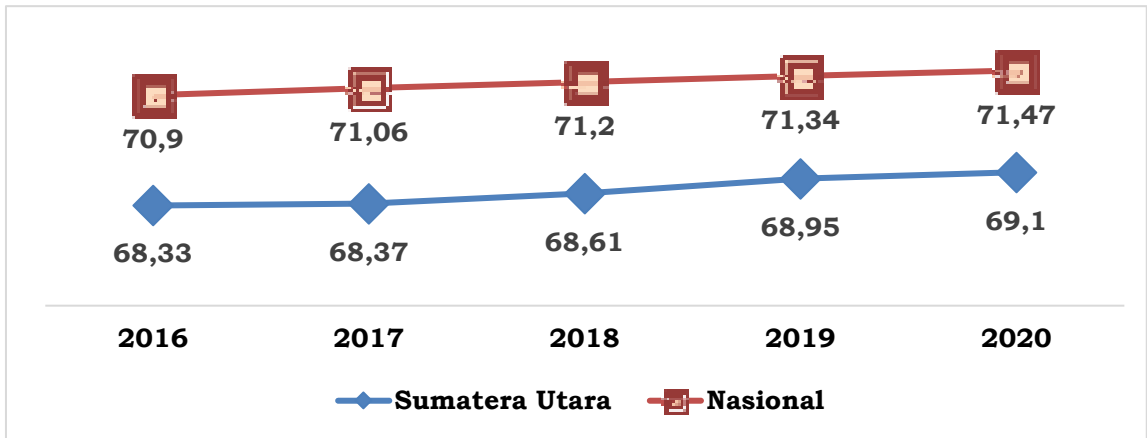


Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Grafik 4.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Wilayah Sumatera 2020

2. Belum Optimalnya derajat kesehatan masyarakat;
Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara pada tahun 2020

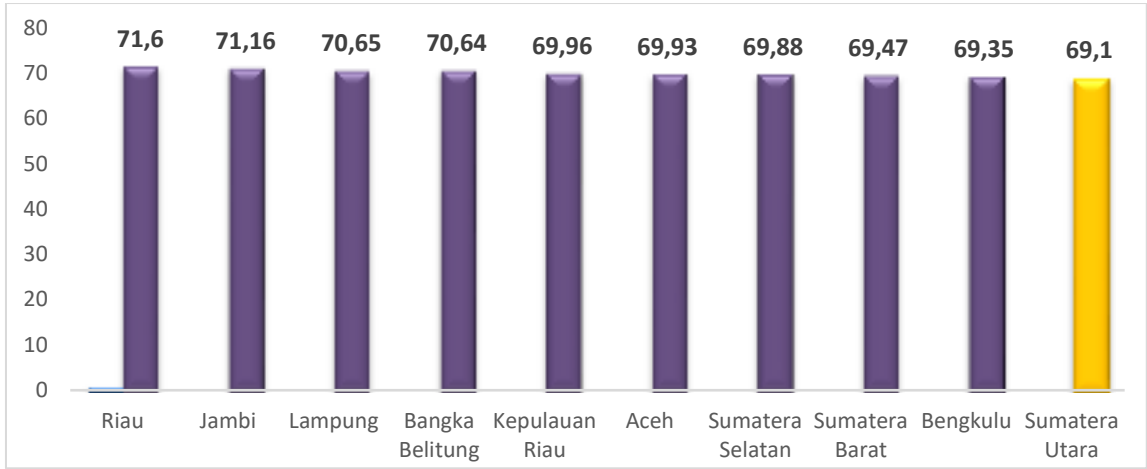
telah mencapai 69,10 tahun. Sementara UHH Nasional mencapai 71,47 tahun. UHH Indonesia mengalami perlambatan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Sumatera Utara masih berada di bawah Nasional.



Sumber : BPS Sumatera Utara 2020

Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan wilayah se Kepulauan Sumatera. Usia Harapan Hidup tertinggi ada di Provinsi Riau dan Jambi, dan UHH terendah ada di Provinsi Sumatera Utara, capaian UHH wilayah se Sumatera dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Indonesia, 2020

Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020

Terkait kondisi stunting Provinsi Sumatera Utara telah menurunkan prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir yakni dari 32,3% pada tahun 2018 menjadi 39,2% pada tahun 2020. Akan tetapi capaian

prevalensi stunting Provsu pada Tahun 2019 masih dibawah capaian Nasional yang tercatat sebesar 27,67%.

Terdapat kabupaten/kota dengan Prevalensi Stunting tinggi adalah Kabupaten Nias (58,5%), Kabupaten Padang Lawas Utara (44,63%), Kabupaten Nias Barat (43,06%), Kabupaten Nias Selatan (42,14%), Kabupaten Tapanuli Tengah (40,5%), Kabupaten Nias Utara (40,45%), dan Kabupaten Padang Lawas (39,8%). Terdapat Kabupaten/kota yang memiliki tingkat Prevalensi Stunting rendah dan berada di bawah 20% sesuai yang disarankan oleh WHO adalah Kota Sibolga (10,03%), Kota Tebing Tinggi (13,5%), Kota Binjai (15,3%) dan Kota Pematang Siantar (15,4%).

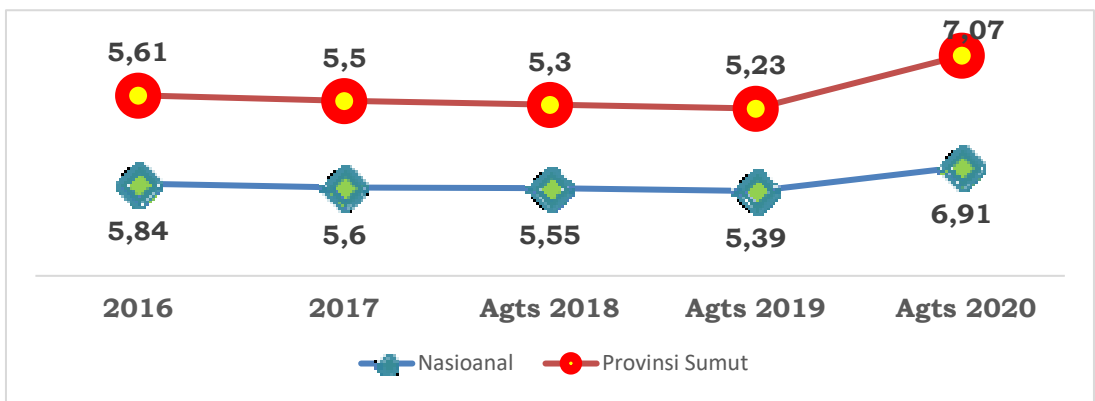
Tabel 4.4
Prevelensi Stunting pada Balita per Kabupateb/Kota, 2020

Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota, 2020		
No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting (%)
1	Kab. Nias	58.50
2	Kab. Padang Lawas Utara	44.63
3	Kab. Nias Barat	43.06
4	Kab. Nias Selatan	42.14
5	Kab. Tapanuli Tengah	40.50
6	Kab. Nias Utara	40.45
7	Kab. Padang Lawas	39.80
8	Kab. Humbang Hasundutan	38.40
9	Kab. Dairi	37.30
10	Kab. Tapanuli Utara	33.40
11	Kab. Pakpak Bharat	33.40
12	Kota Gunungsitoli	32.20
13	Kab. Labuhan Batu Selatan	32.00
14	Kab. Langkat	28.70
15	Kab. Labuhan Batu Utara	27.95
16	Kab. Toba Samosir	26.80
17	Kab. Karo	26.54
18	Kota Padangsidiropuan	26.20
19	Kab. Tapanuli Selatan	25.75
20	Kab. Mandailing Natal	25.50
21	Kab. Simalungun	25.45
22	Kota Medan	24.10
23	Kab. Labuhan Batu	23.60
24	Kab. Serdang Bedagai	23.30
25	Kota Tanjung Balai	23.20
26	Kab. Deli Serdang	22.11
27	Kab. Asahan	22.01
28	Kab. Samosir	21.58
29	Kab. Batu Bara	20.80
30	Kota Pematang Siantar	15.40
31	Kota Binjai	15.30
32	Kota Tebing Tinggi	13.50
33	Kab. Sibolga	10.03
34	Provinsi Sumatera Utara	29.20

3. Belum optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat;
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Namun, kondisi ini masih

belum baik akibat pandemi Covid-19. Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Agustus 2020 TPT mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 1,52 persen. Sementara di tingkat nasional sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen. TPT Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan Nasional.

Pada tahun 2021 (data Agustus), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 6,33 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Nasional yang tercatat sebesar 6,49 persen. Masih tingginya persentase pengangguran antara lain disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan belum terpenuhinya skill tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dapat pula terjadi jika investasi yang masuk tidak menyerap banyak tenaga kerja daerah. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

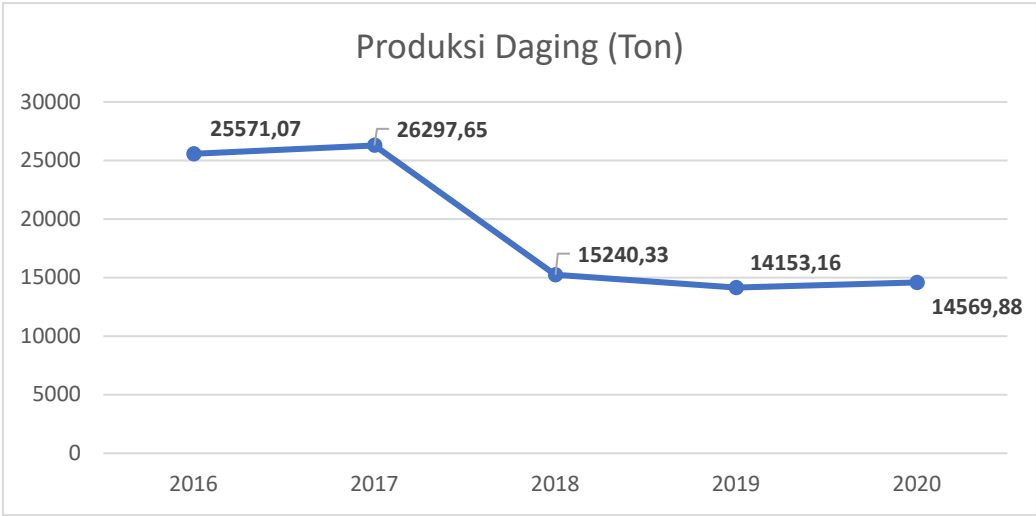


Sumber : BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2020

Grafik.4.5
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2016-2020

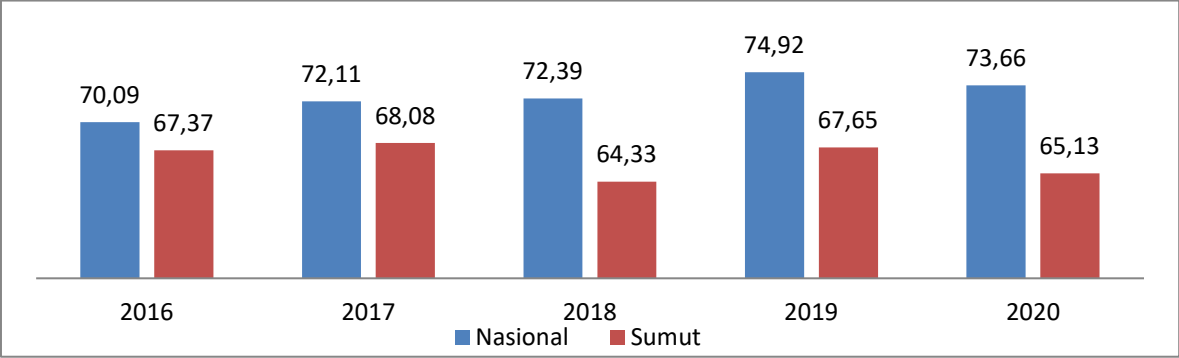
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris;
1. Masih rendahnya Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yang berada pada posisi ke 21 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan nilai 71,84, dimana IKP tertinggi yaitu Provinsi Bali sebesar 84,54 dan yang paling rendah adalah Provinsi Papua sebesar 34,79.
 2. Masih rendahnya produksi bawang merah pada tahun 2020 sebesar 29.222 Ton sedangkan kebutuhan bawang merah sebesar 46.000 Ton, untuk bawang putih pada tahun 2020 sebesar diproduksi 1.339 Ton sedangkan kebutuhan sebesar 29.403 ton.

3. Produksi daging sapi sebanyak 14.569,88 Ton pada tahun 2020. Pada saat ini, produksi daging di Sumut masih berkisar 23 persen dari kebutuhan masyarakat sehingga masih perlu dilakukan peningkatan produksi.



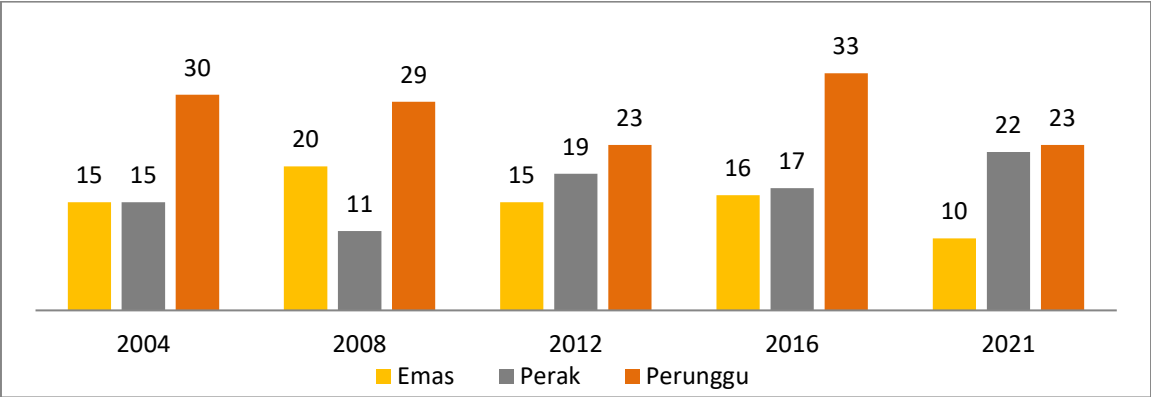
Gambar 4.6
Produksi Daging (Ton) Tahun 2016-2020

5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata;
Prioritas peningkatan daya saing sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Utara dikenal memiliki kekayaan nilai budaya dari berbagai etnis serta destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik tinggi. Akan tetapi, faktor ini dapat menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengembangan dan daya tarik sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Masih rendahnya aspek promosi dan pemasaran serta kualitas sarana dan prasarana yang belum mumpuni menyebabkan nilai kontribusi sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara masih dibawah dari capaian nasional.
6. Belum maksimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan olahraga;
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara masih lebih rendah atau sebesar 65,13 poin dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional sebesar 73,66 poin.



Sumber : BPS Sumatera Indonesia, 2020 (diolah)

Grafik 4.7
Perkembangan IDI Sumatera Utara & Nasional Tahun 2016-2020



Grafik 4.8
Perolehan Medali Sumut di Event PON

Tabel 4.5
Perolehan Medali Provinsi Sumatera Utara pada Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON)

TAHUN	EMAS	PERAK	PERUNGGU	URUTAN
2004	15	15	30	12
2008	20	11	29	7
2012	15	19	23	8
2016	16	17	33	9
2021	16	22	23	13

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Prestasi Olahraga Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang disebabkan antara lain belum maksimalnya pembinaan kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Sumatera Utara.

7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
8. Belum optimalnya kualitas infrastruktur

Tingkat kemantapan jalan provinsi masih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Hal ini disebabkan karena jalan provinsi lebih panjang daripada jalan nasional. Untuk itu diperlukan penanganan yang lebih optimal. hal ini juga di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sasaran pembangunan nasional pada penanganan infrastruktur jalan adalah menurunkan waktu tempuh pada koridor utama dapat mencapai 2,2 Jam/100 Km atau $\pm$ 45 Km/Jam, sehingga dengan pencapaian tersebut dapat diseimbangkan pada koridor jalan provinsi sebagai jalan kolektor yang juga telah diamatkan dalam PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa kecepatan minimal pada jalan kolektor adalah 40 Km/Jam. Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi baik adalah sebesar 1.097,77 Km atau sebesar 36,52 % dari total jalan provinsi sepanjang 3.005,63 Km artinya masih dibawah 50 % kondisinya dalam pencapaian aksesibilitas jalan memadai untuk mencapai kegiatan investasi pada Kawasan potensial tersebut. Penanganan jalan strategis Provinsi yang meliputi jalan strategis kawasan pariwisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas yang harus dikerjakan dalam upaya mencapai tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang $\pm$ 3.000 km yang lebih baik dan penanganan jalan alternatif Medan-Berastagi.

Sasaran pembangunan nasional terhadap konektivitas jalan adalah agar setiap Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubung dengan jaringan jalan sehingga diperoleh suatu nilai indeks konektivitas > 1).

Tabel 4.6
Kemantapan Jalan Tahun 2017-2020

No	Kematapan Jalan	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Provinsi	84.31	81.10	82.19	75.02
2	Jalan Nasional di Provisi Sumatera Utara	87	90.89	95.78	96.21



Grafik 4.9
Kemantapan Jalan Provinsi dan Nasional di Sumatera Utara Tahun 2017-2020

Pemetaan permasalahan utama Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan visi pembangunan daerah terurai ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Grafik 4.10
Permasalahan Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa Permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya kualitas Pendidikan	Belum maksimalnya aksesibilitas layanan Pendidikan, sarana/prasarana dan kapasitas Tenaga Pendidik	1. Belum maksimalnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah 2. Kualitas dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik produktif di bidang keahliannya masih kurang 3. Keterbatasan kemampuan biaya Pendidikan dan informasi bantuan Pendidikan 4. Belum optimalnya ketersambungan antara profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia usaha 5. Belum optimalnya pembangunan perpustakaan sekolah dan pengembangan sarana prasarana perpustakaan sekolah
2.	Belum Optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Adanya pandemic covid 19 dan Belum optimalnya upaya peningkatan Usia Harapan Hidup Masyarakat	1. Belum optimalnya penanganan pandemic covid-19 2. Belum maksimalnya pelayanan kesehatan; 3. Belum maksimalnya kualitas kesehatan bagi Ibu dan anak serta lansia 4. Belum optimalnya pencegahan stunting; 5. Belum optimalnya penurunan angka kesakitan 6. Belum maksimalnya sumber daya manusia tenaga kesehatan
3.	Belum Optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja	1. Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja 2. Rendahnya keterampilan lulusan pendidikan menengah 3. Masih terbatasnya kesempatan kerja 4. Kualitas Balai Latihan Kerja masih kurang 5. Perlunya penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi
4.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris	Belum optimalnya pengelolaan di sektor agraris	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi. 2. Masih minimnya penyuluh pertanian

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan di sektor pariwisata	1. Belum optimalnya promosi pariwisata 2. Penurunan jumlah pengunjung wisatawan akibat pandemi covid-19 3. SDM terkait pengembangan pariwisata masih terbatas 4. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata
6.	Belum maksimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan prestasi olahraga	Belum optimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan pencapaian prestasi olahraga serta pemenuhan sarana prasarana olahraga	1. Belum maksimalnya sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Sosial Kemasyarakatan 2. Belum maksimalnya pembinaan kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi 3. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga
7.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah maupun Perangkat Daerah belum dikendalikan dengan baik dan bersistem 2. Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal
8.	Belum optimalnya kualitas infrastruktur	Rendahnya Kuantitas, Kualitas dan konektivitas Infrastruktur pembangunan daerah	1. Kebutuhan dasar masyarakat air bersih masih minim pengembangan 2. Belum maksimalnya penataan Kawasan permukiman kumuh 3. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik 4. Belum meratanya akses komunikasi masyarakat 5. Belum optimalnya pelayanan persampahan

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			
	PELAYANAN DASAR			
1	PENDIDIKAN			
1.1	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	<	1. Tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi Sekolah dan Fasilitas Sekolah); 2. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah ke Pendidikan Tinggi; 3. Kualitas dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik masih kurang	1. Jangkauan Kewilayahan; 2. Perencanaan kebutuhan guru antar wilayah; 3. Akses ekonomi keluarga; 4. Standarisasi guru dan sekolah; 5. Identifikasi kebutuhan pasar dan tenaga kerja dengan kurikulum vokasi , kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan industry, peningkatan fasilitas alat –alat pendukung vokasi serta Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan fokus pada program keahlian yang sesuai dengan industri pendukung
1.2	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	<	4. Tidak tersambunganya profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industry;	6. Peningkatan kompetensi guru melalui diklat, sertifikasi, akreditasi sekolah 7. Identifikasi dan pembangunan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB); 8. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan
1.3	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	<	5. Masih kurangnya SDM Tenaga Pendidik/ Guru SMK yang mempunyai kompetensi yang baik serta produktif di bidang keahliannya;	
1.4	Persentase Guru SMK bersertifikasi	<	6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa; 7. Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			nasional perpustakaan, baik sarana prasarannya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya; 8. Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling.	Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 9. Peningkatan Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat berupa Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Pelayanan Perpustakaan Keliling, Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah dan Promosi Perpustakaan
2	KESEHATAN			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	<	1. Belum maksimalnya kesehatan Ibu dan anak 2. Masih rendahnya status gizi masyarakat	1. Ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	<	3. Masih tingginya angka kesakitan (<i>morbiditas</i>)	2. Ketersediaan dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar;
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	<	4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat	3. Kemampuan Akses Ekonomi Keluarga;
2.4	Prevalensi Stunting	<		4. Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
2.5	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	<		
2.6	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	=		
2.7	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	<		
2.8	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
3.1	PEKERJAAN UMUM			
3.1.1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	<	1. Belum optimalnya kondisi jaringan jalan dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan sentra-sentra produksi di Sumatera Utara 2. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan jalan 3. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan antara lain pembebanan berlebihan dan bencana alam 4. Masih rendahnya kualitas kompetensi pelaku jasa konstruksi dan ketersediaan informasi jasa konstruksi 5. Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan Kawasan strategis provinsi	1. Memprioritaskan penanganannya sebagai ruas jalan yang mempunyai nilai strategis dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur. 2. Melakukan Elaborasi penambahan sumber dana APBD (DAK, CSR dan sumber dana lainnya) dan sumber dana non APBD (KPBU, PINA dan sumber dana lainnya). 3. Melakukan sinkronisasi pembangunan sebelum dan sesudah dilaksanakan. 4. Melakukan antisipasi terhadap tingkat pelayanan jalan dan jembatan melalui penerapan regulasi untuk dilakukan pengawasan, penerapan inovasi teknologi untuk mengurangi dampak bencana alam dan pemeliharaan spesifikasi teknis terkait. 5. Melakukan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi secara berkala dan periodik berdasarkan data kebutuhan yang di update secara realtime melalui keterlibatan unsur atau lembaga jasa
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	<		
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				konstruksi, sehingga informasi tersebut dapat terpublikasikan dengan Komprehensif dan akuntabilitas. 6. Melakukan integrasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan memanfaatkan seluruh jaringan jalan terhadap kondisi eksisting sarana transportasi khususnya pada kawasan - kawasan strategis provinsi.
3.1.4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	<	1. Belum optimalnya penanganan konservasi dan pelestarian Sumber Daya Air, layanan jaringan irigasi permukaan dan rawa. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal; 2. Masih terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian. 3. Masih tingginya frekuensi kejadian banjir, dan longsor khususnya di kawasan dataran tinggi dan abrasi pantai di wilayah kepulauan Nias dan Danau Toba, dan 4. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Sumber Daya Air, yang terdiri dari OPD Pengelola Sumber Daya Air, TKPSDA Wilayah Sungai, Komisi Irigasi, dan	1. Peningkatan konservasi SDA dalam rangka kelangsungan keberadaan (kelestarian) daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air; 2. Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui peningkatan OP dan Rehabilitasi Irigasi; 3. Peningkatan Pemanfaatan embung sebagai reservoir air bersih; 4. Peningkatan konservasi sumber daya air, peningkatan kesadaran masyarakat tentang resiko kerawanan banjir, longsor dan abrasi pantai serta mitigasi bencana; 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Sumber Daya Air; 6. Pengembangan Sistem Informasi SDA melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 7. Penerapan pola hidup bersih dan sehat; 8. Peningkatan kualitas dan infratraktur pengolahan limbah.
3.1.5	Cakupan Akses Minum Perpipaan	=		
3.1.6	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR)	<		
3.1.7	Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten/kota (TPA Regional)	<		
3.1.8	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	<		
3.1.9	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal	<		
3.1.10	Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal	<		
3.1.12	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			P3A/GP3A/IP3A. Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip good governance sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat; 5. Cakupan pelayanan air limbah domestik (sanitasi) belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. 6. Cakupan pelayanan persampahan masih belum optimal 7. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi yang banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sebagai dampak dari umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan karena tinggi dan rentannya kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Utara.	
3.2	PENATAAN RUANG			
3.2.1	Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	>	Belum maksimalnya Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan RTRW daerah belum mengakomodir tuntutan pengembangan wilayah,	1. Penyusunan dokumen pemanfaatan ruang di kawasan strategis Provinsi; 2. Perencanaan detail tata ruang di kawasan strategis provinsi 3. Penyusunan Perda/Perkada khusus terkait kawasan strategis
3.2.2	Tersedianya regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang (Perda/Pergub)	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
3.2.3	Tersedianya regulasi daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang diterbitkan (Perda)	<		
3.2.4	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	>		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
4.1	Rasio Rumah Layak Huni (%)	<	1. Masih banyak penduduk yang menempati rumah tidak layak huni; 2. Distribusi akses rumah layak huni di Sumatera Utara masih 53.55 persen; 3. Terapat Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sumatera utara (Luas 10 s/d 15 Ha) sejumlah 1.310, 30 Ha pada 108 Desa / Kelurahan di 24 Kabupaten/Kota 4. Pembangunan Rumah Baru Oleh Developer Tidak Terhubung ke Fasilitas Umum Yang tersedia. 5. Terdapat masyarakat yang Tinggal di Kawasan Rawan Bencana Alam 6. Rencana Pembangunan dan Penataan Kawasan Oleh Pemerintah di Kawasan Permukiman Penduduk	1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Memanfaatkan Sumber Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan CSR) 2. Meningkatkan Koordinasi dengan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi 3. Perencanaan pada Kawasan kumuh 4. Penanganan Secara Menyeluruh dan Terpadu Pada Kawasan Yang Sesuai Kewenangan Pemerintah, Kelompok Masyarakat dan Individu 5. Pembangunan PSU Permukiman 6. Sosialisasi dan penyadaran Publik Penyediaan Rumah Baru Serta Infrastruktur Permukimannya 7. Fasilitasi Relokasi Warga Terdampak
4.2	Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	<		
4.3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	<		
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	<	1. Tingkat pelanggaran hukum masih cukup tinggi. Masih lemahnya dan tidak konsistennya penegakan hukum mempengaruhi kondisi dan ketertiban masyarakat dan Belum optimalnya penegakan Perda. Upaya penegakan Perda masih bersifat represif, yang menimbulkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat; 2. Masih kurangnya masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan dan belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; 3. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini dan masih tingginya intensitas daerah rawan bencana di Sumatera Utara.	1. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah terkait ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat; 2. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; 3. Meningkatnya koordinasi antar instansi vertikal seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan; 4. Peningkatan pembangunan sistem pengelolaan bencana dan peringatan dini; 5. Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan terutama di wilayah rawan bencana.
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	<		
5.3	Persentase Penegakan PERDA	=		
5.4	Persentase LSM Aktif	=		
5.5	Persentase Partisipasi Pemilu	=		
5.6	Persentase Pertambahan Ormas	>		
5.7	Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial	>		
5.8	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	>		
5.9	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	=		
5.10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	=		
5.11	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	<		
5.12	Indeks Resiko Bencana	<		
6	SOSIAL			
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	=	1. Belum optimalnya penanganan bencana sosial; 2. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial; 3. Masih kurangnya pemberdayaan warga binaan di dalam panti; 4. Masih belum optimalnya perlindungan dan	1. Peningkatan penanganan bencana sosial dan PMKS; 2. Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan warga binaan di panti-panti melalui pelatihan keterampilan khusus; 3. Sinergitas antar lembaga terkait dalam
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	=		
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	=		
6.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti		jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;	penanggulangan bencana.
6.5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	=	5. menurunnya jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.	
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR			
1	TENAGA KERJA			
1.1	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	<	1. Belum optimalnya Balai Latihan Kerja.	1. Revitalisasi dan pembangunan Balai Latihan Kerja
1.2	Angka Kesempatan Kerja (jiwa)	<	2. Masih kurangnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja;	2. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkait (<i>link and match</i>) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja.
1.3	Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK)	<	3. Belum maksimalnya penempatan tenaga kerja yang efektif	3. Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing;
1.4	Angka Penganggur Terbuka (jiwa)	<	4. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;	4. Ketersediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja perlu didukung dengan penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ketenagakerjaan;
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.1	Pesentase Kabupaten/kota layak Anak (menuju)	<	1. Belum optimalnya integrasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan;	1. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan;
2.2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan	>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	dan Penganggaran Responsive Gender)		2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;	2 Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2.3	Persentase Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	>	3. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;	3 Mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
2.4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	>	4. Belum optimalnya kontribusi dalam perwujudan provinsi layak anak melalui kabupaten/kota layak anak;	4 Menciptakan provinsi layak anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak anak;
2.5	Rasio kekerasan terhadap Anak	>	5. Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data terpilah.	5 Permanfaatan data terpilah
2.6	Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang <i>up to date</i>	<		
3	PANGAN			
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<	1. Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan;	1. Ketersediaan pasokan pangan untuk penduduk baik dari segi kuantitas dan kualitas;
3.2	Produksi Daging (ton)	>	2. Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan);	2. Peningkatan penyuluhan pengembangan diversifikasi pangan dan gizi;
3.3	Produksi Telur (ton)	>	3. Rendahnya pengawasan pangan yang beredar;	3. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian;
3.4	Produksi susu (ton)	>	4. Masih terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan tertentu;	4. Pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan perkarangan;
			5. Rendahnya kualitas SDM petani;	5. Peningkatan sistem jaringan irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air.
			6. Sistem pemasaran belum efisien dan berkeadilan (harga masih ditentukan pedagang);	
			7. Minimnya ju/mlah penyuluh pertanian.	
5	LINGKUNGAN HIDUP			
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	(IKLH) (%)		1. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	1. Peningkatan pengendalian Lingkungan Hidup;
	- Indeks Kualitas Air (%)	<	2. Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca terus meningkat;	2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan minimal 30 %.
	- Indeks Kualitas Udara (%)	>	3. Perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali, perubahan penutupan lahan tersebut telah mempengaruhi indeks tutupan lahan Sumatera Utara.	3. Penyediaan dokumen status lingkungan hidup sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan lingkungan hidup;
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	<		
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
6.1	Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	>	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil;
6.2	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	>	2. Belum maksimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan;	2. Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6.3	Cakupan Akte Perkawinan	>	3. Kurangnya sosialisasi pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik.	3. Sosialisasi Pemanfaatan dan Dokumen Kependudukan untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota;
6.4	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA)	>		4. Sosialisasi pentingnya tertibnya administrasi kebutuhan data pribadi masyarakat.
6.5	Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan	>		
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
7.1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	>		1. Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan dan
7.2	Persentase Kelompok Binaan PKK	>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
7.3	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	>	1. Belum Optimanya kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat desa; 2. Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat desa; 3. Belum optimalnya pembinaan kepada LPM	Lembaga adat desa; 2. Peningkatan Badan Usaha Milik Desa 3. Peningkaan Desa Mandiri
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	<	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB mandiri; 2. Pandemi covid 19 mempengaruhi akses terhadap layanan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana); 3. Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia (stake holder dan masyarakat) dalam pengembangan program dan kegiatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Sumatera Utara.	1. Penguatan program Keluarga Berencana; 2. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan/ GDPK Kabupaten/Kota; 3. Pengembangan Kampung KB.
8.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR)	<		
8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	<		
9	PERHUBUNGAN			
9.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	<	1. Fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara belum maksimal dan merata; 2. Belum maksimalnya penyerahan asset terminal tipe B yang merupakan kewenangan Provinsi;	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas serta pendistribusiannya secara merata; 2. Pembangunan simpul yang modern dan berkualitas, terintegrasi dengan Kawasan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			3. Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul) 4. Belum maksimalnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah. (konektivitas jaringan)	pariwisata dan integrasi antar moda 3. Pengembangan jaringan trayek angkutan jalan ke kawasan strategis dan pelayanan lintas penyeberangan antar kawasan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
10.1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	=	1. Belum optimalnya penyebaran informasi publik 2. Belum optimalnya pengintegrasian TIK dalam mendukung Sistem Pemerintah yang berbasis Elektronik;	1. Meningkatkan penyebaran Informasi public secara berkala di dukung oleh peningkatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi (SDM TIK) serta peningkatan kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kelompok lainnya.
10.2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	>	3. Belum maksimalnya pelayanan informasi publik yang transparan dan partisipatif; 4. Belum optimalnya fasilitas teknologi IT dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik;	2. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara yang didukung dengan pengintegrasian data sebagai upaya mewujudkan 'SatuData'. 3. Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam upaya mewujudkan tatakelola

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya. 4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi daerah dalam upaya meningkatkan keamanan informasi daerah.
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
11.1	Persentase Koperasi Aktif	<	1. Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM untuk <i>go digital</i> . 2. Belum optimalnya strategi pemasaran produk Koperasi dan UMKM khususnya di daerah-daerah destinasi wisata	1. <i>Onboard</i> produk UMKM dalam <i>e-catalogue</i> ; 2. Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam berwirausaha;
11.2	Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	<	3. Masih rendahnya kualitas produk UMKM untuk memasuki pasar ekspor 4. Masih kurangnya akses permodalan UMKM	3. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM; 4. Fasilitasi Akses Permodalan UMKM;
12	PENANAMAN MODAL			
12.1	Investor PMDN (Proyek)	>	1. Belum optimalnya dukungan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam penerbitan regulasi kemudahan berinvestasi 2. Belum optimalnya integrasi sistem layanan perizinan terpadu	1. Peningkatan Standar Pelayanan Adm. atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif; 2. Koordinasi lintas sektor yang kaitannya dengan daya tarik berinvestasi; 3. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi;
12.2	Investor PMA (Proyek)	>		
12.3	Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	<		
12.4	Nilai Investasi PMA (Rp. Triliun)	<		
12.5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	<		
12.6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA	<		
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
12.8	Lama Proses Perizinan	<	3. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT	4. Peningkatan dan Pembenahan Infrastruktur; 5. Pelayanan data dan informasi investasi ekonomi secara elektronik lengkap dan mudah diakses.
	- PMDN			
	- Sektoral			
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	>	1. Masih kurangnya tenaga keolahragaan yang bersertifikat dan pemanduan bakat (<i>talent scouting</i>) ; 2. Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai menuju Persiapan Tuan Rumah PON XXI Tahun 2024, serta pemerataan distribusi penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa peralatan dan gedung olahraga di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara; 3. Belum maksimalnya pembinaan dan apresiasi kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi; 4. Belum optimalnya upaya peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan; 5. Belum optimalnya sinkronisasi antara organisasi olahraga dengan sekolah dalam hal pemassalan, pembibitan, dan pembinaan prestasi olahraga pelajar/ atlet pelajar yang	1. Peningkatan pembinaan ketenagaolahraga yang bersertifikat; 2. Pembangunan sarana dan prasarana areal pertandingan yang mendukung penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024, serta pemerataan distribusi penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa peralatan dan gedung olahraga di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 3. Fasilitasi kepada atlet dalam hal meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri; 4. Meningkatkan kesejahteraan insan olahraga berprestasi; 5. Meningkatkan komitmen organisasi kepemudaan dalam melaksanakan UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan.
13.2	Persentase Wirausaha Muda	>		
13.3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	>		
13.4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	>		
13.5	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			menjadi cikal bakal atlet nasional di masa depan; 6. Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertanding yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih.	
14	STATISTIK			
14.1	Data Statistik Sektoral	>	1. Masih minimnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral; 2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan statistik sektoral.	Peningkatan, Pembinaan dan Pelatihan SDM di bidang Statistik.
15	PERSANDIAN			
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	<	1. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung persandian dan keamanan informasi; 2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi;	Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan di bidang Persandian.
16	KEBUDAYAAN			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
16.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	<	1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan 2. Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya dan sejarah bangsa; 3. Belum maksimalnya penyelenggaraan event seni dan budaya dalam rangka promosi wisata; 4. Belum optimalnya pengembangan destinasi-destinasi bertema sejarah dan budaya;	1. Peningkatan sertifikasi SDM Kebudayaan 2. Identifikasi, Dokumentasi dan Inventarisasi Benda, Cagar Budaya dan Situs Budaya agar kelestariannya bisa terpelihara; 3. Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya 4. Peningkatan komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah.
17	PERPUSTAKAAN			
17.1	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	<	1. Masih kurangnya koleksi buku terutama buku-buku best seller yang tersedia di perpustakaan;	1. Penambahan koleksi buku secara rutin terutama buku-buku best seller yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan perpustakaan;
17.2	Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	<	2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi/ digital/ E-Library;	2. Pengembangan Perpustakaan Digital (e-Library);
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	<	3. Belum optimalnya gerakan pemasyarakatan minat baca melalui sosialisasi, promosi, lomba minat baca serta dan promosi gerakan literasi di Sumatera Utara;	3. Sosialisasi dan Promosi Gerakan Literasi Nasional di Provinsi;
17.4	Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	<	4. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Perpustakaan (Pustakawan) yang bersertifikasi;	4. Mengubah pola pikir masyarakat tentang perpustakaan melalui promosi-promosi yang kreatif secara berkelanjutan.
17.5	Koleksi Judul Buku Perpustakaan	<	5. Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan di Sumatera Utara;	
17.6	Indeks Minat Membaca	<	6. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pojok baca/ reading corner di ruang public untuk meningkatkan indeks minat baca;	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			7. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasana perpustakaan sekolah.	
18	KEARSIPAN			
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	<	1. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sumatera Utara;	1. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	<	2. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Kearsipan (Arsiparis) yang bersertifikasi; 3. Belum optimalnya penataan Kearsipan berbasis digital di OPD Pemprovsumu; 4. Belum dimilikinya pedoman tata cara kearsipan yang diberlakukan secara baku	2. Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang arsip.
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
1	PARIWISATA			
1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	<	1. Perlambatan pertumbuhan sektor pariwisata akibat Pandemi Covid-19. 2. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara disebabkan pembatasan pergerakan sosial akibat Pandemi Covid-19 3. Kurang optimalnya aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Sarana-prasarana penunjang pariwisata	1. Peningkatan Implementasi <i>Clean, Healthy, Safety, Environment</i> (CHSE) di kawasan objek wisata; 2. Pengembangan objek wisata baru antara lain Desa Wisata, Ekowisata dan Wisata Budaya; 3. Peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi di kawasan pariwisata;
1.2	Kunjungan wisatawan mancanegara	<		
1.3	Lama Kunjungan Wisata	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			4. Terbatasnya jumlah dan keterampilan SDM pariwisata serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat 5. Kurang optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif 6. Kurang optimalnya koordinasi antara Lembaga/kementerian, pusat-daerah dan pemerintah swasta dalam mengembangkan pariwisata dan budaya	4. Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sertifikasi pelaku pariwisata, sosialisasi, pelatihan dan <i>knowledge sharing</i> ; 5. Peningkatan Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan event, pameran, media sosial, dan media cetak-elektronik; 6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.
2	PERTANIAN/ PERKEBUNAN			
	Pertanian			
2.1	Produksi Tanaman Pangan			
	1. Padi (ton GKG)	<	1. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lahan	1. Optimalisasi sumber daya lahan melalui sistem pertanian terintegrasi
	2. Jagung (ton pipilan kering)	<	2. Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	2. Memaksimalkan UPT Perbenihan dalam menghasilkan benih sumber,
	3. Kedele (ton)	<	Belum Mencukupi Kebutuhan	Menumbuhkan/embangkan penangkar-penangkar benih dan Fasilitasi Benih ke Kelompok Tani melalui bantuan Pemerintah
2.2	Produktivitas Tanaman Pangan		3. Pemanfaatan Ketersediaan Air	
	1. Padi (ton/Ha)	<	4. Ketersediaan Saprodi Dan Alsintan Masih Terbatas	
	2. Jagung (ton/Ha)	<	5. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	
	3. Kedele (ton/ha)	<	6. SDM Pertanian Masih Relatif Rendah	3. Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Penyediaan Pompanisasi dan Embung
2.3	Produksi Tanaman Holtikultura			
	1. Bawang Merah (ton)	<		
	2. Cabe (ton)	<		
	3. Sayur-sayuran (ton)	<		
	4. Buah - buahan (ton)			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
2.4	Produktivitas Tanaman Holtikultura			
	1. Bawang Merah (ton)	>		4. Fasilitasi Sarana Produksi ke Kel. Tani melalui Bantuan Pemerintah, Pembangunan sarana berupa Rumah Kompos dan Penambahan Sarana alat mesin pertanian
	2. Cabe (ton)	>		5. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengaturan Pola Tanam dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT
				6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian dan Peningkatan Keterampilan Petani dan Kelompok Tani
	Perkebunan			
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	<	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi;	1. Penguatan peran kelembagaan Pertanian;
2.6	Produksi	<	2. Belum optimalnya kelembagaan petani;	2. Pelatihan bimbingan bidang Pertanian/Perkebunan dalam hal peningkatan produksi secara efisiensi melalui teknologi yang sesuai;
	1. K. Sawit (ton)	<	3. Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal;	3. Peningkatan pembangunan infrastruktur/jalan daerah Produksi Perkebunan;
	2. Karet (ton)	<	4. Budidaya tanaman masih terbatas pada komoditas utama/konvensional;	4. Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian guna menciptakan benih unggul
	3. Kopi Arabika (ton)	<	5. Masih rendahnya Mutu hasil produk perkebunan;	
	3. Kopi Robusta (ton)	<		
	4. Kelapa (ton)	<		
	5. Kakao (ton)	<		
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	<		
2.7	Produktifitas sektor perkebunan			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	(kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao)		6. Masih tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil; 7. Masih rendahnya kualitas dan SDM pertanian.	menuju kualitas dan produktifitas hasil pertanian yang tinggi. 5. Peremajaan perkebunan rakyat Fasilitasi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
	1. K. Sawit (kg/Ha/tahun)	>		
	2. Karet (kg/Ha/tahun)	>		
	3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun)	>		
	3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun)	<		
	4. Kelapa (kg/Ha/tahun)	>		
	5. Kakao (kg/Ha/tahun)	<		
	6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun)			
2.8	Luas Areal			
	1. K. Sawit (Ha)	>		
	2. Karet (Ha)	<		
	3. Kopi Arabika (Ha)	>		
	3. Kopi Robusta (Ha)	<		
	4. Kelapa (Ha)	<		
	5. Kakao (Ha)	<		
	6. Komoditi Lainnya (Ha)			
3	KEHUTANAN			
3.1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	<	1. Belum Optimalnya penanganan pelestarian hutan dan lahan kritis; 2. Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara; 3. Masih adanya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain;	1. Meningkatnya penetapan tata batas Kawasan Hutan di Provsu; 2. Meningkatnya Rutinitas patroli perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap konservasi
3.2	Peurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	>		
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			4. Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan kawasan hutan; 5. Belum optimalnya pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan	serta upaya menanam dan memelihara pohon secara terus-menerus; 4. Terbina dan terkendalinya tertib pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial.
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
4.1	Daya Listrik Terpasang	<	1. Tidak meratanya Rasio Elektrifikasi di Sumatera Utara 2. Potensi Energi Alternatif yang belum termanfaatkan sepenuhnya; 3. Masih rendahnya Pemanfaatan energi baru terbarukan; 4. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam di Sumatera Utara	1. Pemanfaatan dan peningkatan pengelolaan energi baru terbarukan yang merupakan energi alternatif 2. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya di Sumatera Utara
4.2	Rasio Elektrifikasi	<		
5	PERDAGANGAN			
5.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	<	1. Belum maksimalnya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas; 2. Kurang optimalnya kualitas produk yang memenuhi standard ekspor;	1. Peningkatan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan; 2. Peningkatan kualitas produk ekspor; 3. Peningkatan SDM pelaku usaha ekspor 4. Peningkatan promosi dagang dan
5.2	Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas	>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			3. Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha ekspor 4. Kurang optimalnya promosi dagang baik di dalam negeri maupun luar negeri 5. Masih rendahnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; 6. Belum optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen;	perluasan akses pasar ekspor. 5. Peningkatan pemasaran dan sosialisasi penggunaan produk Dalam Negeri 6. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
6	PERINDUSTRIAN			
6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	<	1. Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri dan industri yang bernilai tambah;	1. Peningkatan sektor industri bernilai tambah;
6.2	Pertumbuhan Industri		2. Belum optimalnya kualitas produk industri kecil menengah;	2. Peningkatan kualitas produk industri kecil menengah melalui peningkatan sarana dan prasarana dan sertifikasi produk industri kecil menengah;
	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	<		
	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	<	3. Belum optimalnya kualitas SDM pelaku industri kecil menengah; 4. Belum optimalnya promosi produk industri kecil menengah; 5. Masih rendahnya informasi berbasis digital 6. Belum optimalnya penerapan teknologi industri dan <i>sustainable industry (green industry)</i> ;	3. Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah melalui pelatihan dan pendampingan pelaku industri kecil menengah; 4. Peningkatan promosi dan perluasan pasar produk industri kecil menengah melalui <i>marketplace</i> dan penyelenggaraan event/pameran nasional dan internasional ; 5. Pengelolaan Sistem Informasi Industri;

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				6. Pengendalian Implementasi Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Utara terutama dalam penerapan <i>green industry</i> .
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
8.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)		1. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya; 2. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan; 3. Belum optimalnya pengawasan UU fishing; 4. Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah; 5. Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan nelayan; 6. Kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil.	1. Kestinambungan sumber daya ikan; 2. Ketersediaan sarana dan parasarana yang memadai; 3. Pengembangan atau inovasi pnerapan teknologi kelautan dan perikanan secara pasif dan efektif; 4. SDM kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten; 5. Pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik; 6. Dukungan investasi dari para pelaku usaha; 7. Regulasi Pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
8.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	>		
8.3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	<		
8.4	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	<		
8.5	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m²)	<		
8.6	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	<		
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG			
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1.1	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	<	1. Belum optimalnya kelengkapan dan pemanfaatan data infomasi dalam rumusan analisis perencanaan pembangunan daerah;	1. Kurangnya SDM Perencana;
1.2	Tingkat Konsistensi Program RKPD	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	kedalam Penjabaran APBD			
1.3	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	=	2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dan target capaian prioritas pembangunan daerah.	2. Belum semua Perangkat Daerah menginput kelengkapan data ke dalam aplikasi; 3. penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
2	KEUANGAN			
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	=	1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah; 2. Perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam peningkatan Pendapatan Daerah melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Perlu melakukan optimalisasi retribusi daerah, meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD; 3. perlu ditingkatkan kualitas laporan keuangan terutama terkait dengan inventaris aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 4. Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan dan aset berbasis IT;	1. Peningkatan kapasitas SDM otoritas pajak; 2. Kerjasama pertukaran data dan informasi perpajakan dengan pemerintah pusat maupun institusi lainnya; 3. Peningkatan tariff pajak dan retribusi daerah; 4. Penggunaan teknologi informasi dalam pajak; 5. Keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan.
2.2	Persentase SILPA Terhadap APBD	>		
2.3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	<		
2.4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	<		
2.5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	<		
2.6	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	>		
2.7	Penetapan APBD	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			5. Masih lemahnya inventarisir dan pengawasan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	
3	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			
3.1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	<	1. Belum memadainya kualitas SDM pengelola pemungutan pajak daerah; 2. Kurang optimalnya pelayanan jasa pembayaran pajak daerah hal ini terutama penyediaan sarana dan prasarana di tempat pembayaran pajak; 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah; 4. Belum optimalnya penegakan hukum; 5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemungut pajak dan retribusi daerah; 6. Kebutuhan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dituntut semakin cepat untuk memenuhi permintaan masyarakat. 7. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pembelian kendaraan bermotor menurun yang berdampak kepada	1. Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem e-samsat Paten yang merupakan amanat koordinasi, supervise dan pencegahan KPK; 2. Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab setempat; 3. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan; 4. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pengembangan moda pembayaran PKB secara elektronik melalui transaksi mesin <i>Electronic Data Capture</i> (EDC), maupun kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			menurunnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.	memfaatkan aset yang dimiliki oleh mitra Payment Point Online Bank (PPOB);
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1. Terbatasnya disiplin ilmu serta jenjang pendidikan yang ditempatkan pada masing-masing OPD sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan; 2. Belum optimalnya layanan kepegawaian berbasis digital; 3. Masih banyak jumlah ASN Provinsi Sumatera Utara yang belum mengikuti Diklat Manajerial, Diklat Pemerintahan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional; 4. Masih belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pendukung pelatihan /diklat 5. Masih diperlukan optimalisasi kualitas dan kuantitas pendidik kediklatan 6. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholders terkait untuk peningkatan distribusi pemerataan diklat dan pelatihan terutama terkait pemenuhan demand diklat sesuai dengan perkembangan zaman 4.0 7. Penguatan koordinasi yang optimal antar lintas OPD dan kabupaten/kota terkait identifikasi kebutuhan diklat prioritas yang dibutuhkan serta mekanisme alokasi penganggaran yang dibutuhkan (mekanisme kontribusi	1. Pengembangan sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sumatera Utara; 2. Peningkatan optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Kearsipan (Arsiparis) yang bersertifikasi; 3. optimalisasi penataan Kearsipan berbasis digital di OPD Pemprovsumu; 4. Peningkatan fasilitas, mutu dan kualitas tenaga pendidik kediklatan.
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan			
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	<		
4	KEPEGAWAIAN DAERAH			
4.1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	<		
4.2	Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	<		
4.3	Jabatan Pengawas Pada Instansi Pemerintah	<		
4.4	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	<	1. Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian yang disampaikan kepada perangkat daerah; 2. Belum efektifnya sosialisasi terhadap hasil penelitian Balitbang kepada Perangkat daerah/pemangku kepentingan; 3. Belum melakukan koordinasi/belum melibatkan Perangkat Daerah dalam hal memantau sejauhmana hasil kelitbangan yang telah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian
5.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	<		
	Penerapan SIDA:	<		
5.4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	<		
5.5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	<		
6	PENGAWASAN			
6.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	>	1. Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjend Kementerian Dalam Negeri, Itjend Kementerian Teknis, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Inspektorat Provinsi; 2. Masih belum adanya Kendali Mutu dan Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis; 3. Masih terbatasnya SDM pemeriksa/pengawas.	meningkatkan standar operasional pemeriksaan
6.2	Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas	>		
7	PENGHUBUNG			
7.1	Persentase hubungan antar lembaga	>	Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik pada badan penghubung provinsi sumatera utara	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparaturnya dan masyarakat
7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				2. Peningkatan pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat Peningkatan
8	SEKRETARIAT DEWAN			
8.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi	=	Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat.	Persamaan persepsi dalam menyikapi malalah-masalah pembangunan.
8.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	=		
8.3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	=		
9	SEKRETARIAT DAERAH			
9.1	Persentase penyelesaian batas daerah	>	1. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 2. Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah;	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
9.2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	>		
9.3	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
9.4	Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	<	3. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT;	
9.5	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	=	4. Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;	
9.6	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	=	5. Masih belum maksimalnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT.	
9.7	Nilai capaian pelaporan kinerja	=		
9.8	Persentase Fasilitasi Materi Pimpinan			
9.9	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Tamu Utama Pemerintah Daerah			

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah` dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian sebagai berikut:

4.2.1. Telaahan Isu International

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Provinsi Sumatera Utara yaitu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian.

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “*The Future We Want*” dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional

dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu :

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif,

- akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

Di Provinsi Sumatera Utara, rumusan SDGs dan target pencapaian menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas dalam pembangunan, hal ini terlihat dari sinkronisi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs) dengan RPJMD Perubahan 2019-2023

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	
			1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
			1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
			1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
			1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
			1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
			1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
			1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Persentase rumah tinggal bersanitasi
			1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
			1.4.1. (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
			1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Cakupan penerbitan akta kelahiran
			1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Persentase rumah tangga pengguna listrik
	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
		mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	
			1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
			1.5.1. (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
			1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	
			1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	
			1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%)
	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)
			2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Prevalensi balita gizi kurang

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Penanganan daerah rawan pangan
			2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)
	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			2.2.1. (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	
			2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi
			2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
					tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	
			2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	
			2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Konsumsi ikan
	2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
			3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
			3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
			3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
		hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.			pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	
			3.2.2. (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
			3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
			3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka kejadian Malaria
			3.3.3. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	
			3.3.4. (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
				tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		
			3.3.5. (a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	
			3.3.5. (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	
	3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	
			3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	
			3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	
			3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			3.4.2. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
				yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	
	3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalnya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	
			3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	
			3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
			3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)
			3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Total Fertility Rate (TFR)
	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1. (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	
			3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	
	3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta	3.9.3. (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.				
	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen,	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rasio tenaga medis per satuan penduduk

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.				
	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%).	
			4.1.1. (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	Angka partisipasi kasar
			4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Angka rata-rata lama sekolah
	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).	Angka partisipasi kasar
	4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan,	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
		termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.				
	4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
			4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
					pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	
	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rasio KDRT
			5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
			5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	Rata-rata usia kawin pertama wanita
			5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)
			5.3.1. (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 75,4%).	Angka partisipasi kasar
	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
			5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
					(2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
			5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	
	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
			6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	
			6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Persentase rumah tinggal bersanitasi
			6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
			6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			6.2.1. (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	
			6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	
			6.3.2. (a)	Kualitas air danau.	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator	Peningkatan Indeks Kualitas Air

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
					membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	
			6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Peningkatan Indeks Kualitas Air
	6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1. (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.	
			6.4.1. (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	
			6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	
			6.5.1. (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
			6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
			6.5.1. (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	
	6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
			6.6.1. (e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019 (2014: 81,5%).	Presentase rumah tangga pengguna listrik
			7.1.1. (a)	Konsumsi listrik per kapita.	Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019 (2014: 843 KWh).	
			7.1.2. (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Tercapainya jaringan gas 1,1 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2019 (2014: 200 ribu).	
			7.1.2. (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	
			7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Pertumbuhan PDRB
			8.1.1. (a)	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	PDRB per Kapita

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			8.3.1. (a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	
			8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tingkat pengangguran terbuka
			8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
			8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Kunjungan wisata
			8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Kunjungan wisata
			8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	PAD sektor pariwisata
			8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	
			8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi					penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	
	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	
			9.1.1. (c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	
			9.1.2. (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
			9.1.2. (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
			9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
			9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil,	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
		khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.		total nilai tambah industri.	
			9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
	9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
			9.4.1 (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019.
	9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi rumah tangga dengan akses internet
			9.c.1. (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Presentase penduduk yang menggunakan hp/telepon
			9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi rumah tangga dengan akses internet
	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Indeks Gini
			10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Presentase penduduk di atas garis kemiskinan
			10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	
			10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	Presentase penduduk di atas garis kemiskinan
	10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan		semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.		jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		
	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3)	
			10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
					Metropolitan hingga tahun 2019.	
			11.1.1. (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.	
	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
			11.2.1. (b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	
	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1. (a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
			11.3.1. (b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	
			11.3.2. (a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	
			11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	
	11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	
	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana,	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana t
			11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	

TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1. (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience).
		11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
		11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).
		11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Jumlah limbah B3 yang dikelola

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
		dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				
	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
	12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	
	12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1. (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	
			13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk	13,2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).	Laporan inventarisasi GRK
	14,2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional,	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Pembangunan Berkelanjutan		dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.			serta terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan hingga tahun 2019 (2015: 5 WPP).	
	14,6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Terkendalnya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019 (2015: 66 %).	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Cakupan bina kelompok nelayan
			14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara
	15,2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
		terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha).	
			15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
	15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		penganggaran pengurangan kemiskinan.				
	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
			16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalnya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rasio KDRT
			16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
			16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	
	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
			16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Opini BPK
			16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	
			16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	
			16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
				Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	
			16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	
	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
			16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
	####	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan		peraturan nasional dan kesepakatan internasional.		mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	
	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	
	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase PAD terhadap pendapatan
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	
			17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Proporsi rumah tangga dengan akses internet
	17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
	17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi rumah tangga dengan akses internet
	17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	
	17,2	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	
			17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan,	

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
				penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.
			17.18.1 .(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
			17.18.1 .(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
			17.18.1 .(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
			17.18.1 .(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
			17.19.2 .(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)

TUJUAN TPB	TARGET		INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD/Renstra Perubahan
			17.19.2 .(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)
			17.19.2 .(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)

b. Pandemi COVID-19

Dunia telah berada dalam masa pandemi COVID-19 selama hampir satu tahun. Virus Corona terus menyebar ke seluruh dunia dan memaksa semua orang beradaptasi dengan kehidupan era new normal. Pandemi Covid-19 sudah berjalan setahun lebih dan sampai saat ini belum terkendali. Vaksin yang disetujui menawarkan perlindungan enam bulan, tetapi kesepakatan internasional telah memperlambat distribusinya. hingga pertengahan 2021, diperkirakan 250 juta orang telah terinfeksi di seluruh dunia, dan 1,75 juta lainnya meninggal akibat Virus Corona COVID-19.

Penyakit *coronavirus* atau Covid-19 telah menyebar ke 185 negara dan wilayah, menginfeksi lebih dari 2,7 juta orang dan membunuh lebih dari 190.000 orang secara global sejak muncul pertama kali di kota Wuhan, China, akhir tahun 2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.

Untuk membendung penyebaran virus lebih lanjut, pihak berwenang di seluruh dunia menerapkan langkah-langkah untuk mengunci negara dan kota pada tingkat yang berbeda-beda. Itu termasuk menutup perbatasan, menutup sekolah dan tempat kerja, dan membatasi pertemuan besar. Pembatasan-pembatasan itu, yang oleh Dana Moneter Internasional (IMF) disebut sebagai "*Great Lockdown*," membuat banyak kegiatan ekonomi global terhenti, merugikan bisnis dan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan. Berikut pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kondisi global.

1. Jumlah Pengangguran Meningkat

Banyak ekonom telah memperingatkan bahwa tindakan *lockdown* di seluruh dunia akan mempercepat orang-orang kehilangan pekerjaan hal ini sudah terlihat dalam angka pengangguran di beberapa negara. Di AS sebagai pusat ekonomi terbesar di dunia, lebih dari 26 juta pekerjaan hilang selama lima minggu terakhir. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja, tingkat pengangguran AS pada bulan Maret adalah sebesar 4,4% menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2017. AS tidak sendirian dalam menghadapi meningkatnya jumlah pengangguran. Australia dan Korea Selatan juga mencatat kenaikan tingkat pengangguran, dengan beberapa ekonom yang

memperingatkan bahwa situasinya dapat menjadi lebih buruk.

2. Industri Jasa terpuruk

Industri jasa adalah sumber utama pertumbuhan dan lapangan kerja bagi banyak negara, termasuk AS dan China, dua negara ini merupakan ekonomi dan pasar konsumen terbesar di dunia. Namun, kedua negara melaporkan penurunan tajam dalam penjualan ritel karena tindakan *lockdown* selama pandemi memaksa banyak toko untuk tutup dan membuat konsumen tetap di rumah. Peningkatan penjualan online yang dilaporkan oleh beberapa retailer, seperti Amazon, gagal membendung penurunan secara keseluruhan.

3. Aktivitas manufaktur menurun

Produsen, yang sudah terbebani oleh perang dagang AS-China dalam dua tahun terakhir, sekali lagi berada di bawah tekanan ketika virus corona menyebar ke seluruh dunia. Ketika lebih banyak negara memberlakukan tindakan *lockdown*, sebagian besar perusahaan manufaktur terpuruk. Beberapa terpaksa ditutup sementara, sementara yang tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi. Selain itu, adanya penurunan permintaan barang turut memperburuk tantangan yang dihadapi produsen.

4. Melambatnya volume perdagangan

Perdagangan global, yang sudah melambat pada tahun 2019, diperkirakan akan terbebani lebih lanjut pada tahun 2020 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dalam perkiraan terbarunya mengatakan volume perdagangan global bisa anjlok sebesar 12,9% atau 31,9% tahun 2019 tergantung pada lintasan ekonomi global. semua wilayah akan mengalami penurunan dua digit dalam ekspor dan impor pada tahun 2020.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan sektor ekonomi - sosial terdampak oleh Pandemi Covid19 meliputi antara lain:

1. Bantuan jaring pengaman Sosial

Pemberian bantuan Pangan (tunai/non tunai) kepada masyarakat secara langsung melalui Gugus Tugas Kabupaten/Kota, yang

ditampung melalui Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 300,3 Miliar pada Tahap I dan Rp. 82 Miliar pada Tahap II

2. Penguatan Sektor UMKM

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong peningkatan UMKM/IKM melalui pemanfaatan e-Katalog dan aplikasi Bela Pengadaan, melakukan kerjasama dengan marketplace nasional untuk mendorong pembelian produk UMKM dengan menyediakan satu halaman khusus produk asal Sumatera Utara dalam kurun waktu 1 bulan penuh. Untuk promosi, pemerintah daerah juga perlu bekerjasama dengan selebgram/artis/content creator nasional agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dibarengi dengan **Virtual Campaign Dari Sumut untuk Sumut.**

3. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan melalui

- Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
- Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hias
- Program Sarana dan Prasarana Pertanian
- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan /Penanggulangan Penyakit Hewan
- Program Sarana dan Prasarana Perkebunan

4. Penguatan Sektor Pariwisata, Industri, dan Investasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong sektor Pariwisata melalui peningkatan Quality Tourism dengan penerapan WISATA AMAN COVID melalui CHSE, peningkatan kunjungan wisatawan lokal / domestic melalui pengembangan Desa-Desa Wisata berbasis Tematik, dan pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif yang mendukung sektor Pariwisata.

c. Ancaman Krisis Ekonomi Global

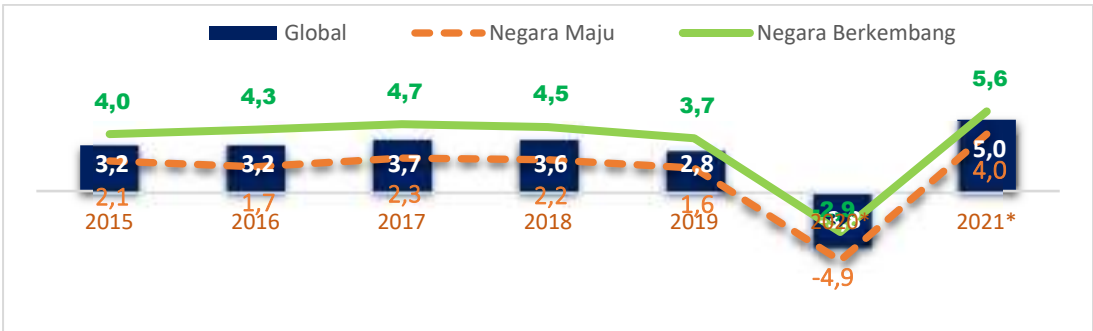
Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi telah menyebabkan banyak lembaga memangkas perkiraan pertumbuhan mereka terhadap ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF), yang penilaian ekonominya diikuti secara luas, memperkirakan ekonomi global menyusut 3% tahun ini. Hanya segelintir ekonomi - seperti China dan India - yang diperkirakan tumbuh pada 2021.

Tahun 2020 diawali dengan optimisme bahwa akan terjadi perbaikan perekonomian dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global diyakini akan kembali membaik Ketika mulai membaiknya hubungan Amerika Serikat dan China yang telah menjalankan Perang Dagang sejak tahun 2018. Namun, optimisme tersebut memudar dengan cepat seiring dengan merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi pada awal 2020, menjadi krisis perekonomian yang memengaruhi kehidupan sosial, kesejahteraan, dan finansial.

Pemulihan ekonomi global diproyeksikan akan terus berlangsung terutama didukung oleh stimulus di berbagai negara serta mulainya program vaksinasi. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi momentum pemulihan di akhir tahun 2020 untuk memasuki tahun 2021.

Sejak kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi dunia masih terkontraksi dan diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2020. Pada kuartal I-2020, Produk Domestik Bruto (PDB) dunia terkontraksi menjadi -1,5% dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama (year on year). Pertumbuhan ekonomi global makin terperosok di kuartal II-2020. Saat itu, terjadi penurunan hingga -8,9%. Namun, pada kuartal selanjutnya PDB dunia membaik, meskipun masih terkontraksi 2,6%. Hal ini terdorong peningkatan mobilitas masyarakat yang menggerakkan perekonomian.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik pada kuartal selanjutnya. Pada kuartal IV-2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan terdongkrak hingga di titik -2%. BI pun memprediksi tahun ini PDB global akan bertahan di titik -3,8%.



Sumber: IMF dan Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 4.1.1

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2013 - 2019 (%)

Isu-isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian Sumatera Utara adalah:

1. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Pemulihan ekonomi global didukung prakiraan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Ketersediaan vaksin diperkirakan akan terpenuhi pada paruh pertama 2021 untuk 68% penduduk dunia, sehingga diharapkan dapat mendorong perbaikan mobilitas, keyakinan konsumen, dan keyakinan dunia usaha.
2. Kondisi pemulihan kinerja perekonomian global. Ini khususnya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan kasus penularan virus corona di dunia. Faktor geopolitik pasca pemilu AS, dan dinamika hubungan AS dan China memiliki peranan penting dalam peningkatan perdagangan global yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang dan pandemi sepanjang tahun 2020 diharapkan dapat segera pulih dan hubungan dagang Indonesia – Amerika Serikat tetap akan stabil dan bergerak lebih positif.
3. Perilaku mendahulukan kepentingan domestik (*inward looking policy*) makin meluas di banyak negara. Hal ini dicirikan dengan upaya beberapa negara yang meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri maupun membatasi hubungan dagang dengan negara lain. Perilaku tersebut terjadi di tengah sistem perdagangan internasional yang selama ini banyak bertumpu pada negara tertentu dalam mata rantai produksi global (*global supply chains*). Perkembangan pada 2020 menunjukkan terhentinya proses produksi di Tiongkok sebagai negara yang berperan besar dalam perdagangan dunia, akibat pembatasan mobilitas untuk mengatasi Covid-19, telah menimbulkan gangguan signifikan pada mata rantai produksi global. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan sistem perdagangan internasional ke depan, terutama pada saat terjadi tekanan yang besar.

4. Ketergantungan pasar keuangan dunia pada dominasi mata uang dolar AS berpotensi memunculkan risiko sistemik. Penggunaan mata uang dolar AS dalam berbagai transaksi keuangan internasional terus meningkat pasca krisis keuangan global. Hal tersebut kemudian memicu perilaku investor global untuk menarik dananya dalam jumlah besar dari berbagai negara, terutama dari negara berkembang, kepada aset keuangan yang dianggap aman, seperti dolar AS.
5. Aliran modal keluar dari negara berkembang dalam jumlah besar yang terjadi pada waktu yang bersamaan tersebut kemudian mendorong pelemahan mata uang berbagai negara secara tajam.
6. Peningkatan harga komoditas berlanjut pada tahun 2021 seiring dengan mulai pulihnya ekonomi global akibat optimisme global sejak vaksin Pandemi Covid-19 telah mulai di berikan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan melemahnya permintaan global dan disrupsi dari sisi rantai pasok. Harga-harga komoditas berguguran. Sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2020, harga-harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, nikel, CPO, timah, karet dan tembaga mengalami kontraksi. Namun seiring dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19 di berbagai penjuru dunia, banyak negara yang sudah mulai melonggarkan pembatasannya. Dampaknya pun dirasakan oleh pasar komoditas. Memasuki bulan Mei dengan bertambahnya negara yang melakukan pelonggaran, harga komoditas mulai merangkak naik. Ekspor Indonesia diuntungkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti batubara, pangan, hingga minyak sawit mentah (CPO). Kinerja tersebut akan bertahan karena harga komoditas akan terus meningkat hingga normalisasi ekonomi global secara penuh. Namun dalam jangka menengah-panjang, kemungkinan akan stagnan atau turun, khususnya untuk batubara karena adanya tren global terhadap energy terbarukan (*renewable energy*).

4.2.2. Telaahan Isu Strategis Regional

Isu Strategis regional melihat berdasarkan posisi Geostrategis Provinsi Sumatera Utara di dalam konstelasi hubungan dengan provinsi

bertetangga dan letak nya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Salah satu isu strategis regional adalah terkait dengan Daya Saing Nasional dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia dan seluruh negara-negara ASEAN lainnya (9 negara lainnya) telah bersepakat menyepakati perjanjian MEA tersebut mulai tahun 2015. Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai pasok makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Peluang dari implementasi MEA dapat dimanfaatkan Provinsi Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan ekspornya ke negara-negara ASEAN. Selama ini, Singapura, Malaysia, Thailand telah menjadi mitra dagang utama bagi Sumatera Utara. Pada masa yang akan datang dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara ASEAN lainnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apalagi Sumatera Utara sanggup berkompetisi dengan produk-produk unggulannya khususnya komoditas hasil perkebunan seperti Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Kopi.

Implementasi MEA juga memberikan tantangan bagi perekonomian Sumatera Utara. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah:

1. Meningkatnya resiko kompetisi perdagangan, khususnya produk-produk UMKM. Dengan diimplementasikannya MEA, muncul produk-produk dari negara ASEAN lainnya yang beragam dalam jumlah banyak ke pasar Sumatera Utara. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang

lebih bagus. Industri di Provinsi Sumatera Utara pun dapat terancam karena persaingan yang semakin ketat.

2. Meningkatnya resiko eksploitasi di bidang investasi. Dengan meningkatnya investasi akan memberikan tantangan bagi persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Sumatera Utara. Permasalahan konflik sosial sering muncul ketika munculnya investasi asing, karena masyarakat setempat tidak diberikan kesempatan besar untuk berperan dalam kegiatan produksi.
3. Meningkatnya persaingan di bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja di Sumatera Utara pada umumnya masih berpendidikan rendah. Ditinjau dari sisi pendidikan dan produktivitas, maka kualitas tenaga kerja Sumatera Utara masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dengan upah minimum yang terus meningkat setiap tahunnya, maka keunggulan upah murah yang masih dimiliki saat ini akan hilang di masa yang akan datang. Di samping itu, untuk tenaga kerja profesional, masih terbatasnya tenaga profesional yang dimiliki Sumatera Utara dapat menyebabkannya memasukkan tenaga-tenaga profesional dari negara ASEAN lainnya mengisi posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan besar di Sumatera Utara.

4.2.3. Isu Strategis Nasional

- Telaahan RPJMN 2020-2024

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Tabel 4.10
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Misi	Agenda Pembangunan Nasional
1. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.	

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Target indikator makro untuk Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Target Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMN

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan			
	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	6,40	6,90	7,40
Tingkat Kemiskinan (%)	8,43	7,95	7,25	6,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50	5,30	5,20	4,70

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (major project). Adapun major project yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.12
Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
di Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Lokasi	Indikasi	Pendanaan Pelaksana
1	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	1. Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha 2. Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Sumatera Utara	Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara	APBN: Rp 30,9 triliun	APBN
2	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 2. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024	Sulawesi Utara, Sumatera Utara , Riau, Maluku	Rp 30 Triliun APBN: Rp7,2 Triliun KPBU dan Swasta: Rp22,8 triliun	APBN, KPBU dan Swasta
3	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, BromoTengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	1. Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) 2. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024)	Danau Toba , Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Rp 161 triliun	APBN KPBU BUMN Swasta
4	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	1. Menurunkan waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 2. Menjadi enabler bagi pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera 3. Menghubungkan koridor Timur dan Barat Sumatera	Aceh, Sumatera Utara , Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung	Rp 308,5 triliun APBN: Rp105,5 triliun KBPU: Rp203,0 triliun	APBN, KPBU

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Lokasi	Indikasi	Pendanaan Pelaksana
5	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	1. Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitas 2. Mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sampai dengan 1 million t CO2-eq 3. Meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan	Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan , Semarang, dan Makassar	Rp118,8 triliun	APBN APBD KPBU
6	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	1. Penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 M per tahun dan penghematan pengeluaran energi masyarakat sebesar Rp 386 M per tahun (setara 1 juta SR); 2. Mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahunnya, serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 T per tahun. 3. Lokasi prioritas: DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan, Palembang	DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan , Palembang	Rp38,4 Triliun APBN: Rp 4,1 triliun BUMN: Rp 6,9 triliun KPBU: Rp 27,4 triliun	APBN, BUMN, KPBU

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun prioritas pembangunan wilayah tersebut di Sumatera Utara terletak pada lokasi sebagai berikut :

Tabel 4.13
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Sumatera Utara dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan		Koridor Pemerataan	
1	Kabupaten Langkat	1	Kota Pematang Siantar
2	Kota Binjai	2	Kabupaten Samosir
3	Kota Medan	3	Kabupaten Toba Samosir
4	Kabupate Deli Serdang	4	Kabupaten Dairi
5	Kabupaten Karo	5	Kabupaten Pakpak Bharat
6	Kabupaten Serdang Bedagai	6	Kabupaten Humbang Hasundutan
7	Kabupaten Batubara	7	Kabupaten Tapanuli Utara
8	Kabupaten Simalungun	8	Kabupaten Tapanuli Tengah
9	Kota Tanjungbalai	9	Kota Sibolga
10	Kabupaten Asahan	10	Kota Gunung Sitoli
11	Kabupaten Labuhanbatu Utara	11	Kabupaten Nias
12	Kabupaten Labuhanbatu	12	Kabupaten Nias Selatan
13	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	13	Kabupaten Nias Barat
		14	Kabupaten Nias Utara

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

- **Pandemi COVID-19**

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:

 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia secara garis besar telah merilis berbagai kebijakan dalam penanganan dampak Covid-19 yaitu Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan; Perlindungan terhadap dunia usaha antara lain dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) serta; serta Program pemulihan ekonomi nasional.

Penyediaan SDM siap kerja melalui pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) juga merupakan salah satu isu yang sedang berkembang pada saat ini, dimana pada saat pandemic covid-19 banyak tenaga kerja yang dirumahkan sehingga diperlukan kompetensi atau keahlian yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Selain itu Isu pada bidang Kepariwisata memiliki multilyer efek yang cukup besar, pengembangan kepariwisataan di Indonesia diharapkan dapat mempertimbangkan beberapa tren perkembangan saat ini, seperti :

1. Perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari quantity tourism menjadi quality tourism. Quality Tourism menjadi paradigma strategis arah pembangunan kepariwisataan, menggantikan paradigma sebelumnya yang berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan (number oriented);
2. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Sustainable-Responsible Tourism);
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan potensi lokal dan nilai manfaat yang maksimal Bagi kesejahteraan ekonomi

- masyarakat setempat/sekitar destinasi pariwisata (Community Based Tourism);
4. Pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis pariwisata;
 5. Destinasi Pariwisata Indonesia merupakan destinasi yang rentan dengan ancaman bencana.

4.2.4. Isu Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara

- Penelaahan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, dengan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara Yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan Dan Berkeadilan”**, untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan berbagai upaya yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen yang dapat dicapai melalui **Misi** pembangunan jangka panjang Sumatera utara 2005-2025 sebagai berikut :

1. Memperkuat akhlak dan moal penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah swasta serta kerjasama pemerintah daerah lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat International.
5. Memantapkan sandi-sandi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sector

unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun kawasan Agropolitan maupun kawasan Agromaripolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumber daya alam lokal secara berwawasan lingkungan.

6. Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas yaitu cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktifitas dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahandalam arti luas.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 Sumatera Utara adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan di bawah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang demokratis, bersih dan jujur, arah pembangunan Sumatera Utara dalam periode 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum.
4. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
5. Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
6. Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk dipedesaan.

- **Penelaahan RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037**

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara, meliputi antara lain:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Sistem Jaringan Energi, Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air, serta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan, dan
- f. Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Arahana Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Arahana Perizinan, Arahana Insentif dan Disinsentif, serta arahan sanksi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah *"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan"*.

- **Penelaahan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023**

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Permendagri ini merupakan instrumen yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian

17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

KLHS Perubahan RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen Perubahan RPJMD.

- Penelaahan SDGs dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Berdasarkan Hasil analisa pencapaian target TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi,
2. Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban,
3. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
4. Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan dan Tenaga Kerja,
5. Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan
6. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan serta
7. Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan.

Perumusan isu strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi, didasarkan pada data bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sumatera Utara masih belum mencapai target yang diharapkan, baik ditinjau dari aspek tenaga kerja, kepariwisataan, maupun industri manufaktur. Demikian juga rasio penerimaan pajak terhadap PDB, total pendapatan pemerintah

terhadap PDB, proporsi anggaran riset terhadap PDB. Hal lainnya adalah rendahnya akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jasa keuangan, rendahnya penerapan kota hijau, masih terdapatnya rumah tangga kumuh perkotaan, kawasan perkotaan metropolitan yang belum memenuhi standar pelayanan perkotaan, jumlah kota pengendali urbanisasi, jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Perkotaan, rendahnya persentase penggunaan transportasi umum di perkotaan, dan juga rendahnya penegakan hukum bagi penggunaan air tanah serta kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik, demikian juga dengan indeks perilaku anti korupsi. Timbulnya masalah-masalah ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tata kelola pemerintahan. Pemerintah kurang hadir baik dari aspek kebijakan maupun kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Selain hal itu berbagai indikator yang terdapat pada isu ini, dapat dipenuhi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Isu strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban, didasarkan pada fakta indikator-indikator TPB yang berkaitan dengan hal tersebut belum mencapai target nasional. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak belum terpenuhi, demikian juga dengan kapasitas air baku, layanan sanitasi, pengelolaan air limbah baik terpusat, kawasan maupun komunal, pengelolaan lumpur tinja maupun jaringan gas rumah tangga, serta konsumsi listrik perkapita yang masih rendah. Infrastruktur lain yang belum terpenuhi adalah panjang jalan tol, jumlah pelabuhan strategis, serta jumlah sistem angkutan rel.

Jika ditinjau dari aspek ketersediaan air, Sumatera Utara secara umum masih surplus, namun daerah-daerah perkotaan umumnya sudah defisit. Oleh sebab itu peranan infrastruktur untuk mendistribusikan air menjadi sangat penting. Ketersediaan jaringan air yang cukup dan andal akan berperan dalam pembangunan dan pelayanan sanitasi.

Dalam aspek telekomunikasi proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband juga belum mencapai target, baik karena tingkat penetrasi yang rendah maupun proporsi populasi yang memiliki telepon genggam yang masih rendah.

Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan diangkat menjadi salah satu isu prioritas berhubung target-target untuk indikator yang berhubungan dengan hal ini masih banyak yang belum tercapai, diantaranya masih terjadinya kekerasan terhadap anak baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan belum terlayannya korban kekerasan ini secara komprehensif. Total Fertility Rate yang masih tinggi, baik karena angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun masih tinggi, median usia kawin pertama yang rendah, atau perempuan yang belum bisa membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi.

Pada bidang pemberdayaan, jumlah perempuan yang berada pada posisi manajerial masih rendah, demikian juga yang terlibat dalam parlemen.

Pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan tenaga kerja masih menjadi isu pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara meskipun ketersediaan pangan melebihi kebutuhan, namun ketersediaannya tidak merata pada seluruh wilayah. Angka kemiskinan di Sumatera Utara yang belum mencapai target nasional menjadi salah satu faktor pendukung isu ini. Hak-hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan belum terpenuhi, demikian juga jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat masih tinggi.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara juga masih belum mencapai target nasional, asupan kalori minimum belum tercapai, ketidakcukupan konsumsi pangan masih terjadi, sehingga kasus stunting masih terjadi pada beberapa wilayah.

Persentase tenaga kerja formal juga masih rendah, tingkat setengah pengangguran masih tinggi bahkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan masih rendah.

Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan isu pembangunan berkelanjutan berikutnya di Sumatera Utara. Isu ini diangkat karena masih banyak indikator kesehatan dan pola hidup sehat yang belum tercapai di Sumatera Utara, diantaranya persentase merokok pada penduduk umur

≤18 tahun masih tinggi, prevalensi darah tinggi, obesitas, dan penyalahgunaan narkoba. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan juga masih perlu ditata, persentase perempuan yang proses melahirkannya pada fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih juga belum mencapai target, unmet need pelayanan kesehatan serta unmet need kebutuhan Keluarga Berencana juga masih terjadi termasuk prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur.

Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan menjadi salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara karena target indikator-indikator lingkungan dan kebencanaan banyak yang belum tercapai seperti luas lahan kritis, kualitas air sungai sebagai air baku, kualitas air danau, emisi gas rumah kaca, timbunan sampah yang didaur ulang, dan sampah perkotaan yang tertangani. Peningkatan hasil hutan bukan kayu guna pemulihan DAS juga belum tercapai, luas tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan, dll.

Dari aspek tata kelola, jumlah jaringan sumberdaya air yang dibentuk juga belum memadai, demikian juga dengan jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat, , jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca belum memenuhi target, dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati serta ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Aspek kebencanaan yang belum mencapai target al. dokumen strategi pengurangan risiko bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, serta jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.

Angka partisipasi murni, persentase SMA/MA berakreditasi minimal B, proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta proporsi sekolah dengan akses listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin

dam fasilitas cuci tangan yang belum terpenuhi menjadi dasar perumusan isu strategis Peningkatan Kualitas Air dan Layanan Pendidikan.

Sedangkan untuk indikator TBP yang selama ini sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Secara rinci dijabarkan sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Dalam tujuan 1 TPB yaitu tanpa kemiskinan, terdapat 7 (satu) indikator yang telah tercapai yaitu proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, persentase perempuan yang melahirkan difasilitas kesehatan, imunisasi dasar, kepemilikan akta kelahiran serta korban meninggal akibat bencana dan jumlah lokasi penguatan resiko bencana.

2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Pada tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target, yaitu indikator tentang kekurangan gizi, malnutrisi, anemia, ASI eksklusif serta nilai tambah pertanian. Terdapat 3 (tiga) indikator SDGs yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara, namun indikator tersebut masih dalam perhitungan, sehingga ketersediaan data masih tidak ada. Sedangkan 1 (satu) indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan, capaiannya masih dibawah target.

3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Untuk tujuan 3, terdapat 36 indikator dan hanya 18 indikator (50%) yang sudah mencapai target nasional. Indikator-indikator yang sudah mencapai target meliputi angka kematian ibu, balita, neonatal, prevalensi HIV, TBC, malaria, deteksi dini infeksi Hepatitis B, eliminasi kusta, eliminasi filariasis, kematian akibat bunuh diri, penyelenggaraan kesehatan jiwa di Puskesmas, penggunaan kontrasepsi, cakupan asuransi kesehatan serta ketersediaan obat dan vaksin. terdapat 15 indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Pada tujuan 4 yaitu Pendidikan Berkualitas, terdapat 4 (empat) indikator capaian yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator-indikator tersebut, sebanyak 7 (tujuh) indikator telah mencapai target yaitu APK/APM SMA sederajat, rata-rata lama sekolah,

persentase angka melek huruf dan aksara serta persentase guru yang bersertifikan pendidik.

5. Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Untuk tujuan 5, terdapat 15 (lima belas) indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tersebut, namun hanya 5 indikator yang sudah mencapai target, yaitu kebijakan yang mendukung responsif gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan serta APK SMA sederajat. Sedangkan sebanyak 10 (sepuluh) indikator lainnya tidak mencapai target.

5. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, terdapat 5 (lima) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target, yaitu (1) Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipedaan; dan (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Masyarakat; (2) Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun); dan (3) Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan.

6. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau, terdapat 2 (dua) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut, kesemua indikator atau sebanyak 2 (dua) indikator telah mencapai target yaitu (1) Rasio Elektrifikasi dan (2) Daya listrik terpasang.

7. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 4 (empat) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut hanya terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator yang belum

dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) PDRB Per Kapita; (2) Tingkat partisipasi angkatan kerja; dan (3) Jumlah wisatawan mancanegara.

8. Tujuan 9: Industri Inovasi dan Infrastruktur

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-9 yaitu Industri Inovasi dan Infrastruktur, hanya terdapat 1 (satu) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, mengingat telah adanya dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca.

9. Tujuan 10: Berkurang Kesenjangan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 yaitu Berkurang Kesenjangan, terdapat 2 (dua) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari kedua indikator tersebut terdapat kesemuanya belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang belum mencapai target untuk tujuan ke-10 SDGs adalah (1) Indeks Gini dan (2) Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

10. Tujuan 13: Perubahan Iklim

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-13 yaitu Perubahan Iklimnya terdapat 1 (satu) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, mengingat telah adanya dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca.

11. Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-15 yaitu Ekosistem Daratan, terdapat 2 (dua) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut kedua indikator yang telah mencapai target, yaitu (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis; dan (2) Kerusakan Kawasan Hutan.

12. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, terdapat 4 (empat) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut, hanya sebanyak 2 (dua) indikator telah mencapai target yaitu (1) Opini BPK; dan (2) Nilai Akuntabilitas Pemerintah. Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) Indeks Pemberdayaan Gender; dan (2) Indeks Pembangunan Gender.

13. Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17 yaitu Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, terdapat 7 (tujuh) indikator yang selaras dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target, yaitu (1) Total Fertility Rate (TFR) dan (2) Jumlah Kematian Ibu. Sementara itu, terdapat indikator yang belum mencapai target. Adapun indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) PDRB Per Kapita; (2) Ekspor bersih perdagangan; (3) Jumlah Kematian Bayi; (4) Jumlah Kematian Balita dan (5) Jumlah Kematian Neonatal.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang tidak tercapai yaitu sebanyak 45 target indikator dari 66 target (68,20%). Sedangkan 21 capaian indikator (37,8%) telah melampaui target yang telah ditetapkan. Masih banyak target indikator yang belum tercapai, untuk itu perlu dilakukan beberapa sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif dalam mengejar ketertinggalan terkait perlindungan sosial, jaminan kesehatan, layanan dasar, pendidikan dan penanggulangan bencana. Program-program yang saat ini berjalan saat ini terkait pengentasan kemiskinan,

peningkatan mutu pendidikan perlu mendapatkan perhatian lebih terutama karena belum merangkul multi pihak didalam pelaksanaan program-program tersebut. Mengingat keterbatasan anggaran untuk mencapai semua target tersebut, maka kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya sangatlah diperlukan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan efisien.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pelaksanaan SDGs yang terukur, terakses, dan melibatkan berbagai pihak sehingga target dan indikator SDGs di Provinsi Sumatera Utara dapat segera tercapai. Perbaikan target indikator SDGs secara realistis akan lebih dapat memastikan ketercapaiannya pada akhir periode RPJMD tahun 2023.
3. Perlu adanya sosialisasi mengenai SDGs termasuk menerjemahkan indikator-indikator SDGs sehingga mudah dipahami oleh seluruh komponen masyarakat. Sosialisasi mengenai SDGs ini sebaiknya dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pihak Swasta, DPRD, Perusahaan, Filantropi dan Akademisi.
4. Mendorong daerah untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs secara tepat dan akurat serta Menyusun program dan kegiatan yang menysasar kepada pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

4.2.5. Penelahaan RPJMD Daerah Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.14
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Provinsi Aceh	2017-2022	Visi: Terwujudnya aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih adil dan melayani.	Qaunun Aceh No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017-2022
			Misi: 1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani. 2. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi,'yah dengan tetap menghormati mazhab yang lain. 3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki. 4. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing tingkat nasional dan regional. 5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi 6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. 7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan. 8. Membangun dan Mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif. 9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang Efektif, Efisien dan berkelanjutan. 10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.	
2	Provinsi Riau	2019-2024	Visi: Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)	Perda Provinsi Riau No.3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
			Misi: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender. Selain itu, untuk mewujudkan sumber daya yang	

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			beriman melalui peningkatan kerukunan umat beragama. 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	
3	Provinsi Sumbar	2016-2021	Visi: Terwujudnya Sumatra Barat Yang Madani dan Sejahtera.	Perda Provinsi Sumbar No.1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021
			3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, dan berkualitas tinggi Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender. 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah; Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan+D3 sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. 5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.	

4.3. Penetapan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Utara; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 8 (delapan) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Pendidikan

Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, keterbatasan kemampuan biaya pendidikan dan informasi bantuan pendidikan, belum selarasnya penerapan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta rendahnya minat baca yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara termasuk di dalamnya perlunya peningkatan kualitas kesetaraan gender.

2. Kesehatan

Peningkatan Usia Harapan Hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit, ketersediaan obat, penanganan dampak narkoba, jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting serta percepatan penanganan Covid-19 juga menjadi hal yang penting, selain itu diperlukan upaya membangun paradigma hidup sehat melalui Gerakan masyarakat Sehat (Germas).

3. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara pada Februari Tahun 2021 pada masa pandemi tercatat sebesar 6,01% dengan jumlah penganggur sebanyak 449.000 jiwa, Kondisi ini membaik jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang melonjak sebesar 6,91%. Angka ini juga masih lebih baik daripada capaian nasional yang mencatat persentase pengangguran sebesar 6,26%. Namun tetap diperlukan penanganan yang lebih serius khususnya pada penduduk usia kerja yang mengalami peningkatan sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

4. Agraris

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan produksi ternak sapi dan domba, mempertahankan swasembada komoditas pangan beras dan jagung, peningkatan produksi cabe merah, bawang merah dan bawang putih serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris yang lebih baik

5. Pariwisata

Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthty, Safety, and Environmental Sustainability) atau 4 K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata, desa wisata tematik, penataan cagar budaya, pelestarian budaya daerah serta dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, dan digitalisasi promosi pariwisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

6. Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah daerah serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

7. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Peningkatan kondisi sosial dan kemasyarakatan diwujudkan melalui peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendorong iklim demokrasi serta kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan serta bebas diskriminasi. Peningkatan kondisi panti sosial dan pemenuhan SPM sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban perlu terus didorong. Provinsi Sumatera Utara juga akan menjadi tuan rumah PON XXI Tahun 2024 untuk itu prestasi atlet, penguatan sektor olahraga dan sarana prasarana terus ditingkatkan

8. Infrastruktur

Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 (dua) tahun anggaran, pembangunan Sumatera Utara difokuskan pada penanganan covid-19. Pada tahun – tahun berikutnya diperlukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya penanganan penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energy listrik dala rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang dilaksanakan juga harus berwawasan lingkungan, antara lain melalui:

➤ **Pembangunan Rendah Karbon**

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penerapan pembangunan rendah karbon (PRK) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target

pembangunan. Pada lingkup nasional, dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon terus bergulir, akan tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara belum optimal kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (*awareness*) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor non-pemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

➤ **Rencana Pertumbuhan Hijau**

Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RJMD 2019 -2023 perlu diperkuat khususnya terkait dengan misi kelima yaitu “*Mewujudkan Sumatra Utara yang bermartabat dalam lingkungan*” dengan menekankan prinsip pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Visi dan misi yang menjadi komitmen terhadap rencana dan arah pembangunan harus menjamin terwujudnya keseimbangan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dan keberlanjutan daya dukung ekosistem.

➤ **Indikator Pertumbuhan Hijau**

Laju pertumbuhan ekonomi yang positif tidak dipungkiri sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah beserta indikator makro lainnya seperti ketimpangan wilayah, kemiskinan, ketimpangan pendapatan (koefisien gini) dan indeks pembangunan manusia. Namun demikian capaian pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan ekstraksi

dan investasi yang merusak akan menimbulkan “biaya sosial” dan “lingkungan” sebagai akibat dari ekstraksi sumber daya alam dan eskalasi konsumsi pada barang dan jasa. Capaian pertumbuhan ekonomi melalui perhitungan PDB dengan mengabaikan biaya sosial dan lingkungan tersebut sering disebut sebagai “**PDB coklat**”. Sebagaimana disampaikan oleh David Piling dalam “Growth Illusion”, negara atau daerah yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata berada dalam ilusi pertumbuhan karena menafikan terjadinya deplesi dan degradasi pada sumber daya alam dan lingkungan.

Deplesi dan degradasi ini pada akhirnya akan menimbulkan biaya cukup mahal yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Kerusakan lingkungan dari pembangunan yang mengandalkan ekstraktif semata akan berkontribusi terhadap bencana lingkungan yang selama 10 tahun terakhir telah mengakibatkan kerugian hampir Rp 30 triliun rupiah. Biaya ini merupakan biaya korban yang sejatinya bisa alokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, fisik dan lingkungan.

Untuk menghindari proses perencanaan pembangunan yang *Business As Usual*, Revisi dan telaah atas RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara perlu memasukkan Nilai PDB Hijau. Nilai PDB Hijau didapat setelah nilai PDB dikurangi deplesi dan degradasi lingkungan (biaya eksternalitas). Kebutuhan untuk menampilkan Nilai PDB Hijau ini merupakan bagian dari proses konsultasi parapihak dalam penyusunan Green Growth Plan Sumatera Utara, sekaligus berkaitan melakukan perbaikan pada perencanaan pembangunan lebih baik, agar hasil-hasil capaian pembangunan dapat dimonitor kinerja pertumbuhan ekonomi dan kesehatan ekologi dan daya dukung sumberdaya alam agar tetap menjadi modal dasar pembangunan dan pertumbuhan hijau di Sumatera Utara.

Menyadari pentingnya mempertimbangkan biaya eksternalitas dari pembangunan yang bersifat ekstraktif tersebut, kini di berbagai belahan dunia dan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah diarusutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan basis perencanaan pertumbuhan hijau.

Pertumbuhan hijau sendiri akan menjadi pendekatan pembangunan inklusif, dimana konsultasi multipihak dimasa depan akan merekognisi tentang pentingnya Nilai PDB Hijau ini sebagai acuan penilaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

➤ **Pengarusutamaan Rencana Pertumbuhan Hijau**

Pengarus utamaan perencanaan pertumbuhan hijau dalam perencanaan pembangunan ini akan lebih berdampak jika kemudian dimasukkan dalam dokumen RPJMD sehingga akan mengikat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karenanya indikator-indikator pembangunan yang menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan hijau perlu menjadi pertimbangan yang serius dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan pertumbuhan hijau, maka disarankan pada proses telaah (*review*) dan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2019-2023 dimasukkan beberapa indikator pembangunan yang mendukung tercapainya pertumbuhan hijau.

Salah satu yang perlu dikembangkan di daerah adalah **Indeks Komposit Pembangunan Hijau Daerah** (IPHD). Indeks komposit ini menggambarkan sejauh mana arah capaian pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan. IPHD dari skala 0-100 menggambarkan skala indeks capaian pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi berbagai indikator seperti:

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi (PDB coklat);
- 2) Laju deplesi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan yang dapat diukur melalui IKLH (indeks kualitas lingkungan hidup);
- 3) Indeks pembangunan manusia (IPM);
- 4) Indikator-indikator yang berkaitan dengan kerentanan sosial dan lingkungan seperti kepadatan penduduk, keragaman mata pencaharian (livelihood); dan
- 5) Indeks kerentanan ekonomi dan lingkungan atau indeks resiliensi ekonomi dan lingkungan.

Beberapa indikator tersebut di atas mungkin sebagian belum tersedia dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh karenanya perlu dibangun sebagai **indeks yang baru** yang akan mengukur seberapa kuat atau seberapa rapuh capaian pembangunan yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun mendatang.

➤ **Isu Strategis Pengembangan Wilayah**

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership (PPP)*. Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut :

1. Rencana Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei

Menyikapi perkembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Sei Mangkei dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 83.304 jiwa sampai tahun 2025, maka perlu adanya konsep pembangunan rumah susun. Pengembangan rumah susun diarahkan berada di luar Kawasan Ekonomi Terpadu Sei Mangkei. Oleh karena itu perlu adanya alokasi ruang untuk mengakomodasi kebutuhan rumah tersebut.

Perhitungan kebutuhan ruang rumah susun diasumsikan hanya 60% tenaga kerja yang tinggal di rumah susun dan 40% tinggal di perumahan. 40% berasal dari tenaga kerja lokal dan diasumsikan hanya 10% tenaga kerja lokal yang tinggal di rumah susun. Di samping penyediaan rumah bagi pekerja, Rusunawa ini juga menjadi alternatif bagi relokasi masyarakat korban bencana, masyarakat terdampak program pembangunan pemerintah, maupun masyarakat yang berada di wilayah negatif list, hal ini ini untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana.

2. Rencana Pembangunan LRT Mebidang

Pembangunan Jalur LRT dan Monorel Mebidang akan direncanakan dibagi ke dalam 4 fase dengan jarak yang berbeda-beda, dengan total jarak 51,16 KM, jarak monorel terdapat di SP. Kayu Besar-Batang Kuis-Sultan Serdang, jalur LRT dan Monorel Mebidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.15
Jalur LRT Dan Monorel Mebidang

FASE	JALUR	JARAK
I	Stasiun Pusat - Cirebon - Sisingamangaraja - Tj morawa- Sp kayu besar. (LRT)	21,7 Km
II	Sp kayu besar - Batang kuis - Sultan serdang (MONOREL)	9,4 Km
III	Binjai - Megawati - Mencirim - Diski - Gatot subroto - Kapten maulana lubis -Raden saleh - Stasiun Pusat.	20,45 Km
IV	Marelan - Veteran - P Braya - Yos sudarso -Glugur - Stasiun Pusat	11,61 Km
	TOTAL	53,16 Km

Sumber : Bappedasu (data diolah)

3. Proyek Pembangunan Sport Centre Sumatera Utara

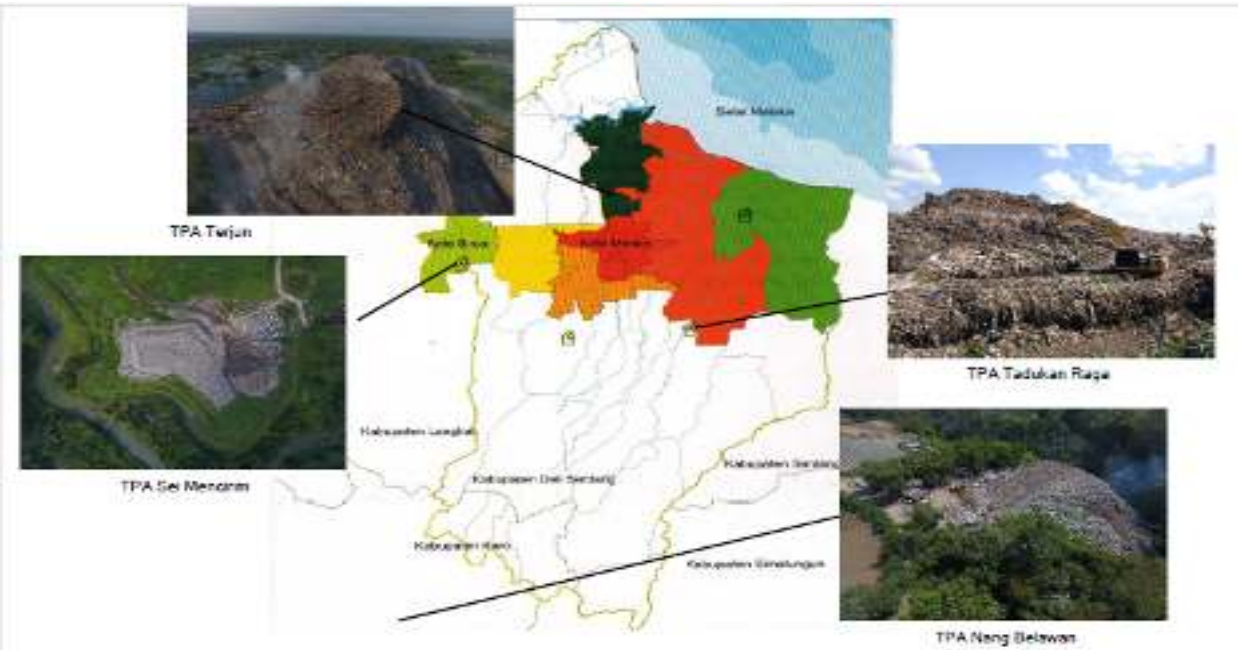
Konsep Pembangunan yang direncanakan adalah didaerah Sport Center ada pusat Kesehatan, pusat komersil dan expho Center dan tempat hiburan, knsep pembangunan sebagai berikut :



Gambar 4.1
Konsep Pembangunan Sport Center

4. Perencanaan Proyek *Waste to Energy*

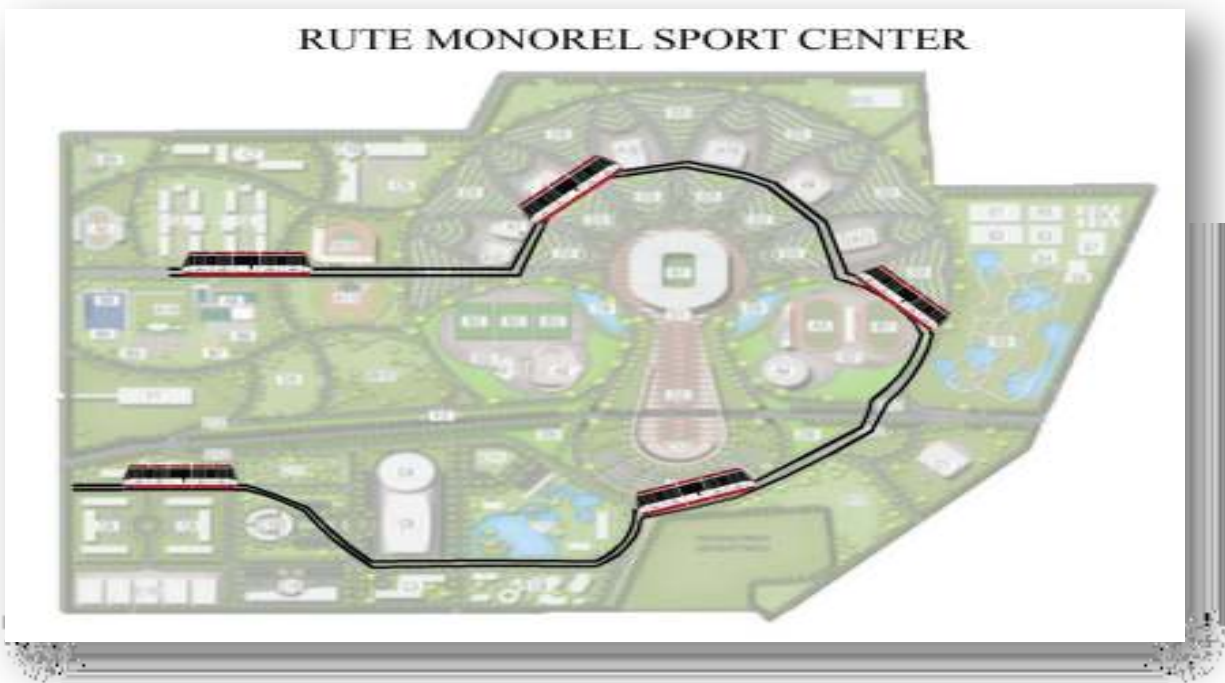
Proyek ini direncanakan akan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) daerah Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro). Dimana kondisi saat ini sampah yang dihasilkan perhari adalah 3827,61 Ton/Hari dimana sampah yang paling banyak ada di Kota Medan 2500 Ton/hari, kemudian Deli Serdang 638 Ton/Hari, Kota Binjai 132,61 Ton/hari dan Karo 557 Ton/hari, rencana Lokasi TPA ini di Desa Limau Mungkur STM Hilir, Deli Serdang, konsep pembangunan adalah sebaai berikut :



Gambar 4.2
Konsep Pembangunan TPA MEBIDANGRO

5. Perencanaan Pembangunan Monorel di Sport Center Sumatera Utara

Rencana kedepan akan di bangun Monorel di area Sport Centre Sumatera Utara, rencana pembangunannya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3
Rencana Pembangunan Monorel

BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 –2025 yaitu tahap pemantapan *“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*. Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

5.2. MISI

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :

- *Misi Pertama*

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.

- *Misi Kedua*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- *Misi Ketiga*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- *Misi Keempat*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- *Misi Kelima*

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah,

penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemic COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Sumatera Utara dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori

serta data masa lalu capaian pembangunan Sumatera Utara berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik. Tujuan dan Sasaran Perubahan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara
VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2019		2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD			Target Setelah Perubahan RPJMD			KONDISI AKHIR		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender		Indeks Pendidikan	Poin	-	68.03	-	68.55	-	-	-	68,65-69,15	68,75-69,25	68,85-69,35	68,85-69,35	
			1.1	Meningkatkan kualitas Pendidikan bagi Masyarakat		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.79	9.45	9.97	9.54	10.15	10.33	10.5	9.68	9.82	9.96	9.96
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.37	13.15	13.81	13.23	14.01	14.21	14.42	13.31	13.38	13.46	13.46		
				1.2	Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.87	90.71	90.93	90.93	91.00	91.08	91.17	90,73	90,77	90,81
		2*	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	Poin	-	75.31	-	75.54	-	-	-	75,65-76,15	75,70-76,20	75,75-76,25	75,75-76,25	
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	68.74	68.95	68.87	69.10	69.00	69.13	70.00	69,23	69,35	69,50	69,50
			3*	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		PDRB Perkapita (ADHB)												

MISI		TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2019		2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD			Target Setelah Perubahan RPJMD			KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	73.01	70.19	74.2	72	75.39	76.58	77.77	73.04	74.08	75.12	75.12
		3.2	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	Poin	100.101	98.08	100.102	109.83	100.10	100.10	100.21	109.92	110.35	111.41	111.41
		3.3	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	8.15	7.46	8.56	6.66	8.99	9.44	9.92	7.02	7.10	7.18	7.18
		4*	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	Indeks Infrastruktur	Poin	-	-	-	0,69	-	-	-	0,70	0,74	0,79	0,79
		4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemandapan Jalan Provinsi	Persen	82.99	82.19	84.52	75,02	86.29	88.59	90	76,37	78,55	85,08	85,08
				Rasio Elektrifikasi	Persen	99.9	98.8	100	99.99	100	100	100	100	100	100	100
				Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	-	-	-	-	-	-	58.69	63.48	68.98	68.98
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	-	-	-	-	-	-	-	57.17	59.47	62.92	62.92

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2019		2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD			Target Setelah Perubahan RPJMD			KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih		Indeks Demokrasi	Poin	69.02	67.65	69.04	65,13	69.06	69.08	70.00	65,25	65,50	65,75	65,75
				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	B	(60.05)B	B	(61.05)B	A	A	A	(64.00)B	(70,00)BB	(75.00)BB	(75.00)BB
		2.1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Skor Kebebasan Sipil	Skor	-	72.54	-	-	-	-	-	72.99	73.44	73.89	73.89
		2.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	BB	(65.00)B	(70.00)BB	(72.00)BB	(72.00)BB
				Indeks Pelayanan Publik	Nilai (Kategori)	2,99 (C)	3,00 (C)	3,51 (B)	3,68 (B)	-	-	-	3,80 (B)	4,01 (A-)	4,20 (A-)	4,20 (A-)
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	65	97	68	90,25	71	76	80	91	92	93	93
		4.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	45	59	60	31.25	65	70	75	65	70	75	75
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68.00	68.20	68.70	69.37	70.70	71.70	72.70	69,02	69,20	69,38	69,38
		5.1	Meningkatkan Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	78.00	78.80	79.00	69.37	80.00	81.00	82.00	53,71	53,81	53,91	53,91

MISI		TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2019		2020		Target Sebelum Perubahan RPJMD			Target Setelah Perubahan RPJMD			KONDISI AKHIR
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	5.2	Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	72,51	73,13	73,74	73,74
	5.3	Meningkatkan Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	86,00	86,60	87,00	89,30	88,00	89,00	90,00	87,09	87,19	87,29	87,29	87,29
	5.4	Meningkatkan Indeks Kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Poin	47,00	46,45	47,26	46,45	50,75	51,75	52,75	47,42	47,72	48,03	48,03	48,03

Keterangan :
1*) Mendukung Misi 3
2*) Mendukung Misi 1
3*) Mendukung Misi 1
4*) Mendukung Misi 1

5.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 meliputi :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 dirumuskan Kembali Prioritas pembangunan yang menjadi agenda pembangunan pemerintah dengan sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sesuai dengan hasil evaluasi Review mitem RPJMD.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Perbandingan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.2
Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Sebelum
dan Sesudah Perubahan RPJMD 2019-2023

Prioritas Provinsi Sumatera Utara Sebelum Perubahan	Prioritas Provinsi Sumatera Utara Setelah Perubahan
1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja; 2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan; 3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; 4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; 5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.	1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan; 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan; 4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris; 5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata; 6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi; 7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga; 8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Strategi yang dilakukan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 setelah Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan yang dilakukan dengan strategi : Peningkatan pemerataan akses belajar, peningkatan sarana dan prasarana sekolah menengah, kejuruan dan khusus serta peningkatan kualitas mutu pendidikan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan strategi : Meningkatkan penanganan pandemik Covid-19, memperkuat kualitas kesehatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, dilaksanakan melalui strategi Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha.
4. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris dilakukan dengan strategi yaitu :
 - a. Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan dan Energi Pedesaan
 - b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian
 - c. Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian

5. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata dilakukan dengan strategi Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata melalui Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan.
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi melalui strategi meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), penguatan sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pelayanan publik yang prima.
7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga, dilakukan dengan strategi : meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dan upaya menghasilkan prestasi daerah melalui penguatan sektor olahraga.
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan
 - b. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu dengan Keciptakarya dan selaras dengan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara selain untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah, juga diarahkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional atau sering disebut dengan Prioritas Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan terlihat bahwa seluruh prioritas pembangunan Sumatera Utara yang termuat ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan Prioritas Nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Persandingan Prioritas Nasional (PN) dengan
Prioritas Provinsi (PP) Sumatera Utara

Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
		PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP1	Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan
		PP2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
		PP3	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
		PP7	Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olah raga
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP4	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
		PP5	Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata
		PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara Lain RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2037.

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dengan kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi Pembangunan RPJMD 2019-2023 melalui pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi untuk pencapaian visi dan misi provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini menggunakan hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan, kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) atau analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di

lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Lingkungan itu sendiri mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Berdasarkan analisis SWOT tersebut yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity (WO)* yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Dalam rangka mencapai keberhasilan prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan perubahan strategi dan arah kebijakan pembangunan melalui :

1. Kebijakan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Penerapan pola money follow program priority;
3. Inovasi pengendalian perencanaan pembangunan daerah dengan gagasan 3 SP (Sukses Perencanaan, Sukses Pelaksanaan dan Sukses Pencapaian).

Adapun Strategi pembangunan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT				
Misi 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM KEHIDUPAN KARENA MEMILIKI IMAN DAN TAQWA, TERSEDIAANYA SANDANG PANGAN YANG CUKUP, RUMAH YANG LAYAK, KESEHATAN YANG PRIMA, MATA PENCAHARIAN YANG MENYENANGKAN, SERTA HARGA-HARGA YANG TERJANGKAU;				
MISI 3 : WUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PENDIDIKAN KARENA MASYARAKATNYA YANG TERPELAJAR, BERKARAKTER, CERDAS, KOLABORATIF, BERDAYA SAING DAN MANDIRI				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	1.1.1. Peningkatan Layanan dan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata, dukungan biaya serta informasi bantuan pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan minat baca	1. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus di Sumatera Utara 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi siswa/i kurang mampu; 3. Pembangunan kampung beasiswa/scholarships booth (wadah informasi beasiswa)/wadah informasi center untuk informasi beasiswa S1, S2, S3; 4. Optimalisasi link and match sekolah menengah kejuruan/ vokasi dengan dunia usaha dunia industry; 5. Pembangunan Pojok Baca dan Gerobak Baca serta pengembangan perpustakaan berbasis digital (e-

				library) yang menjangkau 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; 6. Pemberian motivasi pada siswa/I menengah atas dan kejuruan se-Sumatera Utara; 7. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan, spiritual, emosional dan intelektual; 8. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
		1.2 Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1.2.1 Memperkuat Peran perempuan dan kesetaraan Gender	1. Meningkatkan Perlindungan Perempuan 2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

2	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2.1.1 Meningkatkan percepatan penanganan pandemic covid-19, memperkuat kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan serta pembangunan paradigma hidup sehat.	1. Percepatan penanganan kesehatan pandemic covid-19; 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara; 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Lansia; 4. Penurunan Prevalensi Stunting di Sumatera Utara; 5. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dalam rangka rehabilitasi narkoba; 6. Peningkatan pemberdayaan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS); 7. Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu; 8. Peningkatan layanan kesehatan bergerak.
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	3.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	3.1.1 Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha serta pengembangan informasi ketenagakerjaan dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.	1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (link and match) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja; 2. Fasilitasi standarisasi UMKM dan UKM menuju digitalisasi pemasaran; 3. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi; 4. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.
		3.2 Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	3.2.1 Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan 3.2.2 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian	1. Meningkatkan Produksi daging sapi dan domba; 2. Mempertahankan swasembada beras dan jagung; 3. Meningkatnya capaian produksi padi, jagung, cabai merah, bawang putih dan bawang merah

			3.23 Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian	4. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya 5. Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi 6. Pembangunan infrastruktur Pertanian 7. Memberikan Jaminan Penetapan Harga Komoditi Pertanian yang Layak
		3.3 Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	3.3.1 Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata melalui Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Pengembangan destinasi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya; 3. Dukungan destinasi wisata super prioritas Danau Toba; 4. Digitalisasi promosi pariwisata; 5. Pelestarian budaya daerah.
4	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	4.1 Meningkatnya Kualitas infrastruktur	4.1.1 Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur Jalan 4.1.2 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu dengan Keciptakayaan, Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penataan Ruang 4.1.3 Pengembangan Infrastruktur jaringan di daerah yang belum terjangkau aliran listrik	1. Penanganan jalan strategis Provinsi dalam kondisi baik yang meliputi Jalan Strategis Akses Kawasan Wisata dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi; 2. Fasilitasi masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan penegakan hukum dan kelembagaan; 3. Optimalisasi jalan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor agraris; 4. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Regional 5. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Air Minum

				6. Pembuatan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 7. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas
MISI 2 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM POLITIK DENGAN ADANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA, POLITIK YANG BERETIKA, MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN MEMILIKI KOHESI SOSIAL YANG KUAT SERTA HARMONIS				
2	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dan Pemerintahan yang baik dan Bersih	2.1. Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	2.1.1. Peningkatan kebebasan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan dan bebas diskriminasi	1. Meningkatkan pemahaman politik dan memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat; 2. Meningkatkan kerukunan antara umat beragama dan masyarakat; 3. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah
		2.2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	2.2.1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), penguatan sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pelayanan public yang prima	1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan dukungan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 33 Kabupaten/Kota dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 2. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

				3. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik
MISI 4 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PERGAULAN KARENA TERBEBAS DARI JUDI, NARKOBA, PROSTITUSI DAN PENYELUNDUPAN, SEHINGGA MENJADI TELADAN DI ASIA TENGGARA DAN DUNIA				
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban	4.1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4.1.1. Meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dan upaya menghasilkan prestasi daerah melalui penguatan sektor olahraga.	1. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda; 2. Pelayanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara; 3. Peningkatan jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 4. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Pencapaian SPM Bidang Sosial; 5. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan fasilitas olahraga dalam rangka PON 2024; 6. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi; 7. Pembangunan sport center
MISI 5 : MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM LINGKUNGAN KARENA EKOLOGINYA YANG TERJAGA, ALAMNYA YANG BERSIH DAN INDAH, PENDUDUKNYA YANG RAMAH, BERBUDAYA, BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERADAB				
5	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan	1.1. Meningkatnya kualitas air	1.1.1. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) sumber air (danau, sungai, waduk dan sumber air lainnya)	1. Pengaturan baku mutu kualitas air limbah, 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemnatauan kualitas air 3. Penegakkan pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3

				4. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup 5. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3R 6. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik 7. Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada pelaku usaha dan/atau kegiatan
		1.2. Meningkatnya kualitas tutupan lahan	1.2.1. Meningkatkan penanganan pencemaran dan kerusakan lahan dan mengurangi alih fungsi lahan	1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta perlindungan dan pengamanan kawasan hutan 2. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut 3. Peningkatan kualitas kawasan lindung akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali
		1.3. Menurunnya emisi gas rumah kaca	1.3.1. Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Dengan 3R, Pengelolaan Air Limbah Terpadu Di Perkotaan serta Rehabilitasi Hutan & Lahan

6.2. ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023 telah sampai di akhir tahun 2020. Visi Pembangunan “SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT” yang tertuang di dalam RPJMD 2019-2023 dilaksanakan optimal, walau menghadapi berbagai dinamika seperti Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Pada hari Senin 14 Desember 2020 Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Sembilan pokok Arahan Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2019-2023. Gubernur mengintruksikan agar Pemprovsu dapat merealisasikannya hingga tahun 2023. Sembilan pokok Arahan Strategis tersebut hakikatnya adalah tujuan mikro pembangunan daerah jangka menengah Provsu 2019-2023. Untuk itu, dibutuhkan pemetaan berbagai program pembangunan terkait untuk selanjutnya tersusun berbagai strategi percepatan.

Sembilan Arahan Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut:

1. Arahan Pengembangan Sejarah Kota Medan dan Sumatera Utara
2. Arahan Pengembangan Sarpras Olahraga Berstandar Internasional
3. Arahan Pengembangan Reindustrialisasi Indonesia di Kabupaten Batubara
4. Arahan Pengembangan Infrastruktur
5. Arahan Pengembangan Lapangan Kerja Penuh (Full employment)
6. Arahan Pengembangan Integrasi Ilmu yang Implementif
7. Arahan Pengembangan Budaya
8. Arahan Pengembangan Tata Ruang
9. Arahan Pengembangan Umat

Sembilan Arahan Starategis Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sejalan degnan Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, Pencapaian sasaran Sembilan pokok warisan Gubernur dan Wakil Gubernur hingga tahun 2023 dapat dilakukan dengan integrasi dan optimalisasi Program bidang urusan terkait di berbagai Perangkat Daerah.

Tabel. 6.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi 9 (Sembilan) Arahkan Strategis
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2021-2023

9 ARAHAN STRATEGIS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	TUJUAN POKOK ARAHAN STRATEGIS	SASARAN POKOK ARAHAN STRATEGIS	STRATEGI
1. Arahkan Pengembangan Sejarah Kota Medan dan Sumatera Utara	Mengembalikan Fungsi Lapangan Merdeka dan Penataan Berbagai Bangunan Aset Sejarah di Kota Medan	a) Revitalisasi dan Rehabilitasi bangunan aset sejarah kota medan rampung 100%; b) Penetapan Kawasan Lapangan Merdeka sebagai kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau selsai 100% sesuai rencana waktu; c) Revitalisasi dan Rehabilitasi Lapangan Merdeka sebagai kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau selesai 100% sesuai rencana waktu	Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan politik; Kesekretariatan daerah (Hukum dan Pemerintahan); Pariwisata; Kebudayaan
2. Warisan Sarpras Olahraga Berstandar Internasional	Membangun Sport Center berstandar Internasional dengan fasilitas olahraga, komersil dan pendukung lainnya	a) Pembangunan Sport Center Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang rampung 100% sesuai rencana	Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Tata Ruang
3. Warisan Reindustrialisasi Indonesia di Kabupaten Batubara	Pelabuhan Hub Internasional terintegrasi dengan Kawasan Industri terbangun di Kuala tanjung Kab. Batubara	a) Pembebasan lahan untuk kebutuhan rencana pembangunan kawasan industri Kuala tanjung rampung tepat waktu 100%; b) Cadangan energi tersedia 100% sesuai kebutuhan industri baru di kawasan industri kuala tanjung;	Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Perumahan; Pekerjaan Umum; ESDM; dan Pengelolaan Sumberdaya Air, perizinan, tata ruang, Perindustrian, Kesekretariatan (Hukum dan Pemerintahan); Kehutanan; Lingkungan Hidup; perhubungan
4. Warisan Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi, Air dan Energi Tersedia cukup dan dalam kondisi mantap	a) Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi > 96,35% pada tahun 2023; b) Layanan Irigasi Kondisi Optimal > 60,5% pada tahun 2023; c) Cakupan Layanan Air Minum > 60,15% pada tahun 2023 d) Rumah Layak Huni > 68,98% pada tahun 2023 e) Rasio elektrifikasi 100%;	Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Perumahan; Pekerjaan Umum; ESDM; dan Pengelolaan Sumberdaya Air

9 ARAHAN STRATEGIS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	TUJUAN POKOK ARAHAN STRATEGIS	SASARAN POKOK ARAHAN STRATEGIS	STRATEGI
		f) Energi Listrik mampu melayani industri baru 100%	
Warisan Lapangan Kerja Penuh (Full employment)	Iklim Investasi kondusif sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang luas	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara < 5,1% pada tahun 2023	Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Penanaman modal dan perizinan; Ketenagakerjaan; Koperasi dan UMKM; Perindustrian dan perdagangan
Warisan Integrasi Ilmu yang Implementif	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Yang Terinterasi Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri	1.008 SMK di Sumatera Utara telah terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan; Perindustrian
Warisan Budaya	Revitalisasi dan peletarian sejarah melayu, serta pemosisian kesultanan melayu Sumatera Utara dalam bingkai NKRI	a) Revitalisasi dan rehabilitasi bangunan peninggalan sejarah melayu Kesultanan Langkat, Deli, Asahan dan Serdang rampung 100%; b) Kajian objektif terkait posisi kesultanan melayu dalam bingkai NKRI rampung 100%	Integrasi dan Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Pariwisata; kebudayaan; penelitian dan pengembangan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Kesatuan Bangsa dan politik
Warisan Tata Ruang	Masalah pertanahan khususnya di lahan Eks PTPN II dan Eks Airport Polonia yang sudah berlangsung menahun, selesai secara adil dan maksimal	a) Selesainya Inventarisasi dan Verifikasi ulang daftar nominatif 3.104 Ha lahan eks HGU PTPN II yang belum memiliki catatan pembukuan, maupun 2.768 Ha lahan yang telah memiliki catatan pembukuan; b) Penyelesaian yang adil atas sengketa lahan seluas 260 Ha eks bandara udara Polonia, dimana diatas lahan tersebut terdapat 5.036 KK (27.00 Jiwa) masyarakat. Termasuk ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 Ha yang telah memiliki putusan hukum dari MA	Optimalisasi Program Terkait Bidang Urusan Sosial dan kesejahteraan
Warisan Umat	Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Utara	a) Pembangunan dan Renovasi Rumah Ibadah yang memiliki nilai sejarah	Integrasi dan Optimalisasi Program Keagamaan

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), melalui pengembangan serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata dalam rangka mendorong penciptaan struktur ekonomi yang tanggung	Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan dengan cara peningkatan produktivitas dan daya saing pembangunan menuju Sumatera Utara yang Bermartabat.	Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan. Yang dilakukan dengan pembangunan sumber daya manusia unggul, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat sistem kesehatan daerah.	Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat, yang dilaksanakan dengan cara percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.	Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

Untuk mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diperlukan program pembangunan yang mendukung. Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang sekaligus mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan sasaran untuk masing-masing misi RPJMD. Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu program pembangunan daerah tahun 2019 dan tahun 2020 serta program pembangunan daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan nomenklatur program, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan program berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
2. Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan program yang disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD.

Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel 6.7. (program berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023) dan tabel 6.8. (Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan program yang disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019) sebagai berikut:

6.3. KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA UTARA

Kegiatan strategis daerah sebagai kebijakan daerah yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, yaitu :

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu :
 - a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
 - b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
 - c. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
 - d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui :
 - 1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
 - 2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
 - 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;
 - e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);
 - f. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se-Sumatera Utara;
 - g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
 - h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu :
 - a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
 - c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
 - d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. m. ildrem;
 - e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;
 - f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;
 - g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu :
 - a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
 - b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;

- c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
 - d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu :
- a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
 - b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
 - c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
 - d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
 - e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu :
- a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui ;
 - 1) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;

- 2) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;
- 3) Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.
- b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;
- c. Digitalisasi promosi pariwisata;
- d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu :
 - a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
 - b. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;
 - c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-.
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu :
 - a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
 - c. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;
 - d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;

- e. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
 - g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
 - h. Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;
 - i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu :
- a. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;
 - b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
 - c. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;
 - d. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;
 - e. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
 - f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;
 - g. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;
 - h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap

pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.

6.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2017-2037. Fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJPD yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Utara. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Perwujudan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang KSP; dan
- f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan provinsi harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yaitu Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdayasaing dan dan berwawasan lingkungan. Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara dicapai melalui sasaran penataan ruang, meliputi :

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
2. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
4. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala provinsi. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang diterapkan sebagai pendekatan spasial meliputi :

1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung;
- b. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat.

2. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
- b. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
- d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;

- e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;
- f. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan lahan pertanian lahan basah yang ada saat ini;
- b. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah;
- c. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan.

4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan kawasan lindung;
- b. Meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
- c. Mengembalikan ekosistem kawasan lindung.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman perkotaan;
- b. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

6. Meningkatkan aksesibilitas dan pemeratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi;

- b. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

6.4.1. Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RTRW

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Sedangkan yang dimaksud dengan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah langkah - langkah pelaksanaan kebijakan dalam penataan ruang.

Tabel. 6.4
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

KEBIJAKAN	STRATEGI
Mengurangi Kesenjangan Pengembangan Wilayah Timur dan Barat	a. Mengembangkan Pusat-pusat Pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung b. Membangun dan meningkatkan Aksesibilitas Wilayah Timur dan Barat serta Dataran Tinggi
Mengembangkan Sektor Ekonomi Unggulan Melalui Peningkatan Daya Saing dan Diversifikasi Produk	a. Mendorong Kegiatan Pengolahan Komoditi Unggulan di Pusat Produksi Komoditi Unggulan; b. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendukung Produksi untuk Menjamin Kestabilan Produksi Komoditi Unggulan; c. Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi, Perhubungan, Sumber Daya Air dan Telekomunikasi Dari Pusat Produksi Komoditi Unggulan Menuju Pusat Pemasaran; d. Mengembangkan Pusat-Pusat Agropolitan, Minapolitan Serta Kawasan Wisata Potensial Untuk Meningkatkan Daya Saing; e. Meningkatkan Kapasitas Pembangkit Listrik Dengan Memanfaatkan Sumber Energi yang Tersedia dan Terbaharukan Serta Memperluas Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Guna Mendukung Produksi Komoditas Unggulan; dan f. Mengembangkan Kawasan dan Produk Unggulan yang Berpotensi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kawasan dan Wilayah di Sekitarnya Serta Mendorong Pemerataan Perkembangan Wilayah.

KEBIJAKAN	STRATEGI
Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Intensifikasi Lahan yang ada dan Ektensifikasi Kegiatan Pertanian pada Lahan Non - Produktif	a. Mempertahankan Luasan Lahan Pertanian; b. Meningkatkan Produktivitas Pertanian; c. Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan d. Mencetak Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Baru dan Penyediaan Sarana Prasarananya untuk Memenuhi Swasembada pangan.
Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem	a. Mempertahankan Luasan Kawasan Lindung b. Meningkatkan Kualitas Kawasan Lindung; dan c. Mengembalikan Ekosistem Kawasan Lindung.
Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Budidaya sebagai Antisipasi Perkembangan wilayah	a. Mengembangkan Kawasan Budidaya Yang Berwawasan Lingkungan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; b. Mengendalikan Perkembangan Fisik Permukiman dan Peruntukan Lainnya; dan c. Mendorong Sinergitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perdesaan dan Perkotaan.
Meningkatkan Aksesibilitas dan Memeratakan Pelayanan Sosial Ekonomi ke Seluruh Wilayah Provinsi	a. Mengembangkan dan Memeratakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Sosial Pada Seluruh Bagian Kawasan; dan b. Menyediakan dan Memeratakan Fasilitas Pelayanan Ekonomi Sosial.

Sumber: Bappedasu, hasil analisis, 2021

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang tersebut yang sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah, dibutuhkan inovasi pola perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Upaya yang dikembangkan adalah melakukan penguatan perencanaan kawasan yang diarahkan untuk mendukung perwujudan kawasan strategis nasional serta mewujudkan kawasan-kawasan strategis provinsi melalui percepatan pembangunan infrastuktur ekonomi dan sosial.

Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan kerjasama antar daerah untuk membuat terobosan dalam upaya tumbuhnya usaha yang saling menguntungkan untuk dikembangkan secara intensif. Hal utama yang harus mendasari terbentuknya kerjasama pembangunan antar daerah tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing pemerintahan daerah terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah

disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Beberapa kerjasama yang dikembangkan, antara lain :

1. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
2. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
3. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Saat ini, beberapa kerjasama yang telah diselenggarakan adalah kerjasama pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan kerjasama dengan provinsi lain, khususnya yang berbatasan, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Riau. Bentuk-bentuk kerjasama ini akan semakin dikembangkan pada masa periode jangka menengah untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam mengantisipasi keterbatasan pembiayaan pembangunan dan pengembangan pola alternative pembiayaan pembangunan.

6.5. DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA

6.5.1. Program Pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat

Tabel. 6.5
Program Pembangunan Yang
Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah	a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;	Alokasi APBN untuk pembangunan unit sekolah baru (Mekanisme DAK, Anggaran K/L)
	b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (bop) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan	Verifikasi data Penerima manfaat bantuan operasional Pendidikan (BOP) Intervensi siswa/i kurang mampu

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
	prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;	
	c. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;	Perluasan Akses informasi beasiswa dari Pusat, dalam negeri dan luar negeri
	d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui : 1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;	1. Mapping identifikasi kebutuhan tenaga kerja lulusan Vokasi sesuai dengan kebutuhan DUDI 2. Kegiatan pelatihan Vokasi bersertifikasi untuk SMK, Lulusan SMK, dan tenaga Pendidik SMK/Vokasi 3. Peningkatan kapasitas pemerintah Provinsi dalam Penyelarasan kurikulum SMK/Vokasi dengan dunia usaha dan dunia industry 4. Workshop Teaching Factory Vokasi berbasis Best Project Learning dengan mengundang Trainers/Wirausaha dari pusat 5. Perluasan akses informasi DUDI yang bekerja sama dengan SMK/Vokasi dalam kerja sama Link and Match MoU dan MoA
	e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);	Alokasi APBN untuk pengembangan perpustakaan digital (e-library) dalam bentuk : 1. Peralatan pendukung seperti internet, computer, dan Laptop. 2. Peningkatan kapasitas SDM Pustakawan dan Kearsipan bersertifikasi
	f. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se-sumatera utara; g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual	1. Dukungan untuk sinkronisasi materi ajar 2. Penguatan Kerjasama Pemda dengan Pusat terkait e-Government percepatan Transformasi Digital pembangunan infrastruktur TIK seperti Penyediaan Akses BTS, Penyediaan Akses Internet dan Desa

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
	dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;	Broadband Terpadu di setiap titik layanan terdepan pemerintah untuk mengikis kesenjangan akses telekomunikasi 3. Dukungan untuk sinkronisasi materi ajar
	h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.	Alokasi APBN untuk dalam bentuk : 1. Peralatan pendukung seperti internet, computer, dan Laptop. 2. Narasumber/Trainer yang Kompeten dalam penyelenggaraan TOT
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah	a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;	Penyediaan vaksinasi, obat-obatan, alat alat kesehatan, sarana dan prasarana serta penerapan 3T di segala aspek oleh Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid Nasional
	b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;	Dukungan pembangunan infrastruktur, penyediaan vaksinasi, obat-obatan, alat alat kesehatan, sarana dan prasarana oleh Kementerian Kesehatan
	c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;	Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah terutama pada usia dini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
	d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. m. ildrem;	Dukungan penilaian akreditasi Rumah Sakit dan alokasi sarana prasarana melalui DAK
	e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;	Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui DAK
	f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran	Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui DAK

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
	(PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta pbi jkn sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;	
	g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.	Pengadaan Obat-obatan melalui DAK
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah	a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;	PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan PN2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Program Peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri.
	b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;	PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Major Project: -Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi - Pengelolaan Terpadu UMKM Program Bangga Buatan Indonesia
	c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;	Program aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kemnaker
	d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).	1. Terbitnya UU No.11 Tahun 2020, tentang cipta kerja beserta produk hukum turunannya yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 2. Terbitnya PP 24 Tahun 2019, tentang pemberian

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
		insentif dan kemudahan investasi di daerah. 3. Alokasi dana DAK non-fisik Fasilitasi penanaman modal pada DPMPSTSP Provsu.
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah	a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi;	• Penyidikan dan Pengujian Produk Pakan • Pemberiaan obat-obatan, vitamin dan desinfektan • Penyediaan benih ternak • Pengendalian pemotongan betina produktif • Penyidikan dan pengujian produk ternak • Fasilitasi dan pembinaan lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor
	b. Peningkatan produksi daging domba menjadi sebesar 1.537,50 ton dalam rangka permintaan ekspor;	• Pengujian Produk Pakan • Pemberiaan obat-obatan, vitamin dan desinfektan • Penyediaan benih ternak • Pengendalian pemotongan betina produktif • Penyidikan dan pengujian produk ternak • Fasilitasi dan pembinaan lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor
	c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;	Dalam rangka mempertahankan swasembada beras diharapkan Pemerintah Pusat mengalokasikan : 1. Bantuan benih padi mencapai 200.000 Ha, 2. Bantuan alokasi pupuk organik 200.000 ton, 3. Alat mesin pertanian pra panen handtraktor 6.000 unit, traktor roda empat 40 unit, rice transplanter 30 unit, 4. Dukungan pengembangan jaringan irigasi tersier 150.000 Ha, 5. Dukungan alat pasca panen power thresher 1.000 unit, 6. Alat angkut roda tiga 500 unit,

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
		7. Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani padi 500 orang Dalam rangka mempertahankan swasembada jagung diharapkan Pemerintah Pusat mengalokasikan : 1. Bantuan benih jagung mencapai 280.000 Ha, 2. Alat prapanen cultivator 3.000 unit, 3. Alat tanam jagung 4.500 unit, 4. Corn sheller 1.500 unit, 5. Alat angkut panen jagung 500 unit, 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani Jagung 500 orang
	d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;	Dalam rangka meningkatkan produksi bawang merah diharapkan Pemerintah Pusat mengalokasikan : 1. Bantuan benih bawang merah seluas 2.000 Ha, 2. Bantuan pupuk organik sebanyak 2.000 ton, 3. Mulsa sebanyak 20.000 gulung, 4. Cultivator sebanyak 100 unit, 5. Gudang bangsal bawang merah sebanyak 100 unit, 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia petani bawang merah 150 orang Dalam rangka meningkatkan produksi cabe diharapkan Pemerintah Pusat mengalokasikan : 1. Bantuan benih cabe seluas 1.500 Ha, 2. Cultivator sebanyak 80 unit, 3. Mulsa sebanyak 150 gulung, 4. Pupuk organik 3.000 ton, 5. Alat angkut roda tiga sebanyak 40 unit,

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
		6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani 120 orang, 7. Cold storage sebanyak 40 unit
	e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.	1. Bantuan dari Pemerintah Pusat (KKP RI) berupa alat penangkapan ikan dalam rangka penggantian alat tangkap ikan yang dilarang. 2. Bantuan dari Pemerintah Pusat (KKP RI) berupa kapal penangkapan ikan 3. Bantuan dana pinjaman dengan bunga ringan kepada nelayan/kelompok pembudidaya ikan 4. Penetapan Kawasan Konservasi 5. Penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah	Pengembangan kawasan pariwisata ,meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu punkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;	Dukungan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kemenparekraf melalui Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi
	Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;	Dukungan Desa Wisata oleh Kemenparekraf
	Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.	Dukungan Sertifikat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/M/2017 tentang Pemukiman, Pemandian, dan Pemakaman Tradisional Megalitik Bawomataluo

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
		Dukungan Penyusunan kajian Penataan Kawasan Kota Lama dan Lapangan Merdeka oleh BPIW Kementerian PUPRI
	Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO global geopark kaldera Toba;	- Dukungan Penerbitan Perpres No. 9 Th 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) - Dukungan Penerbitan Permen/Kepala Bappenas No. 15 Th 2020 tentang Rencana Aksi Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025
	Digitalisasi promosi pariwisata;	Dukungan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Kemenparekraf melalui Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.	Dukungan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan oleh Kemendikbud Ristek
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah	a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);	- Terbitnya Permendagri No.19 tahun 2020, tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. - Agenda Nasional terkait dengan Reformasi Birokrasi. - Terbitnya PP No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. - Serta regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pencegahan korupsi. - Penguatan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih pada masing-masing kab/kota untuk mencapai opini WTP

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
	b. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;	Pendampingan dalam penyusunan SAKIP dan peningkatan kualitas SAKIP Provsu oleh PAN RB dan KL terkait lainnya
	c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-	Pendampingan dalam pelaksanaan pelayanan publik Provsu oleh PAN RB dan KL terkait lainnya (urusan kesehatan, urusan perizinan dan urusan penerimaan pendapatan daerah)
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah	a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di provinsi Sumatera Utara;	Penguatan wawasan kebangsaan melalui Gerakan Revolusi Mental
	b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	Penguatan Kampanye Anti Narkoba dan rehabilitasi melalui Badan Narkotika Nasional
	c. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;	Penguatan Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) antara Pemda dengan Pusat dan penguatan Broadband
	d. Gubernur dan wakil gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;	Penguatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pusat terkait percepatan Transformasi Digital pembangunan infrastruktur TIK dan e-literasi seperti Penyediaan Akses BTS, Penyediaan Akses Internet dan Desa Broadband Terpadu di setiap titik layanan terdepan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses telekomunikasi dan penguatan Broadband
	e. Pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;	Penanganan PMKS serta peningkatan sarana dan prasarana panti melalui DAK Kemensos

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
	f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024;	Alokasi anggaran dari mekanisme APBN dan K/L
	g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;	Alokasi anggaran dari mekanisme APBN dan K/L
	h. Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu (Desa Sena, Kec. Batangkuis Kab. Deli Serdang)	Alokasi anggaran dari mekanisme APBN, KPBU, Investors, Stakeholders
	i. Persiapan Tuan Rumah PON XXI Tahun 2024	Alokasi anggaran dari mekanisme APBN, KPBU, Investors, Stakeholders
	j. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.	Penguatan kerukunan umat beragama di berbagai rumah ibadah melalui Kemenag RI
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah	1. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;	- Inovasi bentuk skema Pembiayaan infrastruktur non APBD termasuk kebijakan membuat regulasi. - Inovasi teknologi terhadap jaringan mutu kualitas infrastruktur.
	2. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;	Perlu dibentuk Tim Terpadu yang berkomitmen dalam Penyelesaian Pertanahan dan Penataan Ruang
	3. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;	Bantuan Teknis Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
	4. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;	Bantuembangunan fisik TPA, karena sesuai dengan kesepakatan dan hasil dari rapat-rapat untuk pembangunan TPA Regional ini Pemerintah Pusat melalui BPPW Provsu akan membantu pembangunan, yang diharapkan bahwa Pemerintah Daerah yang dalam hal ini

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
		Pemerintah Provinsi telah mempersiapkan Readiness Criteria.
	5. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;	Percepatan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi kewenangan Satker PPW II SU
	6. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;	Program KOTAKU dapat berkoordinasi dan memberikan data yang akan melaksanakan Program KOTAKU dan yang telah melaksanakan Program KOTAKU
	7. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;	- Sosialisasi, Bimbingan Teknis terhadap pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat melalui Program Kampung Iklim dari KLHK. - Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dari Bappenas Harapan: - Pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui proklam - Bantuan alat pengolah sampah organik menjadi briket di kampung iklim - Bantuan alat untuk pemanenan air hujan - Bantuan alat untuk membantu ketahanan pangan di kampung iklim - Sosialisasi PPRK bagi dunia usaha dan kabupaten/kota - Pembangunan TPS 3R di lokasi kampung iklim - Pembangunan IPAL komunal - Bantuan alat inovasi pengolahan ikan menjadi pelet atau pakan pada kampung iklim di wilayah pesisir - Bantuan alat pemanenan air hujan untuk daerah kekeringan dan krisis air bersih
	8. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak	Pemerintah Pusat bersama dengan PT. PLN (Persero) bekerja sama dengan 19 Badan Usaha di Sumatera

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Pusat
	8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.	Utara akan memasang 18.411 Sambungan Baru bagi masyarakat tidak mampu.

6.5.2. Program Pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan kegiatan strategis Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023, diperlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara seperti table dibawah ini :

Tabel. 6.6
Program Pembangunan Yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Prioritas peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah	1. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;	Dukungan dalam bentuk : 1. Penyiapan lahan 2. penyiapan Dokumen Readiness Criteria dalam pembangunan unit sekolah baru 3. Penyiapan Dokumen pendukung (DED, RAB) 4. Penyiapan Akses Fasilitas pendukung pembangunan unit sekolah baru (air, jalan, listrik, transportasi)
	2. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;	Mapping Identifikasi data penerima BOP intervensi siswa/i kurang mampu
	3. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1,	Sosialisasi informasi kampung beasiswa kepada pemerintah Kab/Kota

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;	
	4. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri	Dukungan dalam bentuk: 1. Mapping identifikasi kebutuhan tenaga kerja lulusan Vokasi sesuai dengan kebutuhan DUDI 2. Kemudahan izin/regulasi dari Kab/Kota dan OPD untuk akses promosi dan pemasaran produk-produk SMK 3. Penyediaan materi praktek ajar
	5. Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;	Sinergitas dan Koordinasi aktif dalam proses sinkronisasi penyelarasan kurikulum dengan DUDI
	6. Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;	Sinergitas dan koordinasi aktif dalam kegiatan Teaching Factory
	7. MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;	Mapping identifikasi bentuk kerja sama link and match sesuai potensi Kab/Kota dan kebutuhan DUDI
	8. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e-library);	Dukungan dalam bentuk: 1. Izin pembangunan Pojok baca 2. Penyediaan SDM pelayanan pojok baca di Kab/Kota 3. Identifikasi Locus Penempatan pojok baca sesuai kebutuhan Kab/Kota
	9. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se- sumatera utara;	Dukungan dalam bentuk: 1. Sinergitas dan kerja sama 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana TIK untuk kelancaran kelas motivasi 3. Memprioritaskan sekolah yang akan dikunjungi oleh Gubernur/ Wakil Gubernur
	10. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual,	Sinergitas dan kerja sama

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;	
	11. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.	Penyediaan SDM yang akan dilatih
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah	1. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3t (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;	Penyediaan sarana/prasarana 3T, penguatan Rumah Sakit Daerah, Penguatan SDM dan Insentif tenaga medis pada setiap Kab/Kota
	2. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;	Peningkatan pelayanan rujukan ke RS Haji Provsu
	3. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;	Penguatan Pelayanan Posyandu dalam pemberian makanan tambahan, imunisasi dan Pemeriksaan ibu hamil dan menyusui
	4. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. M. Ildrem;	Peningkatan pelayanan rujukan ke RS Jiwa Provsu
	5. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga	Sosialisasi Germas pada Kab/Kota dan Komitmen penganggaran dalam kegiatan Germas

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;	
	6. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta pbi JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;	Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah melalui APBD Kab/Kota dan Sinkronisasi data penerima melalui dinas Dukcapil Kab/Kota
	7. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.	Penyediaan tempat pelaksanaan layanan kesehatan bergerak di wilayah kab/kota dan dukungan bantuan tenaga medis kab/kota dan dukungan bantuan tenaga medis kab/kota
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah	1. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;	1. Dukungan Data dan Informasi UMKM/IKM 2. Dukungan Data Potensi Produk Unggulan Daerah
	2. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;	Dukungan Data dan Informasi terkait Tenaga Kerja dan pasar kerja tingkat Kabupaten/Kota
	3. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;	Dukungan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Masing-masing kabupaten/kota
	4. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana	

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Umum Penanaman Modal (RUPM).	
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah	1. Peningkatan produksi daging sapi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi;	• Rekomendasi lokasi kegiatan • Pembinaan dan pendampingan kelompok • Penyediaan prasarana dan sarana • Pengawasan penyakit hewan Pelaksanaan Inseminasi Buatan
	2. Peningkatan produksi daging domba sebesar 1.537,50 ton dalam rangka permintaan ekspor;	• Rekomendasi lokasi kegiatan • Pembinaan dan pendampingan kelompok • Penyediaan prasarana dan sarana • Pengawasan penyakit
	3. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;	• Rekomendasi lokasi kegiatan • Pembinaan dan pendampingan kelompok • Penyediaan prasarana dan sarana
	4. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;	• Rekomendasi lokasi kegiatan • Pembinaan dan pendampingan kelompok • Penyediaan prasarana dan sarana
	5. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka	1. Ikut serta dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut masing-masing kab/kota. 2. Memberikan bantuan prasarana perikanan tangkap dan budidaya kepada nelayan/pembudidaya secara maksimal 3. Dukungan peran aktif dalam membina seluruh stakeholder kelautan dan perikanan di kab/kota melalui penyuluhan

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.	
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah	1. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara	Dukungan Pengembangan Kawasan Ekowisata Tangkahan-Bahorok: ➤ Infrastruktur •Bukit Lawang - Pengaspalan Jalan Dsn Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok •Pengaspalan Hotmix Jalan Simp. Sejagat Pantai Sampah Kec. Bahorok (•Tangkahan - Pembangunan JembataDesa Sei Serdang Kec. Batang Serangan (- Pengaspalan Hotmix Tualang Gepang-Namu ➤ Amenitas • Bukit Lawang - Pembangunan Lapang Parkir •Tangkahan - Pembangunan Pentas Seni ➤ Atraksi dan Promosi - Pembuatan Video Promosi Wisata Alam dan Budaya ➤ Pemberdayaan Masyarakat • Bukit Lawang - Bimtek Kerajinan Bambu/Kayu di Destinasi Wisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok (40 IKM) •Tangkahan - Pelatihan dan bantuan peralatan Meubel di Destinasi Wisata Tangkahan Kecamatan Batang Serangan Dukungan Pengembangan Wisata Kepulauan Nias 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		3. Dukungan pembangunan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. 4. Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota 5. Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota Dukungan Pengembangan agrowisata Ulu Pungkut 1. Dukungan pengembangan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. 2. Dukungan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) Dukungan Pengembangan wisata religi dan sejarah Barus, Tapanuli Tengah ➤ Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Wisata Religi Barus Dukungan Pengembangan wisata religi dan sejarah candi bahal – Padang Lawas Utara ➤ Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota ➤ Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata ➤ Dukungan pembangunan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. ➤ Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota ➤ Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota
	2. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;	Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki beberapa Desa Wisata, seperti : Desa Huta

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Tinggi (Samosir), Desa Tipang (Humbang Hasundutan) Desa Denai Lama (Deli Serdang), Desa Raya (Karo), Desa Silahisabungan (Dairi). Kampung Nipah (Serdang Bedagai), dll. Dukungan yang diperlukan dari Kab/Kota: - Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota - Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata - Dukungan pembangunan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. - Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota - Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota
	3. Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.	- Dukungan Pembangunan Situs Cagar Budaya Benteng Putri Hijau: - Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota - Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terutama dalam pembebasan lahan sekitar - Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat sekitar - Dukungan Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata - Dukungan Pembangunan Bawomataluo: - Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota - Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat sekitar - Dukungan Peningkatan aksesibilitas sesuai

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata ➤ Dukungan Pembangunan Lapangan Merdeka Medan: 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Pelaksanaan kegiatan dana hibah pengembalian fungsi lapangan merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH)
	4. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;	Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba: ➤ Kab Dairi - Pengaspalan/Pengecoran Jalan Lingkungan Kec. Silahisabungan 2KM - Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Silahisabungan - Pembangunan/Pengadaan sarana/ prasarana pariwisata di Taman Wisata Iman Kec. Sitinjo (➤ Toba - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa/Siswa) di Kab. Toba - Pengadaan dan Pemasangan serta Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ➤ Taput - Pembangunan baru IPAL skala pemukiman kombinasi MCK - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (DAK Air Minum di Dusun Hutasihlap Desa Hutanagodang Kec. Muara
	a. Digitalisasi promosi pariwisata;	1. Penyusunan data potensi pariwisata kab/kota 2. Penyusunan calender of event kab/kota

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		3. Penyusunan travel pattern pariwisata
	b. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.	MoU dengan forum masyarakat melayu terkait pelestarian dan pemberdayaan forum kesultanan melayu
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah	1. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);	Penguatan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih pada masing-masing kab/kota untuk mencapai opini WTP
	2. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;	Penguatan capaian dan peningkatan kualitas SAKIP Kab/Kota
	3. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik yang Prima di Kab/Kota
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah	1. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di provinsi sumatera utara;	Penguatan wawasan kebangsaan di masing-masing Kab/Kota
	2. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	- Dukungan penyediaan relawan P4GN Kab/Kota dalam desa/kelurahan bersih narkoba (bersinar) - Dukungan penyediaan pendamping kab/kota dalam kampanye bersih narkoba
	3. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan sumatera utara;	Integrasi Kerjasama terkait SPBE pelaporan/pengaduan masyarakat
	4. Gubernur dan wakil gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat	Kerjasama terkait penguatan infrastruktur digital dan Penguatan e-literasi

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	secara langsung maupun virtual;	
	5. Pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Utara;	Penyediaan data identitas penduduk yang akan dan telah menjadi penghuni panti sosial Provsu
	6. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024;	1. Percepatan peningkatan sarpras/renovasi venues olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024 2. Dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota 3. Pendidikan dan pembinaan atlet daerah (Talent Scouting) 4. Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI tahun 2024
	7. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;	Dukungan pembiayaan dari Kab/Kota untuk Atlet Kab/Kota
	8. Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu (Desa Sena, Kec. Batangkuis Kab. Deli Serdang)	Dukungan pembiayaan dari APBD Kab/Kota untuk percepatan peningkatan Sarpras/renovasi Venues Olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024
	9. Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024	1. Percepatan peningkatan sarpras/renovasi venues olahraga yang akan digunakan untuk PON XXI tahun 2024; 2. Pendidikan dan pembinaan atlet daerah (Talent Scouting) 3. Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI tahun 2024
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah	10. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.	Penyediaan sarana/prasarana pendukung Rumah Ibadah di masing-masing Kab/Kota
	1. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan	Mediasi terhadap ruang penguasaan jalan akibat dilakukannya tindakan penanganan

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;	
	2. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;	Membuat tim terpadu yang berkomitmen dalam penyelesaian pertanahan dan penataan ruang
	3. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (Tujuh puluh delapan ribu) hektar yang merupakan kewenangan Provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras;	Mendorong masyarakat petani agar tidak melakukan alih fungsi lahan serta menertibkan masyarakat yang menggunakan jaringan irigasi diluar ketentuan
	4. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;	Mendukung dan ikut berkontribusi dalam pengelolaan TPA Regional Mebidang
	5. Pembangunan sistem penyediaan air minum (spam) mebidang;	Berkomitmen atas tugas dan kewenangan yang dituangkan pada Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (SP3)
	6. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat agar mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dengan melakukan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh
	7. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;	1. Dukungan kegiatan dalam hal penanganan timbulan sampah, 2. Pengendalian emisi kendaraan
	8. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus	1. Penetapan lokasi penerima manfaat (KK MIskin), 2. Penetapan lokasi prioritas pertanian, 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang akan dibangun

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.	

Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan perampingan organisasi Perangkat Daerah yang diharapkan efektif terlaksana pada Tahun 2022. Adapun perampingan tersebut merupakan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dilakukan melalui perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut.

Perampingan organisasi ini dilakukan melalui penggabungan beberapa perangkat daerah. Beberapa Perangkat Daerah (PD) berdasarkan hasil pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provsu tersebut antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergabung dengan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bergabung dengan Urusan Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menjadi Dinas Pertanian;
4. Urusan Peternakan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bergabung dengan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi menjadi Dinas Pekerjaan Umum;
6. Urusan Tata Ruang dari Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang bergabung dengan Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Tata Ruang;

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan bergabung menjadi Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup;
8. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan bergabung menjadi Dinas Pertanian;
9. Urusan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan bergabung dengan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan
10. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral bergabung menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bergabung Dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan.

Penggabungan beberapa Perangkat Daerah berdasarkan prinsip antara lain agar Perangkat Daerah bergerak cepat, berjalan sesuai fungsi, dan tidak ada tumpang tindih dengan urusan tugas dan fungsi antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah.

Tujuan penataan antara lain meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah yang tepat ukuran, rasional serta sesuai sumber daya, potensi dan kebutuhan nyata.

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah yang disertai Realisasi Pagu Indikatif
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020
VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019				2020				OPD PENANGGUNG JAWAB	
								REALISASI	Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan														
					1,1	Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Program Pembinaan Pendidikan Khusus	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	98,24	14.679.146.279	13.199.526.144	100	10	9.232.942.400
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas	APM SM SEDERAJAT	%				69	71	99,64	385.631.346.537	384.236.659.393	100	1	568.640.841.613	369.137.956	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%				97	99	100,00	251.281.613.995	248.958.815.098	100	27,71	406.714.528.716	852.850.629	Dinas Pendidikan	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya Program Pengembangan Budaya Baca, Pembinaan Perpustakaan dan Peningkatan Layanan Bagi Pengunjung Perpustakaan	Perp, Eks, Kegiatan, Orang				0	34	93,00	10.673.665.850	10.253.427.165	40	40	15.244.000.000	9.774.414.110	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		Program Pembinaan dan ketenagaan	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	%				95	96	99,60	158.325.557.940	154.543.876.725	99	67,28	204.136.035.950	130.824.437.642	Dinas Pendidikan	
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	100	100	100	13.682.656.820	13.682.656.820	100	100	13.682.656.820		Badan Kepegawaian Daerah	
					Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	unit	0	3000	3.491	52.030.385.625	37.343.625.843	2.666	482	18.639.457.975	14.932.182.245	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia	%										Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terwujudnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas	%	0	98	74,50	12.484.269.700	8.330.386.488					Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1,2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kesetaraan Gender	%	0	76	72,00	1.093.523.600	1.041.216.700	79	79	1.468.023.600	665.137.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Program peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	%	0	77	70,00	2.498.826.510	2.247.376.220	81	81	3.205.941.110	1.887.177.359	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Program Peningkatan Pemenuhan hak anak	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan	%	0	80	75,00	1.804.148.911	1.324.259.998	82	82	2.082.401.611	1.185.888.276	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2*	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan														
					2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit / Rumah Sakit Khusus / Laboratorium	Persentase Rumah Sakit / Rumah Sakit Khusus / Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	%	0	0	-	27.055.095.286,00	31.745.527.932,00	100	104,79	26.457.005.766
		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	%				0	30	65,70	18.710.257.302	12.292.497.725	37	37	163.720.800	148.544.500	Dinas Kesehatan	
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	%				0	100	96,88	5.368.250.000	5.368.134.270	100	99,65	3.028.906.732	2.874.425.268	Rumah Sakit Jiwa Daerah	
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%		80	80	6.984.824.162	6.984.824.162	100,00%	88,67%	264.036.818	261.087.878	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa, keterampilan berusaha masyarakat pedesaan dan akses masyarakat terhadap informasi serta menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat				%	79	100	100	4.242.170.500		100	100	3.855.000.000	279.924.989,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019					2020				OPD PENANGGUNG JAWAB
								REALISASI	Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
					Program Penguatan Keluarga Sejahtera dan Berencana Pemberdayaan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	RS	0	59	59	330.000.000	330.000.000	90% 40%		3.012.898.000	291.584.069	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	
						%	0	43	43	210.000.000	210.000.000							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pembinaan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil	%	0	47	47	795.201.220	795.201.220			481.575.850	424.056.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				3*	Meningkatkan Kesejahteraan	PDRB Perkapita (ADHB)												
			3,1 Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen	0,57	0,9	0,90	953.697.489,0	619.734.420	0,96	0,74	287.379.900	221.807.050	Dinas Tenaga Kerja	
					Program peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Capaian Target Lama Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan sesuai target Renstra	%	70	75	93	1.911.378.365	1.420.797.906	78	78	907.384.900	906.325.757	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor di Sumatera Utara guna mendukung terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja	tahun	2	1	1	468.495.700	433.564.670	1	0	33.061.000	33.061.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	Persen	0,4	0,12	0,11	1.390.112.260	1.351.502.400	0,23	0,22	1.000.847.757	964.491.317	Dinas Tenaga Kerja	
					Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3	Persen	5,99	7,49	7,49	2.244.979.519	2.199.429.163	8,24	7,92	1.682.475.718	1.617.120.529	Dinas Tenaga Kerja	
					Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Sumatera Utara	%	0	2	2,00	3.213.171.805	1.065.949.740	3	2	3.071.000.000	4.345.127.170	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	IKM yang menerima bantuan peralatan dan/atau sosialisasi teknologi industri	IKM	70	80	80,00	555.336.260	442.416.810	90	90	172.546.200	135.819.650	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	unit	0	6,245	6,245	13.805.134.848	5.299.999.744			5.096.055.015	1.358.155.942	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
						Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif	unit	0	2,858,000	2,858,000								
				3,2 Meningkatkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya Produksi tanaman hortikultura	%	0	6	6,00	19.529.033.104	10.853.937.988	3	2	7.160.752.414	6.492.971.448	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Program pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman	Meningkatnya Luas serangan OPT yang dikendalikan	Hektar	0	29,013	40,00	531.760.530	408.448.250	27,17	26,90	1.306.444.070	1.300.500.322	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani	Hektar	0	50,65	49,15	3.745.070.512	3.488.127.923	35,75	10,10	845.166.586	828.371.316	Dinas Kelautan dan Perikanan	
																	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
					Program Peningkatan Produksi ,Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	NTP Perkebunan	Poin	0	99	99	35.497.334.767	35.497.334.767	3%	91,33%	11.012.160.932	10.077.183.776	Dinas Perkebunan	
						PDRB Perkebunan	%	0	10	10								
				3,3 Meningkatkan destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Capaian Target Lama Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan sesuai target Renstra	%	70	75	85,87	1.911.378.365	1.420.797.906	78	13	907.384.900	906.325.757	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
					Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Misi Investasi yang diikuti baik di tingkat nasional maupun internasional	tahun	2	1	1,00	2.706.558.780	2.637.415.053	1	0	69.197.000	68.536.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
					Program Destinasi wisata	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Sumut	orang	0	280.000	258,77	5.205.744.280	2.904.669.800	300.000	44,285	14.138.023.308	12.079.514.082	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Program Pemasaran pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	8,15	8,56	9,80	5.865.989.250	5.205.744.280	8,99	6,36	2.279.390.876	1.926.721.173	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

[illegible]

**Program Pembangunan Daerah yang disertai Realisasi Pagu Indikatif
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023
VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT**

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2021		2022		2023		OPD PENANGGUNG JAWAB	
1		2		3	4	5	6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	13	
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat	Indeks Pendidikan											
			1,1 Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SM SEDERAJAT	Persen	82,61	3.823.481.922.408,00	83,31	1.498.545.888.294,00	83,61	1.573.473.182.708,70	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
						APM SM SEDERAJAT	Persen								
						Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen								
					Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen									
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	Persen	97,4	209.963.950.900,00	98,2	198.317.296.500,00	99,01	208.233.161.325	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	unit	100	17.272.501.754	100	5.093.974.220	100	5.348.672.931	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	100 %	3.955.719.987,00	100 %	41.555.372.801,00	100 %	43.633.141.441	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	%	87 %	16.043.025.783,00	90 %	10.051.224.510	100 %	10.553.785.736	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
		1,2 Meningkatkan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Implementasi PPRG dalam pembangunan daerah	Persen	83,9	290.557.200	91,2	373.424.000,00	100	392.095.200,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak		
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berakarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	2	2.1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	11.721.400.000	100%	12.439.900.000	100%	12.389.100.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
						Prevalensi Stunting pada Balita	%	28,50%	21.835.568.500	27,50%	24.019.125.350	26,50%	26.421.037.885		
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,5 : 1.000	850.000.000	1,5 : 1.000	1.000.000.000	1,5 : 1.000	1.200.000.000		
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	%	100 %	160.587.115.281	100 %	1.650.000.000	100 %	1.700.000.000		
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang	%	100 %	799.499.000	100 %	48.865.966.404	100 %	5.800.000.000		
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan	%	30%	698.772.900	40%	768.650.190	50%	845.515.209	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota BKB ber-KB	%	65 %	3.000.000.000	67 %	800.000.000	69 %	840.000.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	
		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	%	1,00	483.484.050	1,00	150.000.000		157.500.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		3*		Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)										
				3,1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Program PenempatanTenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	16,58%	2.259.512.350,00	16,58%	1.063.129.394,00	17,11%	1.116.285.864

MISI		TUJUAN / SASARAN			INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2021		2022		2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	75,76%	109.642.500	84,85%	205.515.500	93,94%	215.791.275	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

MISI		TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2021		2022		2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Program Promosi Penanaman Modal	peningkatan nilai invetasi	Rp. Triliun	35	1.697.728.500,00	36,6	1.607.552.382,00	38,43	1.687.930.001	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor	investor	557	1.387.012.280,00	584	1.206.373.000,00	613	1.266.691.650,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	(1). Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi;	%	0,20%	3.243.124.868,00	4,81%	1.203.810.356,00	4,81%	1.264.000.873,80	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
						(2). Tingkat produktivitas tenaga kerja.	indeks	5,36		5,65		5,65		OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
					Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	50,12%	830.344.850,00	50,10%	964.284.250,00	50,73	1.012.498.462,50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
					Program Hubunga Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	7,72%	756.461.750,00	7,94%	784.152.900,00	7,80%	823.360.545,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	4,30%	707.255.500,00	4,74%	468.748.641,00	4,98%	492.186.073,05	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang difasilitasi	%	100	188.243.950,00	100	111.840.500,00	100	117.432.525,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan RPIK	Kab/Kota	2	4.549.301.041,00	3	3.471.995.350	4	3.645.595.118	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif	unit	2.860.000 unit	-	2.861.000 unit	1.594.562.900,00	2.862.000 unit	1.674.291.045,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
					Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan wirausaha baru	unit	475 unit	15.725.616.308,00	475 unit	11.756.024.502,00	475 unit	12.343.825.727,10	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
						Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM	orang	4.644 orang		4.876 orang		4.973 orang		OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan
		3,2	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA POPULASI TERNAK RUMINANSIA DAN UNGGAS	%	1,5	43.476.788.151	1,5	32.650.955.675	1,5	34.283.503.459	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Sektor Peternakan
						Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	Ha	1,415,511 Ha		1,436,744 Ha		1,458,295 Ha		
						Cakupan luas lahan fasilitasi prasarana pertanian	Ha	188 Ha		24 Ha		24 Ha		
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, SUSU DAN TELUR	%	1,5	69.025.443.728	1,5	67.245.840.724	1,5	70.608.132.760	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
						Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha)	%	58.91 %		59.08 %		59.26 %		
						Cakupan luas lahan fasilitasi sarana pertanian	Ha	550 Ha		1895 Ha		1895 Ha		
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Point	86.68 Point	1.863.737.004	86.68 Point	1.666.306.184	86.68 Point	1.749.621.493	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

MISI		TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2021		2022		2023		OPD PENANGGUNG JAWAB			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			3,3	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	251,669 Ton	7.761.227.538	259,219 Ton	5.173.348.734	266,996 Ton	5.432.016.171	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	577,376 Ton	13.281.011.703	594,698 Ton	13.702.809.249	612,539 Ton	14.387.949.711	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	%	0.03 %	10.822.561.166	0.03 %	12.759.501.348	0.03 %	13.397.476.415	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
						Jumlah penyuluhan petani pekebun	orang	1065 orang		3430 Ha		3430 Ha					
							Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	Orang	500 Orang	7.103.636.764	1.000 Orang	9.341.371.000	1.500 Orang	9.808.439.550	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pengelola Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	400 orang	751.027.775	870 orang	2.010.279.200	957 orang	2.110.793.160	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN		2021		2022		2023		OPD PENANGGUNG JAWAB		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1		2		3		4		5		6		7	8	9	10	11	12	13		
		4*				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya	DPP	8 DPP	15.807.235.940	3 DPP	6.693.192.558	4 DPP	7.027.852.186	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	%	50 %	12.144.357.500	60 %	16.841.531.340	80 %	17.683.607.907,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
						Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	%	90	-	91,25	-	92,5	-	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
			4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu	%		3.361.270.900	100 %	11.749.970.000	100 %	12.337.468.500	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
						Meningkatkan infrastruktur	Indeks Infrastruktur													
							Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi mantap	Persen	76,37	518.446.591.125	78,31	830.635.940.000	85	872.167.737.000,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
						Akses Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	%	100,00	14.813.265.200	100,00	70.561.231.400	100,00	74.089.292.970,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan				
						Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi yang terlayani	%	57,17	131.693.108.008	59,47	60,34	#VALUE!	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
						Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir		%	56,92	60,48		64,75								
						Rasio Elektrifikasi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	%	100 %	4.676.810.875	100 %	4.183.909.000	100 %	4.393.104.450	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
			2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih		Indeks Demokrasi													
					2,1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Indeks Reformasi Birokrasi													
Skor Kebebasan Sipil		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100%	3.633.404.700	100%	666.119.550	100%	699.425.527,50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik					
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	%	100%	8.778.989.650	100%	32.410.249.800	100%	34.030.762.290,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik						
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pertambahan Ormas	%	100%	2.103.087.850	100%	3.280.497.850	100%	3.444.522.742,50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik						
2,2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tingkat pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	%	100%	2.618.127.234.032	98%	3.204.067.834.654	100%	3.364.271.226.387	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan						
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	%	100%	9.820.088.941	100%	9.539.825.861	100%	10.016.817.154	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan						

MISI		TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2021		2022		2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	%	100%	4.930.807.500	100%	4.858.073.500	100%	5.100.977.175	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan	%	100%	7.185.256.324	100%	8.432.135.775	100%	8.853.742.564	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan standar pelayanan minimal dan norma, standar, peraturan dan ketentuan	%	100%	23.563.996.500	100%	25.384.074.400	100%	26.653.278.120,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
					PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100	2.224.776.000	100	2.458.639.000	100	2.581.570.950,00	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
				Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100	2.224.776.000	100	2.458.639.000	100	2.581.570.950,00	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	4,1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	%	75 %	18.341.124.590	80 %	6.147.431.200	85 %	6.454.802.760	OPD yang melaksanakan Urusan
						Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100		100		100		OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial.	%	100 %	1.404.168.500	100 %	1.067.957.550	100 %	1.121.355.428	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	kab/kota	33 kab/kota	55.162.633.974	33 kab/kota	5.339.282.500	33 kab/kota	5.606.246.625,00	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologiinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	5,1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	69,02	6.581.749.347	69,2	3.754.543.156	69,38	3.942.270.314	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
		5,2	Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	%	100 %	649.905.500	100 %	824.993.250	100 %	866.242.913	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
		5,3	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	%	70 %	403.739.050	72%	549.997.740	74%	577.497.627	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
		5,4	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	poin	45	2.793.564.020	50	1.444.534.025	60	1.516.760.726	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya serta tertib dalam pengelolaannya	%	100	15.557.525.950	100	23.172.370.860	100	24.330.989.403	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2019-2023 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023*
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Daerah	13.687.035.662.525	12.011.625.563.716	13.300.056.517.578
a.	Pendapatan Asli Daerah	6.279.786.774.225	6.819.012.313.316	8.101.943.267.178
	Pajak Daerah	5.706.083.586.846	6.227.774.043.083	7.336.833.529.012
	Retribusi Daerah	30.370.035.040	68.415.527.040	78.415.527.040
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	356.265.026.558	354.759.991.476	456.265.026.558
	Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	187.068.125.781	168.062.751.717	230.429.184.568
b.	Pendapatan Transfer	7.317.180.888.300	5.093.345.250.400	5.093.345.250.400
	Dana Perimbangan	7.317.180.888.300	5.077.512.782.400	5.077.512.782.400
	Dana Insentif Daerah	-	15.832.468.000	15.832.468.000
c.	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	90.068.000.000	99.268.000.000	104.768.000.000
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	476.782.631.305	750.000.000.000	450.000.000.000
3	Total Penerimaan	14.163.818.293.830	12.761.625.563.716	13.750.056.517.578
	Dikurangi :			
4	Belanja :	9.531.405.393.582	8.226.056.617.231	8.880.310.199.383
a	<i>Belanja pegawai</i>	<i>3.497.040.891.582</i>	<i>3.390.518.248.492</i>	<i>3.498.866.426.146</i>
b	<i>Belanja Hibah</i>	<i>3.413.035.623.506</i>	<i>1.693.301.376.043</i>	<i>1.562.533.017.432</i>
c	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>23.322.875.828</i>	<i>35.342.972.550</i>	<i>45.282.684.760</i>

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023*
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
d	Belanja tidak terduga	21.058.512.853	100.000.000.000	50.000.000.000
e	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2.576.947.489.813	3.006.894.020.146	3.723.628.071.045
5	Pengeluaran Pembiayaan	210.500.000.000	112.000.000.000	150.000.000.000
6	Kapasitas riil kemampuan keuangan	4.421.912.900.248	4.423.568.946.485	4.719.746.318.195

Sumber : Bappeda Provsu (data diolah)

Analisis data di atas adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada tabel 7.1 diatas tergambar bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 mencapai Rp. 4,42 Triliun demikian juga untuk tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 4,42 Triliun dan untuk tahun 2023 kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 4,71 Triliun.

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperlihatkan pada Tabel selanjutnya dapat ditentukan kerangka pendanaan seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021		2022		2023	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	100%	4.421.912.900.248	100%	4.423.568.946.485	100%	4.719.746.318.195
1	Prioritas I	55%	2.432.052.095.136	58%	2.565.669.988.961	60%	2.831.847.790.917
2	Prioritas II	30%	1.326.573.870.074	32%	1.415.542.062.875	34%	1.604.713.748.186
3	Prioritas III	15%	663.286.935.037	10%	442.356.894.649	6%	283.184.779.091

Sumber : Bappeda Provsu (data diolah)

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD RPJMD dan RKPD sebagai berikut :

- a. **Prioritas I.** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b. **Prioritas II.** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah.
- c. **Prioritas III.** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dari Tabel 7.2 di atas, untuk memenuhi rencana kapasitas riil indikasi kebutuhan alokasi anggaran prioritas pembangunan daerah yang dialokasikan dari penjumlahan Prioritas I ditambah dengan Prioritas II, maka didapati untuk kebutuhan prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2021 sebesar 85 persen dengan total alokasi anggaran sejumlah Rp. 3,75 Triliun, dan Tahun 2022 sebesar 90 persen dengan total anggaran sejumlah Rp. 3,98 Triliun serta untuk Tahun 2023 sebesar 94 persen sejumlah Rp. 4,43 Triliun, untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada Tabel 7.3 sebagai berikut :

Tabel 7.3.
Rencana Kapasitas Riil Indikasi Kebutuhan Alokasi Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	2021		2022		2023	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	20%	751.725.193.042	20%	796.242.410.367	20%	887.312.307.820
2	Penyediaan Deraja Kesehatan Masyarakat	12%	451.035.115.825	15%	597.181.807.775	16%	709.849.846.256
3	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	15%	563.793.894.781	16%	636.993.928.294	18%	798.581.077.038
4	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	13%	488.621.375.477	14%	557.369.687.257	15%	665.484.230.865
5	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	10%	375.862.596.521	8%	318.496.964.147	7%	310.559.307.737
6	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	7%	263.103.817.564	4%	159.248.482.073	3%	133.096.846.173
7	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	8%	300.690.077.216	6%	238.872.723.110	3%	133.096.846.173
8	Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	15%	563.793.894.781	17%	676.806.048.812	18%	798.581.077.038
Jumlah Indikasi Kebutuhan Dana mendukung Prioritas Pembangunan Daerah		100%	3.758.625.965.210	100%	3.981.212.051.837	100%	4.436.561.539.103

Sumber : Bappeda Provsu (data diolah)

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa dalam mewujudkan visi misi Sumatera Utara terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah yang akan didukung dengan program kegiatan prioritas sehingga perlu diproyeksikan indikasi kebutuhan alokasi anggarannya. Pada tabel 7.3 di atas, merupakan gabungan kapasitas riil kemampuan keuangan untuk membiayai kebutuhan pendanaan Prioritas I ditambah dengan Prioritas II, yaitu kebutuhan alokasi anggaran yang merupakan gambaran rencana alokasi anggaran program kegiatan yang prioritas untuk mendongkrak pencapaian target dan indikator pembangunan berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tidak termasuk alokasi untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pembiayaan Tahun Jamak (Multi Years)

Bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat 2019 – 2023 dan keberhasilan Prioritas Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah yang efektif dan efisien (tepat waktu, tepat anggaran, tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat manfaat) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023 yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang mendukung pencapaian keberhasilan Prioritas Pembangunan Daerah yang termuat di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yaitu :

1. Penjabaran Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih melalui 8 (delapan) Prioritas Pembangunan dan 54 Kegiatan Strategis Daerah.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. kesempatan kerja. lapangan berusaha. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

TABEL 7.4
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2020

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Pendidikan													
Dinas Pendidikan													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	82,05	16.879.881.957	13.850.361.489	100%	99%	3.153.155.600	3.076.120.299	Dinas Pendidikan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	91,30%	5.454.288.210	4.979.726.088	100%	100%	5.183.041.953	5.124.348.285	Dinas Pendidikan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	97,72%	509.350.000	497.752.200	100%	100%	73.300.000	73.286.000	Dinas Pendidikan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	20,23%	200.000.000	40.460.000	100%	50%	66.750.000	64.568.000	Dinas Pendidikan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	-	-	100%	100%	46.371.080	46.371.080	Dinas Pendidikan
6	Program Pembinaan Pendidikan Khusus	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	98,24%	14.679.146.279	13.199.526.144	98	98	16.664.524.784	9.232.942.400,00	Dinas Pendidikan
7	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas	APM SM SEDERAJAT	%	69	100	99,64%	385.631.346.537	384.236.659.393	73	73	481.019.568.808	568.640.841.613,00	Dinas Pendidikan
8	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99	99,08%	251.281.613.995	248.958.815.098	99	99	349.130.579.575	406.714.528.715,90	Dinas Pendidikan
9	Program Pembinaan dan Ketenagaan	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	%	95	96	97,6%	158.325.557.940	154.543.876.725	97	97	135.115.477.940	204.136.035.950,00	Dinas Pendidikan
10	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas lainnya	Persentase Kehadiran Pegawai Tidak Kurang Dari 100%	%	100	100	93,12%	262.850.157.413	243.293.786.935	100	100	269.443.229.977	334.136.083.094,20	Dinas Pendidikan
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA	APK SM SEDERAJAT	%	97	97	77,42%	61.199.027.474	47.381.146.313	98	98	75.670.945.574	43.600.314.774,00	Dinas Pendidikan
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK		%	69	71	62,98%	34.871.364.119	21.962.475.664	73	73	43.727.283.174	17.403.255.706,00	Dinas Pendidikan
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SM SEDERAJAT	%	97	99	99	4.285.451.351		99	99	4.285.451.351	536.180.000,00	Dinas Pendidikan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kesehatan													
Dinas Kesehatan													
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	95	96	93,94	25.569.796.070	24.019.290.077	87%	100%	24.173.926.147	22.047.834.112	Dinas Kesehatan
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	82	85,91	17.483.026.652	15.018.907.789	33%	100%	7.365.569.736	7.107.937.300	Dinas Kesehatan
16	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	95	96	29,78	906.132.000	269.828.100					Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	95	96	55,16	4.661.161.328	2.570.880.431	12%	100%	355.180.000	329.932.640	Dinas Kesehatan
18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	62,34	499.890.000	311.614.000	98%	100%	252.126.950	250.150.950	Dinas Kesehatan
19	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	%	85	90	53.016	11.429.051.702	6.535.672.884	92%	100,91%	3.644.194.550	2.722.489.807	Dinas Kesehatan
20	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90	100	73,86	8.889.154.430	6.565.799.198	100%	109,07%	3.667.820.500	2.943.694.416	Dinas Kesehatan
21	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	%	25	30	42,63	4.090.374.410	2.868.024.047	40%	85,93%	2.356.879.050	2.030.236.675	Dinas Kesehatan
22	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun)	%	33	32	79,14	5.226.337.500	3.486.993.802					Dinas Kesehatan
23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	34	50	85,28	2.532.837.890	2.159.970.755	60%	94,14%	3.023.097.400	2.470.054.942	Dinas Kesehatan
24	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	0	100	60,33	11.943.801.268	7.514.043.976	100		3.811.337.268	2.151.434.622	Dinas Kesehatan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit / Rumah Sakit Khusus / Laboratorium Kesehatan	Persentase Rumah Sakit/ Rumah Sakit Khusus/ Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	%	0	0	0	27.055.095.286	31.745.527.932	60%	104,79%	26.457.005.766	19.106.346.363	Dinas Kesehatan
26	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	%	0	30	65,70	18.710.257.302	12.292.497.725	10%	66,43	163.720.800	148.544.500	Dinas Kesehatan
27	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	70	79	50,53	11.677.232.223	7.439.650.034	81%	98,88%	1.831.454.850	1.687.591.987	Dinas Kesehatan
28	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas	dokumen	13	90	72,33	6.884.170.297	5.501.168.292	13		4.271.350.650	3.543.560.102	Dinas Kesehatan
29	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan JKN	%	69	75	74,35	100.850.992.600	89.880.539.809	71%	99,80%	136.369.097.072	134.154.651.850	Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Jiwa Daerah													
30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	97	97	4.279.965.000	4.279.965.000	98	98	4.700.000.000	5.091.972.204,16	Rumah Sakit Jiwa Daerah
31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	1.099.671.000	1.099.671.000	100	100	1.000.000.000	464.257.694,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah
32	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100	399.000.000	399.000.000	100	100	450.000.000	0	Rumah Sakit Jiwa Daerah
33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	92	92	320.775.000	320.775.000	96	96	400.000.000	112.752.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah
34	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	92	92	20.000.000	20.000.000	95	95	20.000.000	0	Rumah Sakit Jiwa Daerah
35	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan, dan perbekalan kesehatan RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem	%	0	100	100	1.767.208.320	1.767.208.320	100	100	4.927.499.776	3.998.148.225,65	Rumah Sakit Jiwa Daerah

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
36	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat di RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem	%	0	96	96	12.554.125.312	12.554.125.312	97	97	13.942.024.192	8.846.287.200,84	Rumah Sakit Jiwa Daerah
37	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kesehatan jiwa	%	0	50	50	17.200.000	17.200.000	70	70	20.000.000	10.800.000,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah
38	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	%	0	100	100	5.368.250.000	5.368.250.000	100	100	17.300.476.032	3.028.906.732,35	Rumah Sakit Jiwa Daerah
39	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana di RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem	%	0	100	100	569.426.000	569.426.000	100	100	1.000.000.000	236.448.568,00	Rumah Sakit Jiwa Daerah
Rumah Sakit Haji Medan													
40	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100%	8.717.376.210	664.100	100%	97%	8.002.850.245	7.767.232.033	Rumah Sakit Haji Medan
41	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	75	75	3.067.881.280		100%	98%	2.183.917.538	2.137.887.715	Rumah Sakit Haji Medan
42	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100	404.950.000		1 laporan		0	0	Rumah Sakit Haji Medan
43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	70	100%	951.672.000	53.177.058	1 Dokumen	1 Dokumen	470.000.000	449.720.733	Rumah Sakit Haji Medan
44	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100%	220.526.500	165.000	1 Dokumen	1 Dokumen	23.032.844	21.698.650	Rumah Sakit Haji Medan
45	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standart	%	0	70	100%	21.363.491.420	43.084.580	1 Tahun	1 Tahun	16.423.988.450	15.750.400.654	Rumah Sakit Haji Medan
46	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	%	0	100	100	3.106.102.590	172.514.430	100%	96%	3.200.188.704	3.074.905.251	Rumah Sakit Haji Medan
47	Program Pelayanan BLUD RS	Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan BLUD	%	100	100	100	64.000.000.000	7.516.151.808	100%	100%	57.599.999.889	57.114.734.590	Rumah Sakit Haji Medan
48	Program Standart Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pelayanan rumah sakit yang memenuhi standart	%	100	100	100	0		100%	64%	97.500.000	62.094.000	Rumah Sakit Haji Medan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi													
49	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	81,40%	5.750.991.863	881.577.789.332	97	97	4.166.153.592	7.173.929.456	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
50	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	82,94%	3.570.310.364	2.961.272.520	67	67	20.432.985.800	7.460.169.950	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
51	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	98,17%	337.750.000,00	331.566.820,00	97	97	210.000.000	591.250.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
52	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	95	60,81%	665.006.000,00	404.400.800,00	96	96	680.000.000	1.177.455.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
53	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	8,17	82,99	82,19%	424.892.871.829	333.098.152.229	84,52	75,02	631.316.439.477	558.375.380.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	%	0	82	83,71%			84,78	84,06			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
54	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi yang Terpelihara	%	0	100	100	1.246.250.650.000	124.625.065.000	100	100	1.246.250.650.000	101.843.632.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase Panjang Jembatan yang Terpelihara	%	0	100	100			100	100			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
55	Program Pembinaan Jalan dan Jembatan	Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintah yang tepat waktu	%	100	100	100	78.599.683.171	78.599.683.171	100	100	79.246.033.803	52.918.623.010	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Berfungsinya Saluran Drainase di Jalan Provinsi	%		70	84,59%	10.000.000.000	8.459.496.563	73	73	20.900.000.000	23.500.000.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
56	Program Peningkatan/Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Longsoran yang Tertangani	%	0	100	79,47%	62.000.000.000	49.272.120.530	100	100	70.950.000.000	52.000.000.000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
57	Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	%	10	100	83,79%	69.119.847.440	3.325.068.996	11	11	3.283.633.526	3.325.068.996	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kualiiitas dan Kapasitas Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100	7.929.192.483	7.729.615.430	100,00%	86,62%	7400867519	6.329.267.842	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kapasitas dan Efektivitas Layanan	%	100	100	100	6.534.983.050	7.291.886.800	80,00%	94,93%	4721983455	4.482.559.679	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Efektivitas dan Produktifitas Layanan	%	100	100	100	826.950.000	826.950.000					Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan	%	100	100	100	1.518.473.250	1.758.856.250	80,00%	47,15%	328750000	155.014.000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan menyerahkan laporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	1.299.999.101	1.299.999.101	95,00%	98,82%	1.408.695.275	1.392.013.613	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tingkat layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal	%	82	83	83	92.455.951.225	103.527.421.824	83,31%	82,94%	94.251.010.045	91.545.190.037	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Tingkat layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal	%	53	55	55							Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ (M3)	M2	325	5000	M3	1.499.999.859	1.499.999.859	2 tkpsda_ws		2.000.922.920	1.699.436.024	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Meningkatnya Kapasitas dan Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi (OPD Pengelola Irigasi P3A/GP3A/IP3A, Komisi Irigasi) dalam Pengembangan dan Pengeloaan Irigasi	kab/kota		4	4	2.443.975.379	2.443.989.379	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	1.326.673.012	916.945.500	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
9	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Terbentuknya TKPSDA WS kewenangan provinsi	unit	0	2	2	2.431.435.584,00	2.431.435.584	70,27%	1	73.317.716.201	72.346.817.982	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Kapasitas dan peran kelembagaan TKPSDA WS Kewenangan Provinsi	laporan	0	2	2			1 sistem aplikasi	1 sistem aplikasi			Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Kapasitas dan Peran kelembagaan Forum DAS, dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung	laporan	0	1	1			6 dokumen	7 dokumen			Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
10	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Meningkatnya kemanfaatan infrastruktur pengendali daya rusak air (pengamanan areal pemukiman dan infrastruktur masyarakat)	%	0	25	25	84.349.323.898	98.032.603.769	70,27%	1	73.317.716.201	72.346.817.982	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya Air serta tercapainya peningkatan ketrampilan SDM	aplikasi	0	1	1	14.740.354.476	12.406.624.476	1 sistem aplikasi	1 sistem aplikasi	5.208.642.203	4.719.356.183	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah	dokumen	0	70	70	7.657.483.113	8.573.376.538	50 dokumen		2.086.774.366	1.973.658.790	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang	Perda/Pergub	0	1	1							Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	40	50	50							Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
13	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kapasitas Penataan dan pengembangan sarana prasarana permukiman pada Kawasan Strategis Nasional/Provinsi	dokumen	0	2	2	6.687.971.425	6.399.015.925	0 KSN/ 0 KSP	1 KSN/ 3 KSP	797.859.836	733.182.886	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
14	Program pembangunan pengelolaan persampahan	Dokumen Perencanaan	dokumen	4	1	1	42.134.300.657	-	100,00%	100,00%	13.314.000	13.314.000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Terbangunan TPA Regional	unit	0	1	0							Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
15	Program Pembinaan dan Pengembangan Bangunan Gedung	Kapasitas Pembinaan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Negara	%	0	10	10	82.163.320.000	6.021.414.695	3 Dokumen	5 Dokumen	796.124.360	526.126.500	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
16	Program Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	meter	251	256	256	6.454.943.950	-	254,560 M	254,560 M	92559060	83.492.740	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
17		Cakupan Layanan Air Minum Layak	%	77	89	89	42.134.300.657	51.468.156.624	76,95%	73,87%	1.645.224.926	1.215.288.250	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
	Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Akses Minum Perpipaan	%	32	33	33							Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang
		Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Sambungan Rumah(SR)	29	29	29							Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman													
75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	82,69	3.928.417.315	3.248.225.435	100%	100%	4.219.707.848	3.532.167.996	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
76	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	83,20	1.376.421.650	1.145.170.748	80%	100%	1.870.687.100	1.530.475.452	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
77	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	98,90	62.400.000	61.714.950					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
78	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	98,55	254.050.000	250.362.500	80%	100%	156.398.500	156.398.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
79	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	85,37	622.612.000	531.545.245	100%	100%	417.945.550	324.041.550	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
80	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	unit	0	3000	3.491	52.030.385.625	37.343.625.843	2.666	482	18.639.457.975	14.932.182.245	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
81	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0	135	95,07	40.253.596.372	38.269.202.340	135	28,40%	9.856.073.036	9.439.629.195	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
82	Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	%	NA	92,72	94,10	20.394.539.705	19.624.104.305	93,22%	96%	13.493.512.309	13.258.492.150	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
Badan Kesatuan Bangsa, Politik													
83	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	60	12	12	3.343.000.740	2.524.965.923	12 bulan	12 bulan	2.748.100.566	1.948.366.754	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
84	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	60	12	12	1.259.966.000	921.291.345	12 bulan	12 bulan	1.830.033.100	1.440.188.104	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
85	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	orang	73	71	71	99.980.000	52.440.000	73 orang	68 orang	285.977.660	271.339.400	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
86	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	bulan	60	12	12	394.999.700	231.627.300	12 bulan	12 bulan	55.800.000	4.600.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
87	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan	dokumen	25	5	2	431.630.647	261.805.300	5 Dokumen	3 Dokumen	238.389.850	201.970.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
88	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	%	63	64	60	3.213.186.669	1.736.042.251	64%	64%	246.305.250	145.926.099	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
89	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	0	100	75	1.874.967.205	1.381.640.441	100%; 1300 Orang	75%	246.037.650	114.208.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
90	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	%	13	9	5	3.843.092.465	1.736.042.251	peringkat 9	75%	283.884.400	168.504.388	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
91	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Pertambahan Ormas	%	160	20	16	5.092.214.896	2.947.534.220	100%; 20 Ormas	75%	417.644.800	332.452.020	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Satuan Polisi Pamong Praja													
92	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	81	81	12.548.000.000	12.548.000.000	83	83	14.430.200.000	10.458.036.120,00	Satuan Polisi Pamong Praja
93	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	68	68	229.840.629.960	229.840.629.960	98%	93,69%	10.458.036.120	9.798.262.437	Satuan Polisi Pamong Praja
94	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	orang	0	95	95	1.750.000.000	1.750.000.000	95%	63,96%	16.380.189.350	10.475.993.762	Satuan Polisi Pamong Praja
95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Kali	0	95	95	19.650.000.000	19.650.000.000	100%	98,50%	443.886.250	322.697.863	Satuan Polisi Pamong Praja
96	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	Dokumen Laporan	0	32	32	3.100.000.000	3.100.000.000	100%	50%	348.340.000	329.810.000	Satuan Polisi Pamong Praja
97	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Persentase Terpeliharanya Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur	%	NA	95	95	57.908.900.000	57.908.900.000	65%	93,81%	5.851.503.782	5.489.426.160	Satuan Polisi Pamong Praja
98	Program Peningkatan Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	%	33	45	45	7.240.000.000	7.240.000.000	20%	99,11%	332.570.700	329.598.200	Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
99	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	12	12	12	4.452.263.310	3.895.863.264	100%	93,29%	3.312.188.866	3.089.845.514	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	paket	10	10	5	4.107.619.650	2.920.000.000	100%	81,41%	519.298.827	422.770.547	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
101	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	orang	70	74	74	81.000.000	81.000.000	0%	0%	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
102	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	orang	55	65	40	859.873.000	379.240.325	100%	78,95%	26.016.000	20.538.742	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
103	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	laporan	12	12	12	1.918.953.445	1.748.182.219,00	100%	68,38%	444.996.250	304.278.637	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
104	Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	kab/kota	33	33	33	7.055.792.910	401.813.100	100%	96,74%	1.958.198.925	1.894.348.965	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
105	Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya Upaya Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Sumatera Utara	kab/kota	33	100	88,32	6.701.411.700	5.495.448.015	100%	97,46%	6.367.267.262	6.205.403.713	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
106	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab/Kota	kab/kota	2	2	2	3.720.464.097	3.219.622.547	100%	63,71%	918.207.400	585.034.086	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
107	Program Penguatan Kelembagaan Bencana	Meningkatnya Peran Lembaga dalam Penanggulangan Bencana di Provsu	%	50	100	75	1.927.781.250	1.396.625.441	100%	96,03%	545.183.250	523.561.109	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial													
Dinas Sosial													
108	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	0	12	12	28.817.738.902	27.024.647.168	-		23.915.212.646	13.397.654.578	Dinas Sosial
109	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	0	12	12	1.879.293.969	1.694.397.495	36		656.813.715	381.771.669	Dinas Sosial
111	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	bulan	0	12	12	147.295.000	-	100%		-	-	Dinas Sosial
112	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh ketrampilan dan bantuan usaha dalam mencapai keluarga sejahtera	Kepala Keluarga (KK)	0	186	143	600.282.800	428.482.800	3897 (63 KK)		116.672.000	73.044.000	Dinas Sosial
113	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat melaksanakan dan mengembangkan hidupnya sesuai dengan fungsi sosialnya	Persen	0	2,46	2.440	4.937.101.808	4.356.855.611	2.403	23,76	3.776.430.090	1.646.192.082	Dinas Sosial
114	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang didayagunakan sesuai dengan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial	Kegiatan/Oran g	0	241	141	555.271.100	476.940.800	451	350	621.950.250	423.801.828	Dinas Sosial

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
116	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah korban bencana dan keluarga miskin yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidupnya	Kegiatan/Oran g	0	366	366	485.313.050	467.275.050					Dinas Sosial
117	Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kab/Kota yang terlibat didalam mekanisme kelembagaan, Sistem Kerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Kegiatan/Kota / Bulan	0	8	8	813.198.400	752.666.020					Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Tenaga Kerja													
Dinas Tenaga Kerja													
118	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	0	12	12	4.349.864.361	4.349.864.361	1 Tahun	12 bulan	4.835.854.425	4.457.848.885	Dinas Tenaga Kerja
119	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	0	12	12	3.338.754.233	3.338.754.233	1 Tahun	12 bulan	1.116.186.800	1.279.276.725	Dinas Tenaga Kerja
120	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	bulan	0	12	12	0	0					Dinas Tenaga Kerja
121	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	bulan	0	12	12	390.998.844	390.998.844	1 Tahun	9 bulan	153.847.350	135.507.250	Dinas Tenaga Kerja
122	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	bulan	0	12	12	911.059.335	911.059.335	1 Tahun	12 bulan	647.473.600	550.978.502	Dinas Tenaga Kerja
123	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3	Persen	5,99	7,49	7,49	2.483.643.710	2.483.643.710	29,41%	28,27%	1.682.475.718	1.617.120.529	Dinas Tenaga Kerja
124	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase masyarakat transmigran yang dilayani	Persen	67,44	67,5	67,5	419.997.537	419.997.537	85,37%	99,71%	90.514.250	90.255.350	Dinas Tenaga Kerja
125	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	Persen	0,4	0,12	0,12	2.014.996.360	2.014.996.360	0,23%	0,22%	1.000.847.957	964.491.317	Dinas Tenaga Kerja
126	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen	0,57	0,9	0,9	1.770.271.982	1.770.271.982	0,18%	0,14%	287.379.900	221.807.050	Dinas Tenaga Kerja

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
127	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	80	48%	2.156.239.888	805.019.733			1.484.989.766	805.050.893	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
128	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	80	22%	929.196.941	61.441.020			251.058.503	167.996.991	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
129	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	80	58%	77.025.000	34.675.000			10.800.000	10.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
131	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	77	52%	113.400.000	10.960.000			44.488.000	41.421.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
133	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kesenjaraan Gender	%	0	76	22%	1.093.523.600	141.216.700			223.041.500	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
134	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan	%	0	80	23%	1.804.148.911	267.776.472			364.370.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
135	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah di semua sektor pembangunan daerah	%	0	76	0%	1.215.889.850	329.112.588			186.783.000	68.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
136	Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	0	75	41%	871.532.000	386.811.906			332274599	136.424.995	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
137	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	%	0	77	32%	2.889.143.810	347.376.220			493.357.007	123.717.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan													
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan													
138	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100	3.730.000.000	3.730.000.000	100	100	8.317.152.960		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
139	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	4.673.936.000	4.673.936.000	100	100	5.702.864.797		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
140	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	tahun	1	1	1	517.000.000	517.000.000	1	1	619.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
141	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	tahun	1	1	1	96.500.000	96.500.000	1	1	192.500.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
142	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	tahun	1	1	1	2.513.000.000	2.513.000.000	1	1	5.499.579.511		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
143	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dan Pencegahan/ Penanggulanga n Penyakit Hewan	Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor peternakan	Poin	112.07	113,65	114,78	76.280.669.703,30	68.717.294.848	114,44	98,74	58.045.443.513	47.119.847.327	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Produksi Daging	Ton	164.496,67	169.775,74	258.090,36			175.551,96	218.083,49			
		Produksi Telur	Ton	180.163,21	186.062.33	541.234,15			191.961,45	470.179,22			
		Produksi Susu	Ton	1.513,44	1.587,56	3.489,84			1.661,68	5.150,72			
144	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Diversifikasi Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89,1	90,4	89,60	9.276.090.642	68.717.294.848	92,3	83,77	5.285.114.951	5.183.459.141	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Lingkungan Hidup													
Dinas Lingkungan Hidup													
145	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100	9.917.219.619	9.917.219.619	100,00%	92,86%	4.604.942.484	4.266.309.394	Dinas Lingkungan Hidup
146	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	4.818.224.000	4.818.224.000	100,00%	91,67%	547.305.850	424.910.357	Dinas Lingkungan Hidup
147	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	100	499.925.000	499.925.000	100,00%	100,00%	149.640.000	149.278.800	Dinas Lingkungan Hidup
148	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	100	1.050.612.550	1.050.612.550	100,00%	67,43%	180.714.886	169.654.886	Dinas Lingkungan Hidup
149	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	1.852.430.100	1.852.430.100	100,00%	99,31%	550.408.400	546.334.350	Dinas Lingkungan Hidup
150	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan hidup	%		82	82	4.377.324.944	4.377.324.944	60,00%	51,76%	7.894.480.890	7.846.013.406	Dinas Lingkungan Hidup
151	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%		80	80	6.984.824.162	6.984.824.162	100,00%	88,67%	264.036.818	261.087.878	Dinas Lingkungan Hidup
		Penurunan Tingkat pencemaran air	%	71	71	71	12.278.209.124	12.278.209.124	70,00%	63,70%	311.253.200		Dinas Lingkungan Hidup
		Penurunan Tingkat Pencemaran udara	%	81	81	81	696.967.750	696.967.750	78,00%	41,86%	212.405.000		Dinas Lingkungan Hidup

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
152	Program Pengendalian Pencemaran	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang- undangan lingkungan hidup	%	100	100	100	1.482.826.000	1.482.826.000	82,00%	80,42%	995.036.844	305.038.384	Dinas Lingkungan Hidup
	dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	80	80	80	1.385.893.350	1.385.893.350	60,00%	40,80%	3.411.188.319		Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang- undangan	Ton	35	35	35	1.077.239.950	1.077.239.950	80,00%	60,00%	1.183.977.000		Dinas Lingkungan Hidup
153	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui implementasi 3R	%	20	20	20	11.578.303.451	11.578.303.451	22,00%	19,64%	2.115.803.200	1.832.573.264	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
154	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	83	3.928.417.315	5.407.990.834	100	95	4.638.474.652	1.642.893.874	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
155	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	82	82	1.000.000.000	1.000.000.000	5 unit	99	238.006.000	39.513.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
156	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	82	82	232.201.205	232.201.205	1	92	219.798.700	135.680.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
157	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	82	82	50.000.000	50.000.000	1 tahun	20	140.941.500	4.250.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
158	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	82	82	157.968.700	157.968.700	1	95	96.227.951	30.400.150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
159	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	%	0	100	100	2.425.737.996	2.425.737.996	100	93	2.180.958.670	898.173.631	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
160	Program Pembinaan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan	%	0	89	89	1.390.900.000	1.390.900.000	100	98	720.619.847	617.028.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
161	Program Pembinaan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil	%	0	47	47	795.201.220	795.201.220	100	96	481.575.850	424.056.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
162	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	0	100	100	1.675.000.000	1.675.000.000	100	97	1.206.752.570	445.442.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
163	Program Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	%	0	25	25	1.415.000.000	1.415.000.000	100	98	902.159.006	175.773.290	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
164	Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Kesadaran Stake Holder terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	0	100	100	450.000.000	450.000.000	100	98	297.894.635	297.894.635	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
165	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	87	100	100	3.133.180.355		100	100	2.968.000.000	3.276.966.241,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
166	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	97	100	100	2.955.673.150		100	100	1.234.000.000	697.975.000,00 (	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
167	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	100	233.000.000		100	100	303.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
168	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	86	100	100	453.950.575		100	100	60.000.000	50.050.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
169	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	49	100	100	271.131.600		100	100	275.000.000	30.155.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
170	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	0	100	100	1.806.186.785		100	100	5.031.399.750	250.535.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
171	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa, keterampilan berusaha masyarakat perdesaan dan akses masyarakat terhadap informasi serta menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	%	79	100	100	4.242.170.500		100	100	3.855.000.000	279.924.989,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
172	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kemampuan SDM aparatur Desa dalam Menajemen Pemerintah Desa	%	42	100	100	3.323.278.500		100	100	3.261.950.000	504.970.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
173	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkat partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka membangun desa	%	90	100	100			100	100	2.611.650.250	1.937.170.575,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
174	Program Pembangunan Kawasan Pedesaan	Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga ekonomi, sosial dan budaya baik formal maupun non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kehidupan masyarakat di daerah tertinggal	%	0	100	100	3.924.725.800		100	100	4.900.000.000	109.765.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
173	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	98	98	1.540.713.472	1.540.713.472	90%	85%	3.985.656.000	910.561.632	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
174	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	76	76	462.927.936	462.927.936	90%	67%	2.276.655.000	150.114.853	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
175	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	82	82	205.266.000	205.266.000	95%	50%	263.580.000	69.735.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
176	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	92	92	138.019.600	138.019.600	95%	45%	452.999.000	1.800.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
177	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	90	90	374.999.904	374.999.904	90%	60%	27.998.000	5.775.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
178	Program Penguatan Pemberdayaan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	RS	0	59	59	330.000.000	330.000.000	90%	40%	3.012.898.000	291.584.069	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			%	0	43	43	210.000.000	210.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Keluarga Sejahtera dan Berencana	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	0	3	3	155.000.000	155.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	0	54	54	340.000.000	340.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
179	Program Keluarga Berencana	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	0	19	19	800.000.000	800.000.000	90	50	3.004.790.000	341.753.699	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	0	13	13	700.000.000	700.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0	32	32	800.000.000	800.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	0	48	48	900.000.000	900.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
180	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Grend Design Kependudukan	%	0	5	5	1.350.000.000	1.350.000.000	90	40	3.246.898.000	320.799.150	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan	sektor	0	5	5	2.050.000.000	2.050.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerjasama	0	1	1	700.000.000	700.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
181	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kepndudukan dan KB		%	0	1	1	450.000.000	450.000.000	90%	10%	600.000.000	93.481.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan													
Dinas Perhubungan													
182	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%	0	95	86,50	7.283.316.957	7.514.171.260	96	96	7.883.209.262	8.656.076.312	Dinas Perhubungan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
183	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	95	86,11	1.619.580.250	842.464.500	96	96	1.488.865.750	2.056.365.050	Dinas Perhubungan
184	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	95	83,58	428.750.000	358.345.000	96	96	663.300.000	633.299.860	Dinas Perhubungan
185	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	95	67,39	512.129.058	465.573.400	96	96	520.129.058	585.128.557	Dinas Perhubungan
186	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	95	65,25	460.234.780	300.311.800	96	96	809.621.780	507.334.950	Dinas Perhubungan
187	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	%	0	40	42,08	1.986.700.399	1.118.895.876	50	50	2.135.071.349	5.717.917.046	Dinas Perhubungan
188	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana perhubungan	%	0	0	0	0	-	0	0	0	38.588.922.990	Dinas Perhubungan
189	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	%	0	90	73,19	1.551.719.870	1.191.294.450	92	92	882.637.850	2.493.874.349	Dinas Perhubungan
190	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	%	0	0	0	0	-	0	0	4.314.320.000	4.130.454.575	Dinas Perhubungan
191	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas		%	0	30	74,69	11.370.241.866	3.745.539.466	40	40	7.715.043.031	7.548.657.097	Dinas Perhubungan
192	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor dan kualitas lingkungan hidup	%	0	40	97,38	1.778.447.740	1.877.952.900	50	50	2.587.801.920	2.615.292.880	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika													
Dinas Komunikasi dan Informatika													
193	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	95	81,18	3.590.605.814	256.147.102	12 bulan		1.727.388.245	1.643.682.656	Dinas Komunikasi dan Informatika
194	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	90	81,18	3.604.119.776	256.147.102	12 bulan		2.199.269.159	2.136.515.701	Dinas Komunikasi dan Informatika
195	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	90	95,20	404.230.000	76.800.000	12 bulan		7.800.000	7.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
196	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	85	48,44	295.706.000	75.922.000	12 bulan		18.180.000	17.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
197	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	80	87,56	612.242.095	422.504.360			161.116.642	157.828.950	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
198	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya data Statistik Sektoral	%	0	0	0	0		1 buku	90	897.523.098	393.492.750	Dinas Komunikasi dan Informatika
199	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	0	0	0	0	-	12 bulan	80	4.962.872.013	4.746.804.278	Dinas Komunikasi dan Informatika
200	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan persandian dan keamanan informasi	%	0	0	0	0	-		85	152.344.000	136.648.280	Dinas Komunikasi dan Informatika
201	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	0	0	0	0	-		85	3.144.119.843	3.081.745.504	Dinas Komunikasi dan Informatika
202	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga	Terwujudnya pelayanan informasi kemitraan	%	0	96	81,45	5.845.148.603	4.982.563.239					Dinas Komunikasi dan Informatika
203	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terwujudnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas	%	0	98	74,50	12.484.269.700	8.330.386.488					Dinas Komunikasi dan Informatika
204	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya kepastian legal yg menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to tell)	%	0	90	86,20	4.554.167.500	3.032.847.232					Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													
205	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	90	4.665.899.369	3.374.162.650	100	93	4.890.892.724	3.505.395.894	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
206	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	99	90	649.905.250	621.468.750	99	90	1.100.030.800	756.050.839	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
207	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	99	95	525.194.896	481.807.396	99	0	0	0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
208	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	99	95	192.830.000	156.600.000	99	40	159.300.000	37.650.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
209	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100	1.617.923.631	1.345.178.876	100	100	1.184.510.050	626.580.500	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
210	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Produk Koperasi Yang Berdaya Saing	unit	0	5	5	709.773.990	683.409.790	0	0	359.814.000	346.050.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Produk KUKM Yang Berdaya Saing	unit	0	7	7			1	1			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
211	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM	orang	0	3,668	3,668	8.357.727.018	7.950.916.471	300	300	1.965.990.500	1.965.990.500	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
212	Program Pengembangan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	unit	0	6,624	6,624	13.552.325.257	12.360.997.086	12.175	12.175	4.540.800.975	3.667.512.191	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif	unit	0	2.860.248	2.860.248			2.860.828	2.860.828			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
213	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif	%	0	5	5	4.540.016.675	3.946.191.610	8	8	556.659.975	478.986.823	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal													
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu													
214	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	24	12	94	3.480.000.000	257.252.100	12	12	3.515.175.000	2.439.264.997	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
215	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	tahun	2	1	81	4.000.000.000	161.489.665	1	1	1.890.000.000	890.764.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
216	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	tahun	2	1	35	335.000.000	52.750.000	1	1	440.000.000	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
217	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	tahun	2	1	97	1.485.000.000	109.150.000	1	1	400.000.000	8.722.735	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
218	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	tahun	2	1	93	1.370.000.000	231.516.244	1	1	810.000.000	74.541.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
219	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Misi Investasi yang diikuti baik di tingkat nasional maupun internasional	tahun	2	1	97	7.805.000.000	2.637.415.053	1	1	4.868.825.000	69.197.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
220	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Jumlah Kab/Kota yang memiliki data potensi dan peluang investasi	tahun	2	1	28	1.125.000.000	99.200.000	1	1	800.000.000	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
221	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Capaian Target Lama Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan sesuai target Renstra	%	70	75	93	7.165.000.000	1.420.797.906	78	78	3.026.000.000	907.384.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
222	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor di Sumatera Utara guna mendukung terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja	tahun	2	1	93	3.250.000.000	433.564.670	1	1	875.000.000	33.061.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olah Raga													
Dinas Pemuda dan Olah Raga													
223	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%	0	100	100	18.880.956.530	18.880.956.530	100,00%	99,34%	24.033.233.296	19.138.574.106	Dinas Pemuda dan Olah Raga
224	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio Luas Kantor/Jumlah Aparatur	%	0	100	100	10.939.574.170	10.939.574.170	100,00%	90,88%	13.372.584.970	12.153.031.240	Dinas Pemuda dan Olah Raga
225	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai	%	0	100	100	344.300.000	344.300.000					Dinas Pemuda dan Olah Raga
226	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Dokumen/ Laporan yang Mampu Disusun Secara Mandiri Tepat Waktu	%	0	100	100	2.045.177.934	2.045.177.934	100,00%	56,52%	152.821.000	89.760.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
227	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan	%	0	100	100	2.578.084.620	2.578.084.620	100,00%	91,28%	871.631.600	795.592.800	Dinas Pemuda dan Olah Raga
228	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemuda Trampil	%	0	100	100	4.641.247.850	4.641.247.850	62,00%	84,79%	1.222.444.550	1.036.504.816	Dinas Pemuda dan Olah Raga
229	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Jumlah Atlet, Pelatih, dan Wasit dalam Mengikuti Event Olahraga	%	0	100	100	20.770.340.190	20.770.340.190	90,00%	98,59%	469.859.850	463.251.850	Dinas Pemuda dan Olah Raga
230	Program Pengelolaan Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang Disediakan	%	0	100	100	79.405.104.734	79.405.104.734	75,00%	90,27%	242.939.787.971	219.310.497.746	Dinas Pemuda dan Olah Raga
231	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Meningkatnya Jumlah Pemuda yang Mengikuti pelatihan keterampilan bidang usaha	%	0	100	100	10.045.372.100	10.045.372.100	73,00%	98,08%	458.727.900	449.927.900	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
232	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya Organisasi Keolahragaan Atlet dan Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Olahraga	%	0	100	100	4.489.463.880	4.489.463.880	75,00%	81,87%	7.920.357.296	6.484.244.311	Dinas Pemuda dan Olah Raga
233	Program Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Kebakatan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan, Pembinaan Sentra dan Kebakatan Olahraga	%	0	100	100	1.821.756.288	1.821.756.288	91,00%	91,23%	699.854.750	638.503.163	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kebudayaan													
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata													
234	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%	0	100	100	9.943.686.010	9.943.686.010	100	100	10.749.000.000	7.944.026.227	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
235	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	82	82	12.393.251.705	12.393.251.705	82	82	10.362.000.000	2.246.466.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
236	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	99	99	199.955.000	199.955.000	99	99	361.000.000	161.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
237	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	98	98	99.910.000	99.910.000	98	98	370.000.000	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
238	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	98	98	471.722.120	471.722.120	98	98	465.000.000	464.999.840	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
239	Program Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	8,15	8,56	8,56	5.865.989.250	5.865.989.250	8,99	8,99	11.240.000.000	2.479.390.826	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
240	Program Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Sumut	orang	0	280.000	280.000	25.450.849.988	25.450.849.988	300.000	300.000	19.133.000.000	14.138.023.308	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
241	Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah Kerjasama dengan Stakeholder Budaya dan Pariwisata	Kerjasama	0	1	1	3.448.106.702	3.448.106.702	1	1	2.510.000.000	580.722.550	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
242	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase SDM Industri Pariwisata yang kompeten	%	0	70	70	6.300.000.000	6.300.000.000	75	75	5.200.000.000	1.371.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
243	Program Pengembangan Nilai	Jumlah Penyeleng garaan Festival Seni dan Budaya	Kali	0	21	21	9.963.187.130	9.963.187.130	22	22	14.340.000.000	1.604.169.863	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Budaya	Jumlah Sanggar seni dan Lembaga Budaya yang dibina	unit	0	65	65	0	0	65	65			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
244	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	0	9	9	10.658.279.690	10.658.279.690	10	10	16.575.000.000	5.935.062.556	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perpustakaan													
Dinas Perpustakaan dan Arsip													

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
245	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	3.245.737.450	3.245.737.450	100	100	3.834.503.000	3.231.794.691,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
246	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	2.879.341.982	2.879.341.982	100	100	3.224.863.630	431.471.321,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
247	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100	187.760.000	187.760.000	100	100	157.505.000	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
248	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	100	496.927.270	496.927.270	100	100	637.763.000	230.194.864,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
249	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100	92.941.300	92.941.300	100	100	204.094.500	12.450.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
250	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya Program Pengembangan Budaya Baca, Pembinaan Perpustakaan dan Peningkatan Layanan Bagi Pengunjung Perpustakaan	Perp, Eks, Kegiatan, Orang	0	34	34	12.904.238.640	12.904.238.640	40	40	15.244.000.000	2.636.435.772,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
251	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	%	0	4	4	862.141.675	862.141.675	5	5	1.168.956.270	245.906.664,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
252	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi yang sesuai Standard Pelayanan	orang	0	31	31	806.103.830	806.103.830	32	32	1.578.224.000	121.246.688,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
Kelautan dan Perikanan													
Dinas Kelautan dan Perikanan													
253	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	7.237.916.805		12 Bulan	12 Bulan	5.102.053.662	4.963.913.833	Dinas Kelautan dan Perikanan
254	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	1.024.924.767		12 Bulan	12 Bulan	105.414.579	96.795.550	Dinas Kelautan dan Perikanan
255	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100	0						Dinas Kelautan dan Perikanan
256	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	100	225.398.278		1 tahun	1 tahun	35.339.000	22.909.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
257	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100	4.418.883.307		1 Tahun	1 Tahun	1.914.662.842	1.798.677.779	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
258	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani	Hektar	0	50,65	50,65	4.308.212.062		35750	35750	845.166.586	828.371.316	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani	Hektar	0	3,8	3,8	0		2500	2500			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani	Hektar	0	1	1			1500	1500			Dinas Kelautan dan Perikanan
259	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	Ton	0	237,222	237,222	13.454.899.318		244339,00	227235,20	4.441.038.715	4.302.184.319	Dinas Kelautan dan Perikanan
260	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	0	544,233	544,233	23.731.358.014		560559,50	420419,65	2.630.830.948	2.564.130.084	Dinas Kelautan dan Perikanan
261	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kapital/ tahun	0	44	44	4.244.701.107		45,57	44,15	1.077.284.334	984.467.720	Dinas Kelautan dan Perikanan
262	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Patroli pengawasan (kali)	Kali	0	0	0	4.996.706.341		20	20	1.231.347.450	1.131.559.755	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Patroli pengawasan (kali) 1.Laut	Kali	0	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan						
		Patroli pengawasan (kali) 2. Perairan Umum (danau Toba)	Kali	0	2	2	Dinas Kelautan dan Perikanan						
263	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan	Patroli pengawasan (kali)	Kali	0	0	0							Dinas Kelautan dan Perikanan
		Patroli pengawasan (kali) 1.Laut	Kali	0	12	12					Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Patroli pengawasan (kali) 2. Perairan Umum (danau Toba)	Kali	0	2	2					Dinas Kelautan dan Perikanan		
264	Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani	Hektar	0	50,65	50,65	0				0		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani	Hektar	0	3,8	3,8						Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani	Hektar	0	1	1						Dinas Kelautan dan Perikanan	
265	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar	Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	Ton	0	237,222	237,222					0		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan kegiatan	Meningkatnya Luas Kawasan Mangrove yang tertangani	Hektar	0	50,65	50,65							Dinas Kelautan dan Perikanan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
266	budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Meningkatnya luas Kawasan Konservasi yang tertangani	Hektar	0	3,8	3,8						0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya luas Kawasan Rehabilitasi yang tertangani	Hektar	0	1	1							Dinas Kelautan dan Perikanan
Pertanian													
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura													
267	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100	18.190.491.273	18.190.491.273	100	100	18.990.491.273	15.334.949.588	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
268	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	11.257.139.446	11.257.139.446	100	100	13.257.139.446	2.038.353.400	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
269	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	100	0	0	100	100	1.000.000.000	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
270	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	100	1.995.391.097	1.995.391.097	100	100	3.995.391.097	1.733.453.900	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
271	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	2.209.986.535	2.209.986.535	100	100	3.109.986.535	1.617.311.618	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
272	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi tanaman hortikultura	%	0	6	6	27.790.049.280	27.790.049.280	3	3	30.974.750.720	18.446.364.085	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
273	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Meningkatkan Produksi tanaman Pangan	%	0	5	5	23.999.444.992	23.999.444.992	2	2	28.604.600.320	7.160.752.414	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
274	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pertanian	%	0	75	75	48.565.972.992	48.565.972.992	80	80	50.155.999.232	34.327.191.616	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
275	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman	Meningkatnya Luas serangan OPT yang dikendalikan	Hektar	0	29,013	29,013	990.000.000	990.000.000	27,17	27,17	3.128.000.000	1.306.444.070	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
276	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		%	0	0	0	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0	2.895.000.064	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
277	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani	%	0	95	95	22.786.875.392	22.786.875.392	95	95	34.778.251.264	9.780.204.737	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
278	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Meningkatnya Nilai Tambah Usaha tani dan Akses Permodalan	%	0	5	5	5.654.585.344	5.654.585.344	5	5	5.747.087.872	957.770.950	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Perkebunan													

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
279	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	5.134.429.094	5.134.429.094	100%	92,05%	3.393.944.259	3.124.041.308	Dinas Perkebunan
280	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	76	76	2.873.641.157	2.873.641.157	76%	98,66%	850.262.864	838.837.072	Dinas Perkebunan
281	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	96	96	429.174.540	429.174.540	96%	99,89%	168.312.100	168.132.800	Dinas Perkebunan
282	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	97	97	1.058.645.850	1.058.645.850	97%	95,80%	437.465.550	419.079.369	Dinas Perkebunan
283	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	97	97	1.726.425.675	1.726.425.675	97%	98,35%	542.251.801	533.283.600	Dinas Perkebunan
284	Program Peningkatan Produksi , Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	0	3%	3,74%	35.497.334.767	35.497.334.767	3%	2,36%	11.012.160.932	10.077.183.776	Dinas Perkebunan
Kehutanan													
Dinas Kehutanan													
285	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100	10.916.476.670	8.187.634.988	100	100	6.945.791.454	6.142.708.351	Dinas Kehutanan
286	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	55	55	55	11.491.181.600	9.971.494.084	56	55	769.807.462	515.326.738	Dinas Kehutanan
287	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	98	98	98	200.000.000	172.623.900	98	98	672.020.000	609.360.900	Dinas Kehutanan
288	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Tingkat Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	%	0	0	0	0	0	20	20	0	0	Dinas Kehutanan
289	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	80	80	80	1.234.000.000	933.066.265	81	81	16.705.150	12.500.000	Dinas Kehutanan
290	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	990.253.598	829.763.200	100	100	248.513.700	208.573.100	Dinas Kehutanan
291	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Cakupan Penerimaan PNPB	%	100	100	100	1.550.226.990	1.550.226.990	100	100	1.562.339.150	1.009.969.560	Dinas Kehutanan
292	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Cakupan Paket Layanan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Hutan	%	100	100	100	8.959.668.542	3.528.823.182	100	100	2.501.789.900	1.268.112.524	Dinas Kehutanan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
293	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan	%	55	55	55	4.668.575.420	4.105.331.044	56	56	10.392.910.416	6.566.174.133	Dinas Kehutanan
294	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	35	35	35	14.098.072.400	5.254.635.224	36	36	1.865.419.720	1.024.286.955	Dinas Kehutanan
295	Program Pembinaan dan Penertiban Pemanfaatan Hasil Hutan	Cakupan Penerimaan PNPB	%	100	100	100	1.239.656.990	1.008.093.368	100	100	1.009.969.560	825.171.650	Dinas Kehutanan
296	Program Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Cakupan Tertib Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan	%	60	61	61	3.014.159.360	2.088.798.498	62	62	1.036.886.350	771.036.785	Dinas Kehutanan
297	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Persentase Tertib Luas Perhutanan Sosial dan Kemitraan yang terkelola dengan baik	%	30	30	30	4.843.663.300	3.527.622.700	31	31	1.860.323.000	520.090.384	Dinas Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral													
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral													
298	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	88%	4.470.333.745	98.086.358	75%	78%	3.983.220.962	3.804.387.163	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
299	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	60	70	80%	3.998.217.700	27.400.000	75%	80.08%	2.650.177.260	2.597.098.408	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
300	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	60	65	87%	564.481.600	349.718.000	5%	40.01%	24.200.000	19.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
301	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	60	65	70%	479.703.000	25.561.000	0 Orang/30%	80%	143.980.500	143.980.500	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
302	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	95%	905.469.300	9.600.000	20%	74.03%	397.135.550	385.142.750	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
303	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi Dan Air Tanah	Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral geologi dan air tanah	%	40	50	89%	18.699.045.210	887.021.000	20%	32%	2.000.724.313	1.977.629.904	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
304	Program Pengembangan Pelayanan	Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan	%	7	17	17	12.272.857.000	757.708.896	6%	12%	9.243.184.404	9.093.956.351	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Energi Baru Dan Terbarukan	Jumlah Infrastruktur energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang dibangun	unit	1,892	601	601			162 unit	133 unit			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
305	Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Mineral dan BatuBara	Persentase rekomendasi/persetujua n teknis perizininan mineral dan batubara	%	80	100	82%	1.802.979.030	25.769.300	20%	85%	335.616.050	326.882.726	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
306	Program Pembinaan dan	Persentase pemegang IUP yang menyampaikan laporan dengan baik	%	5	20	20	2.296.444.950	36.671.000	20%	77%	543.560.492	528.976.692	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengawasan Mineral dan BatuBara	Persentase pemegang IUP yang menempatkan jaminan reklamasi/pasca tambang	%	5	20	20			20%	77%			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
307	Program Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Meningkatkan Pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara	%	40	50	70%	703.125.000	49.407.000			88.565.000	86.439.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
308	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	%	40	50	88%	1.765.974.325	35.124.000			263.101.238	261.569.238	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Beban puncak	MW	1,893	2,009	2,009	2.960.480.740	74.483.452	2219 MW	1859 MW	591.783.000	584.539.700	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Daya listrik terpasang	MW	3,427	4,244	4,244			0,300	0,690			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Reserve Margin (Cadangan Daya Listrik)	%	23	30	30			300 RT	300 RT			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Konsumsi Listrik Perkapita	KWH	1,004	1,029	1,029			1053,99 KWH	4981,6 MW			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
310	Program Pemanfaatan Energi	Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan	%	7	17	17	247.521.750	19.558.000			29.052.500	28.900.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Peningkatan Persentasi Lifting (Volume produksi yang terjual) Minyak dan Gas	%	65	75	75							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
311	Program Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Energi	Peningkatan Persentasi Energi Baru dan Terbarukan	%	7	17	17	1.407.570.800	19.558.000			112.764.412	112.764.412	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Penurunan Intensitas Energi Primer	%	0	1	1							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
312	Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	Rasio Elektrifikasi	%	99	99,9	97%	1.887.795.850	757.708.896	100	95	949.339.471	949.312.471	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan													
Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
313	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	65%	4.724.150.000	2.968.992.386	100%	82%	4.086.246.991	3.349.080.639	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
314	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	59%	3.155.450.000	894.633.662	100%	59%	1.202.917.588	705.114.292	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
315	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100%	223.000.000	149.100.000	100%	92%	175.000.000	160.635.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
316	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	81%	557.500.000	275.701.480	100%	45%	133.055.450	59.341.645	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
317	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	67%	2.453.000.000	1.489.744.059	100%	72%	1.054.290.125	756.952.049	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
318	Program Penataan Struktur Industri	Nilai PDRB Industri Pengolahan Sumatera Utara (Harga Berlaku)	Rp. Triliun	0	146	72%	1.170.750.000	636.493.660	100%	90%	426.868.750	382.890.020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
319	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	IKM yang menerima bantuan peralatan dan/atau sosialisasi teknologi industri	IKM	70	80	81%	892.000.000	442.416.810	100%	79%	172.546.200	135.819.650	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
320	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Penanganan sengketa konsumen melalui BPSK	Kasus	0	130	68%	6.690.000.000	3.715.899.462	100%	93%	3.070.120.357	2.842.471.549	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
321	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		unit	0	61	79%	2.374.950.000	1.306.066.368	100%	104%	949.975.200	984.580.875	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
322	Program Peningkatan kerjasama Perdagangan Internasional	Nilai Ekspor Bersih Sumatera Utara	Rupiah	0	5	47%	1.672.500.000	181.681.705	100%	102%	231.940.345	235.765.365	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
323	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor- Impor	Jumlah SKA yang terbitkan	dokumen	0	52,492	69%	1.115.000.000	3.845.041.680	100%	91%	534.706.557	485.804.165	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
324	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Sumatera Utara	%	0	2	74%	3.233.500.000	1.065.949.740	100%	89%	1.860.398.695	1.657.387.954	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Perencanaan													
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
325	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	8.185.999.872	8.185.999.872	100%	75%	7.140.725.550	3.192.649.758	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
326	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	6.072.000.000	6.072.000.000	100%	75%	581.105.750	503.387.368	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
327	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100	2.190.000.128	2.190.000.128	100%	0%	179.000.000	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
328	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Koordinasi dan Pembinaan tentang Perencanaan Pembangunan	%	0	100	100	450.000.000	450.000.000	100%	0%	Rp 248.456.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
329	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100	21.000.000	21.000.000	100%	0%	Rp 14.200.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
330	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	tingkat kapasitas perencanaan pembangunan daerah	%	0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
331	Program Pengembangan Data dan Informasi	tingkat pengembangan pengolahan data dan informasi	%	0	100	100	2.993.999.872	2.993.999.872	100%	45%	2.271.344.500	552.969.856	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
332	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	persentase Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	0	100	100	300.000.000	300.000.000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
333	Program Perencanaan Penataan Ruang	Persentase Laporan Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang	%	0	100	100	450.000.000		100%	68%	7.442.664.987	1.755.813.219	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
334	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	%	0	100	100	4.600.000.000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan													
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													
335	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	98	98	6.274.427.100	6.274.427.100	98%	68%	4.448.286.990	3.883.085.416	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
336	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	98	98	36.782.564.750	36.782.564.750	98%	82%	2.649.202.750	2.459.076.330	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
337	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya efektivitas dam produktifitas layanan	%	0	98	98	230.701.000	230.701.000	98%	75%	172.100.000	165.450.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
338	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	98	98	2.996.635.493	2.996.635.493	98%	45%	332.801.497	316.017.497	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
339	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	98	98	5.084.242.644	5.084.242.644	98%	70%	2.079.534.450	1.981.440.497	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
340	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kualitas Kapasitas Kelembagaan Meningkatkan	%	0	98	98	165.672.812	165.672.812	98%	56%	12.593.192.570	10.255.256.808	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
341	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	1	98	98	5.592.479.957	5.592.479.957	98%	71%	2.910.044.700	2.405.170.303	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kepegawaian													

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Badan Kepegawaian Daerah													
342	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100	2.234.231.640	2.234.231.640	100	100	2.234.231.640	1.427.831.640,00	Badan Kepegawaian Daerah
343	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	3.687.493.000	3.687.493.000	100	100	3.687.493.000	740.894.716,00	Badan Kepegawaian Daerah
344	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	100	236.850.000	236.850.000	100	100	236.850.000	0	Badan Kepegawaian Daerah
345	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Terselesainya Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	181.371.950	181.371.950	100	100	181.371.950	111.731.500,00	Badan Kepegawaian Daerah
346	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Menyerahkab Laporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	491.715.090	491.715.090	100	100	491.715.090	194.423.420,00	Badan Kepegawaian Daerah
347	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	100	100	100	13.682.656.820	13.682.656.820	100	100	13.682.656.820		Badan Kepegawaian Daerah
348	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah	%	100	100	100	2.027.681.500	2.027.681.500	100	100	2.027.681.500	325.170.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan													
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia													
349	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran	%	0	100	100	6.370.718.876		100	100	6.662.406.170	4.798.184.004,00	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
350	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan Aparatur	%	0	100	100	4.408.679.150		100	100	1.503.787.326	2.811.712.406,00	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
351	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100	234.200.000		100	100	269.330.000	0	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
352	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan	%	0	100	100	2.656.437.685		100	100	3.619.307.426	1.118.322.008,00	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
353	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja Keuangan	%	0	100	100	611.374.025		100	100	242.651.625	32.189.600,00	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
354	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Mewujudkan ASN yang Profesional, Amanah dan Bermartabat	%	0	100	100	14.090.528.331		100	100	21.918.565.761	20.852.908,00	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Penelitian dan Pengembangan													
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah													

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
355	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100	2.420.529.566	2.420.529.566	100%	100%	2.452.189.791	2.350.313.044	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
356	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan	%	100	100	100	2.435.640.000	2.435.640.000	100%	100%	670.900.625	668.515.222	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
358	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	100	350.305.000	350.305.000	100%	71,67%	40.480.000	35.730.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
359	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	419.425.135	419.425.135	100%	100%	211.328.750	210.498.450	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
360	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemanfaatan Hasil Penelitian	%	24	44	44	3.975.003.532	3.975.003.532	20%	20%	441.775.700	441.571.700	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
361	Program Desiminasi Informasi Teknologi	Meningkatnya Kualitas Informasi Teknologi Hasil Penelitian	%	12	24	24	4.001.949.370	4.001.949.370	27%	27%	1.304.646.384	1.282.234.617	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
362	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Penguatan Sistem Inovasi Daerah	%	0	50	50	200.017.655	200.017.655	20%	20%	128.016.500	124.798.500	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah													
Biro Umum dan Perlengkapan													
363	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	20.844.264.275	118.042.500	100	100	26.352.814.080	28.812.339.443,00	Biro Umum dan Perlengkapan
364	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	35.533.322.095	37.749.482.601	100	100	68.339.245.056	30.602.534.881,00	Biro Umum dan Perlengkapan
365	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Efektivitas dan Produktifitas Layanan	%	0	100	100	1.129.500.032	563.500.000	100	100	1.242.450.048	-	Biro Umum dan Perlengkapan
366	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	100	380.500.000	2.333.851.825	100	100	539.000.000	1.125.987.024,00	Biro Umum dan Perlengkapan
367	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	0	100	100	21.260.157.785	31.533.914.756	100	100	25.845.315.584	20.820.696.436,68	Biro Umum dan Perlengkapan
368	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tahun	1	1	1	2.601.703.652	2.601.703.652	1	1	2.368.747.110	855.305.000,00	Biro Umum dan Perlengkapan
369	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	%	0	100	100	7.586.740.800	5.249.358.350	100	100	10.898.575.360	19.920.342.940,00	Biro Umum dan Perlengkapan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
370	Program Pemeliharaan dan pengelolaan Bangunan Gedung Negara	Terpeliharanya dan Terkelolanya Bangunan Gedung Negara Dengan Baik	%	0	100	100	38.170.212.000	12.261.160.450	100	100	34.201.133.056	Biro Umum dan Perlengkapan	Biro Umum dan Perlengkapan
Biro Pemerintahan													
371	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	surat	4,813	4,813	4,813	2.928.361.200		4,813	4,813	2.930.000.000		Biro Pemerintahan
372	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	unit	238	238	238	538.975.000		238	238	539.000.000		Biro Pemerintahan
373	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	orang	78	55	55	0		55	55	0		Biro Pemerintahan
374	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	Buku	65	75	75	109.829.172		100	100	110.000.000		Biro Pemerintahan
375	Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Terfasilitasinya penyelesaian persoalan tanah yg dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dlm mewujudkan	kab/kota	231	198	198	1.039.653.521		198	198	1.050.000.000	119.036.600,00	Biro Pemerintahan
376	Program Kepemerintahan Yang Baik	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelng pemerintahan dan pembangunan	%	1,365	631	631	5.096.194.601		631	631	5.191.000.000	1.356.232.090,00	Biro Pemerintahan
377	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tertatnya wilayah administrasi pemerintahan daerah kab/kota dan provinsi melalui batas wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan	%	322	121	121	2.057.795.563		121	121	2.100.000.000	251.320.600,00	Biro Pemerintahan
378	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tertatnya kepemilikan tanah serta kawasan khusus dan umum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kab/Kota dan Provinsi demi tercapainya pem yg baik	kab/kota	33	33	33	299.983.930		33	33	300.000.000	2.194.400,00	Biro Pemerintahan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Biro Bina Perekonomian													
379	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	78	78	69%	1.311.641.960	49.000.000	79%	74,35%	1062766742	624244350	Biro Bina Perekonomian
380	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	80	50%	31.000.000	15.479.000	81%	69,44%	22950000	6550000	Biro Bina Perekonomian
381	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	80	80	28%	87.950.000	24.884.000	81%	75,00%	51505000	4700000	Biro Bina Perekonomian
382	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	82	82	88%	4.096.591.508		84%	40,21%	1036543510	350085100	Biro Bina Perekonomian
383	Program Pemberdayaan BUMD	Meningkatnya Pemberdayaan BUMD	%	6	6	58%	523.097.555		6 BUMD	33,33%	208331650	56439600	Biro Bina Perekonomian
Biro Sosial dan Kesejahteraan													
384	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	4.717.364.224		100	100	5.189.100.544		Biro Sosial dan Kesejahteraan
385	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	250.000.000		100	100	275.000.000		Biro Sosial dan Kesejahteraan
386	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	100	350.000.000		100	100	385.000.000		Biro Sosial dan Kesejahteraan
387	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100	250.000.000		100	100	275.000.000		Biro Sosial dan Kesejahteraan
388	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Pelayanan Publik Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan	%	0	100	100	3.539.996.672		100	100	3.893.996.288		Biro Sosial dan Kesejahteraan
389	Program Fasilitasi Pembinaan Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Terlaksananya Fungsi Pembinaan terhadap Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan	%	0	100	100	3.440.031.744		100	100	3.784.034.816		Biro Sosial dan Kesejahteraan
390	Program pembinaan keagamaan	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama	%	0	100	100	9.280.903.168		100	100	10.208.993.280	2.671.220.485,00	Biro Sosial dan Kesejahteraan
Biro Organisasi													
391	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	85,27%	1.456.209.590	1.241.713.157	100	88%	649.306.171	569.038.733	Biro Organisasi
392	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	56,34%	78.970.000	44.490.000	100	0%	0	0	Biro Organisasi

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
393	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	0%	5.010.000	0	100	0%	0	0	Biro Organisasi
394	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Meningkatkan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	0	100	62%	3.874.460.344	2.419.830.047	100	96%	1.609.076.871	1.545.684.958	Biro Organisasi
395	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	%	0	100	77%	2.016.541.000	1.547.214.761	100	94%	234.856.493	221.819.789	Biro Organisasi
396	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	0	0	0	0	0	100	84%	12.488.000	10.434.900	Biro Organisasi
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama													
397	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	99	100	100	1.332.338.917	1.332.338.917	100%	53,49%	Rp 1.114.710.433	Rp 694.555.990	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
398	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	10.350.000	10.350.000	100%	0%	Rp 3.000.000	Rp -	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
399	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	150	100	100	173.192.000	173.192.000	100%	104,65%	Rp 106.973.600	Rp 8.732.000	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
400	Program Kepemerintahan Yang Baik	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan LPPD Provsu	%	92	100	100	844.933.200	844.933.200	100%	89%	Rp 669.406.050	Rp 683.780.850	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
401	Program Pembinaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Kewenangan Pusat dan Provinsi di Daerah serta lancarnya pelaksanaan Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	5.362.956.778	5.362.956.778	100%	68,79%	Rp 4.148.687.100	Rp 806.702.394	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Biro Administrasi Pembangunan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah													
402	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	830.000.000	36.116.594.899	100	100	913.000.000	1.055.706.670	Biro Administrasi Pembangunan
403	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	20.000.000	37.749.482.601	100	100	22.000.000	-	Biro Administrasi Pembangunan
404	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	100	1.500.000.000	2.333.851.825	100	100	1.650.000.000	112.500.000	Biro Administrasi Pembangunan
405	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100	3.750.000.000	2.717.306.425	100	100	4.125.000.000	2.151.132.164	Biro Administrasi Pembangunan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
406	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase perkembangan pengguna Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	%	0	100	100	1.510.200.000	11.996.412.349	100	100	1.661.220.000	2.151.132.164	Biro Administrasi Pembangunan
407	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya berbagai Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsu dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsu di Dalam dan Luar Negeri	%	0	100	100	4.760.000.000	31.533.914.756	100	100	5.236.000.000	2.840.415.736	Biro Administrasi Pembangunan
Biro Hukum													
404	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	67,2%	1.323.904.200	664.108.644	100	100	1.462.332.704		Biro Hukum
405	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	50	0%	114.950.000	6.450.000	50	50	127.744.000		Biro Hukum
406	Program Perencanaan Hukum	Tersusunnya produk hukum Provinsi Sumatera Utara yang terarah terkoordinasi dan terpadu	%	0	100	88,7%	784.171.500	111.056.000	100	100	878.272.080	440.251.450,00	Biro Hukum
407	Program Pembinaan Peraturan Daerah	Tersebarluasnya produk hukum Daerah Provsu dan terwujudnya penyusunan Ranperda Provsu dan Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan umum dan Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya	%	0	100	96%	992.555.850	115.715.400	100	100	1.111.154.856	392.464.550,00	Biro Hukum

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
408	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia	Meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprovsu serta menjunjung tinggi HAM dalam pelayanan publik	%	0	100	87%	607.452.850	0	100	100	660.347.192	379.291.250,00	Biro Hukum
409	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Meningkatkan penyelesaian perkara dan sengketa hukum di lingkungan pemerintah Provsu	%	0	100	67,3%	1.314.290.400	35.387.400	100	100	1.452.005.248	614.030.450,00	Biro Hukum
410	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sipil Biro Hukum Setdaprovsu	%	0	100	25%	275.128.500	45.000.000	100	100	308.143.920	62.181.350,00	Biro Hukum
Biro Humas dan Keprotokolan SETDA													
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	2.866.941.892		100%	67,75	2.293.980.000	1.554.185.930	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	1.448.765.600		100%	63,31	600.302.000	380.050.000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
413	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan efektivitas dan produktifitas layanan	%	100	100	100	563.500.000						Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
414	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	100	172.384.000		100%	5,12	21.500.000	1.100.000	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
415	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100	64.489.418		100%	45,94	99.996.000	45.940.400	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
416	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	%	0	100	100	7.648.598.487		100%	42	5.023.816.672	2.085.241.864	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
417	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	0	100	100	1.118.493.725						Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
418	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	%	0	100	100	6.670.326.878		100%	46%	5.658.155.944	2.613.890.219	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
419	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Terselenggaranya Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi	%	0	100	100	1.369.500.000		100%	59%	889.000.000	526.086.140	Biro Humas dan Keprotokolan SETDA
Sekretariat DPRD													

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
420	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	100	24.995.606.490	24.995.606.490	100%	87%	25.995.201.355	22.515.656.049	Sekretariat DPRD
421	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan	%	100	100	100	17.768.580.250	17.768.580.250	100%	53%	12.511.734.100	6.632.845.015	Sekretariat DPRD
422	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	100	100	100	14.089.300.000	14.089.300.000	100%	90%	2.227.580.000	2.004.042.800	Sekretariat DPRD
423	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	100	1.356.170.000	1.356.170.000	100%	33%	45.000.000	14.700.000	Sekretariat DPRD
424	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	1.687.840.000	1.687.840.000	100%	91%	438.960.000	404.052.201	Sekretariat DPRD
425	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik	Terciptanya Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik	%	100	100	100	186.126.854.520	186.126.854.520	100%	80%	164.825.333.137	131.741.342.175	Sekretariat DPRD
426	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rapat dan Dokumen Penataan Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	46%	706.930.500	3.225.000	Sekretariat DPRD
427	Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah	Jumlah Rakor Peningkatan Pelayanan dan Risalah	%	100	100	100	1.236.500.000	1.236.500.000	100%	59%	136.500.000	80.000.000	Sekretariat DPRD
428	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Jumlah Laporan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	%	100	100	100	789.137.000	789.137.000	100%	36%	185.365.000	66.300.000	Sekretariat DPRD
Inspektorat													
429	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	100	100	78,69	5.535.145.440	175.101.201	100	100	5.906.305.440	4.883.131.750,00	Inspektorat Daerah Provinsi
430	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	92	2.267.697.060	87.552.500	100	100	2.767.697.060	1.522.904.760,00	Inspektorat Daerah Provinsi
431	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100	240.000.000	237.791.400	100	100	450.000.000	0	Inspektorat Daerah Provinsi
432	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	100	100	92	1.084.424.000	164.160.000	100	100	1.137.264.000	197.081.400,00	Inspektorat Daerah Provinsi
433	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	dokumen	25	25	92	814.942.500	60.048.000	25	25	814.942.500	284.632.210,00	Inspektorat Daerah Provinsi

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
434	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Serta Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	65	71	97	28.057.791.000	279.480.819	76	76	28.923.791.000	11.470.790.252,00	Inspektorat Daerah Provinsi
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah													
435	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	0	20	20	99.749.736.338				75.412.499.143	70.123.637.970	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
436	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	20	20	70.906.623.200		1 Tahun		3.429.926.465	3.429.926.465	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
437	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS	%	0	20	20	159.989.600		1 Tahun		67.383.360	50.303.000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
438	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	20	20	2.790.019.450		1 Tahun		908.867.000	812961497	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
439	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tingkat Ketaatan dan Kepatuhan dalam Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	%	0	20	20	6.026.361.500		1Tahun		4.753.492.400		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
440	Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Capaian realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	%	0	20	20	8.755.600.700		20	20	2.863.850.100		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
441	Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	%	0	20	20	2.082.409.010		20	20	956.360.400		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
442	Program Peningkatan Pajak Air Permukaan	Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor	%	0	20	20	1.899.999.100		20	20	1.288.125.000		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
443	Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah	Persentase Capaian Realisasi Penerimaan pajak Rokok	%	0	20	20	99.999.900		20	20	39.948.400	812961497	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
444	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Wajib pajak dan Wajib Retribusi	%	0	20	20	6.223.989.800		20	20	1.081.134.550	812961497	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
					2019				2020				
					INDIKATOR		(Rp)		INDIKATOR		(Rp)		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
445	Program Pemanfaatan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Sesuai ISO	%	0	20	20	750.000.000		20	20	1.125.000.000	812961497	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
446	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Persentase Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	0	20	20	2.550.629.800		20	20	622.744.325	812961497	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Badan Penghubung Daerah Provinsi													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	%	0	100	100	3.937.333.009	3.937.333.009	1 Thn	8,07%	3.153.155.600	2.032.138.033	Badan Penghubung Daerah Provinsi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	100	3.816.793.292	-	1 Thn	91,67%	5.183.041.953	4.346.383.102	Badan Penghubung Daerah Provinsi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur	%	0	100	100	192.220.000	192.220.000	1 Thn	1	73.300.000	73.286.000	Badan Penghubung Daerah Provinsi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	%	0	100	100	609.430.000	609.430.000	1 Thn	1	66.750.000	64.568.000	Badan Penghubung Daerah Provinsi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	%	0	100	100	58.508.000	58.508.000	1 Thn	1	46.371.080	40.971.080	Badan Penghubung Daerah Provinsi
6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan Penghubung Daerah Provsu	%	0	100	100	1.773.518.500	4.055.527.500	1 Thn	91,67%	92.430.000	60.188.700	Badan Penghubung Daerah Provinsi
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	%	0	100	100	2.311.997.199	-	1 Thn	47,93%	452.425.000	203.388.010	Badan Penghubung Daerah Provinsi

Tabel 7.5
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021 - 2023
Provinsi Sumatera Utara

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	%	97,4	209.883.794.130	98,2	198.317.296.500	99,01 %	208.233.161.325	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	82,61	3.823.481.922.408	83,31	1.498.545.888.294	83,61 %	1.573.473.182.709	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	11.721.400.000	100%	12.439.900.000	100%	12.389.100.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Prevalensi Stunting pada Balita	%	28,50%	21.835.568.500	27,50%	24.019.125.350	26,50%	26.421.037.885	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,5 : 1.000	850.000.000	1,5 : 1.000	1.000.000.000	1,5 : 1.000	1.200.000.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100 %	160.587.115.281	100 %	1.650.000.000	100 %	1.700.000.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	%	100 %	799.499.000	100 %	48.865.966.404	100 %	5.800.000.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan	%	30%	698.772.900	40%	768.650.190	50%	845.515.209	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	80%	230.591.000	90%	442.574.500	100%	486.831.950	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	%	50%	1.299.199.800	70%	1.694.297.500	75%	1.863.727.250	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	%	0	29.874.000	0	8.599.040.000	0	9.028.992.000,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	%	90	1.535.525.404	95	699.625.500	100	734.606.775,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pelayanan Limbah Domestik	%	41,81	1.100.959.500	46,03	1.657.324.000	50,24	1.740.190.200,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas Permukiman Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang Terlayani	Ha	2.545,60	100.000.000	2.598,10	4.264.200.000	2.650,60	4.477.410.000,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemenuhan kapasitas pelayanan air minum	%	61,26	51.596.440.550	62,81	114.210.257.000	65,15	119.920.769.850,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
..	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	Persentase Jaringan Irigasi yang terlayani	%	56,92		60,48		64,75		OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				1	2	3	4	5	6	
12	DAYA AIR (SDA)	Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	%	57,17	131.693.108.008	59,47	107.969.520.588	60,34	113.367.996.617,40	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	%	12.21 %	3.766.529.500	13.09 %	4.142.610.900	14.07 %	4.349.741.445,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	%	100,00	14.813.265.200	100,00	17.464.982.376	100,00	18.338.231.494,80	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
15	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Lokasi	1	1.092.215.300	1	40.867.116.000	1	42.910.471.800,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi mantap	Persen	76,37	518.446.591.125	78,31	830.635.940.000	85	872.167.737.000,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	%	100	2.557.930.293	100	3.208.312.986	100	3.368.728.635,30	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
18	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	16,27	20.927.414.150	16,83	30.085.320.826	18,52	31.589.586.867,30	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
19	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Difasilitasi	%	100	1.272.708.054	100	1.606.547.000	100	1.686.874.350,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	unit	100	17.272.501.754	100	5.093.974.220	100	5.348.672.931,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
21	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	kab/kota	33 kab/kota	55.162.633.974	33 kab/kota	5.339.282.500	33 kab/kota	5.606.246.625,00	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	%	71 %	199.161.600	76 %	134.141.000	80 %	140.848.050	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Persentase Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100 %		100 %		100 %		OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				1	2	3	4	5	6	
23	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	%	75 %	18.341.124.590	80 %	6.147.431.200	85 %	6.454.802.760	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100		100		100		OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial	%	100 %	2.283.413.630	100 %	2.687.512.800	100 %	2.821.888.440	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	%	100 %	6.747.901.292	100 %	18.349.184.775	100 %	19.266.644.014	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial
26	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial	%	100 %	180.709.000	100 %	293.229.000	100 %	307.890.450	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial
27	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN Provinsi yang dikelola	Kegiatan / Orang	2220	4.318.142.338	2085	346.986.000	1980	364.335.300	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial
28	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial.	%	100 %	1.404.168.500	100 %	1.067.957.550	100 %	1.121.355.428	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial
29	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Kegiatan / Orang	1287	24.718.252.276	1287	30.848.305.758	1287	32.390.721.046	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Sosial
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
30	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	7,72%	756.461.750	7,94%	784.152.900	7,80%	823.360.545	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja
31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	(1). Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi;	%	0,20%	3.243.124.868	0,28%	1.209.810.356	4,81%	1.270.300.874	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja
		(2). Tingkat produktivitas tenaga kerja.	indeks	5,36		5,51		5,65		
32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	16,58%	2.259.512.350	16,58%	1.063.129.394	17,11%	1.116.285.864	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja
33	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	50,12%	830.344.850	50,10%	964.284.250	50,73%	1.012.498.463	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja
34	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	75,76%	109.642.500	84,85%	205.515.500	93,94%	215.791.275	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja
35	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Provinsi	%	20	290.557.200	22	373.424.000	24	392.095.200	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi	%	20	1.483.803.600	22	998.226.244	24	1.048.137.556	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
37	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga yang tersedia	%	25	117.268.000	28	33.863.950	30	35.557.148	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
38	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Terpilah	%	76	291.284.000	84	92.473.500	92	97.097.175	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
39	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kluster Hak Anak Terimplementasi	%	75	395.720.000	83	625.085.000	91	656.339.250	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
40	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Terimplementasi	%	80	480.410.700	88	303.120.800	97	318.276.840	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
36	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN DAN GIZI	%	2	1.720.357.710	2	810.330.000	2	850.846.500	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Pangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE KENAIKAN UNIT USAHA YANG MEMILIKI SERTIFIKASI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	%	10	866.793.450	10	821.017.850	10	862.068.743	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Pangan
38	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR PPH KONSUMSI	Point	86,68	3.725.292.485	89,59	4.036.113.250	92,50	4.237.918.913	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Pangan
39	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	100 %	295.166.550	100 %	534.869.400	100 %	561.612.870	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
40	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	90 %	399.995.750	95%	329.999.100	100%	346.499.055	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
41	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100 %	49.999.600	100 %	-	100 %	-	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	%	70 %	403.739.050	72%	549.997.740	74%	577.497.627	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
43	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	poin	45	2.793.564.020	50	1.444.534.025	60	1.516.760.726	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
44	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	%	70 %	264.449.400	72%	270.649.200	74%	284.181.660	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
45	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	69,02	6.581.749.347	69,2	3.754.543.156	69,38	3.942.270.314	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
46	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	%	100 %	417.198.550	100 %	398.458.400	100 %	418.381.320	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
47	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/keompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (%)	%	88 %	174.999.450	90%	29.999.950	100%	31.499.948	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
48	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	%	100 %	649.905.500	100 %	824.993.250	100 %	866.242.913	OPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
49	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	%	100%	483.484.050	100%	150.000.000	100%	157.500.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
50	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100%	391.237.500	100%	150.000.000	100%	157.500.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
51	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	%	100%	644.523.670	100%	300.189.500	100%	315.198.975	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
52	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan profil kependudukan	Buku	100%	465.578.000	Buku	299.999.950	Dokumen	314.999.948	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
53	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu	%		3.361.270.900	100 %	11.749.970.000	100 %	12.337.468.500	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	%		4.033.482.690	100 %	4.433.579.450	100 %	4.655.258.423	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
55	PROGRAM PENATAAN DESA	Terwujudnya penataan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	kab/kota	33 kab/kota	-	33 kab/kota	-	33 kab/kota	-	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
56	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama antar desa	%		934.313.200	100 %	999.998.000	100 %	1.049.997.900	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota BKB ber-KB	%	65 %	3.000.000.000	67 %	800.000.000	69 %	840.000.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
58	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Persentase PUS yang ber-KB	%	59,57 %	1.000.000.000	59,75 %	800.000.000	60 %	840.000.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
59	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan GDPK	Kab/Kota	19 Kab/Kota	-	26 Kab/Kota	800.000.000	33 Kab/Kota	840.000.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
60	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	%	90	-	91,25	-	92,5	-	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	%	50 %	12.144.357.500	60 %	16.841.531.304	80 %	17.683.607.869	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
62	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	90 %	15.473.950.000	92 %	5.944.458.727	100 %	6.241.681.663	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
63	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	%	87 %	16.043.025.783	90 %	10.051.224.510	100 %	10.553.785.736	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	persen	5 persen	3.227.326.962	5 persen	14.024.419.141	5 persen	14.725.640.098	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif	%	60 %		61 %		62 %		OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	UMKM	70 UMKM	7.188.738.307	70 UMKM	5.735.263.970,00	70 UMKM	6.022.027.169	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Meningkatnya Produk KUKM Yang Berdaya Saing	unit	98 unit		105 unit		108 unit		OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
66	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil yang aktif	unit	2.860.000 unit	-	2.861.000 unit	1.594.562.900,00	2.862.000 unit	1.674.291.045,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
67	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan	unit	100 unit	433.133.550	100 unit	754.997.600	100 unit	792.747.480,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
68	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan wirausaha baru	unit	475 unit	15.725.616.308	475 unit	11.756.024.502,00	475 unit	12.343.825.727,10	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM	orang	4.644 orang		4.876 orang		4.973 orang		OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
69	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	unit	100 unit	527.898.250	100 unit	519.928.100	100 unit	545.924.505,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penyelesaian dokumen perizinan	dokumen	1.170	1.401.296.000	1.348	1.428.430.000	1.484	1.499.851.500,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
71	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor	investor	557	1.387.012.280	584	1.206.373.000	613	1.266.691.650,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
72	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan realisasi investasi	%	21	822.056.600	21,5	1.096.024.000	22	1.150.825.200,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
73	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai investasi	Triliun	35	1.697.728.500	36,6	1.607.552.382	38,43	1.687.930.001,10	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
74	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	%	100 %	145.155.755.371	100 %	184.941.782.000	100 %	194.188.871.100,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kualitas Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	%	100 %	8.500.059.167	100 %	1.000.000.000	100 %	1.050.000.000,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
76	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya data statistik sektoral	%	93 %	214.844.500	95 %	230.450.000	100 %	241.972.500,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
77	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	%	87 %	220.197.600	90 %	491.495.200	100 %	516.069.960,00	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
78	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	5 Objek	22.434.315.916	5 Objek	12.062.024.300	5 Objek	12.665.125.515,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
79	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pembinaan sejarah	Kali	10 Kali	299.636.000	5 Kali	150.000.000	10 Kali	157.500.000,00	OPD yang melaksanaka Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah pengunjung ke Museum Negeri Provsu	Orang	NA	12.650.787.400	30.000 orang	3.571.237.851	40.000 orang	3.749.799.743,55	OPD yang melaksanaka Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Festival	3 Festival	7.502.715.781	6 Festival	4.296.004.208	8 Festival	4.510.804.418,40	OPD yang melaksanaka Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penggiat Seni dan Budaya	Orang	NA	-	1000 Orang	2.957.398.529	1500 Orang	3.105.268.455,45	OPD yang melaksanaka Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
83	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	gender	Koleksi	2 Koleksi	215.600.000	2 Koleksi	170.862.319	2 Koleksi	179.405.434,95	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
84	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kualitas pengembangan dan pembinaan perpustakaan	%	100 %	3.522.500.959	100 %	4.140.516.520	100 %	4.347.542.346,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
85	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kualitas pengelolaan arsip secara baik	%	100 %	713.184.950	100 %	256.155.000	100 %	268.962.750,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
86	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah dokumen perlindungan dan penyelamatan arsip	Dokumen	100 Dokumen	18.460.000	100 Dokumen	110.160.000	100 Dokumen	115.668.000,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				1	2	3	4	5	6	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
87	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Patroli Pengawasan di Laut	kali	18 kali	12.936.479.920	20 kali	1.421.115.150	22 kali	1.492.170.908	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
88	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Point	86.68 Point	1.863.737.004	86.68 Point	1.666.306.184	86.68 Point	1.749.621.493	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
89	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	251,669 Ton	7.761.227.538	259,219 Ton	5.173.348.734	266,996 Ton	5.432.016.171	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
90	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	577,376 Ton	13.281.011.703	594,698 Ton	13.702.809.249	612,539 Ton	14.387.949.711	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
91	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kap/ Tahun	46,93	2.409.447.090	48,34	1.507.032.273	49,79	1.582.383.887	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
92	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	Orang	500 Orang	7.103.636.764	1.000 Orang	9.341.371.000	1.500 Orang	9.808.439.550	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
93	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	30%	2.676.266.500	30%	32.392.200	40%	34.011.810	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
94	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pengelola Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	400 orang	751.027.775	870 orang	2.010.279.200	957 orang	2.110.793.160	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
95	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya	DPP	8 DPP	15.807.235.940	3 DPP	6.693.192.558	4 DPP	7.027.852.186	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
96	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI (Persen)	%	3.07 %	2.155.426.730	3.05 %	2.023.848.870	3.04 %	2.125.041.314	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Cakupan luas lahan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Ha	300 Ha		1200 Ha		1200 Ha		OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
97	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT	Point	77	5.379.276.459	78	5.037.003.810	79	5.288.854.001	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan
101	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA - RATA PRODUKSI DAGING, SUSU DAN TELUR	%	1,5	69.025.443.728	1,5	67.245.840.724	1,5	70.608.132.760	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
102		Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ku/Ha)	%	58.91 %		59.08 %		59.26 %		
103		Cakupan luas lahan fasilitasi sarana pertanian	Ha	550 Ha		1895 Ha		1895 Ha		
104	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang berprestasi dan kelompok tani yang dibina	%	0.03 %	10.822.561.166	0.03 %	12.759.501.348	0.03 %	13.397.476.415	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
105		Jumlah penyuluhan petani pekebun	orang	1065 orang		3430 Ha		3430 Ha		
106	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan	%	100	-	100	681.753.211	100	715.840.872	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
107	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Cakupan penataan tertib pengelolaan Hutan oleh masyarakat	%	100	2.577.683.590	100	5.960.000.000	100	6.258.000.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
108	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Cakupan Pengelolaan DAS	%	100	71.554.000	100	1.074.405.000	100	1.128.125.250	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
109	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya serta tertib dalam pengelolaannya	%	100	15.557.525.950	100	23.172.370.860	100	24.330.989.403	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
110	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase rekomendasi teknis izin Pengusahaan air tanah	%	100 %	669.778.470	100 %	590.182.571	100 %	619.691.700	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN							PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Bauran Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	%	34 %	7.046.972.849	36 %	11.014.743.284	36 %	11.565.480.448	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
112	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	%	100 %	4.676.810.875	100 %	4.183.909.000	100 %	4.393.104.450	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
113	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase rekomendasi/persetujuan teknis perizininan mineral dan batubara	%	100 %	566.674.500	100 %	626.746.650	100 %	658.083.983	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
114	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	4,30%	707.255.500	4,74%	468.748.641	4,98%	492.186.073	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
115	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	jenis	10	360.359.348	-	-	-	-	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
116	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pusat distribusi regional/provinsi yang difasilitasi	unit	-	-	-	-	-	-	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
117	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi	dokumen	54.632	114.172.600	55.178	99.999.950	55.730	104.999.948	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				1	2	3	4	5	6	
118	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bapokting	%	13,28%	913.078.600	13,95%	431.593.000	14,64%	453.172.650	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
119	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	77,31%	4.685.336.671	81,18%	3.028.887.139	85,24%	3.180.331.496	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
120	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri yang tersedia	%	-	-	-	-	-	-	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
121	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang difasilitasi	%	100	188.243.950	100	111.840.500	100	117.432.525	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
122	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan RPIK	Kab/Kota	2	4.549.301.041	3	3.471.995.350	4	3.645.595.118	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
123	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	SP/lokasi	79 SP/lokasi	174.999.700	79 SP/lokasi	158.219.650	79 SP/lokasi	166.130.633	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
4 URUSAN PENDUKUNG										
124	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100	2.224.776.000	100	2.458.639.000	100	2.581.570.950,00	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
125	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatkan Pemerintahan yang bertanggungjawab dan berlandaskan Aturan Peraturan dalam Penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan	%	100%	5.460.705.265	100%	5.457.792.867	100%	5.730.682.510,35	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
126	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	%	100%	420.893.877.251	100%	207.018.879.672	100%	217.369.823.655,60	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
127	PROGRAM FASILITAS DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya	%	100%	2.318.554.000	100%	2.632.692.500	100%	2.764.327.125,00	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
128	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang maju dan bermartabat	%	100%	1.938.134.700	100%	2.249.185.450	100%	2.361.644.722,50	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
129	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terlaksananya standart yg proaktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat perpres No 16 tahun 2018 dan Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Sumatera Utara, Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan Kredibel secara Elektronik dan Terbinanya SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu yang kredibel	%	100%	5.660.573.746	100%	5.530.091.047	100%	5.806.595.599,35	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan sumatera utara yang bermartabat	%	100%	2.205.249.360	100%	3.715.288.616	100%	3.901.053.046,80	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
5. URUSAN PENUNJANG										
131	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100%	130.953.011.180	100%	144.468.199.150	100%	151.691.609.108	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan
132	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	%	100%	4.930.807.500	100%	4.858.073.500	100%	5.100.977.175	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan
133	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan	%	100%	7.185.256.324	100%	8.432.135.775	100%	8.853.742.564	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan
134	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tingkat pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	%	100%	2.618.127.234.032	100%	3.204.067.834.654	100%	3.364.271.226.387	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan
135	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	%	100%	9.820.088.941	100%	9.539.825.861	100%	10.016.817.154	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan
136	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	11.084.934.000	100	7.856.100.750	100	8.248.905.788	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan
137	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	%	100 %	7.492.593.000	100 %	6.670.165.770	100 %	7.003.674.059	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
138	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	100 %	3.955.719.987	100 %	41.555.372.801	100 %	43.633.141.441	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pelatihan dan Pendidikan
139	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	kualitas penelitian pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi	%	100%	3.330.623.290	100%	1.195.273.650	100%	1.255.037.333	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian
140	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Tingkat Pelayanan Penghubung	%	100%	4.316.363.890	100%	6.842.889.800	100%	7.185.034.290	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
6. URUSAN PENGAWASAN										
141	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan standar pelayanan minimal dan norma, standar, peraturan dan ketentuan	%	100%	23.563.996.500	100%	25.384.074.400	100%	26.653.278.120,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
142	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	%	100%	4.159.357.250	100%	4.096.269.850	100%	4.301.083.342,50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
				1	2	3	4	5	6	
7. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
143	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100%	3.633.404.700	100%	666.119.550	100%	699.425.527,50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik
144	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	%		8.778.989.650	100%	32.410.249.800	100%	34.030.762.290,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik
145	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pertambahan Ormas	%	100%	2.103.087.850	100%	3.280.497.850	100%	3.444.522.742,50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik
146	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	%	100%	3.995.380.060	100%	2.414.576.950	100%	2.535.305.797,50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik
147	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	%	100%	1.581.731.750	100%	2.122.950.000	100%	2.229.097.500,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keastuan Bangsa dan Politik
148	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	%	100%	16.719.060.000	100%	4.720.182.835.681	100%	4.956.191.977.465	Semua OPD

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Selain itu Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta dukungan terhadap pencapaian IKU dan IKK. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan indikator makro pembangunan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Dalam Perubahan RPJMD ini dilakukan penataan ulang indikator kinerja beserta target-targetnya meliputi indikator makro daerah, IKU Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU PD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK). Realisasi dan proyeksi indikator kinerja disajikan sebagai berikut :

8.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI SUMATERA UTARA

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Inflasi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Sumatera utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

Proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Utara mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 8.1.
Proyeksi Indikator Makro
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR
			2019		2020								
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3	5,22	5,4	-1,07	5,5	5,6	5,7	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,12	71,74	71,67	71,77	72,22	72,77	73,32	71,50-72,00	72,00-72,50	72,25-72,75	72,25-72,75
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	8,43	9,14	8,04	7,7	7,39	9,00-8,00	8,90-7,90	8,80-7,80	8,80-7,80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,41	5,45	6,91	5,4	5,35	5,3	6,50-5,50	6,40-5,40	6,30-5,30	6,30-5,30
5	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	0,32	0,316	0,315	0,31	0,3	0,313	0,311	0,309	0,309
6	Laju Inflasi	Persen	2,95	2,33	2,9	1,96	2,85	2,8	2,75	2,5	2,25	2,00	2,00
7	Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO2eq	-	21,08	-	22,07	-	-	-	26,56	31,06	35,55	35,55

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara.

Target IKU pemerintah daerah mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi Covid-19. IKU pemerintah daerah disajikan pada Tabel 8.2 sebagai berikut :

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Pendidikan	Poin	-	68.03	-	68.55	-	-	-	68,65-69,15	68,75-69,25	68,85-69,35	68,85-69,35
2	Indeks Kesehatan	Poin	-	75.31	-	75.54	-	-	-	75,65-76,15	75,70-76,20	75,75-76,25	75,75-76,25
3	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	55	54.91	59	55.18	63	67	71	57,00	59,00	61,00	61,00
4	Indeks Infrastruktur	Poin	-	-	-	0,66	-	-	-	0,70	0,74	0,79	0,79
5	Indeks Demokrasi	Poin	69.02	67.65	69.04	65,13	69.06	69.08	70.00	65,25	65,50	65,75	65,75
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	B	(60.05) B	B	(61.05) B	A	A	A	(64.00) BB	(70.00) BB	(75.00) BB	(75.00) BB
7	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	65	97	68	90,25	71	76	80	91	92	93	93
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Persen	68.00	68.20	68.70	69.37	70.70	71.70	72.70	69,02	69,20	69,38	69,38

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut *cascading* yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (*impact*) sampai paling rendah (*output*).

Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penangannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Penyesuaian ini menyusul penyesuaian target pembangunan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang terlebih dahulu telah dilakukan.

8.4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA

Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Dearah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi
- b. Indeks Pembangunan Manusia
- c. Persentase Penduduk Miskin
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka
- e. Indeks Gini

Target dukungan terhadap 5 (lima) indikator makro dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 disajikan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 8.3.
Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)					
		Kondisi Awal (Realisasi)		Target			Kondisi Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Kab. Nias	5,04	-1,50	2,90-3,90	3,90-4,90	4,90-5,90	4,90-5,90
2.	Kab. Mandailing Natal	5,30	-0,90	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
3.	Kab. Tapanuli Selatan	5,23	-1,10	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
4.	Kab. Tapanuli Tengah	5,18	-1,20	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
5.	Kab. Tapanuli Utara	4,62	-2,50	2,70-3,70	3,70-4,70	4,70-5,70	4,70-5,70
6.	Kab. Toba Samosir	4,88	-1,90	2,80-3,80	3,80-4,80	4,80-5,80	4,80-5,80
7.	Kab. Labuhan Batu	5,07	-1,40	2,90-3,90	3,90-4,90	4,90-5,90	4,90-5,90
8.	Kab. Asahan	5,64	-0,20	3,20-4,20	4,20-5,20	5,20-6,20	5,20-6,20
9.	Kab. Simalungun	5,20	-1,10	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
10.	Kab. Dairi	4,82	-2,00	2,80-3,80	3,80-4,80	4,80-5,80	4,80-5,80
11.	Kab. Karo	4,60	-2,50	2,60-3,60	3,60-4,60	4,60-5,60	4,60-5,60
12.	Kab. Deli Serdang	5,18	-1,20	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
13.	Kab. Langkat	5,07	-1,40	2,90-3,90	3,90-4,90	4,90-5,90	4,90-5,90
14.	Kab. Nias Selatan	5,03	-1,50	2,90-3,90	3,90-4,90	4,90-5,90	4,90-5,90
15.	Kab. Humbang Hasundutan	4,94	-1,00	2,80-3,80	3,80-4,80	4,80-5,80	4,80-5,80
16.	Kab. Pakpak Barat	5,87	0,50	3,40-4,40	4,40-5,40	5,40-6,40	5,40-6,40
17.	Kab. Samosir	5,70	-0,10	3,30-4,30	4,30-5,30	5,30-6,30	5,30-6,30
18.	Kab. Serdang Bedagai	5,28	-0,90	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
19.	Kab. Batu Bara	4,35	-1,20	2,50-3,50	3,50-4,50	4,50-5,50	4,50-5,50
20.	Kab. Padang Lawas Utara	5,61	-0,30	3,20-4,20	4,20-5,20	5,20-6,20	5,20-6,20
21.	Kab. Padang Lawas	5,64	-0,20	3,20-4,20	4,20-5,20	5,20-6,20	5,20-6,20
22.	Kab. Labuhan Batu Selatan	5,35	-0,80	3,10-4,10	4,10-5,10	5,10-6,10	5,10-6,10
23.	Kab. Labuhan Batu Utara	5,15	-1,20	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
24.	Kab. Nias Utara	4,65	-2,40	2,70-3,70	3,70-4,70	4,70-5,70	4,70-5,70
25.	Kab. Nias Barat	4,82	-2,00	2,80-3,80	3,80-4,80	4,80-5,80	4,80-5,80
26.	Kota Sibolga	5,20	-1,10	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
27.	Kota Tanjung Balai	5,79	-0,50	3,30-4,30	4,30-5,30	5,30-6,30	5,30-6,30
28.	Kota Pematang Siantar	4,82	-2,00	2,80-3,80	3,80-4,80	4,80-5,80	4,80-5,80
29.	Kota Tebing Tinggi	5,15	-1,20	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00
30.	Kota Medan	5,93	-2,00	3,40-4,40	4,40-5,40	5,40-6,40	5,40-6,40
31.	Kota Binjai	5,51	-0,50	3,20-4,20	4,20-5,20	5,20-6,20	5,20-6,20
32.	Kota Padang Sidempuan	5,51	-0,50	3,20-4,20	4,20-5,20	5,20-6,20	5,20-6,20
33.	Kota Gunung Sitoli	6,05	0,60	3,50-4,50	4,50-5,50	5,50-6,50	5,50-6,50
Sumatera Utara		5,22	-1,07	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

Tabel 8.4.
Penetapan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)					
		Kondisi Awal (Realisasi)		Target			Kondisi Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Kab. Nias	61,65	61,93	63,10	63,80	64,50	64,50
2.	Kab. Mandailing Natal	66,52	66,79	67,60	68,20	68,80	68,80
3.	Kab. Tapanuli Selatan	69,75	70,12	70,90	71,50	72,00	72,00
4.	Kab. Tapanuli Tengah	68,86	69,23	69,80	70,20	70,70	70,70
5.	Kab. Tapanuli Utara	73,33	73,47	74,30	74,80	75,30	75,30
6.	Kab. Toba	74,92	75,16	75,70	76,20	76,60	76,60
7.	Kab. Labuhan Batu	71,94	72,01	72,90	73,40	73,90	73,90
8.	Kab. Asahan	69,92	70,29	71,10	71,60	72,20	72,20
9.	Kab. Simalungun	72,98	73,25	73,80	74,30	74,70	74,70
10.	Kab. Dairi	71,42	71,57	72,50	73,10	73,80	73,80
11.	Kab. Karo	74,25	74,43	75,10	75,50	75,90	75,90
12.	Kab. Deli Serdang	75,43	75,44	76,40	77,00	77,60	77,60
13.	Kab. Langkat	70,76	71,00	72,20	72,80	73,40	73,40
14.	Kab. Nias Selatan	61,59	61,89	62,90	63,70	64,40	64,40
15.	Kab. Humbahas	68,83	68,87	69,60	70,20	70,70	70,70
16.	Kab. Pakpak Barat	67,47	67,59	68,50	69,00	69,50	69,50
17.	Kab. Samosir	70,55	70,63	71,60	72,20	72,80	72,80
18.	Kab. Serdang Bedagai	70,21	70,24	71,40	72,00	72,60	72,60
19.	Kab. Batu Bara	68,35	68,36	69,20	69,70	70,20	70,20
20.	Kab. Paluta	69,29	69,85	70,50	71,00	71,60	71,60
21.	Kab. Padang Lawas	68,16	68,25	69,20	69,80	70,40	70,40
22.	Kab. Labusel	71,39	71,4,	72,90	73,50	74,20	74,20
23.	Kab. Labura	71,43	71,61	72,60	73,10	73,60	73,60
24.	Kab. Nias Utara	61,98	62,36	62,90	63,50	64,00	64,00
25.	Kab. Nias Barat	61,14	61,51	62,40	63,10	63,80	63,80
26.	Kota Sibolga	73,41	73,63	74,40	74,90	75,40	75,40
27.	Kota Tanjung Balai	68,51	68,65	69,50	70,10	70,60	70,60
28.	Kota Pematang Siantar	78,57	78,75	79,80	80,40	81,00	81,00
29.	Kota Tebing Tinggi	75,08	75,17	76,00	76,50	77,10	77,10
30.	Kota Medan	80,97	80,98	81,60	82,00	82,50	82,50
31.	Kota Binjai	75,89	75,89	76,90	77,50	78,10	78,10
32.	Kota Padang Sidempuan	75,06	75,22	75,90	76,40	76,90	76,90
33.	Kota Gunung Sitoli	69,3	69,31	70,30	70,90	71,50	71,50
Sumatera Utara		71,74	71,77	71,50 - 72,00	72,00 - 72,50	72,50 - 73,00	72,50 - 73,00

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

Tabel 8.5.
Penetapan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)					
		Kondisi Awal (Realisasi)		Target			Kondisi Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Kab. Nias	15,94	16,74	14,49	14,42	14,35	14,35
2.	Kab. Mandailing Natal	9,11	9,57	7,43	7,32	7,21	7,21
3.	Kab. Tapanuli Selatan	8,60	9,03	6,60	6,31	6,11	6,11
4.	Kab. Tapanuli Tengah	12,53	13,16	10,85	10,68	10,52	10,52
5.	Kab. Tapanuli Utara	9,48	9,95	7,80	7,71	7,62	7,62
6.	Kab. Toba	8,60	9,03	6,97	6,94	6,92	6,92
7.	Kab. Labuhan Batu	8,44	8,86	7,24	7,48	7,73	7,73
8.	Kab. Asahan	9,68	10,16	7,88	7,69	7,51	7,51
9.	Kab. Simalungun	8,81	9,25	7,07	6,92	6,79	6,79
10.	Kab. Dairi	7,70	8,09	6,23	6,28	6,33	6,33
11.	Kab. Karo	8,23	8,64	6,73	6,72	6,72	6,72
12.	Kab. Deli Serdang	3,89	4,08	2,41	2,53	2,66	2,66
13.	Kab. Langkat	9,91	10,41	8,43	8,46	8,51	8,51
14.	Kab. Nias Selatan	16,45	17,27	14,72	14,54	14,37	14,37
15.	Kab. Humbahas	8,75	9,19	7,37	7,47	7,58	7,58
16.	Kab. Pakpak Barat	9,27	9,73	7,62	7,57	7,52	7,52
17.	Kab. Samosir	12,52	13,15	11,22	11,2	11,24	11,24
18.	Kab. Serdang Bedegai	7,90	8,30	8,25	8,21	6,17	6,17
19.	Kab. Batu Bara	12,14	12,75	11,20	11,53	11,86	11,86
20.	Kab. Paluta	9,60	10,08	8,18	8,24	8,30	8,30
21.	Kab. Padang Lawas	8,28	8,69	7,13	7,38	7,64	7,64
22.	Kab. Labusel	8,94	9,39	7,15	6,87	6,66	6,66
23.	Kab. Labura	9,57	10,05	8,07	8,05	8,04	8,04
24.	Kab. Nias Utara	24,99	26,24	21,87	20,69	19,52	19,52
25.	Kab. Nias Barat	25,51	26,79	23,62	23,22	22,83	22,83
26.	Kota Sibolga	12,36	12,98	11,06	11,18	11,31	11,31
27.	Kota Tanjung Balai	14,04	14,74	12,98	13,21	13,45	13,45
28.	Kota Pematang Siantar	8,63	9,06	6,93	6,88	6,84	6,84
29.	Kota Tebing Tinggi	9,94	10,44	8,25	8,13	8,03	8,03
30.	Kota Medan	8,08	8,48	6,55	6,60	6,65	6,65
31.	Kota Binjai	5,66	5,94	4,08	4,12	4,18	4,18
32.	Kota Padang Sidempuan	7,26	7,62	5,73	5,77	5,82	5,82
33.	Kota Gunung Sitoli	16,23	17,04	12,39	10,79	9,31	9,31
Sumatera Utara		8,63	9,14	9,00-8,00	8,9-7,9	8,8-7,8	8,8-7,8

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

Tabel 8.6.
Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

No		Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				
			Kondisi Awal (Realisasi)		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
1.		Kab. Nias	1,09	3,49	3,00	2,75	2,50
2.		Kab. Mandailing Natal	6,37	6,50	5,30	4,80	4,30
3.		Kab. Tapanuli Selatan	4,17	4,42	3,42	2,92	2,42
4.		Kab. Tapanuli Tengah	7,26	7,54	6,54	6,04	5,54
5.		Kab. Tapanuli Utara	1,33	2,94	1,94	1,44	0,94
6.		Kab. Toba	1,26	2,50	1,50	1,00	0,50
7.		Kab. Labuhan Batu	5,70	6,05	5,05	4,55	4,05
8.		Kab. Asahan	6,86	7,24	6,24	5,74	5,24
9.		Kab. Simalungun	4,39	4,58	3,58	3,08	2,58
10.		Kab. Dairi	1,58	1,75	1,55	1,45	1,35
11.		Kab. Karo	1,09	1,83	1,63	1,53	1,43
12.		Kab. Deli Serdang	5,74	9,50	8,50	8,00	7,50
13.		Kab. Langkat	5,30	7,02	6,02	5,52	5,02
14.		Kab. Nias Selatan	2,25	4,15	3,15	2,65	2,15
15.		Kab. Humbahas	0,33	0,84	0,64	0,54	0,44
16.		Kab. Pakpak Barat	0,19	1,93	1,73	1,63	1,53
17.		Kab. Samosir	1,25	1,20	1,00	0,90	0,80
18.		Kab. Serdang Bedagai	4,37	5,54	4,54	4,04	3,54
19.		Kab. Batu Bara	6,69	6,48	5,48	4,98	4,48
20.		Kab. Paluta	3,21	3,11	2,11	1,61	1,11
21.		Kab. Padang Lawas	4,24	4,11	3,11	2,61	2,11
22.		Kab. Labusel	4,80	4,90	3,90	3,40	2,90
23.		Kab. Labura	5,84	6,82	5,82	5,32	4,82
24.		Kab. Nias Utara	3,07	4,54	3,54	3,04	2,54
25.		Kab. Nias Barat	1,63	1,71	1,51	1,41	1,31
26.		Kota Sibolga	7,40	8,00	7,00	6,50	6,00
27.		Kota Tanjung Balai	6,82	6,97	5,97	5,47	4,97
28.		Kota Pematang Siantar	11,09	11,50	10,50	10,00	9,50
29.		Kota Tebing Tinggi	8,60	9,98	8,98	8,48	7,98
30.		Kota Medan	8,53	10,74	9,74	9,24	8,74
31.		Kota Binjai	6,14	8,67	7,67	7,17	6,67
32.		Kota Padang Sidempuan	4,34	7,45	6,45	5,95	5,45
33.		Kota Gunung Sitoli	5,59	5,94	4,94	4,54	3,94
Sumatera Utara			5,41	6,91	6,00	5,75	5,50

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

Tabel 8.7.
Penetapan Indeks Gini Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung
Pencapaian Target Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

		Indeks Gini (Poin)					
No	Kabupaten/Kota	Kondisi Awal (Proyeksi)		Target			Kondisi Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Kab. Nias	0,260	0,255	0,250	0,245	0,240	0,240
2.	Kab. Mandailing Natal	0,252	0,247	0,242	0,237	0,232	0,232
3.	Kab. Tapanuli Selatan	0,268	0,263	0,258	0,253	0,248	0,248
4.	Kab. Tapanuli Tengah	0,312	0,307	0,302	0,297	0,292	0,292
5.	Kab. Tapanuli Utara	0,277	0,272	0,267	0,262	0,257	0,257
6.	Kab. Toba	0,323	0,318	0,313	0,308	0,303	0,303
7.	Kab. Labuhan Batu	0,289	0,284	0,279	0,274	0,269	0,269
8.	Kab. Asahan	0,286	0,281	0,276	0,271	0,266	0,266
9.	Kab. Simalungun	0,285	0,280	0,275	0,270	0,265	0,265
10.	Kab. Dairi	0,260	0,255	0,250	0,245	0,240	0,240
11.	Kab. Karo	0,263	0,258	0,253	0,248	0,243	0,243
12.	Kab. Deli Serdang	0,289	0,284	0,279	0,274	0,269	0,269
13.	Kab. Langkat	0,248	0,243	0,238	0,233	0,228	0,228
14.	Kab. Nias Selatan	0,325	0,320	0,315	0,310	0,305	0,305
15.	Kab. Humbang Hasundutan	0,286	0,281	0,276	0,271	0,266	0,266
16.	Kab. Pakpak Barat	0,234	0,229	0,224	0,219	0,214	0,214
17.	Kab. Samosir	0,280	0,275	0,270	0,265	0,260	0,260
18.	Kab. Serdang Bedegai	0,278	0,273	0,268	0,263	0,258	0,258
19.	Kab. Batu Bara	0,244	0,239	0,234	0,229	0,224	0,224
20.	Kab. Padang Lawas Utara	0,294	0,289	0,284	0,279	0,274	0,274
21.	Kab. Padang Lawas	0,294	0,289	0,284	0,279	0,274	0,274
22.	Kab. Labuhan Batu Selatan	0,238	0,233	0,228	0,223	0,218	0,218
23.	Kab. Labuhan Batu Utara	0,277	0,272	0,267	0,262	0,257	0,257
24.	Kab. Nias Utara	0,232	0,227	0,222	0,217	0,212	0,212
25.	Kab. Nias Barat	0,278	0,273	0,268	0,263	0,258	0,258
26.	Kota Sibolga	0,298	0,293	0,288	0,283	0,278	0,278
27.	Kota Tanjung Balai	0,327	0,322	0,317	0,312	0,307	0,307
28.	Kota Pematang Siantar	0,329	0,324	0,319	0,314	0,309	0,309
29.	Kota Tebing Tinggi	0,335	0,330	0,325	0,320	0,315	0,315
30.	Kota Medan	0,309	0,304	0,299	0,294	0,289	0,289
31.	Kota Binjai	0,304	0,299	0,294	0,289	0,284	0,284
32.	Kota Padang Sidempuan	0,354	0,349	0,344	0,339	0,334	0,334
33.	Kota Gunung Sitoli	0,356	0,351	0,346	0,341	0,336	0,336
Sumatera Utara		0,317*	0,316*	0,315	0,314	0,313	0,313

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021

TABEL 8.8
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH (IKU PD)/INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020									
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI													
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,30	5,22	5,4	-1,07	5,5	5,6	5,7	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,00-6,00	Seluruh Perangkat Daerah
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	55	54,91	59	55,18	63	67	71	57	59	61	61	Seluruh Perangkat Daerah
3	PDRB Per Kapita (ADHK 2010)	Juta Rupiah	36	37,05	37	36,31	38	39	40	38	39	40	40	Seluruh Perangkat Daerah
4	PDRB menurut Pengeluaran	Rupiah	950.000	1.063.964	1.050.000	1.042.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.189.623	1.337.246	1.484.869	1.484.869	Seluruh Perangkat Daerah
5	Laju Inflasi	Persen	2,95	2,33	2,9	1,96	2,85	2,8	2,75	2,5	2,25	2,00	2,00	Seluruh Perangkat Daerah
6	Indeks Gini	Poin	0,325	0,315	0,320	0,314	0,315	0,310	0,300	0,313	0,311	0,309	0,309	Seluruh Perangkat Daerah
7	Indeks Ketimpangan Regional	Poin	0,565	0,571	0,562	0,571	0,560	0,558	0,556	0,560	0,558	0,556	0,556	Seluruh Perangkat Daerah
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL													
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	8,43	9,14	8,04	7,7	7,39	9,00 - 8,00	8,90 - 7,90	8,80 - 7,80	8,80 - 7,80	Seluruh Perangkat Daerah
2	Jumlah Penduduk Miskin	orang	1.298.513	1.260.000	1.247.505	1.356.000	1.202.304	1.173.831	1.127.554	1.315.000	1.295.000	1.275.000	1.275.000	Seluruh Perangkat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,12	71,74	71,67	71,77	72,22	72,77	73,32	71,50 – 72,00	72,00 – 72,50	72,25 – 72,75	72,25 – 72,75	Seluruh Perangkat Daerah
4	Indeks Pendidikan	Poin	-	68,03	-	68,55	-	-	-	68,65-69,15	68,75-69,25	68,85-69,35	68,85-69,35	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	Indeks Kesehatan	Poin	-	-	-	75,54	-	-	-	75,65-76,15	75,70-76,20	75,75-76,25	75,75-76,25	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,87	90,71	90,93	90,67	91	91,08	91,17	90,73	90,77	90,81	90,81	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,34	72,5	71,61	68,92	72,88	75,15	75,42	92,54	94,14	95,75	95,75	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,79	9,45	9,97	9,54	10,15	10,33	10,50	9,68	9,82	9,96	9,96	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,15	13,81	13,23	14,01	14,21	14,42	13,31	13,38	13,46	13,46	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	APK SM Sederajat	Persen	97,44	100,83	98,14	105,12	98,44	99,14	99,44	99,14	99,44	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
11	APM SM Sederajat	Persen	71,49	80,61	73,19	73,69	73,49	74,19	74,49	82,61	83,31	83,61	83,61	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,74	68,95	68,87	69,10	69,00	69,13	70	69,23	69,35	69,50	69,50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,01	70,19	74,2	72	75,39	76,58	77,77	73,04	74,08	75,12	75,12	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,41	5,45	6,91	5,4	5,35	5,3	6.50-5,50	6,40-5,40	6,30-5,30	6,30-5,30	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
15	JUmlah Penganggur	Jiwa	390.000	383.088	380.000	508.000	-	-	-	500.000-450.000	450.000-350.000	350.000-400.000	350.000-400.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			”											
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA													
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Persen	-	55	-	10	-	-	-	2	6	8	8	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga
2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	54,9	54,9	56,86	53,7	55	93	94	58,82	96,87	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga
3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	88	88	90	90	92	94	95	45,04	60,06	75,07	75,07	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga
B	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
B.1.1	PELAYANAN DASAR													
1	PENDIDIKAN													
1.1	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	96,2	90.14	97	96,61	97,4	98,2	99,01	97,4	98,2	99,01	99,01	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.2	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	56,1	52.07	57,4	48,97	58,7	60	61,3	58,7	60	61,3	61,3	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.3	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	94,42	90.48	94,72	93,55	95,02	95,32	95,62	95,02	95,32	95,62	95,62	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.4	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	42,7	40.77	43,4	38,72	44,1	44,8	45,5	44,1	44,8	45,5	45,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	KESEHATAN													
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/ 1.000 KH	4,5	2,61	4,3	2,39	4,1	3,9	3,7	2,44	2,32	2,2	2,2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	11,01	11,97	10,99	12,24	10,97	10,95	10,93	12,24	12,22	12,20	12,20	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	80,1	66,76	75,1	62,5	70,2	68,1	64,3	93,49	79,40	67,39	67,39	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.4	Prevalensi Stunting	Persen	31,50	30,7	30,50	29,20	29,5	28,5	27,5	28,5	27,5	26,5	26,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.5	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	100	73,85	95	68,34	90	85	80	62	52	42	42	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.6	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	65	70,59	61	79,83	57	53	47	80	82	85	85	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/ IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020									
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
2.7	Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	55	46	60	27	42	41	40	62	60	65	65	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.8	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	5	4	5	4	3	2	2	5	5	5	5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.9	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	Persen	-	46	-	27	-	-	-	62	65	70	70	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	-	-	-	-	-	-	-	80	85	90	90	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
3.1	PEKERJAAN UMUM													
3.1.1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	82,99	82,19	84,52	75,02	86,29	88,59	90	76,37	78,55	85,08	85,08	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,26	83,71	84,78	84,06	85,42	87,24	88,43	86,29	88,77	91,26	91,26	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	-	10,71	2,68	10,88	2,71	2,74	2,77	15	19,11	23,23	23,23	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.4	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	-	-	-	-	-	-	-	56,92	60,48	64,75	64,75	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.5	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	-	-	-	-	-	-	-	57,17	59,47	62,92	62,92	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.6	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	Persen	-	-	-	-	-	-	-	61.26	62.81	65.15	65.15	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.7	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	-	-	-	-	-	-	-	41.81	46.03	50.24	50.24	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.2	PENATAAN RUANG													

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKKI	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020									
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
4.1	Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	-	-	-	-	-	-	58,69	63,48	68,98	68,98	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	-	-	-	-	-	-	-	16,27	16,83	18,52	18,52	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
5,1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	65	97	68	90,25	71	76	80	92	95	97	97	Satpol PP, Biro Hukum, BPSDM, Inspektorat, BPBD
5,2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	45	59	60	31,25	65	70	75	65	70	75	75	Satpol PP, Biro Hukum, Inspektorat, BPBD
5,3	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	Orang	300	400	350	-	-	-	-	400	425	550	2025	Bakesbangpol (Data dari BNN dan BPS)
5,4	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Jumlah Ormas	20		20	-	-	-	-	30	40	50	160	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5,5	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna narkoba di Sumut	Persentase	0	6,5	6,3	(data belum keluar)	-	-	-	6,1	5,9	5,7	5,7	Bakesbangpol (Data dari BNN dan BPS)setiap tahunnya ditargetkan berkurang 0,2%
5,6	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat Provinsi	9		9		9	8	7	9	8	7	7	Bakesbangpol (penilaian oleh kemandagri)
5,7	Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Orang	1300	1300	1100	0	2000	2200	2400	260	1275	1300	5235	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5,8	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	Kab/Kota	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	BPBD, BMKG, Badan Geologi dan Badan Informasi Geospasial, Dinas Kominfo, Dinas PMD
5,9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	3	3	4	3	5	5	5	3	3	3	3	BPBD, BNPP, Dinas Sosial
5,10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	-	2	2	2	0	2	3	3	0	0	0	0	BPBD, Biro Kesra, Dinas Sosial
5,11	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145,18	134,4	145,18	127	121	109	145	144,5	143,5	143,5	BPBD, DLH, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Bina Marga dan Bina Konstruksi, SDACKTR, Dinas TPH, Dinas Ketapangnak, Dinas Perkebunan
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR													
1	TENAGA KERJA													

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
1,1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	-	0,005	-	0,01	-	-	-	0,27	0,31	0,34	0,34	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1,2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	-	78,13	-	80	-	-	-	-	16,58	17,11	17,11	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1,3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	-	0,66	-	0,7	-	-	-	7,72	7,94	7,8	7,8	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1,4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	-	7,49	-	8,24	-	-	-	50,12	50,1	50,73	50,73	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	Persen	50	73	60	98	70	80	100	66	85	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	15	5/100.000	4	5/100.000	10	7	5	6/100.000	5/100.000	4/100.000	4/100.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Rasio kekerasan terhadap Anak	/10.000	20	11/100.000	10	12/100.000	16	14	11	3/10.000	2/10.000	1/10.000	1/10.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	Persen	-	-	-	-	100	-	-	58%	76%	100%	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	PANGAN													
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,40	89,6	92,3	83,77	94,3	96,3	98,1	86,68	89,59	92,5	92,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
3.2	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	113,65	114,78	114,44	98,74	115,23	116,02	116,81	115,23	116,02	116,81	116,81	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan
3.3	Produksi Daging (ton)	Ton	169.775,74	258.090,36	175.551,96	218.083,49	181.328,18	187.104,40	192.880,62	221.354,76	224.675,08	228.045,21	228.045,21	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
3,4	Produksi Telur (ton)	Ton	186.062,33	541.234,15	191.961,45	470.179,22	197.860,67	203.759,69	209.658,81	477.232	484.390	491.656	491.656	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan
3,5	Produksi susu (ton)	Ton	1.587,56	3.489,84	1.661,68	5.150,72	1.735,80	1.809,92	1.884,05	5.227,98	5.306,40	5.386,00	5.386,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan
5	LINGKUNGAN HIDUP													
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	poin	68	68,2	68,7	69,37	70,7	71,7	72,7	69,02	69,2	69,38	69,38	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5,2	Indeks Kualitas Udara	poin	86	86,6	87	89,3	88	89	90	87,09	87,19	87,29	87,29	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5,3	Indeks Kualitas Air	poin	78	78,8	79	69,37	80	81	82	53,71	53,81	53,91	53,91	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5,4	Indeks Kualitas Lahan	poin	47	46,45	47,26	46,45	50,75	51,75	52,75	47,42	47,72	48,03	48,03	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5,5	Indeks Kualitas air laut	poin	-	-	-	-	-	-	-	72,51	73,13	73,74	73,74	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5,6	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	-	21,08	-	22,07	-	-	-	26,56	31,06	35,55	35,55	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
6.1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Pendudu dan Pencatatan Sipil		84	91,78	87	88,99	-	-	-	92	94	97	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	Persen	84	91,78	87	98,91	90	93	96	99,2	99,2	99,2	99,2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	71	75,33	76	78,63	81	86	91	95	97	98	98	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	-	100	-	100	-	-	-	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.5	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	Persen	-	100	-	100	-	-	-	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya di laporkan	Persen	-	100	-	100	-	-	-	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[illegible]

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2019		2020										
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023		
9	PERHUBUNGAN														
9.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	90	39,32	92	39,32	94	96	98	45,29	68,58	91,86	91,86	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	
9.2	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	50	75	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	
9.3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	90,29	90,86	91,71	91,71	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	
9.4	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	90	91,25	92,5	92,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
10.1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persen	84	61	86	61	90	95	100	87	90	92	92	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	
10.2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	Persen	20	20	41	31	61	82	100	55	65	75	75	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
11.1	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	Jumlah UMKM	1.000	1.117	213 Usaha Mikro, 155 Usaha Kecil dan 77 Usaha Menengah	250 Usaha Mikro, 250 Usaha Kecil dan 80 Usaha Menengah	1.000	1.000	1.000	200	250	300	300	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	
11.2	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	Persen	5	60,31	1,5	1,5	7,5	10	10	2	2,5	3,0	3,0	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	
11.3	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	Persen	5	2	3,5	2,1	7,5	10	10	2	2,5	3,0	3,0	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	
11.4	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan	Persen	5	-	-	-	7,5	10	10	2	2,5	3,0	3,0	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	
11.5	Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	Jumlah UMKM	50	64	-	-	100	150	200	20	25	30	30	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	
11.6	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Persen	60	39,86	-	-	65	70	70	25	35	40	40	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020									
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
11.7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Persen	35	23,46	-	-	45	50	55	30	35	40	40	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	PENANAMAN MODAL													
12.1	Investor PMDN	Investor	537	948	190	926	205	215	210	215	225	236	236	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.2	Investor PMA	Investor			280	301	342	342	357	342	359	377	377	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.3	Nilai Investasi PMDN	Rp. Triliun	33,91	18,78	11	13,3	12	12,75	13	18,75	19,60	20,58	20,58	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.4	Nilai Investasi PMA	Rp. Triliun			20,23	12,4	22	22,25	23	16,25	17,00	17,85	17,85	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	-	-	-	-	-	-	-	12,375	13,61	14,970	14,970	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang			-	-	-	-	-	6,121	7,039	7,743	7,743	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	68,50	70,69	20,00	37	68,5	70	70,2	21,00	21,50	22,00	22,00	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	21	12,6	23,5	17,8	26	33,7	49,5	26,31	33,6	49,5	49,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
13.2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	54,9	54,9	56,86	53,7	55	93	94	58,82	96,87	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
13.3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	88	88	90	90	92	94	95	45,04	60,06	75,07	75,07	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14	STATISTIK													
14.1	Data Statistik Sektoral	Persen	25	69	50	69	75	85	100	71	75	77	77	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
15	PERSANDIAN													
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	10	10	25	10	55	75	100	20	30	50	50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
16	KEBUDAYAAN													
16.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	8	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
16.2	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	-	-	-	-	-	-	-	5	7	9	9	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020									
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	-	10	-	2	-	-	-	7	15	20	20	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
17	PERPUSTAKAAN													
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	-	-	-	9,75	-	-	-	12,5	14,5	16,5	16,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
18	KEARSIPAN													
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	4	20	4,62	6,12	47	5,59	6,15	47	49	50	50	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	50	15.432	60	65	71	86	103	71	86	103	103	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
1	PARIWISATA													
1.1	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	8,15	7,46	8,56	6,66	8,99	9,44	9,92	7,02	7,10	7,18	7,18	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
1.2	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000	213.858	300.000	45.902	370.000	400.000	500.000	500	1.000	1.500	1.500	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
1.3	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2,26	1,38	2,36	1.15	2,46	2,56	2,66	1.15	1,35	1,5	1,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
1.4	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	DPP	-	-	-	-	-	-	-	8	10	12	12	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
2	PERTANIAN/ PERKEBUNAN													
	Pertanian													
2.1	Produksi Tanaman Pangan													OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	5.375.167,60	4.693.563	5.498.796,45	4.200.112	5.625.268,77	5.754.649,95	5.887.006,90	3.906.872	3.985.007	4.064.705	4.064.705	
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1.829.409,19	1.960.424	1.875.144,42	1.965.444	1.922.023,03	1.970.073,60	2.019.325,44	1.597.073	1.624.357	1.706.549	1.706.549	
	3. Kedele (ton)	Ton	8.905,03	9.627	9.528,38	4.003	10.195,37	10.909,05	11,672,68	4.052	4.145	4.244	4.244	
2.2	Produktivitas Tanaman Pangan													OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5,22	4,66	5,23	5,1	5,25	5,26	5,27	5,17	5,24	5,25	5,25	
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6,24	6,14	6,27	6,12	6,29	6,32	6,35	6,21	6,25	6,38	6,38	
	3. Kedele (ton/ha)	Ton/Ha	1,3	1,73	1,31	1,56	1,31	1,32	1,32	1,58	1,58	1,58	1,58	
2.3	Produksi Tanaman Holtikultura													OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	16.918,42	18.072	17.341,39	29.196	17.774,92	18.219,29	18,674,78	17.775	18.219	18.675	18.675	
	2. Cabe (ton)	Ton	168.822,08	154.008	173.886,74	193.862	179.103,34	184.476,44	190.010,74	179.103	184.476	190.011	190.011	
	3. Sayur-sayuran (ton)	Ton	998.498,42	1.130.462	1.008.483,41	1.270.084	1.018.568,24	1.028.753,92	1.039.041,46	1.018.568	1.028.754	1.039.041	1.039.041	
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1.180.230,44	1.107.154	1.193.212,98		1.206.338,32	1.219.608,04	1.233.023,73	1.206.338	1.219.608	1.233.024	1.233.024	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						1.249.380								
2.4	Produktivitas Tanaman Holtikultura													OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	7,89	8,04	7,99	9,55	8,08	8,18	8,28	8,08	8,18	8,28	8,28	
	2. Cabe (ton)	Ton	9,91	9,61	10,02	10,48	10,13	10,24	10,36	10,13	10,24	10,36	10,36	
	Perkebunan													
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)		3%	3,74%	3%	2,60%	3%	3%	3%	2,65%	2,80%	3,00%	3,00%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
2.6	Produksi			7.569.995,70	7.818.400,52	7.766.705,00	8.051.922,55	8.293.480,22	8.542.284,63	7.953.702,74	8.176.773,58	8.422.484,98	8.422.484,98	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	1. K. Sawit (ton)	Ton	7.004.659,63	7.006.986,36	7.223.006,12	7.199.750,00	7.447.877,73	7.679.553,61	7.918.271,07	7.355.475,90	7.563.008,08	7.788.108,75	7.788.108,75	
	2. Karet (ton)	Ton	323.589,02	309.973,00	326.824,91	310.016,00	330.093,16	333.394,09	336.728,03	326.826,00	326.830,00	326.928,00	326.928,00	
	3. Kopi Arabika (ton)	Ton	65.327,91	66.831,00	67.666,65	67.469,00	70.089,12	72.598,31	75.197,32	71.586,92	76.511,55	83.654,39	83.654,39	
	3. Kopi Robusta (ton)	Ton	9.223,04	8.091,00	9.407,50	9.128,00	9.595,65	9.787,56	9.983,32	10.360,46	12.899,57	14.845,52	14.845,52	
	4. Kelapa (ton)	Ton	102.943,95	99.132,00	106.311,66	99.972,00	107.733,83	110.211,71	112.746,58	101.745,60	105.014,99	109.300,38	109.300,38	
	5. Kakao (ton)	Ton	41.936,76	34.792,00	42.146,44	35.696,00	42.357,17	42.568,95	42.781,79	36.223,00	38.286,00	40.321,00	40.321,00	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	Ton	42.028,92	44.190,34	43.037,24	44.674,00	44.175,89	45.365,99	46.576,52	51.484,86	54.223,39	59.326,94	59.326,94	
2.7	Laju pertumbuhan Produktifitas sektor perkebunan (%)	Persen	-	1,61%	-	1,92%	-	-	-	2,02%	2,12%	2,22%	2,22%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
2.8	NTP Perkebunan	Persen	-	94,73%	-	124,96%	-	-	-	100,01%	100,51%	101,01%	101,01%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
2.9	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	-	9,88%	-	10,66%	-	-	-	10,58%	10,68%	10,78%	10,78%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
3	KEHUTANAN													
3.1	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	60.500	60.500	59.500	59.895	58.500	57.500	56.500	58.500	57.500	56.500	56.500	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
3.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	276.336	275.711	276.226	275.333	276.116	276.000	275.900	275.233	275.120	275.000	275.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Persen	0.84	0,84	0.85	0,83	0.86	0.87	0.88	0,86	0,87	0,88	0,88	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
4.1	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,9	98,8	100	99,99	100	100	100	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4.2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	-	99,11	-	107,69	-	-	-	98,83	99,52	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
4,3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Persen	-	8,74	-	22,95	-	-	-	75,82	80,16	86,96	86,96	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5	PERDAGANGAN													
5.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	6,48	8,00	6,50	-1,94	6.77	6.79	6.95	2,97	3,39	3,81	3,81	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
5.2	Ekspor Non Migas	(Juta US\$)	na	7.663,174	na	8086,221				7.995,503	8.092,923	8.190,344	8.190,344	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
6	PERINDUSTRIAN													
6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	3.27	1,23	3.29	-0,84	3.35	3.45	3.53	0,61	1,00	1,39	1,39	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
6.2	Pertumbuhan Industri													OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Persen	5.00	-5,11	6.00	-5,11	7.00	8.00	9.00	1,48	2,33	3,17	3,17	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Persen	8.50	9,01	9.10	9,01	9.70	10.30	11.30	8,28	8,55	8,82	8,82	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
7	TRANSMIGRASI													
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN													
8.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg/kap/tahun	44.24		45.57		46.91	48.34	49.79					OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.2	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,8	7,2	7,2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.3	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	-	-	-	-	-	-	-	634.701,24	655.242,20	676.399,89	676.399,89	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.4	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	544,232.57	540.421,70	60,559.54	336.335,72	577,376.32	594,697.61	612,538.53	433.032,24	446.023,20	459.403,89	459.403,89	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.5	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	237,222	246.908,30	244,339	146.603,40	251,669	259,219	266,996	201.669	209.219	216.996	216.996	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.6	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ Th	-	-	-	-	-	-	-	46,91	48,34	49,79	49,79	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	-	-	-	-	-	-	-	102	103	104	104	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	-	-	-	-	-	-	-	103	104	105	105	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.9	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	Ha	138,438.4	NA	25	11.345	25	25	25	25.000	25.000	25.000	25.000	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
8.10	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m²)	m²	500	NA	500	230	500	500	500	52.031	72.031	102.031	102.031	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
8.11	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	Ha	3	NA	3	2	3	3	3	39	42	45	45	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG													
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN													
1,1	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	Persen	80	78	85	85	90	95	100	80	82	84	84	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan

[illegible]

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2019		2020										
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023		
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
3,1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jam	36 hari	8	36 hari	NA	9 JP	37 hari	40 hari	9 JP	12 JP	20 JP	20 JP	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan	Persen	17.49	NA	NA	19,2	18.24	21.16	23.28	22,22%	33,33%	44,44%	44,44%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan	
3,3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FORMAL	Persen	33,33%	NA	19,44%	NA	16,66%	19,44%	11,11%	24%	35%	41%	41%	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
4	KEPEGAWAIAN DAERAH														
4.1	Nilai Sistem Marit	Point	-	-	-	97,5	-	-	-	250	300	325	325	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	Persen	20	20	20	7	20	20	20	12	16	20	20	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian	
5.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	20	20	20	20	30	30	30	33	50	60	60	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian	
5.4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	15	15	20	66	25	30	35	25	30	35	35	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian	
5.5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	50	50	50	50	50	50	50	40	50	57	57	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penelitian	
6	PENGAWASAN														
6,1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan	
6,2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakisip ≥ B	%	-	-		73	80	85	90	80	90	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan	
6,3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	80	81,67	82	83,64	83	84	85	75	77	80	80	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan	
6,4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagril pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan	
6,5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level	Level 3	Level 3	Level 3 terdefenisi	Level 3 terdefenisi	Level 3 dengan peningkatan	Level 3,5	Level 3,5 tedefenisi	Level 3,25	Level 3,5	Level 3,5	Level 3,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
6,6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	Level 2 menuju level 3	Level 2 plus	Level 2 plus	Level 3	Level 3 plus	Level 4 (DC)	Level 3	Level 3 plus	Level 3 plus	Level 3 plus	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
6,7	Pengaduan Masyarakat	%	50	52,4	55	74,5	60	65	70	68	72	75	75	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
6,8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	%	-		-	10	-	-	-	20	40	60	60	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan
7	PENGHUBUNG													
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	-	-	-	77,42	-	-	-	70	80	90	90	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan
8	SEKRETARIAT DEWAN													
8.1	Persentase capaian tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan
9	SEKRETARIAT DAERAH													
9.1	Persentase penyelesaian batas daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OPD yang melakasanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	3,5	3,4	3,5	3,8	4,1	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.3	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.4	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	Persen								70%	75%	80%	80%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.5	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen								70%	75%	80%	80%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.6	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.7	Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.8	Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.9	Persentase kebijakan peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	-		100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (KU PD/ IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
9.10	Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen								100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.11	Presentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.12	Terbitnya Peraturan/ Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD	Dokumen												OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.13	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.14	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	BB	(65.00)B	(70.00)BB	(72.00)BB	(72.00)BB	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.15	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	2,99 (C)	3,00 (C)	3,51 (B)	3,68 (B)	NA	NA	NA	3,80 (B)	4,01 (A-)	4,20 (A-)	4,25 (A-)	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.16	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.17	Nilai capaian pelaporan kinerja	Bobot	10	11,64	11	9,11	12	14	15	12	14	15	15	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.18	Persentase Fasillitasi Pelayanan Kerumahtangaan Pimpinan		-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.19	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.20	Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah
9.21	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Sekretariat Daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKK)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020									
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah													
1.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	86,99	45,83	88,00		88,00	88,00	88,00	47,04	48,24	49,44	50,64	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
1.2	NTP	Poin	100,101	98,08	100,102	109,83	100,103	100,104	100,21	109,92	110,35	111,41	111,41	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
	NTP Tanaman Pangan	Persen	100,62	93,16	100,64	96,9	100,66	100,68	100,82	100,66	100,68	100,82	100,82	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pangan
	NTP Tanaman Perkebunan	Persen	98,82	94,73	99,12	125,05	100,01	100,51	101,01	100,01	100,51	101,01	101,01	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan
	NTP Hortikultura	Persen	100,98	92,87	101,01	97,28	101,03	101,06	101,20	101,03	101,06	101,20	101,20	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	100,00	101,00	101,00	101,45	102,00	103,00	104,00	102,00	103,00	104,00	101,20	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Perikanan
	NTP Peternakan	Persen	113,65	114,78	114,44	98,74	115,23	116,02	116,81	115,23	116,02	116,81	116,81	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Sub sektor peternakan
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur													
2.1	Indeks Infrastruktur	Poin	-	-	-	0,69	-	-	-	0,70	0,74	0,78	0,78	OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Binamarga dan Bina Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang, Bidang Perumahan dan Permukiman
2.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,26	83,71	84,78	83,8	85,42	87,24	88,43	86,29	88,77	91,26	83,71	OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Binamarga dan Bina Konstruksi
2.3	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,90	99,99	100,00	99,11	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	OPD yang amelaksanakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.4	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	-	-	-	-	-	-	-	57,17	59,47	62,92	60,34	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
2.5	Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	-	-	-	-	-	-	59	63,48	68,98	68,98	OPD yang melaksanakan UrusanPerumahan dan Permukiman
2.6	Luas Kawasan Kumuh Ditangani	Persen	-	-	-	-	-	-	-		28,37	54,12	54,12	OPD yang melaksanakan UrusanPerumahan dan Permukiman

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
2.7	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	-	-	-	-	-	-	-		100,00	100,00	100,00	OPD yang melaksanakan UrusanPerumahan dan Permukiman
3	Fokus Iklim Berinvestasi													
3.2	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	-	-	-	-	-	-	-	1.170	1.348	1.348	1.348	OPD yang melaksanakan urusan Penanaman modal dan perijinan
4	Fokus Sumber Daya Manusia													
4.1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)			10.532		10.703								
4.2	Angkatan Kerja (ribu orang)			7.411		7.350								
4.3	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	96,2	97	97	97	97,4	98,2	99,01	97,29	97,57	97,86	97,86	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4.4	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	56,1	53,2	57,4	54,7	58,7	60	61,3	56,2	57,7	59,2	59,2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4.5	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	94,42	39,9	94,72	43	95,02	95,32	95,62	45,4	47,8	50,2	50,2	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4.6	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	42,7	94,2	43,4	94,72	44,1	44,8	45,5	95,24	95,76	96,28	96,28	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	Dukungan Terhadap Daya Saing													
5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	B	(60.05)B	B	(61.05)B	A	A	A	(64.00) BB	(67.00) BB	(70.00) BB	(70.00) BB	OPD yang melakasanakan urusan penunjang bidang Sekretariat Daerah, Urusan pemerintahan bidang pengawasan, bidang pendidikan dan dan pelatihan, bidang Komunikasi dan Informasi, bidang perencanaan , Bidang pengelolaan keuangan
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatra Utara	Persen	69,02	67,65	69,04	65,13	69,06	69,08	70,00	65,53	65,93	66,33	66,33	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5.3	Skor Kebebasan Sipil	Skor	-	72.54	-	-	-	-	-	72.99	73.44	73.89	73.89	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5.4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	77	76	80	80	83	85	90	82,17	84,33	86,5	86,5	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
5.5	Indeks Resiko Bencana Daerah	Poin	145	145,18	134,4	145,18	127	121	109	145	144,5	143,5	143,5	OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiiiban, bidang Lingkungan Hidup, bidang Kehutanan, bidang sosdial, Bidang Bina marga dan Bina Konstruksi, Bidang Sumber Day air Cipta Karya dan tatar ruang, Bidang Pertanian, bidang Pertanian sub sektor peternakan bidang Pertanian
6	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		s											
1	Pendidikan													
1.1	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.2	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Kesehatan													
2.1	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2.2	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
3.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota									100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota									100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKUPD/IKKI)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020									
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
4	Perumahan Rakyat													
4.1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni									100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni									100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Trantibumlinmas													
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi									100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas
6	Sosial													
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
6.2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Persen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,14	0,18	0,18	OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMN. Dalam hal ini dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 telah disusun berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disajikan sebagaimana berikut ini.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2023. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatar belakangi perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pandemi COVID-19. Dampak dari kedua hal tersebut menghendaki perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk

dukungan pendanaan pembangunan.

9.1.1. Masa Transisi Tahun 2020

Pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020. Dalam 2 (dua) dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, IKD tingkat dampak, dan IKD tingkat *outcome* tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen APBD Tahun 2021. Pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan sedangkan pada dokumen APBD 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

9.1.2. Masa Akhir Periode RPJMD Tahun 2023 dan Penyusunan RKPD Tahun 2024

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu realisasi pembangunan tahun 2019; rencana tahun 2020 dan 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020; dan rencana tahun 2022 dan 2023 yang targetnya disesuaikan dengan target tahun 2020 dan 2021.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Untuk itu penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025, Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2024, dan hal-hal penting lainnya.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Sumatera Utara akibat pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret tahun 2020. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini.

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi tahun 2019 dan tahun 2020, rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, serta penyusunan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2022 dan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2023.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Prioritas pembangunan provinsi dilaksanakan setiap tahun, kecuali prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 yang dilaksanakan hanya sampai tahun 2021. Hal ini dengan asumsi bahwa vaksin COVID-19 telah ditemukan dan masyarakat sudah divaksin pada tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 pembangunan akan kembali diprioritaskan pada 7 (tujuh)

prioritas pembangunan yang menjadi program prioritas kepala daerah. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perdatentang Perubahan RPJMD ini.

4. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
5. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 kepada masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyempurnakan Perubahan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Perubahan ini nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
8. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
9. Gubernur dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD secara periodik.
10. Pada tahun 2021, evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 1, 2, dan 3. Evaluasi ini

dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen Perda APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sedangkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 4 dilakukan berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang akan diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.

11. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota ini akan mewujudkan sinergi dan kolaborasi pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.
12. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2019 – 2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya **Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat**.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

EDY RAHMAYADI



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002